



EKONOMI PERIKANAN

**Muhammad Nur, Agus Kurniawan B, Suharno,
Yuyun Anggraini, Hendra Poltak, Fajriah,
Muhammad Bibin, Sahabuddin, Shara Jayanti,
Akmaluddin, Putri Ayu, Roni Bawole**

ISBN 978-623-198-671-9



9 786231 986719

EKONOMI PERIKANAN

**Muhammad Nur
Agus Kurniawan B
Suharno
Yuyun Anggraini
Hendra Poltak
Fajriah
Muhammad Bibin
Sahabuddin
Shara Jayanti
Akmaluddin
Putri Ayu
Roni Bawole**



GET PRESS INDONESIA

EKONOMI PERIKANAN

Penulis :

Muhammad Nur
Agus Kurniawan B
Suharno
Yuyun Anggraini
Hendra Poltak
Fajriah
Muhammad Bibin
Sahabuddin
Shara Jayanti
Akmaluddin
Putri Ayu
Roni Bawole

ISBN : 978-623-198-671-9

Editor : Diana Purnama Sari., S.E M.E

Penyunting : Tri Putri Wahyuni,S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat
Website : www.getpress.co.id
Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, 6 September 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Ekonomi Perikanan ini.

Buku ini membahas Sistem Perikanan, Perikanan Indonesia dalam konteks global, Mekanisme harga, Penawaran/*Supply*, Analisis biaya dan pendapatan, Pemasaran perikanan, Kontribusi perikanan terhadap perekonomian Indonesia, Pajak dan subsidi sektor perikanan, Perdagangan internasional hasil perikanan, Kebijakan Pemerintah tentang Pembangunan Perikanan, Ruang lingkup dan implementasi penelitian sosial ekonomi, Peran Usaha Kecil Dan Menengah Perikanan Dalam Perekonomian.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, 6 September 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTARTABEL	xi
BAB 1 SISTEM PERIKANAN	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Karakteristik Sistem Perikanan	3
1.2.1 Skala spasial.....	3
1.2.2 Sistem perikanan skala kecil dengan skala besar	4
1.2.3 Pendekatan lain untuk mengkarakterisasi sistem perikanan	6
1.3 Sistem Alam.....	6
1.3.1 Ikan	6
1.3.2 Distribusi spasial sumber daya perikanan	7
1.3.3 Ekosistem	8
1.4 Sistem Manusia.....	10
1.4.1 Nelayan.....	10
1.4.2 Keragaman nelayan.....	12
1.4.3 Tipologi metode penangkapan ikan	12
1.4.5 Sektor pasca panen dan konsumen	13
1.4.6 Konsumen.....	14
1.5 Sistem Manajemen.....	15
DAFTAR PUSTAKA	19
BAB 2 PERIKANAN INDONESIA DALAM KONTEKS GLOBAL	21
2.1 Pendahuluan.....	21
2.2 Kontribusi terhadap Pasar Global Indonesia	23
2.2.1 Potensi Pertumbuhan Ekonomi	25
2.2.2 Kebutuhan Pasar Global akan Produk Perikanan	27
2.2.3 Kualitas dan Keamanan Produk Perikanan.....	29
2.4 Kerjasama Regional dan Internasional.....	31

DAFTAR PUSTAKA.....	33
BAB 3 MEKANISME HARGA.....	35
3.1 Pendahuluan.....	35
3.2 Permintaan, dan Penawaran.....	37
3.2.1 Permintaan	37
3.2.2 Penawaran	38
3.3 Pasar dan Harga Keseimbangan.....	39
DAFTAR PUSTAKA.....	48
BAB 4 PENAWARAN (SUPPLY).....	51
4.1 Definisi Penawaran (<i>Supply</i>) dalam Ekonomi.....	51
4.2 Hukum Penawaran	52
4.3 Kurva Penawaran.....	53
4.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penawaran.....	59
4.5 Elastisitas Harga Penawaran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	64
BAB 5 ANALISIS BIAYA DAN PENDAPATAN	65
5.1 Pendahuluan.....	65
5.2 Konsep Dasar Analisa Biaya dan Pendapatan.....	65
5.3 Analisis Biaya.....	66
5.4 Analisis Pendapatan	68
5.5 Sumber-Sumber Pendapatan	68
5.6 Penentuan Harga Jual	69
5.7 Volume Penjualan	70
5.8 Analisis Break Even.....	70
5.9 Analisis Margin Laba.....	73
5.10 Margin Laba Kotor	73
5.11 Margin Laba Bersih.....	74
5.12 Margin Laba Operasional	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
BAB 6 PEMASARAN PERIKANAN	79
6.1 Pendahuluan.....	79
6.1.1 Peran Penting Pemasaran Dalam Industri Perikanan.....	79

6.1.2 Keberlanjutan Pemasaran Perikanan	81
6.2 Analisis Pasar Perikanan.....	81
6.2.1 Faktor-Faktor keberhasilan Pemasaran Produk Perikanan di Era Modern	82
6.2.2 Segmen Pasar Perikanan	84
6.2.3 Target Pasar Perikanan.....	84
6.3 Rantai Pasok Perikanan	85
6.4 Strategi Pemasaran Perikanan.....	88
6.5 Tantangan Pemasaran dalam Industri Perikanan.....	90
6.6 Peluang Pemasaran dalam Industri Perikanan.....	92
6.6.1 Eksplorasi Pasar Ekspor	94
6.6.2 Penerapan Teknologi Dalam Pemasaran Perikanan	96
DAFTAR PUSTAKA	99
BAB 7 KONTRIBUSI PERIKANAN TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA.....	101
7.1 Pendahuluan.....	101
7.2 Potensi Sumberdaya Perikanan.....	102
7.3 Potensi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Yang Berkelanjutan	104
7.4 Industrialisasi Perikanan	106
7.4.1 Peran Industri Perikanan Dalam Pembangunan Ekonomi	108
7.4.2 Prinsip-Prinsip Industri Perikanan	111
7.5 Peluang Pasar Perikanan.....	114
7.5.1 Kebutuhan Sektor Perikanan Regional	114
7.5.2 Kebutuhan Komoditi Regional	116
7.5.3 Strategi Ekspor Produk Perikanan	116
DAFTAR PUSTAKA	119
BAB 8 PAJAK DAN SUBSIDI SEKTOR PERIKANAN	121
8.1 Pendahuluan.....	121
8.2 Pajak Sektor Perikanan	122
8.2.1 Definisi.....	122

8.2.2 Fungsi Pajak	123
8.2.3 Tujuan dan Bentuk Pajak	125
8.2.4 Penerimaan Pajak Sektor Perikanan.....	127
8.3 Subsidi Sektor Perikanan.....	132
8.3.1 Definisi Subsidi.....	132
8.3.2 Tujuan Subsidi.....	133
8.3.3 Bentuk Subsidi.....	134
8.3.4 Penerapan Kebijakan Subsidi Perikanan Indonesia.....	135
DAFTAR PUSTAKA.....	138
BAB 9 PERDAGANGAN INTERNASIONAL	
HASIL PERIKANAN	143
9.1 Pengertian dan Faktor Pendorong Perdagangan Internasional.....	143
9.2 Hasil Perikanan Indonesia	146
9.3 Strategi Peningkatan Hasil Ekspor Produk Perikanan.....	153
DAFTAR PUSTAKA.....	159
BAB 10 KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA	
TENTANG PEMBANGUNAN PERIKANAN.....	161
10.1 Pendahuluan.....	161
10.2 Sejarah Kebijakan Perikanan di Indonesia.....	162
10.2.1 Era Orde Lama.....	162
10.2.2 Era Orde Baru	163
10.2.3 Era Reformasi	164
10.2.4 Era Pembangunan Modern.....	164
10.3 Landasan Hukum Kebijakan Perikanan	165
10.3.1 Undang-Undang Dasar	165
10.3.2 Undang-Undang Perikanan	167
10.3.3 Peraturan dan Keputusan Menteri	168
10.4 Struktur Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Perikanan	170
10.4.1 Pembangunan Infrastruktur.....	170
10.4.2 Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	180

10.4.3 Konservasi Sumber Daya Perikanan.....	188
10.4.4 Penegakan Hukum dan Regulasi	191
10.5 Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Perikanan	194
10.5.1 Program dan Proyek Spesifik.....	194
10.5.2 Kemitraan dengan Sektor Swasta dan LSM.....	197
10.5.3 Evaluasi dan Pengawasan Kinerja	199
10.6 Kebijakan Terkini Pemerintah Indonesia dalam Pembangunan Perikanan	202
10.6.1 Strategi dan Prioritas.....	204
10.6.2 Respons terhadap Isu Global dan Regional.....	207
10.6.3 Tantangan dan Peluang	210
10.7 Kesimpulan dan Rekomendasi	213
10.7.1 Kesimpulan:.....	214
10.7.2 Rekomendasi:.....	214
DAFTAR PUSTAKA	216
BAB 11 RUANG LINGKUP DAN IMPLEMENTASI	
PENELITIAN SOSIAL EKONOMI	223
11.1 Ruang lingkup Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan.....	223
11.2 Implementasi Penelitian Sosial ekonomi.....	223
11.2.1 Faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi pendapatan Nelayan Ikan/pengusaha Ikan di Indonesia.....	224
11.2.2 Faktor sosial ekonomi Nelayan di Negara lain	229
DAFTAR PUSTAKA	237
BAB 12 PERAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
PERIKANAN DALAM PEREKONOMIAN.....	241
12.1 Pendahuluan	241
12.2 Potensi Perikanan	243
12.2.1 Perikanan Tangkap	245
12.2.2 Perikanan Budidaya	246
12.2.3 Unit Pengolahan Ikan (UPI).....	247
12.3 Peran dan Kontribusi UMKM Perikanan.....	248

12.3.1 Peran UMKM	248
12.3.2 Kontribusi UMKM	250
12.4 Penutup.....	251
DAFTAR PUSTAKA.....	252
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Sistem perikanan, menunjukkan struktur dari tiga sistem utama (alam, manusia dan pengelolaan).....	2
Gambar 4.1. Kurva Penawaran	54
Gambar 4.2. Peningkatan Penawaran	55
Gambar 4.3. Penurunan Penawaran.....	56
Gambar 4.4. Kurva Keseimbangan Pasar	57
Gambar 4.5. Kurva Penawaran Berlebih	58
Gambar 9.1. Udang <i>Litopenaeus vannamei</i>	149
Gambar 9.2. Udang Windu / <i>Penaeus monodon</i>	150
Gambar 9.3. <i>Penaeus merguensis</i>	151
Gambar 9.4. Grafik Ekspor Udang Indonesia tahun 2022	153
Gambar 9.5. KKP sepakat penguatan Kerjasama perdagangan dengan China.	156
Gambar 10.1. Kapal nelayan sandar di dermaga Pelabuhan Perikanan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur	173
Gambar 10.2. Suasana Pasar Ikan Modern Muara Baru ini mirip dengan Tsukiji Fish Market yang berada di negara Jepang.	175
Gambar 10.3. Kapal Perikanan Bantuan Dirjen Perikanan Tangkap untuk Nelayan pada tahun 2022	178
Gambar 10.4. Aplikasi Alat Transportasi Ikan Segar Roda Dua (ALTIS-2) oleh pedagang ikan keliling di Cirebon.....	179
Gambar 10.5. Sistem teknologi <i>Recirculating Aquaculture System</i> (RAS)	181

Gambar 10.6.	Pelatihan Peningkatan Keterampilan Nelayan dengan materi Teknik Perawatan Mesin Kapal dan Alat Tangkap Jaring di UPTD PAPLWU DKP Jabar	183
Gambar 10.7.	Nelayan dilatih latihan dasar keselamatan yang diselenggarakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kendal	185
Gambar 10.8.	Deklarasi Kerjasama Riset Rumput Laut dengan Negara ASEAN.....	187
Gambar 10.9.	Hasil Kerjasama Riset BRIN dan PT Evogaia Karya Indonesia yaitu Biji Plastik dari Rumput Laut	188
Gambar 10.10.	Nyimas Laula Pariama Hutasoit, konservasionis terumbu karang berusia 52 tahun, membersihkan terumbu karang dari ganggang bersama para relawan di Nusa Dua, Bali, Indonesia	190
Gambar 10.11.	Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia (Intani) dan PT Pegadaian berkolaborasi dengan Korps Marinir TNI AL mengembangkan Kampung Bahari Nusantara.	192
Gambar 10.12.	Pementerian Kelautan dan Perikanan memusnahkan 19 kapal motor nelayan asing asal Vietnam, Thailand, Filipina dan China yang tertangkap mencuri ikan secara illegal di perairan Indonesia	194
Gambar 10.13.	Dirjen PSDKP, Laksda TNI Dr. Adin Nurawaluddin, M. Han saat menginterogasi ABK yang melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia	195

Gambar 10.14. KKP membangun proyek tambak Udang terintegrasi di beberapa tempat di Indonesia untuk menggenjot ekspor udang	197
Gambar 10.15. Sinergi antara KKP RI, WWF Indonesia dan COREMAP-CTI dalam sebuah kegiatan Simpoisum Nasional Pengelolaan Perikanan Karang Berkelanjutan Indonesia.....	199
Gambar 10.16. Sebagai bentuk pengawasan KKP Lawan IUU Fishing Lewat Kebijakan PIT dan Pengawasan Terintegrasi	201
Gambar 10.17. KKP Libatkan Jepang Modernisasi Pelabuhan Perikanan di Indonesia.....	204
Gambar 10.18. Perkembangan penggunaan jenis lampu pada <i>light fishing</i> dan riset terkini teknologi lampu hemat energi LED dalam penangkapan ikan lebih menguntungkan	206
Gambar 10.19. Upaya PLN Rehabilitasi Terumbu Karang di Raja Ampat dan Jayapura.....	208
Gambar 10.20. Upaya dukungan Pemerintah Provinsi Sulsel Gencarkan Rehabilitasi Mangrove di Tongke-Tongke Kab. Sinjai.....	209
Gambar 10.21. Salah satu tantangan budidaya udang vaname yaitu adanya limbah tambak telah mencemari laut.....	211
Gambar 10.22. Salah satu peluang saat ini adalah tingginya permintaan udang vaname di pasar global/ekspor.....	213
Gambar 12.1. Perkembangan jumlah Unit Pengolahan Perikanan	249

DAFTARTABEL

Tabel 1.1. Dikotomi antara sistem perikanan skala kecil dan skala besar	4
Tabel 4.1. Daftar Penawaran pisang	54
Tabel 7.1. Pertumbuhan Volume Ekspor	111
Tabel 7.2. Negara Tujuan Utama Ekspor Ikan Segar	112
Tabel 12.1. Kinerja Kelautan dan Perikanan Indonesia, 2016-2021 (KKP, 2022)	245

BAB 1

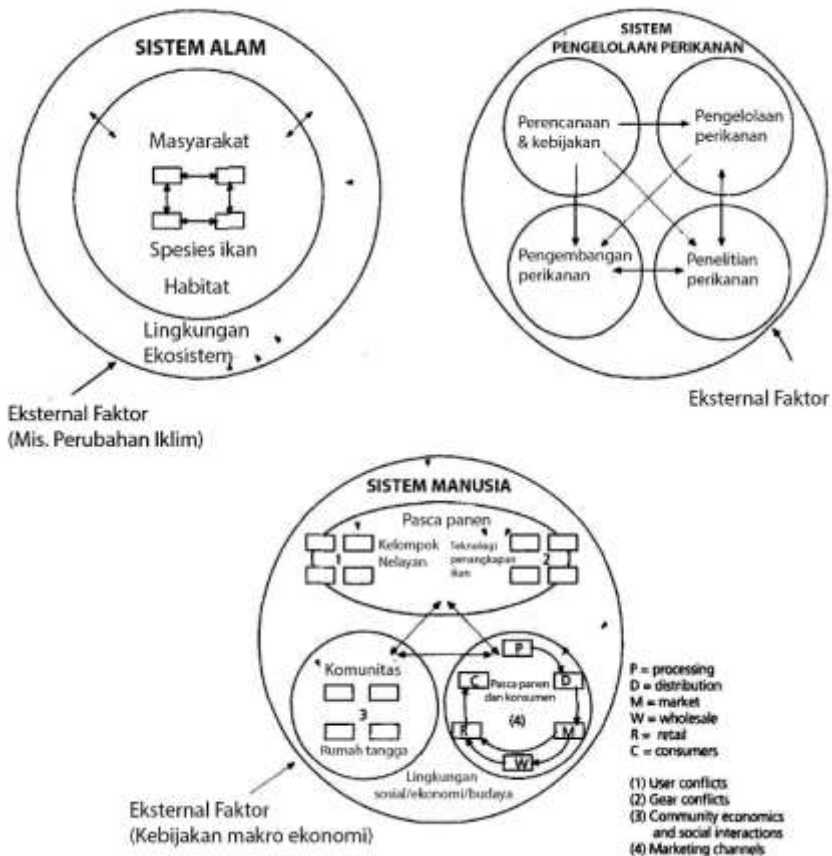
SISTEM PERIKANAN

Oleh Muhammad Nur

1.1 Pendahuluan

Sumber daya perikanan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peranan penting untuk memenuhi kebutuhan protein pada tubuh manusia, sumber bahan baku pada berbagai industri perikanan, dan menjadi sumber lapangan pekerjaan bagi jutaan manusia di dunia. Selain itu, sumber daya perikanan ini juga memiliki nilai budaya dan nilai ekologi. Sumber daya perikanan di masa mendatang diperkirakan akan memberikan kontribusi signifikan dalam ketahanan pangan dan kecukupan nutrisi bagi populasi global. Hal ini menunjukkan begitu pentingnya sumber daya ini bagi kehidupan manusia.

Secara umum, struktur sistem perikanan terdiri dari tiga komponen utama, yaitu sistem alam (*natural system*), sistem manusia (*human system*), dan sistem pengelolaan perikanan (*fishery management system*). Sistem alam merupakan sistem yang berkaitan tentang ikan, ekosistem dan lingkungan biofisik. Kemudian pada sistem manusia adalah sistem tentang komponen sumber daya manusia seperti nelayan, pengolah, pengguna/konsumen, rumah tangga, komunitas perikanan dan lingkungan sosial, ekonomi dan budaya. Terakhir sistem pengelolaan perikanan adalah sistem yang berkaitan dengan kebijakan dan perencanaan perikanan, pengelolaan perikanan, pembangunan perikanan dan penelitian perikanan. Ketiga sistem perikanan ini saling berinteraksi dengan yang lainnya (Gambar 1).



Gambar 1.1. Sistem perikanan, menunjukkan struktur dari tiga sistem utama (alam, manusia dan pengelolaan). Sumber: (Charles, 2001)

Berbagai komponen dalam sistem perikanan ini saling berkaitan. Pengelolaan perikanan berkelanjutan bukan hanya tentang melindungi stok ikan, melainkan melibatkan semua aspek perikanan. Perikanan sebagai jaring memiliki komponen ekologi, biofisik, ekonomi, sosial dan budaya yang saling terkait dan

berinteraksi. Hal ini kemudian memunculkan model-model pendekatan dalam pengelolaan perikanan. Model pendekatan tersebut menjadi kunci untuk keberlanjutan dan ketahanan sumber daya perikanan saat ini. Beberapa pendekatan tersebut telah banyak digunakan termasuk di beberapa wilayah di Indonesia seperti pendekatan kehati-hatian, pendekatan ekosistem, pendekatan berbasis pengelolaan bersama, pendekatan berbasis hak dan pengelolaan berbasis masyarakat.

Sistem perikanan adalah sistem yang kompleks, dan memiliki sejumlah unsur yang terkait satu sama lain secara dinamik maupun statis. Dalam prakteknya, keragaman sistem perikanan bersumber dari beberapa hal, yaitu 1) banyaknya tujuan dan seringkali menimbulkan konflik antar tujuan, 2) banyaknya spesies dan interaksi antar spesies dalam konteks level tropik, 3) banyaknya kelompok nelayan beserta interaksinya dengan sektor rumah tangga dan komunitas, 4) banyaknya jenis alat tangkap dan interaksi antar mereka, 5) struktur sosial dan pengaruhnya terhadap perikanan, 6) dinamika informasi perikanan dan diseminasi, 7) dinamika interaksi antar sumber daya ikan, dan 8) ketidakpastian dalam masing-masing komponen sistem perikanan (Charles, 2001). Selanjutnya mengingat luasnya cakupan materi sistem perikanan ini, kami coba mengurainya secara ringkas namun komprehensif.

1.2 Karakteristik Sistem Perikanan

1.2.1 Skala spasial

Skala spasial suatu sistem perikanan berkaitan dengan ukuran/ skala dari sistem perikanan baik secara geografis maupun administratif. Masalah skala spasial, biasanya akan muncul dalam praktik perencanaan dan pengelolaan perikanan seperti penetapan batas wilayah spasial dari suatu sistem perikanan, kemudian bagaimana merancang sistem pengelolaan yang sesuai, dan

pertimbangan apa yang akan diambil dalam pengelolaan sistem perikanan yang konseptual.

Sebagai contoh, seseorang manajer dapat mempertimbangkan sistem perikanan yang memiliki skala spasial yang berbeda-beda. Masyarakat pesisir, bersama dengan sumber daya perikanan lokalnya (seperti jenis ikan di terumbu karang, atau populasi stok lobster yang menetap di dekat wilayah komunitas nelayan) dan sistem pengelolaan skala kecil lainnya.

1.2.2 Sistem perikanan skala kecil dengan skala besar

Terdapat dikotomi perbedaan mendasar antara perikanan skala kecil dan perikanan skala besar (Tabel 1.1). Dikotomi ini dapat didefinisikan dalam beberapa cara: (1) berdasarkan ukuran operasi nelayan tertentu seperti ukuran kapal (2) berdasarkan pemisahan jarak lokasi penangkapan, (3) Berdasarkan cara produksi.

Tabel 1.1. Dikotomi antara sistem perikanan skala kecil dan skala besar

	Perikanan skala kecil	Perikanan skala besar
Terminologi alternatif	Artisanal (daerah berkembang); perahu kecil (daerah maju)	Industri (daerah berkembang); korporasi (daerah maju)
Area penangkapan	Pesisir, termasuk daerah pasang surut, pantai dan perairan dekat pantai	Lepas pantai, beroperasi relatif jauh dari pantai
Sifat dan tujuan	Berbagai tujuan (sosial, budaya, ekonomi, dan tujuan lainnya)	Kecenderungan fokus pada satu tujuan (maksimalisasi profit/keuntungan)

	Perikanan skala kecil	Perikanan skala besar
Tujuan khusus di daerah berkembang	Produksi pangan dan keamanan penghidupan	Produksi ekspor dan devisa
Tujuan yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga kerja	Fokus pada memaksimalkan kesempatan kerja	Fokus pada meminimalkan biaya tenaga kerja
Mode produksi	Perikanan subsisten serta yang komersial, menjual ke pasar yang sesuai	Perikanan komersial yang digerakkan oleh pasar, seringkali dengan fokus pada ekspor
kepemilikan	Biasanya individu/keluarga;	Biasanya perusahaan, armada asing di negara berkembang
Masukan	Padat karya, tingkat teknologi relatif rendah	Padat modal, penekanan pada penerapan teknologi baru
Perpaduan desa-kota	Sebagian besar pedesaan; biasanya terletak di luar pusat sosial dan ekonomi	Seringkali perkotaan atau terikat perkotaan; pemilik dalam pusat-pusat sosial dan ekonomi
Koneksi komunitas	Terikat erat dengan komunitas tempat nelayan tinggal	Relatif terpisah dan mandiri dari masyarakat pesisir
Persepsi umum	"Tradisional", sederhana secara teknologi	Perusahaan modern, impersonal, multinasional

Sumber: Charles, 2001

1.2.3 Pendekatan lain untuk mengkarakterisasi sistem perikanan

Selain klasifikasi berdasarkan skala, sistem perikanan juga dapat dicirikan dengan berbagai cara diantaranya:

1. Berdasarkan lokasi geografisnya, khususnya garis lintang (tropis, sedang, arktik);
2. Berdasarkan jenis ekosistem tempatnya berada (mangrove, padang lamun, terumbu karang, upwelling, muara, dan lainnya);
3. Berdasarkan lingkungan fisik tempatnya (dasar berbatu, teluk, sungai, danau, dan lainnya);
4. Berdasarkan kedalaman kolom air tempatnya berada (dasar laut, permukaan);
5. Berdasarkan sifat dan perilaku pemanen (terorganisir vs. tidak terorganisir);
6. Berdasarkan lingkungan sosial ekonomi (perkotaan dan pedesaan, infrastruktur maju dan belum berkembang)

1.3 Sistem Alam

1.3.1 Ikan

Pada sistem perikanan, produksi perikanan dunia tidak hanya terkait dengan “ikan” saja (secara taksonomi), tetapi juga pengertian ikan disini lebih luas yaitu berbagai jenis organisme lainnya yang menghuni ekosistem perairan (ikan berdasarkan Undang-Undang). Beberapa kelompok utama spesies ikan yang dieksploitasi tersebut adalah:

1. Ikan – bertulang belakang (vertebrata), sirip, berdarah dingin, insang dan sisik. Ikan bersirip, dibagi menjadi dua kategori umum menurut bagian lautan tempat ikan tersebut menghabiskan masa dewasanya: ikan pelagis dan ikan demersal. Ikan pelagis hidup terutama di lapisan atas dekat permukaan, dan ikan demersal hidup di dekat dasar laut.

2. Crustacea- avertebrata air dengan kerangka luar (udang, lobster, kepiting, kril dan lainnya)
 1. Moluska- avertebrata dengan cangkang luar atau dalam (kerang, tiram, remis, abalon, cumi-cumi dan lainnya)
 2. Echinodermata - avertebrata dengan kaki tabung (teripang, bulu babi).
 3. Elasmobranchs- Ikan bertulang rawan (hiu dan pari)
 4. Porifera – aneka jenis spons laut
 5. Makroalga - rumput laut dan makro alga lainnya

Sumber daya ikan dapat menjadi salah satu tumpuan ekonomi nasional terutama jika dikaitkan dengan konsumsi ikan masyarakat global akan semakin meningkat (Adam, 2012). Sumber daya ikan adalah salah satu sumber daya ekonomi, oleh karena itu sumber daya ikan merupakan modal bagi pembangunan bangsa Indonesia (Retnowati, 2011). Dalam pengelolaan sumber daya ikan terdapat keterkaitan antara aspek biologi dan aspek ekonomi. Aspek biologi secara umum menyangkut aspek proses produk alamiah (*natural production*) dan aspek kondisi lingkungan perairan. Karakteristik dari analisis biologi perikanan menjadi masukan bagi analisis ekonomi (Fery et al., 2022) .

1.3.2 Distribusi spasial sumber daya perikanan

Berbagai faktor memengaruhi penataan ruang spesies ikan. Klasifikasi kehidupan pada perairan laut terkait dengan posisinya di kolom air (demersal dan pelagis). Terdapat tiga komponen utama kehidupan ekosistem laut adalah yang berada di atau dekat dasar laut (*benthos*), yang lebih tinggi di kolom air yaitu plankton (organisme yang hanyut) dan nekton (organisme perenang).

Plankton adalah komponen penting dari komunitas organisme perairan. Fitoplankton hidup di dekat permukaan di mana sinar matahari menembus permukaan air. Fitoplankton merupakan makanan untuk berbagai kehidupan organisme laut

utamanya zooplankton, kemudian zooplankton menjadi makanan spesies ikan kecil, kemudian akan dimakan lagi oleh ikan yang lebih besar dan seterusnya sehingga kelimpahan plankton menjadi informasi penting keberadaan ikan. Dengan demikian, dari perspektif spasial, organisme yang terendah dalam jaring makanan akan sangat memengaruhi konsentrasi spesies target (ikan) yang akan ditangkap.

Faktor utama lain yang menjelaskan distribusi spasial spesies air adalah garis lintang. Secara umum, keragaman spesies cenderung menurun dengan meningkatnya garis lintang. Faktor fisik dan kimiawi juga bervariasi menurut garis lintang. Suhu, intensitas cahaya, ketersediaan nutrisi juga memengaruhi persebaran yang ada.

Kepadatan dan penyebaran sumber daya ikan di perairan banyak dipengaruhi oleh variasi kondisi oseanografinya. Hasil penelitian menunjukkan densitas ikan pelagis dipengaruhi secara berturut-turut oleh salinitas, oksigen, klorofil, pH dan suhu. Komponen lingkungan yang memiliki interaksi langsung dengan kelimpahan ikan pelagis adalah salinitas dan oksigen. Kedua faktor ini merupakan faktor utama dalam kegiatan osmoregulasi dan pembentukan energi untuk tubuh ikan, sementara keempat faktor lingkungan lainnya (klorofil pH, suhu dan kecepatan arus) berkorelasi secara parsial terhadap keberadaan ikan pelagis (Ma'mun et al., 2019).

1.3.3 Ekosistem

Ekosistem adalah sistem yang dibentuk oleh adanya interaksi dari berbagai organisme dalam komunitas dengan lingkungannya. Populasi spesies ikan tidak hidup terpisah satu sama lain, populasi tersebut berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungan fisik-kimia tempat tinggalnya. Terjadi mangsa dan dimangsa, spesies bersaing untuk mendapatkan ruang dan relung makanannya.

Dalam sistem perikanan penting mengetahui berbagai macam tipologi ekosistem perikanan sebagai berikut:

1. Muara – merupakan habitat dan daerah pemijahan berbagai jenis ikan, moluska, krustasea dan ikan. Muara juga menjadi habitat bagi ekosistem mangrove yang menjadi habitat ribuan biota perairan.
2. Terumbu Karang – Ekosistem utama dan kompleks dalam perairan laut, menyumbang banyak sumber daya spesies ikan dan avertebrata bagi para nelayan.
3. Landas kontinen (*continental shelves*) - kemiringan yang landai tertutup oleh air yang dangkal yang mengalir dari garis pantai sekumpulan daratan sebelum turun secara tajam ke perairan samudra. Wilayah ini menjadi sumber utama perikanan utamanya di daerah beriklim sedang, subtropis dan tropis.
4. Lereng benua (*continental slope*) - relief dasar laut yang menurun tajam dan juga curam.
5. Perairan permukaan samudra (*Oceanis surface water*)
6. Perairan dekat permukaan laut - potensi besar untuk sumber daya perikanan. Lokasi untuk perikanan budidaya (jaring apung dan lainnya)
7. Laut lepas - badan air yang kompleks daerah *upwelling* dan *downwelling*
8. Laut dalam - probabilitas rendah untuk sumber daya perikanan yang besar.
9. Danau oligotrofik - terletak di lingkungan yang dingin, di dataran tinggi atau garis lintang tinggi, sering didominasi oleh ikan salmon.
10. Danau meso dan eutrofik – terletak di daerah hangat, sedang hingga tropis, memiliki produktivitas tinggi, dan sering didominasi oleh ikan dari family cichlid.

1.4 Sistem Manusia

Pada subbab ini memberikan gambaran tentang sisi manusia dari sistem perikanan. Beberapa hal yang perlu diketahui dan dibahas dari sistem manusia adalah sistem tentang komponen sumber daya manusia seperti nelayan, pengolah, pengguna/konsumen, rumah tangga, komunitas perikanan dan lingkungan sosial, ekonomi dan budaya.

1.4.1 Nelayan

Nelayan adalah inti dari sistem manusia dalam sistem perikanan. Nelayan dapat dibagi menjadi empat kategori utama berdasarkan sifat, latar belakang dan aktivitas penangkapan ikan yaitu:

1. Nelayan subsisten: mereka yang menangkap ikan sebagai sumber makanan mereka sendiri.
2. Nelayan asli/ aborigin: mereka yang tergabung dalam kelompok aborigin, seringkali mencari nafkah.
3. Pemancing rekreasi: mereka yang menangkap ikan terutama untuk kesenangan mereka sendiri.
4. Nelayan komersial: mereka yang menangkap ikan untuk dijual di pasar domestik atau ekspor; para nelayan ini secara tradisional dianggap termasuk dalam kategori artisanal dan industri.

Berdasarkan skalanya nelayan terbagi menjadi dua yaitu nelayan skala besar yaitu nelayan yang memiliki spektrum pilihan yang luas baik dalam hal daerah penangkapan ikan. nelayan skala kecil adalah nelayan yang berdasarkan wilayah penangkapan ikan terbatas dan sejumlah karakteristik sosial ekonomi yang terbatas, dihadapkan pada serangkaian pilihan yang terbatas dan secara intrinsik bergantung pada sumber daya lokal yang ada.

Nelayan tradisional adalah mereka yang melakukan kegiatan mata pencahariannya menggunakan alat atau teknologi sederhana, seperti pancing, jala dan tombak, pedang, penikam,

sero dan seke. Mereka menangkap ikan hanya di laut dangkal dengan cara penangkapan sambil berdiri dipantai atau dengan menggunakan alat bantu perahu sampan atau perahu motor tempel (Indrawasih, 2004).

Nelayan skala kecil dicirikan oleh berbagai atribut, seperti: (1) tingkat ketergantungan yang tinggi pada perikanan untuk penghidupan mereka, dengan sedikit kesempatan kerja lain, dan seringkali dengan pendapatan bersih yang relatif rendah; (2) pemanfaatan kapal yang relatif kecil dan milik perseorangan; (3) kecenderungan untuk menggunakan sistem 'bagi hasil' untuk membagi pendapatan penangkapan ikan antara pemilik kapal, nakhoda dan awak kapal, daripada sistem pengupahan; (4) secara tradisional berada di luar pusat kekuatan ekonomi dan politik, di pinggiran masyarakat yang lebih besar, baik karena lokasi (di pedesaan atau daerah terpencil) atau keanggotaan dalam kelompok minoritas tertentu (masyarakat adat asli), meskipun perlu dicatat bahwa di beberapa negara industri, pengaruh politik nelayan skala kecil telah cukup besar; (5) sering dipandang oleh para analis dalam salah satu dari dua cara yang sangat berbeda (Charles, 2001).

Dalam budaya penangkapan ikan secara tradisional terdapat sistem bagi hasil. Aspek keberlanjutan sosio-ekonomi yang termanifestasi dalam sistem bagi hasil antara pihak-pihak yang terkait dalam usaha penangkapan ikan, yakni: 1) nelayan penggarap yang bertugas melaksanakan aktifitas penangkapan (melaut), selanjutnya disebut “nelayan”; serta 2) pemilik modal yang bertugas menyiapkan armada, peralatan tangkap, dan semua kebutuhan operasional melaut, selanjutnya disebut “pemilik”. Sejauh ini mekanisme pengupahan yang diterapkan adalah sistem bagi hasil, yakni masing-masing pihak memperoleh proporsi tertentu dari hasil tangkapan bersih setelah dikurangi biaya operasional dengan pola 60:40 (Ruslan et al., 2013).

1.4.2 Keragaman nelayan

Dalam kelompok nelayan tertentu, terdapat variasi dalam banyak aspek sosial dan demografis, seperti usia, pendidikan, status sosial dan agama. Di antara kelompok nelayan, mungkin terdapat perbedaan dalam kohesi sosial internal dan dalam hubungan komunitas (keterikatan dengan komunitas lokal mereka).

Dalam perikanan komersial, nelayan dibedakan berdasarkan komitmen pekerjaan (nelayan yang bekerja penuh waktu dan paruh waktu) dan tingkat pluralisme pekerjaan (nelayan mengkhususkan diri sepenuhnya dalam penangkapan ikan untuk satu spesies, beberapa nelayan memanfaatkan berbagai sumber daya, dan yang lainnya mencari penghasilan dari luar perikanan).

1.4.3 Tipologi metode penangkapan ikan

Perikanan bervariasi sesuai dengan teknologi yang digunakan, baik dari segi kapal (ukuran dan konstruksi) maupun jenis alat tangkap. Sehubungan dengan jenis alat tangkap terdapat empat jenis alat tangkap utama: pukat, pukat cincin, jaring insang dan pancing.

Pukat cincin atau purse seine adalah jaring melingkar yang dapat digunakan untuk spesies pelagis seperti layang dan tongkol. Nelayan memasang purse seine untuk melingkari sekumpulan ikan, jaring kemudian ditutup dari bawah, yang kemudian ditarik dan dipindahkan ke dalam kapal. Trawl merupakan jaring berbentuk kerucut yang ditarik. Alat tangkap ini dapat ditarik ke dasar laut untuk menangkap spesies bentik/demersal.

Jaring insang adalah alat untuk menangkap ikan dengan prinsip insang ikan terjaring ketika mereka berenang; jaring tersebut dapat berupa jaring set atau jaring hanyut. Jaring set melekat pada tiang atau objek tetap lainnya, dan insang hanyut 'melayang atau bergerak mengikuti arus. jaring insang 'digunakan

secara ekstensif oleh nelayan perahu kecil di perairan terlindung karena mereka dapat diangkat dengan tangan atau dengan mesin pengangkut sederhana.' Di sisi lain, jaring insang berupa jaring apung skala besar, dengan panjang beberapa kilometer, juga digunakan dalam pengaturan industri di lokasi laut dalam.

Penggunaan pancing '*hook and line*' adalah metode penangkapan ikan yang sangat kuno dan mungkin tetap menjadi metode penangkapan ikan yang paling umum saat ini. Ikan terpicat untuk menggigit kail dengan umpan yang dapat dimakan atau dengan salah satu dari variasi atraktan. Nelayan memegang tali di tangan saat memancing untuk ikan dasar atau menempelkannya ke perahu yang bergerak sambil memancing ikan lebih dekat ke permukaan.

Jenis alat tangkap di Indonesia dapat berbeda-beda tergantung daerahnya. Sebagai contoh nelayan di Kabupaten bintan menggunakan berbagai macam alat antara lain jaring kembang, tongkol, pari, karang, ketam, bagan apung, bagan kapal motor, bubu ikan, bubu ketam, bubu rajungan oval, pancing, pancing rawai, tombak, senapan ikan (Azrianto *et al.*, 2021).

1.4.5 Sektor pasca panen dan konsumen

Pendekatan pembangunan berkelanjutan ini memastikan bahwa jumlah ikan yang tersedia dapat digunakan seefisien mungkin untuk memenuhi banyak tujuan pembangunan nutrisi, lapangan kerja, sosial dan ekonomi. Poin ini memiliki relevansi khusus dengan sektor pasca panen, menyiratkan perlunya perhatian dalam mengurangi limbah dan kerugian pascapanen; memaksimalkan nilai tambah melalui pengolahan yang tepat; mengembangkan dan/atau meningkatkan sistem distribusi dan pemasaran; dan mengintegrasikan perikanan ke dalam upaya pembangunan pedesaan secara keseluruhan. Pada kegiatan di sektor pascapanen, terdapat tiga langkah pemanfaatan ikan setelah

didaratkan yaitu pemasaran dan distribusi; pengolahan dan pasar; dan konsumen.

Pemasaran adalah kegiatan penting dalam perikanan; dalam konteks komersial, hasil tangkapan yang baik hanya menguntungkan jika dapat dijual. Pemasaran adalah tindakan mencari dan mengatur pasar (khususnya pembeli) untuk hasil tangkapan yang diperoleh oleh nelayan, koperasi, perusahaan atau komunitas tertentu.

Pemrosesan pasca panen meliputi segala sesuatu yang dilakukan terhadap ikan sebelum akhirnya dijual ke pedagang grosir dan/atau pengecer. Ini dapat mencakup metode umum berikut:

1. *Heading, gutting* dan pemberian es (untuk persiapan penjualan dalam bentuk segar);
2. Pembekuan (bentuk umum untuk ikan hasil tangkapan industri);
3. Pengasapan dan penggaraman (bentuk tradisional, memperpanjang umur simpan dengan biaya rendah);
4. Pengalengan (bentuk umum untuk banyak spesies, seperti tuna, sarden, dan salmon);
5. Pengolahan (produksi tepung ikan, abon, bakso dan lain sebagainya).

1.4.6 Konsumen

Setelah beralih dari nelayan ke perantara ke pengolah dan grosir, sebagian besar ikan (selain yang digunakan untuk pakan ternak atau keperluan industri) pada akhirnya akan berakhir di sektor ritel, untuk dijual ke konsumen. Dalam memeriksa sektor konsumen dari sistem perikanan, dua penentu utama harus dipertimbangkan: preferensi konsumen dan permintaan konsumen.

Preferensi adalah keinginan bawaan yang dimiliki orang untuk produk tertentu, dan ini biasanya dipengaruhi oleh tradisi

dan budaya lokal. Preferensi konsumen tersebut harus dipahami untuk memprediksi dampak dari kebijakan pembangunan dan manajemen. Tiga tingkat utama preferensi konsumen harus dipertimbangkan yaitu preferensi yang melekat pada ikan dibandingkan daging dan sumber protein lainnya merupakan masalah mendasar. Preferensi konsumen juga dapat bervariasi di antara spesies ikan yang dipanen. Terakhir, preferensi konsumen juga bervariasi sehubungan dengan cara penyiapan ikan tertentu.

Permintaan konsumen berfokus pada hubungan antara harga produk dan jumlah produk yang bersedia dibeli oleh konsumen, yang dikualifikasikan oleh kemampuan membayar dari pihak konsumen tersebut (yaitu daya beli). Seperti preferensi konsumen, penting untuk memahami permintaan konsumen untuk menganalisis dampak tindakan di bagian lain dari sistem perikanan.

Aspek terakhir adalah kondisi rumah tangga. Rumah tangga nelayan adalah rumah tangga yang setidaknya satu anggotanya terlibat dalam perikanan tersebut. Sebagian besar diskusi berfokus pada rumah tangga yang setidaknya satu anggotanya adalah nelayan meskipun secara lebih luas, kita juga dapat memasukkan rumah tangga yang satu-satunya hubungan perikanan adalah dengan aspek pascapanen, khususnya pengolahan.

1.5 Sistem Manajemen

Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana diisyaratkan pada pasal 2 bahwa pengelolaan perikanan dilakukan atas asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan (Fikri & Kadiati, 2016). Meskipun sistem manajemen ini tidak menghasilkan hasil perikanan secara langsung namun menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan manfaat produktif yang diperoleh dari sistem

perikanan yang lain. Kebutuhan untuk mengontrol eksploitasi penangkapan melalui pengelolaan menjadi semakin jelas dari waktu ke waktu karena alasan yang diberikan di bawah ini.

1. Stok ikan tidak hanya habis, tetapi berpotensi punah jika eksploitasi tidak terkendali. Hal ini terutama terjadi dalam ekosistem perairan yang kompleks dan tidak pasti, di mana efek antar spesies yang kurang dipahami menyebabkan kurangnya kontrol (*laissez-faire*) sangat mungkin menghasilkan eksploitasi berlebihan dari satu atau lebih spesies yang berinteraksi.
2. Sasaran biologis, sosial, ekonomi dan budaya yang saling bertentangan yang melekat pada sebagian besar perikanan sehingga harus diseimbangkan melalui pengelolaan jika ingin memaksimalkan keuntungan total perikanan.
3. Kontrol diperlukan atas laju eksploitasi stok ikan untuk menyeimbangkan kebutuhan saat ini dengan pemeliharaan sumber daya pada tingkat yang sesuai untuk penggunaan di masa mendatang.

Sistem pengelolaan perikanan dapat dilihat sebagai terdiri dari empat komponen yaitu Kebijakan dan perencanaan perikanan (manajemen strategis), Manajemen perikanan (manajemen taktis dan operasional), Pengembangan perikanan dan Penelitian Perikanan.

Kebijakan dan perencanaan perikanan (manajemen strategis). Tahap kebijakan dan perencanaan bisa dibilang merupakan elemen paling kritis dari sistem pengelolaan perikanan. Beberapa bagian dalam kebijakan dan perencanaan perikanan antara lain : tujuan keseluruhan yang ingin dicapai dalam sistem perikanan, arah kebijakan untuk mencapai tujuan yang dinyatakan, legislasi terkait pengelolaan dan regulasi perikanan dan keputusan tentang struktur sistem manajemen.

Keberlanjutan pembangunan perikanan tangkap di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan iklim, polusi, degradasi sumber daya maupun tekanan dari harga komoditas yang berfluktuasi. Terdapat enam prioritas utama alternatif kebijakan, yaitu: (1) peningkatan pemanfaatan SDI, (2) peningkatan produktivitas hasil tangkapan, (3) peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan, (4) pemberian asuransi/jaminan sosial nelayan, (5) perbaikan status pemanfaatan SDI, dan (6) peningkatan nilai PNBPN perikanan tangkap.

Manajemen perikanan (manajemen taktis dan operasional) meliputi Portofolio dari langkah-langkah pengelolaan untuk mengendalikan dampak pemanenan pada stok ikan dan ekosistem, penentuan tindakan tahunan untuk setiap tindakan pengelolaan (tangkapan yang diperbolehkan), keputusan untuk mencapai rencana operasional (misalnya pembukaan perikanan) dan penelitian dan pengumpulan data untuk menyediakan basis pengetahuan yang diperlukan. Terdapat bukti yang kuat dan meyakinkan bahwa melindungi daerah dari penangkapan ikan membuat bertambahnya jumlah, besarnya ukuran, dan biomassa dari jenis organisme yang dieksploitasi. Penerapan model pengelolaan berbasis masyarakat terbukti dapat memberikan hasil yang cukup efektif dan efisien khususnya efisiensi pengelolaan, mereduksi konflik antar nelayan, dan keberlanjutan sumber daya laut dan pesisir (Widarmanto, 2018).

Pengembangan perikanan meliputi langkah-langkah untuk meningkatkan infrastruktur fisik, kemampuan teknologi, kelembagaan dan/atau produktivitas manusia dalam sistem perikanan. Langkah-langkah, selain melalui pengelolaan perikanan itu sendiri, juga untuk meningkatkan keberlanjutan manfaat berkelanjutan dari perikanan, termasuk pengembangan pasar, kontrol kualitas dan perbaikan proses distribusi sumber daya perikanan.

Penelitian Perikanan meliputi langkah-langkah untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyebarluaskan data yang relevan tentang berbagai komponen sistem perikanan, untuk mendukung kegiatan pengelolaan dan pengembangan perikanan, langkah-langkah untuk menilai dan melestarikan stok ikan dan langkah-langkah untuk memahami sistem alam dan manusia dalam perikanan. Penelitian Perikanan menjadi dasar dalam upaya pengelolaan.

Pengelolaan perikanan yang efektif didasarkan pada pencapaian tujuan dan sasaran masyarakat melalui penggunaan instrumen kebijakan dan peraturan yang tepat (Santoso, 2017). Pengelolaan perikanan merupakan kegiatan multi-tujuan, melayani berbagai tujuan sosial, budaya, politik, ekonomi dan ekologi. Olehnya aspek berkelanjutan mesti dilihat secara lengkap, meliputi aspek keberlanjutan ekologi, keberlanjutan sosio-ekonomi, keberlanjutan komunitas, dan keberlanjutan kelembagaan. Semoga keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia selalu terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, L. 2012. Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara). *Jurnal Perikanan Dan Kelautan*, 2(2), 115–126.
- Azrianto, F., Apdilah, D., & Raja Ali Haji, M. 2021. Keragaman Alat Tangkap Nelayan di Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan. *Jurnal Perikanan Dan Kelautan*, 26(2), 94–97.
- Charles, A. 2001. *Sustainable Fishery Systems* (Blackwell Science). Blackwell Science.
- Fery, R., Krisna, Zulbainarni, N., & Benny Osta Nababan. 2022. Analisis Sistem Dinamik Perikanan Multispecies: Studi Terhadap Perikanan Pelagis Di Pelabuhan Perikanan. *J. Sosek KP*, 17(1), 19–33. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v17i1.9968>
- Fikri, M., & Kadiati, B. 2016. Kajian pengelolaan sumberdaya perikanan yang optimal di Kabupaten Halmahera Tengah. *Prosiding Seminar Nasional Kemaritiman Dan Sumberdaya Pulau-Pulau Kecil*, 1(1), 144–156.
- Indrawasih, R. 2004. Pembagian kerja secara gender pada masyarakat nelayan Indonesia. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 6(2).
- Ma'mun, A., Priatna, A., Amri, K., & Nurdin, D. E. 2019. Hubungan antara kondisi oseanografi dan distribusi spasial ikan pelagis di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) 712 Laut Jawa. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*, 25(1), 1–14. <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jppi>
- Retnowati, E. 2011. Nelayan indonesia dalam pusaran kemiskinan struktural (perspektif sosial, ekonomi dan hukum). *Perspektif*, 16(3), 149–159. www.wikipedia.com

- Ruslan, T., Simbolon, D., Purbayanto, A., & Taurusman, A. A. 2013. Sistem bagi hasil pada usaha penangkapan madidihang skala kecil di Kabupaten Seram Bagian Barat. *Buletin PSP*, 21(2), 237–245.
- Santoso, D. 2017. Model Pengelolaan Perikanan Tangkap Berbasis Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Untuk Meningkatkan Hasil Tangkapan Nelayan - Suatu Pendekatan Teoritis. *Jurnal Biologi Tropis* 20, 17(2), 35–44.
- Widarmanto, N. 2018. Kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. *Sabda*, 13(1), 18–26.

BAB 2

PERIKANAN INDONESIA DALAM KONTEKS GLOBAL

Oleh Agus Kurniawan B

2.1 Pendahuluan

Perairan Indonesia memang kaya akan sumber daya perikanan yang melimpah dengan wilayah lautan seluas 5,8 juta km² atau 3/4 total wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di Dunia, Indonesia memiliki lebih dari 17.506 pulau dan garis pantai yang panjang seluas 81.000 km yang memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia terutama terhadap orientasi pembangunan yang akan dijalankan (Mudzakir, 2011). Menciptakan ekosistem laut yang beragam dan subur. Letak geografis Indonesia diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, menjadikannya negara kepulauan terbesar di dunia. Keberadaan pulau-pulau dan sistem perairan yang luas memberikan lingkungan yang beragam bagi kehidupan ikan. Alasan yang mendasari untuk memperkuat pembangunan sektor sumberdaya perikanan dan kelautan yang dijadikan utama pembangunan Nasional, baik secara ekonomi, politik, sosial dan budaya (Dahuri, 2002).

Perairan Indonesia memiliki keanekaragaman jenis ikan yang sangat kaya dan keberlimpahan sumber daya perikanan yang melimpah meliputi berbagai keanekaragaman jenis ikan, ekosistem karang, laut kepulauan, dan sumber daya perikanan. Hal ini mendapat perhatian dari ilmuwan Internasional sejak tiga abad yang lalu. Sasaran penelitian para ahli dibidang biologi, geologi, fisika dan kimia oseanografi perairan Indonesia. Namun sayangnya

semua hasil ekspedisi bahari pada waktu itu dibawa ke negeri asal pelaksana peneliti untuk diolah dan dimiliki oleh peneliti tersebut. Hal ini disebabkan perlunya pemilikan flora fauna dan batuan yang ada di Indonesia (Soegiarto, 1987).

Mari kita tarik kebelakang sejarah perikanan Indonesia dalam konteks global mencakup beberapa fase penting Pada abad 5 permulaan Masehi terjalin hubungan dengan perdagangan Arab Cina, sekitar abad 8 terdapat relief dinding Candi Borobudur yang menggambarkan bentuk perahu layar yang cukup maju bertiang ganda. Selanjutnya pada abad 13 dalam buku Kutaramenwa tentang siwakan (pengelolaan air) yang diduga merupakan awal dimulainya pertambahan di Jawa Timur.

Kemudian pada masa kolonialisme dan Eksploitasi atau selama masa penjajahan. Perikanan di Indonesia banyak dieksploitasi oleh negara-negara kolonial, terutama Belanda. Perikanan dianggap sebagai sumber daya yang kaya untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Kapal-kapal penangkap ikan asing dan kapal-kapal induk dari belanda mengeksploitasi sumber daya perikanan Indonesia tanpa memperhatikan keberlanjutan. Selanjutnya di Era Kemerdekaan setelah Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mulai mengambil alih pengelolaan perikanan di wilayahnya. Munculnya kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 1946 merupakan langkah penting dalam pengelolaan perikanan yang mandiri. Pemerintahan Indonesia mengeluarkan kebijakan dan regulasi untuk melindungi sumber daya perikanan, termasuk melarang penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dan meracuni perairan.

Pada tahun 1960-an Indonesia mulai mengembangkan industri perikanan untuk memanfaatkan sumber daya perikanan secara lebih efisien. Pembenihan ikan dan budidaya perikanan diperkenalkan untuk meningkatkan produksi ikan secara intensif. Pemerintah juga mendirikan stasiun penelitian perikanan dan

lembaga pendidikan perikanan untuk mengembangkan keahlian dan teknologi dalam sektor perikanan.

Pada tahun 1970-an Indonesia menjadi eksportir utama produk perikanan, terutama ikan tuna dan udang ke pasar global. Dimana permintaan produk perikanan Indonesia meningkat dan ekspor perikanan menjadi satu sumber pendapatan devisa yang signifikan bagi negara. Ekspor perikanan juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Perikanan Indonesia pada tahun 1990-an, Indonesia semakin menyadari pentingnya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Pemerintah mengadopsi kebijakan dan langkah-langkah untuk membatasi penangkapan ikan yang berlebihan, melindungi habitat perikanan, dan mempromosikan praktik perikanan yang bertanggung jawab. Pendekatan pengelolaan berbasis ekosistem diperkenalkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan (Sumaila *et al*, 2018).

Hingga pada awal tahun 2000-an pemerintah Indonesia semakin fokus pada pengelolaan perikanan yang berkelanjutan seperti Program pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan (PSDPB) diperkenalkan dengan tujuan mengatur penangkapan ikan, melindungi sumber daya perikanan dan menjaga keberlanjutan ekosistem perairan. Langkah-langkah seperti penetapan kuota penangkapan ikan, pembentukan zona-zona perlindungan, dan penegakan hukum yang ketat diterapkan hingga kini.

2.2 Kontribusi terhadap Pasar Global Indonesia

Latar belakang kontribusi Indonesia terhadap pasar global Indonesia dalam sektor perikanan dapat meliputi kekayaan sumber daya perikanan, potensi pertumbuhan ekonomi, produksi dan ekspor produk perikanan, serta peran aktif dalam organisasi perikanan Internasional. Semua ini membawa manfaat ekonomi

dan menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan baik di tingkat regional maupun global.

Keberlimpahan sumber daya perikanan di perairan Indonesia memberikan potensi ekonomi yang besar dan memberikan sumbangan penting untuk sektor perikanan dalam negeri dan pasar global. Namun, penting untuk mengelola sumber daya ini dengan bijaksana dan berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang dan keseimbangan ekosistem laut.

Tingginya keberlimpahan sumber daya juga menarik pelaku industri perikanan global. Banyak negara-negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, Tiongkok dan negara-negara-Eropa tertarik dan mengimpor produk perikanan dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangan dan industri mereka. Ekospor produk perikanan menjadi salah satu sumber pendapatan devisa yang signifikan bagi Indonesia. Namun, keberlimpahan sumber daya ini juga menuntut tanggung jawab yang besar dalam pengelolaannya (Sutinen & Kuperan, 1999).

Indonesia tengah menyongsong peralihan konsepsi dan praktik ekonomi dari bersifat tradisional menuju konsep pemanfaatan sumber daya laut untuk pertumbuhan sosial ekonomi yang berkelanjutan ekosistem laut. Salah satu cara untuk mendukung perikanan berkelanjutan dalam percepatan pembangunan ekonomi nasional melalui peningkatan pengelolaan perikanan berbasis wilayah pengelolaan perikanan atau WPP dengan menguatkan data stok perikanan dan kelembagaan WPP (Bappenas, 2019).



(doc. kkp. go. id, 2023)

2.2.1 Potensi Pertumbuhan Ekonomi

Indonesia memiliki peluang besar untuk terus mengembangkan sektor perikanan dan memperluas kontribusinya dalam pasar global yang signifikan terhadap pasar global Indonesia seperti kekayaan sumber daya perikanan, potensi pasar yang besar, pertumbuhan ekonomi global, dukungan pemerintah, serta kemampuan untuk memenuhi standar kualitas dan keamanan menjadi faktor utama yang memperngaruhi kontribusi tersebut (Purnomo & Sutomo, 2017).

Tentu saja sumber daya perikanan Indonesia yang melimpah menjadi sumber daya perikanan sebagai sektor yang banyak berkontribusi devisa negara (Prabowo & Sahiruddin, 2019). Potensi ini mencakup berbagai jenis ikan, udang, cumi-cumi, lobster, dan organisme laut lainnya. Pertumbuhan ekonomi sektor perikanan tercermin dalam nilai tambah dari produksi perikanan, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan yang dihasilkan. Pertumbuhan ini berdampak positif pada perkembangan ekonomi

nasional dan meningkatkan kontribusi Indonesia terhadap pasar global (Nugroho & Rosady, 2019).

Sebagai sektor yang intensif penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia baik dalam kegiatan penangkapan ikan, budidaya, pengolahan, maupun distribusi produk perikanan, sektor ini memberikan peluang kerja bagi ribuan orang di berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, pertumbuhan sektor perikanan turut mendorong pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Wirawan, 2020).

Peningkatan ekspor produk perikanan juga merupakan komponen penting dalam kontribusi sektor perikanan terhadap pasar global. Indonesia telah menjadi salah satu eksportir utama produk perikanan di Dunia. Produk seperti ikan segar, udang, cumi-cumi, lobster dan produk perikanan olahan di ekspor ke berbagai negara. Peningkatan ekspor ini tidak hanya memberikan kontribusi ekoomi, tetapi juga memperluas akses pasar global untuk produk perikanan Indonesia (Sulistiyanto & Dewi, 2020).

Berdasarkan data yang di rilis oleh ITD Trademap nilai ekspor produk perikanan Indonesia pada tahun 2020 tumbuh positif mencapai USD5,2 miliar atau tumbuh 5,7% dibandingkan dari tahun 2019, capaian nilai ekspor perikanan tumbuh 8,84% dengan nilai USD6,22 miliar tahun 2022 dan nantinya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan ekspor perikanan di tahun 2023 sebesar USD7,66 miliar. Selain ekspor pertumbuhan produk domestik bruto akan menargetkan nilai 5-6 persen, kemudian angka konsumsi ikan 61,02 kg/kapita (doc. Indonesia. go. id, 2023). Hal ini, diklaim Indonesia mengalami peningkatan naik 2 peringkat menjadi berada di posisi 8 sebagai eksportir utama produk perikanan Dunia. Ini berbanding terbalik dengan negara lain yang mengalami penurunan cukup signifikan ditahun 2020 seperti Tiongkok turun 7,8%, Norwegia turun 7,5%, Vietnam turun 2,1%, India turun 15,1%, Thailand turun 2,2%, dan Ekuador turun 1,5%.

Pertumbuhan ekonomi sektor perikanan juga didorong oleh investasi dalam infrastruktur perikanan, pengembangan teknologi, dan peningkatan nilai tambah produk perikanan. Melalui pengembangan industri perikanan yang modern dan inovatif, Indonesia mampu menghasilkan produk perikanan dengan kualitas yang lebih baik, efisiensi produksi yang lebih tinggi dan nilai tambah yang tinggi. Hal ini memberikan daya saing yang lebih baik di pasar global (Nasucha & Astuti, 2019).

Salah satu upaya strategis yang akan dibangun dalam pengelolaan adalah berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada sektor perikanan yaitu (1) Meningkatkan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan, (2). Penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir, (3). Meningkatkan produksi, produktivitas, standarisasi, mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan, (4). Meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, perlindungan usaha, dan akses pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan skala kecil, dan (5). Meningkatkan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan diperlukan kebijakan yang sesuai dalam implementasi pembangunan yang merupakan salah satu model inovasi pembangunan (Bappenas, 2019).

2.2.2 Kebutuhan Pasar Global akan Produk Perikanan

Keanekaragaman sumber daya perikanan sangat kaya jenis ikan, udang, cumi-cumi dan lobster Indonesia menjadi daya tarik bagi pasar global yang dikenal memiliki kualitas yang baik. Ikan dan produk perikanan dari Indonesia sering dianggap segar, alami dan berkualitas tinggi. Selain itu Indonesia juga semakin berfokus pada praktik perikanan berkelanjutan. Hal ini membuat produk perikanan Indonesia diminati di pasar global yang semakin peduli terhadap keberlanjutan.

Pertumbuhan industri perikanan merupakan salah satu sektor yang berpotensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Permintaan global terhadap produk perikanan Indonesia terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi. Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan produksi perikananannya dan memenuhi kebutuhan pasar global yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara.



(doc. Indonesia. go. id, 2023)

Peran pemerintah dan dukungan kebijakan memiliki peran penting dalam mempromosikan dan dukungan industri perikanan dalam kontribusinya terhadap pasar global. Melalui kebijakan yang mendukung pengembangan sektor perikanan termasuk investasi dalam infrastruktur perikanan, pengembangan teknologi, pelatihan, peningkatan kualitas produk, serta promosi perdagangan internasional, pemerintah menciptakan lingkungan

yang kondusif bagi pertumbuhan dan kontribusi pasar global Indonesia.

Selain itu peran budaya dan kuliner makanan laut merupakan bagian penting dari budaya dan kuliner Indonesia. Masakan Indonesia, seperti ikan bakar, sate ikan, gurame asam manis dan masih banyak lagi memiliki cita rasa unik dan khas. Kepopuleran kuliner Indonesia di Dunia Internasional meningkatkan permintaan produk Indonesia yang digunakan dalam masakan tradisional dan inovasi kuliner. Faktor budaya dan kuliner menjadi daya tarik tersendiri bagi pasar global dalam mencari produk perikanan Indonesia.

Untuk menjaga kebutuhan produk perikanan secara global salah satunya harus selalu menjaga kualitas hasil perikanan. Faktor yang bisa dipenuhi untuk menjaga kualitas produk perikanan yang baik dari perikanan tangkap ataupun budidaya yaitu: *Pertama*, mengenai quality atau mutu hasil produksi perikanan khususnya udang. Indonesia harus dapat memenuhi standar mutu yang diminta di pasar global. *Kedua*, mengenai keamanan (*safety*) sehingga produk itu aman untuk dikonsumsi. *Ketiga*, hasil produksi perikanan khususnya udang harus *sustainability* sehingga memenuhi prinsip keberlanjutan. Dan *Keempat*, *traceability* atau ketertelusuran dari pra produksi hingga pemasaran.

2.2.3 Kualitas dan Keamanan Produk Perikanan

Indonesia memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pasar global dalam sektor perikanan yang memiliki sumber daya perikanan yang melimpah, baik di perairan laut maupun perairan tawar. Indonesia menghasilkan berbagai jenis ikan, udang, cumi-cumi, lobster dan produk-produk perikanan olahan lainnya. Produk-produk perikanan Indonesia di ekspor ke berbagai negara di seluruh dunia termasuk negara Asia, Eropa, Amerika, dan Timur Tengah. Kontribusi ekspor perikanan Indonesia ini telah

membantu memenuhi kebutuhan pasar global akan produk perikanan.

Indonesia sebagai salah satu produsen penyedia keanekaragaman produk perikanan khas yang menawarkan berbagai jenis ikan dan produk olahan yang menjadi favorit di pasar global. Contohnya udang vannamei, ikan tuna, ikan tenggiri, lobster dan ikan hias air tawar yang menarik. Keanekaragaman ini memberikan nilai tambah dalam memilih dan memenuhi permintaan pasar global yang beragam.

Kesadaran konsumen akan pentingnya kualitas dan keamanan pangan sangat besar sekali sehingga produk yang diciptakan untuk konsumsi pangan akan aman dan berkualitas. Mereka mencari produk perikanan yang segar, bebas dari kontaminan, dan diproduksi dengan standar yang berkualitas tinggi. Permintaan akan produk perikanan saat ini yang memenuhi persyaratan keamanan pangan dan memiliki jaminan kualitas tinggi akan semakin meningkat.

Indonesia telah menerapkan peraturan dan regulasi yang ada untuk memastikan kualitas dan keamanan produk yang mengacu pada regulasi dan standar Internasional yang ada, contohnya Organisasi Hewan Dunia (OIE) dan Codex Alimentarius Commission untuk pedoman dan standar terkait keamanan pangan dan kebersihan produk perikanan. Untuk memasuki pasar global diperlukan penerapan standar dan persyaratan untuk memastikan produk Indonesia memenuhi standar Internasional.

Perlindungan kesehatan konsumen sangat diperhatikan untuk menjaga kualitas dan keamanan produk perikanan Indonesia. Produk perikanan yang tidak memenuhi standar keamanan dapat berpotensi menyebabkan keracunan dan penyebaran penyakit. Oleh karena itu, pasar global mengharapkan produsen perikanan khususnya Indonesia menerapkan dan menjaga keamanan produk mereka, baik dalam proses penangkapan, pemrosesan, maupun distribusi. Sehingga reputasi

dan daya saing kualitas dan keamanan produk perikanan Indonesia menjadi faktor penting untuk membangun dan meningkatkan daya saing di pasar global.

2.4 Kerjasama Regional dan Internasional

Indonesia aktif berpartisipasi dalam kerjasama regional maupun Internasional di sektor perikanan. Melalui ASEAN, Indonesia terlibat dalam upaya peningkatan pengelolaan perikanan di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga bekerja sama dengan negara-negara lain dan organisasi internasional untuk memperkuat pengawasan, penegakan hukum, dan pemantauan perikanan.

Permintaan global yang tinggi akan permintaan produk perikanan terus meningkat di pasar global. Negara mitra dagang mengimpor produk perikanan untuk memenuhi kebutuhan domestik mereka yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Hal ini menciptakan peluang bagi Indonesia untuk memasarkan dan mengeksport produk perikanan ke pasar Internasional (Taufiqurrahman & Herianto, 2017).

Perjanjian perdagangan bebas dengan berbagai negara dan blok ekonomi ASEAN seperti Free Trade Area (AFTA) dan perjanjian bilateral dengan negara seperti Jepang China, dan Korea Selatan ini memberikan kesempatan dan akses pasar yang lebih baik bagi produk perikanan Indonesia dan mengurangi hambatan perdagangan, seperti tarif dan regulasi yang membatasi akses pasar.

Dukungan pemerintah Indonesia sangat diperlukan untuk mengambil kesempatan dan langkah-langkah untuk mendorong dan memfasilitasi kerjasama perdagangan yang lebih luas lagi seperti peningkatan infrastruktur perikanan, pengembangan kebijakan perdagangan, pelatihan dan pengembangan kapasitas serta promosi perdagangan Internasional. Dukungan ini menjadi

faktor penting dalam memperkuat kerjasama perdagangan dan mempromosikan produk perikanan di pasar Global.

Melalui kerjasama perdagangan regional dan Internasional menjadi sangat penting bagi Indonesia dalam memasarkan dan meningkatkan daya saing produk hasil perikanannya. Sehingga melalui kerjasama Indonesia dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan volume ekspor, meningkatkan kualitas produk, serta memperoleh keuntungan ekonomi yang signifikan melalui perdagangan Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahuri, R. 2002. Wawancara Prof. Dr. H. Rochmin Dahuri pada Tokoh Indonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia). www.TokohIndonesia.com (22 Desember 2004). *Dalam* : Mudzakir, AK. 2011. Kajian Yuridis Dan Sejarah Terhadap Pengelolaan Pungutan Perikanan di Zeei.
- Mudzakir, AK. 2011. Kajian Yuridis Dan Sejarah Terhadap Pengelolaan Pungutan Perikanan di Zeei. *Dalam*: [http://eprints.undip.ac.id/35265/1/Kohar-KAJIAN YURIDIS DI ZEEI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/35265/1/Kohar-KAJIAN%20YURIDIS%20DI%20ZEEI.pdf).
- Nasucha, M. H., & Astuti, P. S. 2019. The competitiveness of Indonesian fisheries products in the global market. *Asean Marketing Journal*, 11(3), 189-196.
- Nugroho, D., & Rosady, P. 2019. The role of Indonesian fisheries products in global trade. *Asian Journal of Fisheries and Aquatic Research*, 4(1), 1-8.
- Purnomo, S. W., & Sutomo, S. 2017. The competitiveness of Indonesian fishery products in the global market. *Marine Fisheries*, 8(1), 19-28.
- Prabowo, M. H., & Sahiruddin, S. 2019. Overview of Indonesian fisheries sector. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8(1), 790-795.
- Sulistiyanto, B., & Dewi, A. S. 2020. The competitiveness of Indonesian fishery products in the ASEAN market. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 35(2), 190-210.
- Sumaila, U. R., Khan, A., & Teh, L. 2018. Contributions of fisheries to the sustainable development goals. *Fish and Fisheries*, 19(3), 540-557.
- Sutinen, J. G., & Kuperan, K. 1999. A socio-economic theory of regulatory compliance and enforcement. *Marine Resource Economics*, 14(3), 207-216.

- Taufiqurrahman, M., & Herianto, A. S. 2017. Competitiveness of Indonesian fishery products in the international market. *Jurnal Manajemen Aset Kelautan dan Perikanan*, 2(1), 11-20.
- Wirawan, R. 2020. Challenges and opportunities for the Indonesian fishery sector in facing the global market. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 15(2), 153-164.
- <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/6924/gencar-membidik-pasar-ekspor-perikanan?lang=1>
- <https://kkp.go.id/djpdspkp/artikel/33334-peringkat-indonesia-sebagai-eksportir-produk-perikanan-dunia-meningkat-di-masa-pandemi>

BAB 3

MEKANISME HARGA

Oleh Suharno

3.1 Pendahuluan

Harga suatu komoditas ditentukan dalam banyak cara tergantung pada sifat pasar. Dalam ekonomi sosialis atau tertutup, pemerintah mengintervensi dan mengatur harga untuk kepentingan rakyat dan ekonomi. Dalam ekonomi kapitalis, kekuatan pasar dianggap beroperasi secara bebas dan harga komoditas ditentukan oleh interaksi bebas permintaan dan penawaran di berbagai jenis pasar (Grahadita *et al.*, 2022; Pangestu *et al.*, 2021).

Ketika pembeli dan penjual bertemu, bernegosiasi dan bertransaksi dengan harga yang disepakati, maka pemasaran menjadi lengkap. Harga diindikasikan sebagai titik perpotongan kurva permintaan dan penawaran. Harga di mana permintaan sama dengan penawaran disebut harga keseimbangan pasar di mana seluruh penawaran dijual. Dengan kata lain, pasar dikatakan bersih pada harga keseimbangan pasar (Suharno, 2021).

Harga bersifat dinamis. Itu selalu dikaitkan dengan kuantitas, tempat dan waktu yang tanpanya harga tidak ada artinya. Ketika harga suatu komoditas tinggi, produsen cenderung memproduksi lebih banyak yang dapat menurunkan harga karena bekerjanya hukum permintaan, hal-hal lain tetap sama. Namun, harga memang bervariasi yang menimbulkan kesulitan dalam perencanaan produksi. Oleh karena itu, pemerintah berkepentingan dengan stabilisasi harga. Permasalahan lebih terasa pada sektor primer yang memproduksi barang-barang yang mudah rusak seperti ikan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil

intervensi kebijakan (i) untuk menstabilkan harga semua komoditas, terutama komoditas penting dan diperlukan di sektor primer dan (ii) untuk mencegah fluktuasi pendapatan petani. Untuk mengatasi masalah ini, para petani dan nelayan dapat secara kolektif mengatur pasokan yang akan membantu menstabilkan tidak hanya harga produk mereka tetapi juga pendapatan mereka. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kebijakan dukungan harga minimum digunakan untuk tujuan ini oleh pemerintah (Suciati *et al.*, 2022).

Norwegia merupakan pionir dalam pembangunan perikanan dengan fokus pada pengembangan industri perikanan dan kesejahteraan nelayannya. Nelayan berkumpul bersama untuk membentuk federasi pemasaran yang akan menjadi pemasok utama ikan. Federasi telah diberi wewenang oleh undang-undang untuk menentukan harga minimum di bawah yang tidak dapat dibeli oleh penjual. Harga minimum ditentukan sedemikian rupa sehingga mencakup biaya produksi dan keuntungan yang wajar bagi produsen. Kemudian ikan dilelang secara langsung dan harga jual ikan selalu sama atau di atas harga minimum. Mekanisme ini juga menguntungkan konsumen karena mereka dapat merencanakan pengeluaran rumah tangganya yang tentunya juga menguntungkan penjual.

Karena sebagian besar produsen di negara kita tidak terorganisir, pemerintah mengadopsi langkah-langkah berikut untuk memperbaiki kondisi mereka:

1. Subsidi untuk petani,
2. Permintaan promosi,
3. Pembatasan tanaman dan hasil (tidak langsung),
4. Mendukung harga dan pembelian pemerintah dan
5. Produsen bersubsidi – perbedaan harga konsumen.

Dengan globalisasi menjadi lebih invasif dan diucapkan, rezim subsidi akan dihapus dalam jangka panjang. Meningkatkan

efisiensi produksi dan pemasaran menjadi penting untuk membuat usaha pertanian dan perikanan menguntungkan dan berkelanjutan. Persiapan kita untuk menghadapi perdagangan internasional bebas yang muncul di bawah rezim Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tampaknya sangat tidak memadai dan kecuali kebijakan yang tepat dirumuskan dan diterapkan untuk tujuan ini, mungkin sudah terlambat untuk melindungi kepentingan petani dan nelayan kita. .

Dalam hal pertanian, pemerintah terlibat aktif dalam upaya pengaturan dan stabilisasi harga. Sayangnya sektor perikanan masih sangat tidak terorganisir dan pemerintah perlu berbuat lebih banyak untuk mengatasi masalah nelayan dalam memasarkan ikan yang mereka hasilkan.

3.2 Permintaan, dan Penawaran

3.2.1 Permintaan

Kita telah melihat bahwa keinginan manusia tidak terbatas tetapi sumber dayanya terbatas dan memiliki kegunaan alternatif. Jadi, ingin memuaskan perilaku manusia dalam situasi terbatas sumber daya adalah tema sentral ekonomi. Untuk memuaskan keinginan kita, kita perlu mengkonsumsi barang dan jasa. Jadi, konsumsi menentukan produksi. Oleh karena itu, dikatakan bahwa adalah bijaksana untuk memproduksi apa yang dapat dipasarkan dengan mudah daripada mencoba memasarkan apa yang dapat diproduksi dengan mudah.

Kekuatan pemuasan keinginan dari suatu barang atau jasa disebut kegunaannya. Konsumsi adalah penghancuran utilitas sedangkan produksi adalah pembangkitan utilitas. Produksi dan konsumsi adalah dua sisi mata uang yang sama. Analisis permintaan dan penawaran membantu untuk memahami produksi dan konsumsi barang dan jasa.

Permintaan didefinisikan sebagai keinginan untuk suatu komoditas atau layanan yang didukung dengan daya beli yang

diperlukan dan kemauan untuk membayar harga untuk itu. Keinginan seperti itu disebut permintaan efektif. Jadi, semua keinginan bukanlah tuntutan. Permintaan dinyatakan dengan mengacu pada harga dan waktu saja. Permintaan tanpa harga atau waktu tidak memiliki relevansi. Permintaan harus selalu dinyatakan dalam kuantitas dengan harga tertentu di tempat tertentu (Salsabila et al., 2023). Misalnya, permintaan ikan di kota Jakarta mungkin 50 ton per hari dengan harga katakanlah Rp.150.000 per kg.

Ketika gambar permintaan diplot dalam grafik, diperoleh kurva permintaan. Umumnya, kurva permintaan miring ke bawah menunjukkan bahwa hal-hal lain tetap konstan, penurunan harga akan menyebabkan peningkatan permintaan dan kenaikan harga akan menyebabkan penurunan permintaan. Kurva permintaan yang miring ke bawah atau dengan kata lain miring negatif menyatakan hubungan terbalik antara kuantitas yang diminta dan harga.

Jarang kita melihat kurva permintaan memiliki kemiringan ke atas atau positif. Kurva permintaan seperti itu menunjukkan hubungan langsung antara permintaan dan harga. Dengan kata lain, lebih banyak akan diminta pada harga yang lebih tinggi.

3.2.2 Penawaran

Istilah penawaran mengacu pada jumlah barang yang ditawarkan untuk dijual pada harga tertentu. Seperti permintaan, penawaran selalu mengacu pada harga dan titik waktu. Sebelumnya kita belajar bahwa ada hubungan terbalik antara permintaan dan harga. Dalam kasus penawaran dan harga, ada hubungan langsung.

Hukum penawaran menyatakan bahwa hal-hal lain tetap sama, ketika harga suatu komoditas meningkat, penawarannya juga cenderung meningkat. Pada harga yang lebih tinggi, lebih banyak penjual yang tertarik untuk memproduksi lebih banyak dan

setiap penjual yang ada ingin menjual lebih banyak. Ketika harga turun, kebalikannya berlaku.

Hukum penawaran dapat dijelaskan dengan bantuan gambar dan kurva penawaran. Schedule penawaran adalah pernyataan jumlah barang dan harga yang sesuai di mana produsen bersedia untuk memasok.

Representasi grafis dari schedule penawaran yang menjelaskan hukum penawaran. Kurva penawaran memiliki kemiringan positif dan lebih ke atas ke kanan.

Penentu pasokan

Penawaran suatu komoditas ditentukan oleh banyak faktor, beberapa di antaranya tercantum di bawah ini:

1. Harga barang yang akan ditawarkan
2. Harga barang lain
3. Harga faktor produksi
4. Jumlah produsen atau penjual
5. Masuknya perusahaan baru
6. Teknologi
7. Kebijakan pemerintah
8. Penemuan bahan baku baru

3.3 Pasar dan Harga Keseimbangan

Harga ekuilibrium, juga dikenal sebagai harga kliring pasar, adalah biaya konsumen yang dibebankan pada beberapa produk atau layanan sehingga penawaran dan permintaan sama, atau mendekati sama. Pabrikan atau vendor dapat menjual semua unit yang ingin mereka pindahkan dan pelanggan dapat mengakses semua unit yang ingin mereka beli (Pindyck, 2018).

Penetapan harga dinamis berupaya menemukan harga keseimbangan sebagai respons terhadap perubahan pasar, menyesuaikan harga dengan cepat sebagai respons terhadap fluktuasi penawaran dan permintaan. Model lain, seperti penetapan harga berbasis nilai, berupaya memanfaatkan kualitas

yang tidak berwujud atau menggunakan berbagai taktik untuk memanipulasi permintaan dan mencapai margin keuntungan yang lebih tinggi daripada yang dapat direalisasikan melalui penetapan harga berbasis biaya (Koutsoyiannis, 1975).

Harga ekuilibrium cenderung tetap stabil tetapi peristiwa yang memengaruhi penawaran dan permintaan pasti memengaruhi harga juga. Kenaikan biaya untuk bahan baku, misalnya, dapat berarti bahwa produsen tidak dapat memproduksi produk yang sama tanpa menaikkan harga atau memotong margin keuntungan. Hasilnya mungkin pabrikan memproduksi lebih sedikit unit dan membebankan harga yang lebih tinggi. Lebih sedikit konsumen yang dapat membeli pada harga yang lebih tinggi, tetapi karena lebih sedikit unit yang tersedia, harga ekuilibrium dapat dicapai (Bardhan & Udry, 1999; Besanko & Braeutigam, 2000; Boyes & Melvin, 2012; Blundell & Dias, 2009).

Kami akan memeriksa bagaimana pasar menentukan harga barang dan kuantitas yang dijual dan dikonsumsi. Pasar adalah seperangkat pengaturan untuk pertukaran barang atau jasa (Riviera *et al.*, 2023).

Barter vs. pasar

Sistem barter adalah sistem pasar di mana barang atau jasa diperdagangkan secara langsung untuk barang atau jasa lainnya. Jika Anda setuju untuk memperbaiki komputer tetangga Anda dengan imbalan bantuannya dalam mengecat rumah Anda, Anda telah melakukan transaksi barter. Sementara sistem barter mungkin dapat berfungsi secara efektif dalam ekonomi sederhana di mana berbagai barang diproduksi terbatas, ia tidak dapat berfungsi dengan baik dalam ekonomi kompleks yang menghasilkan koleksi barang dan jasa yang ekstensif. Masalah utama yang terkait dengan sistem barter adalah bahwa setiap perdagangan membutuhkan kebetulan ganda dari keinginan. Ini berarti bahwa perdagangan hanya dapat terjadi jika masing-

masing orang menginginkan apa yang orang lain mau perdagangkan dan bersedia menyerahkan apa yang diinginkan orang lain. Dalam ekonomi maju di mana beragam koleksi barang dan jasa diproduksi, menemukan seseorang yang bersedia melakukan perdagangan yang Anda inginkan mungkin cukup sulit dan mahal. Jika Anda memperbaiki TV dan lapar, Anda harus menemukan seseorang dengan TV rusak yang bersedia menukar makanan untuk perbaikan TV. Karena mahal untuk mengatur transaksi semacam itu, para ekonom mencatat bahwa transaksi barter memiliki biaya transaksi yang relatif tinggi.

Untuk alasan ini, sepanjang sejarah yang tercatat hampir semua masyarakat telah menggunakan beberapa bentuk uang untuk memfasilitasi perdagangan. Dalam ekonomi moneter, individu memperdagangkan barang atau jasa untuk mendapatkan uang dan kemudian menggunakan uang ini untuk membeli barang atau jasa yang ingin mereka peroleh. Karena uang dapat diperdagangkan untuk barang atau jasa apa pun, penggunaan uang menghilangkan kebutuhan akan keinginan ganda yang kebetulan dan menurunkan biaya transaksi yang terkait dengan perdagangan.

Harga relatif dan nominal

Biaya peluang untuk memperoleh barang atau jasa di bawah barter atau ekonomi moneter dapat diukur dengan harga relatif komoditas. Harga relatif suatu komoditas adalah ukuran seberapa mahal suatu barang dalam satuan unit barang atau jasa lainnya. Di bawah sistem barter, harga relatif tidak lebih dari rasio perdagangan antara dua barang atau jasa. Misalnya, jika satu printer laser ditukar dengan 2 printer ink-jet, maka harga relatif printer laser tersebut adalah dua printer ink-jet. Alternatifnya, harga relatif printer inkjet adalah setengah dari printer laser dalam hal ini. Dalam ekonomi moneter, harga relatif juga dapat dengan mudah dikomputer menggunakan rasio harga komoditas. Jika,

misalnya, harga bola sepak Rp.20.000 dan pemutar CD portabel berharga Rp.60.000, harga relatif pemutar CD portabel adalah 3 bola sepak (dan harga relatif bola sepak adalah $\frac{1}{3}$ harga CD portabel). Ekonom berpendapat bahwa individu menanggapi perubahan harga relatif karena harga ini mencerminkan biaya peluang untuk memperoleh barang atau jasa.

Dalam ekonomi pasar, harga barang atau jasa ditentukan melalui interaksi permintaan dan penawaran. Untuk memahami bagaimana harga pasar ditentukan, penting untuk mengetahui faktor penentu permintaan dan penawaran.

Perilaku perusahaan dan penentuan harga di pasar telah menarik perhatian para ekonom secara signifikan. Kontribusi besar dibuat pada aspek pasar dan pemasaran yang merupakan pusat ekonomi, khususnya ekonomi kapitalis. Pasar adalah fondasi yang sangat mendasar di mana ekonomi kapitalis bersandar dan beroperasi.

Koordinasi pasar

Produksi dalam ekonomi modern adalah kegiatan yang sangat kompleks. Perhatikan komputer yang sedang Anda gunakan. Ini terdiri dari komponen dan bahan baku yang mungkin dibuat di ribuan perusahaan yang berlokasi di puluhan negara. Entah bagaimana, kaca, plastik, logam, silika, dan bahan mentah lainnya digabungkan menjadi monitor, chip komputer, motherboard, dan komponen lain yang membentuk komputer ini. Sangat menarik untuk dicatat bahwa komputer yang Anda gunakan mengandung daya komputasi yang jauh lebih besar daripada komputer mainframe sekitar 20 tahun yang lalu. Bagaimana semua bahan mentah ini bisa diubah menjadi komputer ini? Nah, itu semua terjadi melalui proses pasar. Semua ekonomi kecuali yang paling primitif bergantung pada pasar untuk mengoordinasikan banyak keputusan produktif (ya, ini bahkan benar di bekas Uni

Soviet – diperkirakan bahwa 50% atau lebih dari semua output dijual dalam ekonomi pasar bawah tanah yang tidak resmi).

Pasar dan "tiga pertanyaan mendasar"

Semua ekonomi, apa pun bentuk organisasi ekonominya, harus membahas apa yang dikenal sebagai "tiga pertanyaan mendasar":

Apa?

Bagaimana?

Untuk siapa?

Mari kita periksa masing-masing pertanyaan ini.

Apa?

Pertanyaan pertama dapat diulang sebagai: "Barang dan jasa apa yang akan diproduksi?" Dalam ekonomi pasar, interaksi pembeli dan penjual yang mementingkan diri sendiri menentukan campuran barang dan jasa yang diproduksi. Adam Smith, menulis di *Wealth of Nations* berpendapat bahwa persaingan di antara produsen yang mementingkan diri sendiri menghasilkan hasil yang menguntungkan semua masyarakat. Dua kutipan dari Smith membantu mengilustrasikan argumen ini:

Bukan dari kebaikan tukang daging, pembuat bir, atau pembuat roti yang kita harapkan dari makan malam kita, tetapi dari perhatian mereka pada kepentingan diri mereka sendiri.

Seorang produsen, dengan mengarahkan industri itu sedemikian rupa sehingga hasil produksinya mungkin memiliki nilai terbesar, dia hanya menginginkan keuntungannya sendiri, dan dia dalam hal ini, seperti dalam banyak kasus lainnya, dipimpin oleh tangan yang tak terlihat. untuk mempromosikan akhir yang bukan bagian dari niatnya. Juga tidak selalu lebih buruk bagi masyarakat bahwa itu bukan bagian darinya. Dengan mengejar kepentingannya sendiri, dia sering mempromosikan kepentingan masyarakat lebih efektif daripada ketika dia benar-benar

bermaksud untuk mempromosikannya. Saya tidak pernah tahu banyak kebaikan yang dilakukan oleh mereka yang terpengaruh berdagang untuk kepentingan umum. Ini adalah kepura-puraan, tidak terlalu umum di kalangan pedagang, dan sangat sedikit kata yang perlu digunakan untuk mencegah mereka darinya.

Argumen ini menunjukkan bahwa persaingan di antara produsen yang mementingkan diri sendiri memaksa mereka untuk memproduksi barang yang memuaskan keinginan konsumen. Dalam mencari keuntungannya sendiri, setiap produsen berusaha untuk menghasilkan produk dengan kualitas lebih tinggi yang melayani kebutuhan konsumen dengan lebih baik. Hal ini mengarah pada kondisi kedaulatan konsumen dimana pada akhirnya konsumenlah yang menentukan bauran barang dan jasa apa yang akan diproduksi. Beberapa ekonom, seperti John Kenneth Galbraith, telah mempertanyakan argumen ini dan menyatakan bahwa aktivitas pemasaran oleh perusahaan besar dapat mempengaruhi pola permintaan konsumen secara substansial. Namun, sebagian besar ekonom berpendapat bahwa meskipun metode pemasaran dapat memengaruhi permintaan konsumen dalam jangka pendek, konsumen pada akhirnya menentukan barang dan jasa apa yang akan mereka beli. Kampanye periklanan yang efektif dapat menyebabkan fenomena seperti pet rock dan Chia Pets, tetapi mode ini umumnya berumur pendek (Suciati et al., 2022).

Jika, karena alasan apa pun, konsumen menginginkan lebih banyak barang, ini menghasilkan peningkatan permintaan. Dalam jangka pendek, peningkatan permintaan ini menghasilkan harga yang lebih tinggi, output yang meningkat, dan tingkat keuntungan yang lebih tinggi bagi perusahaan dalam industri ini. Menanggapi keuntungan ini, bagaimanapun, perusahaan baru akan memasuki pasar dalam jangka panjang, mengakibatkan peningkatan pasokan pasar. Peningkatan pasokan ini akan mendorong harga kembali turun sambil terus meningkatkan kuantitas yang dijual.

Keuntungan jangka pendek yang dihasilkan oleh peningkatan permintaan secara bertahap menghilang seiring dengan penurunan harga. Jadi, respon jangka panjang terhadap peningkatan permintaan adalah peningkatan jumlah yang diproduksi. (Perhatikan bagaimana hal ini konsisten dengan konsep kedaulatan konsumen.)

Bagaimana?

Pertanyaan mendasar kedua mungkin lebih lengkap dinyatakan sebagai: "Bagaimana output diproduksi?" Pertanyaan ini melibatkan penentuan bauran sumber daya yang akan digunakan untuk menghasilkan output. Dalam ekonomi pasar, produsen yang memaksimalkan keuntungan akan diharapkan untuk memilih campuran sumber daya yang menghasilkan tingkat biaya serendah mungkin (memegang kuantitas dan kualitas output konstan). Teknik produksi baru akan diadopsi hanya jika mereka mengurangi biaya produksi. Penjual sumber daya akan memasok mereka ke aktivitas-aktivitas di mana mereka sangat dihargai. Sekali lagi, "tangan tak terlihat dari pasar" Smith memandu sumber daya ke dalam penggunaan yang paling bernilai.

Untuk siapa?

Pertanyaan mendasar ketiga ini berkaitan dengan masalah "siapa mendapatkan apa?" Dalam ekonomi pasar, ini ditentukan oleh interaksi pembeli dan penjual di pasar output dan sumber daya. Distribusi pendapatan pada akhirnya ditentukan oleh upah, pembayaran bunga, sewa, dan laba yang ditentukan di pasar sumber daya. Mereka yang memiliki tanah, tenaga kerja, modal, dan kemampuan kewirausahaan yang lebih bernilai tinggi menerima pendapatan yang lebih tinggi. Mengingat distribusi pendapatan ini, individu membuat keputusan sendiri tentang berapa banyak barang yang akan dibeli di pasar output.

Tiga pertanyaan mendasar dan pemerintah

Tentu saja, dalam ekonomi dunia nyata mana pun, pasar tidak membuat semua keputusan ini. Di semua masyarakat, pemerintah mempengaruhi apa yang akan diproduksi, bagaimana output akan diproduksi, dan siapa yang menerima output tersebut. Pengeluaran pemerintah, peraturan kesehatan dan keselamatan, undang-undang upah minimum, undang-undang pekerja anak, peraturan lingkungan, sistem pajak, dan program kesejahteraan semuanya memiliki dampak yang signifikan terhadap jawaban masyarakat atas pertanyaan-pertanyaan ini. Kami akan memeriksa banyak dari topik ini di bab berikutnya. Untuk saat ini, kami akan fokus pada ekonomi pasar sederhana. Dalam ekonomi sederhana ini, ada tiga peserta di sektor swasta: rumah tangga, perusahaan, dan negara asing (Tulus *et al.*, 2020).

Rumah tangga

Sebuah rumah tangga, seperti yang didefinisikan oleh Badan Sensus, terdiri dari satu atau lebih individu yang berbagi tempat tinggal.

Jenis perusahaan

Ada tiga jenis perusahaan yang mungkin:

kepemilikan perseorangan,
kemitraan, dan
perusahaan.

Kepemilikan tunggal adalah perusahaan yang memiliki pemilik tunggal. Keuntungan utama dari bentuk kepemilikan ini adalah memberikan pemilik otonomi (kemampuan untuk menjadi bos bagi dirinya sendiri). Namun, ada beberapa kelemahan. Karena tingkat kegagalan yang tinggi untuk perusahaan perseorangan yang baru didirikan, sulit mendapatkan dana untuk memperoleh modal fisik. Pemilik juga menghadapi tanggung jawab yang tidak terbatas. Artinya, kekayaan pribadi mereka terancam jika bisnis gagal atau dituntut. Sementara kepemilikan perseorangan adalah

bentuk perusahaan yang paling umum, sebagian besar sangat kecil. Kepemilikan tunggal menyumbang proporsi yang sangat kecil dari total penjualan dalam perekonomian AS.

Kemitraan adalah perusahaan di mana dua atau lebih individu berbagi kepemilikan. Bentuk organisasi bisnis ini memberikan keuntungan dibandingkan kepemilikan perseorangan dengan memungkinkan pemilik mengumpulkan kekayaan, keterampilan, dan sumber daya mereka. Biaya penyatuan sumber daya ini merupakan kerugian dalam otonomi bagi pemiliknya. Seperti dalam kasus kepemilikan perseorangan, kemitraan tunduk pada tanggung jawab yang tidak terbatas.

Korporasi adalah bisnis yang ada sebagai badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Korporasi dapat membuat kontrak, memiliki properti, dan meminjam uang seolah-olah itu adalah seseorang. Pemegang saham korporasi memiliki korporasi. Namun, jika korporasi menyatakan pailit, hanya aset korporasi yang berisiko. Aset pribadi pemilik tidak berisiko (satu-satunya kerugian mereka adalah kekayaan yang digunakan untuk membeli saham). Hal ini mengakibatkan situasi di mana pemilik hanya memiliki "kewajiban terbatas". Mengimbangi keuntungan ini adalah pendapatan perusahaan dikenakan pajak berganda. Setiap keuntungan yang diterima oleh korporasi dikenakan pajak penghasilan badan sebelum dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Dividen yang diterima pemegang saham dikenakan pajak sekali lagi sebagai penghasilan pribadi bagi pemiliknya.

Seperti catatan teks, sebagian besar keluaran di AS diproduksi di perusahaan yang relatif besar. Korporasi bertanggung jawab atas komponen terbesar dari output ini.

Bisnis multinasional telah menjadi semakin penting selama beberapa dekade terakhir. Bisnis multinasional adalah perusahaan yang memiliki dan mengoperasikan fasilitas produksi di lebih dari satu negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bardhan, P., & Udry, C. 1999. *Development microeconomics*. OUP Oxford.
- Besanko, D., & Braeutigam, R. 2020. *Microeconomics*. John Wiley & Sons.
- Boyes, W., & Melvin, M. 2012. *Microeconomics*. Cengage Learning.
- Blundell, R., & Dias, M. C. 2009. Alternative approaches to evaluation in empirical microeconomics. *Journal of Human Resources*, 44(3), 565-640.
- Grahadita, M., Suharno, S., & Gunawan, D. S. 2022. Preference Patterns & Demand Analysis of Traditional Food Using Logistic Regression And Almost Ideal Demand System Approach. *Jurnal Pangan dan Agroindustri*, 10(1). <https://doi.org/10.21776/ub.jpa.2022.010.01.3>
- Koutsoyiannis, A. 1975. *Modern microeconomics*. Springer.
- Pangestu, A., Suharno, S., & Sukiman, S. 2021. Mengestimasi Surplus Konsumen Permintaan Daging Sapi Potong: Studi Empiris di Wilayah Perdesaan dan Perkotaan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 5(3), 798-804. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2021.005.03.17>
- Pindyck, R. S. 2018. *Microeconomics*.
- Riviera, K., & Fauzi, P. 2022. How Consumers Perceive Towards Traditional or Modern Markets Proven by Consumer Preference Logistic Regression. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(02), 137-152. <https://doi.org/10.22219/jep.v21i02.22986>
- Salsabila, D. T., Sambodo, H., & Suharno, S. 2023. Demand Analysis of Marine Fish In South Cilacap Sub-District: A Linear Approximate Almost Ideal Demand System (La Aids) Model Approach. *Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 195-206. <https://doi.org/10.31186/jagrisep.22.01.195-206>

- Suciati, A., Suharno, S., & Suryahani, I. 2022. Assessing The Effects of Structure and Conduct on The Performance of Fried Onion SMEs. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(01), 48-61. <https://doi.org/10.22219/jep.v20i01.19931>
- Suharno, E. 2021. A. Pengertian Harga. *Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi*, 1, 190.
- Tulus, T., Ahmad, A. A., & Suharno, S. 2020. Mengukur efektifitas program pengendalian inflasi pada hari besar keagamaan (idul fitri, natal dan tahun baru) di Kota Tegal. *INOVASI*, 16(1), 51-59. <https://doi.org/10.30872/jinv.v16i1.7013>

BAB 4

PENAWARAN (*SUPPLY*)

Oleh Yuyun Anggraini

Dalam Ilmu Ekonomi, konsep penawaran adalah salah satu elemen penting dan sangat krusial dalam membentuk sistem pasar. Pemahaman akan konsep penawaran merupakan langkah awal bagi pelaku ekonomi baik individu maupun bisnis dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam perekonomian. Bab ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman yang mendalam mengenai konsep dasar penawaran dalam ekonomi. Dalam bab ini akan dibahas mengenai definisi penawaran (*supply*) dalam ekonomi, hukum penawaran, kurva penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, dan elastisitas harga penawaran. Bab ini disusun dengan cermat untuk memudahkan pemahaman tentang konsep penawaran, baik bagi pembaca yang memiliki latar belakang ekonomi maupun non ekonomi yang tertarik untuk memperluas wawasannya tentang isu-isu ekonomi yang relevan.

4.1 Definisi Penawaran (*Supply*) dalam Ekonomi

Jika kita mendengar kata penawaran maka ada beberapa hal yang terlintas dibenak kita yaitu barang/jasa, harga dan pasar. Dalam ilmu ekonomi, penawaran atau yang biasa disebut dengan jumlah penawaran didefinisikan sebagai jumlah barang atau jasa yang siap dan mampu dijual oleh penjual (*supplier*) dipasar pada tingkat harga tertentu. Secara tidak langsung hal ini dapat menunjukkan kemampuan atau keinginan penjual dalam menyediakan barang atau jasa yang akan dibeli oleh konsumen. Ada banyak faktor yang mempengaruhi besarnya jumlah

penawaran atas barang dan jasa namun harga adalah faktor yang paling mempengaruhi besaran atau jumlah barang atau jasa yang akan ditawarkan oleh produsen. (Paul Krugman and Robin Wells, 2009) mendefinisikan jumlah penawaran (*the quantity of supply*) sebagai berikut:

"The quantity supply is the actual amount of a good or service producers are willing to sell at some specific price."

Berdasarkan definisi diatas bahwa jumlah penawaran atau kuantitas penawaran menurut (Paul Krugman and Robin Wells, 2009) yaitu jumlah aktual dari barang atau jasa yang bersedia dijual oleh produsen/*seller/supplier* pada harga tertentu.

4.2 Hukum Penawaran

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa penawaran atau jumlah penawaran adalah jumlah atau kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan di pasar pada tingkat harga tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran atas barang dan jasa di pasar, namun harga adalah faktor utama yang mempengaruhi besaran kuantitas barang yang ditawarkan di pasar. Sebagai contoh penjual pisang di pasar, ketika harga pisang naik di pasaran maka penjual pisang akan menyetok lebih banyak pisang dan menaikkan jumlah pisang yang akan ditawarkan ke konsumen. Begitupula sebaliknya jika harga pisang mengalami penurunan maka kondisi akan menjadi kurang menguntungkan bagi penjual pisang sehingga mereka akan mengurangi stok pisang yang mengakibatkan jumlah pisang yang akan ditawarkan ke konsumen akan menurun.

Berdasarkan fenomena diatas, maka hubungan antara harga dan jumlah penawaran barang atau jasa disebut sebagai **Hukum Penawaran (*Law of Supply*)**. Hubungan antara harga dan jumlah penawaran barang atau jasa berhubungan positif yang

artinya ketika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat dan begitupula sebaliknya jika harga barang turun maka jumlah barang yang ditawarkan akan menurun dengan asumsi bahwa faktor selain harga dianggap konstan atau tetap yang biasa disebut dengan istilah *ceteris paribus*.

4.3 Kurva Penawaran

Kurva ataupun grafik biasa digunakan pada ilmu ekonomi guna memudahkan kita dalam memahami sebuah teori ekonomi. Adapun kurva penawaran adalah kurva atau grafik yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Kurva penawaran menunjukkan bagaimana jumlah barang yang ditawarkan atau yang dijual berubah seiring dengan perubahan yang terjadi pada harga. Kita dapat menulis hubungan tersebut dalam sebuah persamaan sebagai berikut: (Pindyck and Rubinfeld, 2013)

$$Q_s = Q_s(P)$$

Dimana:

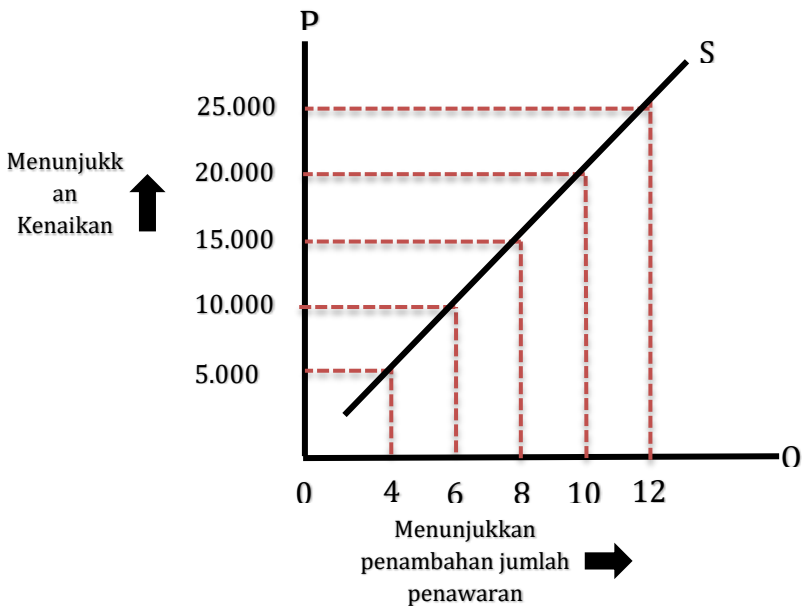
Q_s = Jumlah penawaran

P = Harga

Sebelum membuat sebuah grafik atau kurva penawaran, kita harus menyajikan daftar penawaran. Dimana daftar penawaran adalah (*supply schedule*) tabel yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. (N. Gregory Mankiw, 2017) Tabel ini akan menunjukkan jumlah pisang yang ditawarkan berdasarkan perubahan harga pisang di pasar. Berikut adalah contoh daftar penawaran dan kurva penawaran pedagang pisang di pasar:

Tabel 4.1. Daftar Penawaran pisang

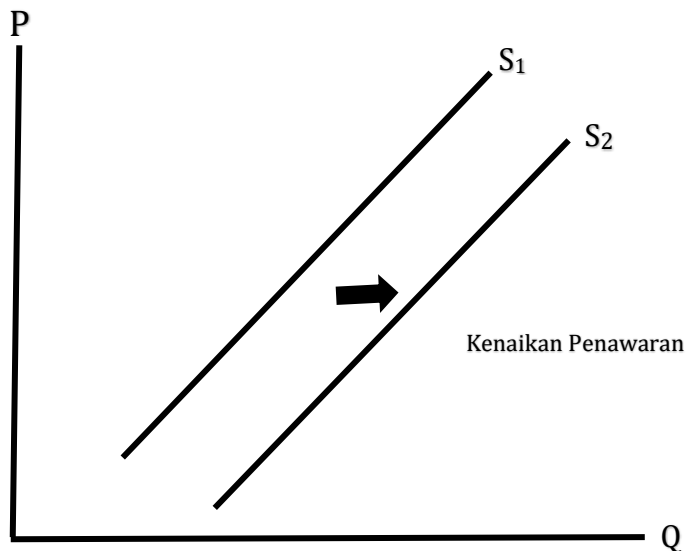
Harga (Rp)	Jumlah Penawaran Pisang (Kg)
Rp. 0,-	0
Rp. 5.000,-	4
Rp. 10.000,-	6
Rp. 15.000,-	8
Rp. 20.000,-	10
Rp. 25.000,-	12



Gambar 4.1. Kurva Penawaran

Pada grafik diatas ditunjukkan bahwa P (*price*) adalah harga, Q (*Quantity*) adalah jumlah penawaran, dan S (*Supply*) adalah kurva penawaran. Ketika terjadi kenaikan harga pisang maka penawaran akan pisang semakin meningkat begitupula sebaliknya jika terjadi penurunan harga pisang maka penawaran akan pisang semakin sedikit. Grafik yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah penawaran disebut dengan Kurva Penawaran atau (*Supply Curve*). (Mankiw, Quah and Wilson, 2014)

Kurva penawaran memiliki *slope* positif atau miring keatas yang bermakna bahwa semakin tinggi harga maka semakin banyak produsen atau penjual yang mampu dan bersedia untuk menjual dan memproduksi barang atau jasa.

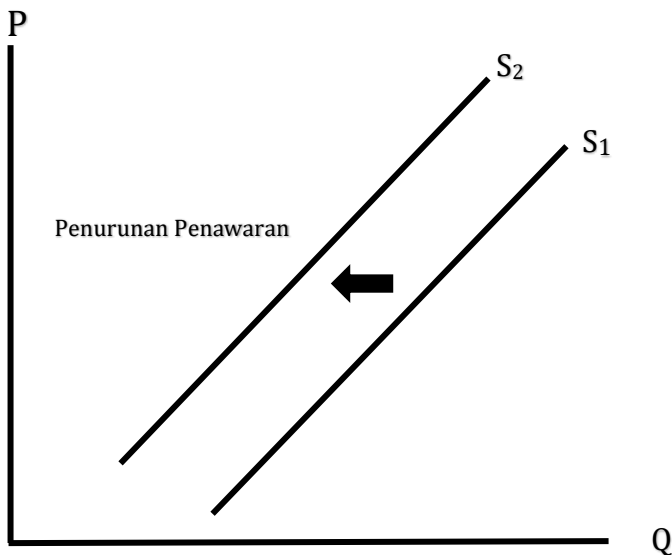


Gambar 4.2. Peningkatan Penawaran

Grafik diatas menunjukkan pergeseran pada kurva penawaran. Ketika terjadi perubahan dalam produksi akibat suatu faktor tertentu yang berdampak pada penambahan produksi atau kenaikan dalam jumlah penawaran maka kurva penawaran akan

bergeser ke kanan. Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa kurva penawaran bergeser dari S_1 ke S_2 .

Sebagai contoh pergeseran kurva akibat turunnya harga bahan baku sehingga menurunkan biaya produksi. Ada dua kemungkinan yang terjadi, jika biaya produksi turun maka produsen dapat memproduksi jumlah yang sama pada tingkat harga yang lebih rendah atau produsen akan memproduksi lebih banyak dengan tingkat harga yang sama. Hal inilah yang dapat menyebabkan pergeseran kurva penawaran ke kanan atau dari S_1 ke S_2 .

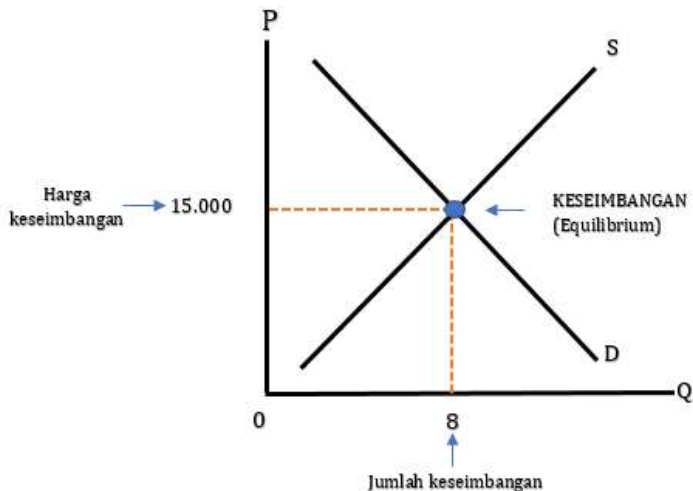


Gambar 4.3. Penurunan Penawaran

Grafik diatas menunjukkan pergeseran padakurva penawaran. Ketika terjadi perubahan dalam produksi akibat suatu faktor tertentu yang berdampak pada pengurangan produksi atau penurunan dalam jumlah penawaran maka kurva penawaran akan bergeser ke kiri. Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa kurva penawaran bergeser dari S_1 ke S_2 .

Setelah membahas mengenai pergeseran kurva penawaran dan pada bab sebelumnya juga telah dibahas mengenai konsep permintaan dalam ekonomi, selanjutnya kita akan membahas mengenai keseimbangan pasar (*market equilibrium*). Ketika kita membahas keseimbangan pasar, maka kita akan membahas kombinasi atau gabungan antara kurva penawaran dan juga kurva permintaan sehingga kita dapat menentukan seberapa besar jumlah barang yang akan ditawarkan serta pada tingkat harga berapa barang tersebut akan ditawarkan di pasar.

Keseimbangan (*equilibrium*) pasar adalah suatu kondisi dimana jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta pada satu titik harga tertentu. (Case and Fair, 2007) atau dengan kata lain pada harga keseimbangan, jumlah barang yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen sama besarnya dengan jumlah barang yang dijual oleh produsen. Berikut adalah kurva keseimbangan pasar:



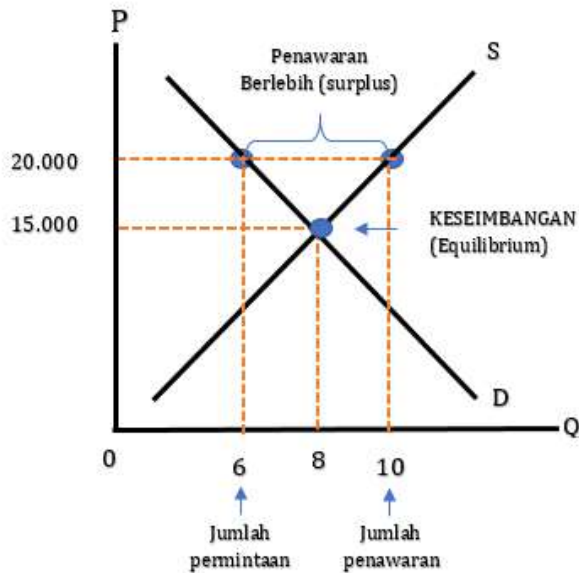
Gambar 4.4. Kurva Keseimbangan Pasar

Pada kurva diatas ditunjukkan bahwa kurva penawaran dan kurva permintaan saling berpotongan pada satu titik, titik

inilah yang disebut dengan titik keseimbangan. Selain titik keseimbangan pada kurva diatas juga ditunjukkan harga keseimbangan. Menurut (Mankiw, Quah and Wilson, 2014) bahwa harga keseimbangan (*equilibrium price*) adalah harga yang menyeimbangkan jumlah penawaran dan jumlah permintaan. Sedangkan jumlah keseimbangan (*equilibrium quantity*) adalah jumlah penawaran dan jumlah permintaan pada harga keseimbangan.

Selain kondisi keseimbangan pasar, ada beberapa kondisi lain yang memungkinkan juga terjadi di pasar yaitu ketidakseimbangan pasar yaitu kondisi ketika terjadi permintaan berlebih atau (*excess demand*) dan juga kondisi ketika terjadi penawaran berlebih (*excess supply*). Permintaan berlebih (*excess demand*) adalah kondisi ketika jumlah permintaan lebih besar daripada jumlah penawaran pada titik harga tertentu. Sedangkan penawaran berlebih (*excess supply*) adalah kondisi dimana jumlah penawaran lebih besar daripada jumlah permintaan pada titik harga tertentu.

Dikarenakan bab ini membahas mengenai konsep penawaran jadi kita akan membahas lebih dalam mengenai penawaran berlebih atau *excess supply*. Sebagai contoh terjadi panen pisang besar-besaran sehingga stok pisang melonjak tinggi dan penawaran pisang di pasar pun melimpah, namun permintaan akan pisang cenderung stabil dan tidak mengalami perubahan, seiring dengan perubahan penawaran pisang sehingga terjadilah penawaran yang berlebih. Ketika hal ini terjadi para penjual pisang akan menurunkan harga pisang guna meningkatkan permintaan pisang dan mengurangi penawaran pisang. Harga pisang akan terus turun hingga mencapai titik keseimbangan. Berikut adalah contoh kurva dalam kondisi penawaran berlebih:



Gambar 4.5. Kurva Penawaran Berlebih

4.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penawaran

Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah penawaran atas barang atau jasa diantaranya sebagai berikut: (Goolsbee, Levitt and Syverson, 2013)

1. Harga Barang atau Jasa

Seperti halnya pada konsep permintaan bahwa harga juga merupakan hal yang sangat penting dan krusial dalam pengambilan keputusan akan jumlah barang atau jasa yang akan ditawarkan. Sebagai contoh di pasar atau di retail modern harga sekilo pisang dijual dengan harga Rp.5.000,-/kilo, jika terjadi kenaikan harga pisang menjadi Rp. 10.000,-/kilo maka penawaran atau supply pisang akan meningkat.

2. Harga Bahan Baku

Harga bahan baku adalah salah satu elemen utama dalam penentuan jumlah barang atau jasa yang akan diproduksi. Perubahan harga bahan baku dapat mempengaruhi besaran jumlah barang atau jasa yang akan ditawarkan oleh produsen. Jika harga bahan baku naik maka biaya produksi akan meningkat sehingga produsen harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk mendapatkan bahan baku yang sama. Begitupula sebaliknya jika harga bahan baku turun maka biaya produksi akan lebih rendah, sehingga produsen dapat memanfaatkan momen tersebut dengan menurunkan harga barang atau jasa yang ditawarkan sehingga konsumen tertarik untuk membeli lebih banyak yang akan mengakibatkan penawaran semakin meningkat. Selain menekan harga produsen juga dapat memproduksi barang lebih banyak dibanding sebelumnya.

3. Harga Produk Lain

Perubahan harga pada suatu produk dapat memberikan respon perubahan harga pada produk yang memiliki keterkaitan pada produk tersebut. Sebagai contoh seorang petani memiliki lahan untuk berkebun yang biasa ditanami pohon pisang ataupun singkong. Ketika harga pisang naik maka petani cenderung beralih menanam pohon pisang dibanding disingkong sehingga produksi pisang lebih banyak dan penawaran pisang pun semakin meningkat. Oleh karena itu, secara tidak langsung kenaikan harga pisang juga mempengaruhi penawaran akan singkong. Penawaran singkong akan cenderung menurun. Hal inilah yang menyebabkan harga produk lain atau harga produk yang memiliki keterkaitan mempengaruhi jumlah barang yang akan ditawarkan.

4. Jumlah Produsen atau Penjual

Jumlah produsen atau penjual juga merupakan salah satu faktor penentu besaran jumlah *supply* atau penawaran yang ada di pasar. Mengapa demikian karena semakin banyak produsen atau penjual maka penawaran atas barang dan jasa yang tersedia akan semakin banyak.

5. Teknologi

Penerapan teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam produksi barang maupun jasa. Penggunaan teknologi juga memberikan dampak positif dalam penambahan jumlah produksi. Penggunaan teknologi dapat mengurangi jumlah tenaga kerja yang digunakan yang mana dapat menurunkan biaya produksi, sehingga produksi semakin efisien. Efisiensi produksi berdampak pada peningkatan produksi sehingga jumlah penawaran barang dan jasa di pasar akan semakin meningkat.

6. Ekspektasi atau Perkiraan

Ekspektasi atau perkiraan produsen akan kondisi masa depan akan sangat berpengaruh dengan jumlah penawaran barang atau jasa yang akan dijual di pasar saat ini. Sebagai contoh: para produsen pisang mendapat kabar bahwa akan ada *acara* lomba pengolahan pangan lokal dengan bahan dasar pisang beberapa hari kedepan. Karena berita tersebut maka ekspektasi produsen pisang akan lonjakan permintaan pisang sangatlah tinggi, maka produsen pisang akan menyimpan sebagian jualan mereka untuk dipasarkan beberapa hari ke depan, sehingga penawaran pisang di pasar saat ini akan menurun.

4.5 Elastisitas Harga Penawaran

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa harga sangat berpengaruh terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Semakin

tinggi harga suatu barang atau jasa maka penawaran akan barang tersebut juga akan semakin tinggi. Elastisitas digunakan untuk mengukur sensitifitas perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat perubahan harga. (Muniarty *et al.*, 2022)

Elastisitas Harga Penawaran digunakan untuk mengukur seberapa besar perubahan jumlah penawaran akibat perubahan harga. Jika perubahan jumlah penawaran cukup besar terhadap perubahan harga maka penawaran dapat dikatakan **elastis**, namun jika perubahan jumlah penawaran tidak terlalu besar terhadap perubahan harga maka penawaran dikatakan **inelastis**. Adapun cara menghitung elastisitas harga penawaran dapat menggunakan rumus berikut:

$$\text{Elastisitas Harga Penawaran} = \frac{\% \text{ perubahan jumlah penawaran}}{\% \text{ perubahan harga}}$$

Sumber: Sudarmanto et al. 2021 dalam (Muniarty *et al.*, 2022)

Elastisitas harga penawaran dihitung berdasarkan persentase perubahan jumlah penawaran barang atau jasa yang dibagi dengan persentase perubahan harga. Sebagai contoh jika harga pisang per kg naik dari harga 5.000 menjadi 10.000 dan meningkatkan jumlah penawaran dari 4 sisir menjadi 6 sisir maka kita dapat menghitung persentase perubahan jumlah penawaran dan persentase perubahan harga menggunakan metode titik tengah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \% \text{ perubahan harga pisang} &= \frac{10.000 - 5.000}{(5.000 + 10.000)/2} \times 100\% \\ &= \frac{5.000}{7.500} \times 100\% = 67\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\% \text{ perubahan jumlah penawaran pisang} &= \frac{6 - 4}{(4 + 6)/2} \times 100\% \\ &= \frac{2}{5} \times 100\% = 40\%\end{aligned}$$

Setelah menghitung persentase perubahan harga pisang dan persentase perubahan jumlah penawaran pisang, selanjutnya kita akan menghitung elastisitas harga penawaran berdasarkan rumus yang telah dipaparkan diatas.

$$\text{Elastisitas Harga Penawaran Pisang} = \frac{40\%}{67\%} = 0,6$$

Elastisitas harga penawaran pisang yaitu sebesar 0,6 yang mana penawaran pisang masuk dalam kategori inelastis. Mengapa dikatakan inelastis karena jika nilai elastisitas lebih kecil dari satu ($E_p < 1$) atau jika persentase perubahan jumlah penawaran lebih kecil dibandingkan dengan persentase perubahan harga ($\Delta Q < \Delta P$) maka penawaran masuk dalam kategori inelastis. Kategori barang yang biasa termasuk dalam kategori inelastis adalah kebutuhan bahan pokok sedangkan yang biasa termasuk dalam kategori elastis adalah barang-barang mewah.

DAFTAR PUSTAKA

- Case, K.E. and Fair, R.C. 2007. *Prinsip-Prinsip Ekonomi*. 8th edn. Jakarta: Erlangga.
- Goolsbee, A., Levitt, S.D. and Syverson, C. 2013. *Microeconomics*. New York, NY: Worth Publishers.
- Mankiw, N.G., Quah, E. and Wilson, P. 2014. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Muniarty, P. *et al.* 2022. *Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Padang, Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi.
- N. Gregory Mankiw. 2017. *Principles of Microeconomics*. Boston: Cengage Learning.
- Paul Krugman and Robin Wells. 2009. *Microeconomics*. United States of Amerika: Worth Publishers.
- Pindyck, R.S. and Rubinfeld, D.L. 2013. *Microeconomics*. 8th ed. Boston: Pearson (The Pearson series in economics).

BAB 5

ANALISIS BIAYA DAN PENDAPATAN

Oleh Hendra Poltak

5.1 Pendahuluan

Analisis biaya dan pendapatan merupakan proses penting dalam manajemen keuangan suatu bisnis atau proyek. Tujuan dari analisis biaya dan pendapatan adalah untuk memahami dan mengevaluasi secara menyeluruh semua aspek finansial yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Beberapa tujuan utama dari analisis biaya dan pendapatan antara lain:

Pengambilan Keputusan: Analisis biaya dan pendapatan membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat terkait harga jual produk atau jasa, alokasi sumber daya, dan strategi bisnis lainnya. Dengan memahami biaya dan pendapatan yang terlibat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan profitabilitas.

Pengendalian Biaya: Dengan menganalisis biaya, perusahaan dapat mengidentifikasi bagian-bagian bisnis yang mungkin memerlukan pengendalian lebih lanjut untuk mengurangi biaya produksi dan operasional.

5.2 Konsep Dasar Analisa Biaya dan Pendapatan

Definisi Biaya dan Pendapatan

Biaya adalah segala pengeluaran atau pengorbanan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Witjaksono, 2006). Dunia, Abdullah and Sasongko (2012) mengartikan biaya sebagai pengeluaran untuk mendapatkan barang dan jasa. Mulyadi (2009) berpendapat bahwa biaya melibatkan tindakan atau keputusan yang mempengaruhi alokasi

sumber daya perusahaan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan baik uang, tenaga kerja, sumber daya lain untuk menghasilkan barang atau jasa maupun tujuan.

Pendapatan, dalam perspektif berbagai ahli ekonomi, dapat diartikan sebagai seluruh penerimaan yang diterima oleh individu atau entitas dalam suatu periode tertentu. Menurut (Sochib, 2018), pendapatan mencakup segala bentuk penerimaan dari penyerahan barang dan jasa oleh unit usaha selama periode tertentu. Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima atas prestasi kerja selama periode tertentu (Sukirno, 2002). Pandangan ahli diatas menyatakan pendapatan dapat diperoleh dari berbagai sumber usaha selama periode tertentu. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, semakin besar kemampuan suatu entitas untuk mendanai semua biaya dan aktivitas yang akan dilaksanakan (Samuelson, 2004).

5.3 Analisis Biaya

Biaya produksi dapat dikaitkan dengan analisa biaya, perencanaan anggaran, perhitungan harga jual, dan pengambilan keputusan terkait produksi dan operasi bisnis secara keseluruhan. Bustami and Nurlela (2009) biaya produksi mencakup pengeluaran dalam proses pembuatan, termasuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya pabrik. Konsep ini terkait erat dengan produk dan mempengaruhi nilai persediaan.

Selain itu, analisis biaya produksi juga berperan penting dalam menentukan strategi bisnis yang efektif. Dengan memahami komponen biaya produksi, perusahaan dapat mengidentifikasi area-area di mana efisiensi dapat ditingkatkan, sumber daya dapat dialokasikan dengan lebih baik, dan penghematan biaya dapat dicapai. Pengelolaan biaya produksi yang baik juga memungkinkan perusahaan untuk bersaing secara lebih efektif di pasar dengan

menawarkan harga jual yang kompetitif tanpa mengorbankan profitabilitas.

Dalam konteks perencanaan anggaran, pemahaman yang mendalam tentang biaya produksi sangatlah penting. Perusahaan perlu mengalokasikan dana dengan bijak untuk memastikan keberlanjutan operasional dan pertumbuhan bisnis. Analisis biaya produksi membantu dalam menentukan seberapa besar alokasi anggaran yang diperlukan untuk berbagai aspek produksi, seperti bahan baku, tenaga kerja, peralatan, dan biaya overhead pabrik. Dengan memiliki gambaran yang jelas tentang biaya produksi yang diharapkan, perusahaan dapat menghindari kekurangan dana yang dapat menghambat proses produksi dan mengganggu suplai produk.

Biaya Produksi secara umum dihitung dengan rumus :

Biaya Produksi = Biaya Bahan Baku + Biaya Tenaga Kerja
+ Langsung + Biaya Overhead Pabrik

Atau

Total Cost= Fix Cost+Variabel Cost

Biaya Bahan Baku merupakan biaya yang digunakan dalam penyediaan bahan baku yang akan dipakai untuk membuat produk dalam satuan uang (Nainggolan and Patimah, 2020).

Contoh : pakan ikan, benih, obat-obatan dan vitamin dll

Biaya Tenaga Kerja Langsung merupakan jumlah uang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau entitas bisnis untuk membayar upah dan tunjangan bagi pekerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi atau pembuatan produk akhir (Prima and Kristanto, 2013).

Contoh : gaji pemanen ikan, gaji pengolah hasil perikanan dll

Biaya Overhead Pabrik merupakan Biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung (Mulyadi *et al.*, 2015; Sodikin, 2015)

Contoh : asuransi, pemeliharaan dan perbaikan, dan biaya administrasi dll

5.4 Analisis Pendapatan

Analisis pendapatan merupakan perhitungan selisih antara total penerimaan dan semua pengeluaran yang terjadi selama proses produksi (Soekartawi, 2002). Analisa pendapatan dihitung dengan rumus :

TR = $P \times Q$

TR = Total Revenue

P = Harga per unit barang/jasa

Q = Jumlah unit/barang yang terjual

5.5 Sumber-Sumber Pendapatan

Sumber-sumber pendapatan merupakan saluran di mana individu, unit usaha, organisasi, maupun pemerintah memperoleh uang. Perolehan uang ini dilakukan melalui aktivitas utama maupun aktivitas pendukung. Sumber-sumber pendapatan dalam bidang perikanan antara lain :

1. **Penjualan hasil tangkapan**, hasil tangkapan berbagai jenis ikan, kerang, udang dan produk laut lainnya;
2. **Akuakultur**, penjualan hasil panen kegiatan pemeliharaan ikan, kerang, atau biota laut lainnya;
3. **Pengolahan dan Pengemasan**, pendapatan dari penjualan hasil pengolahan dan pemberian nilai tambah produk perikanan;
4. **Pemasaran dan distribusi**, pendapatan berasal dari hasil pemasaran dan distribusi produk perikanan;

5.6 Penentuan Harga Jual

Penentuan harga jual suatu produk harus mempertimbangkan berbagai elemen, mulai dari biaya produksi, kualitas produk, permintaan pasar, hingga regulasi dan keberlanjutan. Pendekatan umum dalam menetapkan harga jual adalah dengan menambahkan perkiraan keuntungan, atau markup, ke harga pokok produk. Markup adalah perbedaan antara harga jual dan harga pokok, dan biasanya diwujudkan sebagai persentase tertentu dari harga pokok. Proses ini, di mana persentase markup yang telah ditetapkan sebelumnya ditambahkan ke harga pokok untuk menentukan harga jual, dikenal dengan nama *cost-plus pricing* (Krismiaji and Anny, 2011).

Biaya produksi dalam perikanan melibatkan berbagai aspek seperti biaya penangkapan, biaya pakan, biaya tenaga kerja, peralatan, dan pengelolaan sumber daya. Fluktuasi dalam biaya ini, terutama dalam harga bahan baku seperti pakan, dapat berdampak signifikan pada harga jual. Selain itu, kualitas produk, apakah itu segar, beku, atau diolah, juga berperan dalam menentukan harga. Produk dengan sertifikasi keberlanjutan atau organik mungkin menarik harga premium karena meningkatnya kesadaran konsumen terhadap isu-isu lingkungan.

Faktor lain dalam penentuan harga jual produk perikanan adalah permintaan pasar dan persaingan. Musim, cuaca, dan perubahan regulasi dapat mempengaruhi ketersediaan produk, yang pada gilirannya mempengaruhi harga. Selain itu, dinamika persaingan dengan produk perikanan lain atau bahkan alternatif berbasis tanaman dapat mempengaruhi strategi penetapan harga. Terakhir, kebijakan pemerintah, peraturan perdagangan internasional, dan standar kualitas juga memainkan peran dalam menentukan harga jual.

5.7 Volume Penjualan

Volume penjualan mengacu pada jumlah unit produk yang terjual dalam periode tertentu. Ini adalah indikator kinerja bisnis yang penting, menunjukkan seberapa populernya produk atau layanan di pasar. Di sisi lain, penentuan harga jual adalah proses menetapkan harga untuk produk atau layanan tersebut. Harga ini harus cukup tinggi untuk menutupi biaya dan menghasilkan keuntungan, tetapi juga cukup rendah untuk menarik pelanggan.

Hubungan antara volume penjualan dan penentuan harga jual bisa kompleks. Jika harga terlalu tinggi, beberapa pelanggan mungkin merasa terlalu mahal, dan volume penjualan bisa turun. Jika harga terlalu rendah, meskipun volume penjualan mungkin tinggi, keuntungan mungkin minimal atau bahkan bisa merugi. Oleh karena itu, menemukan keseimbangan yang tepat antara harga dan volume penjualan adalah kunci keberhasilan bisnis.

Dalam praktiknya, perusahaan sering mengadakan promosi harga atau diskon untuk meningkatkan volume penjualan dalam jangka pendek. Mereka juga mungkin menyesuaikan harga berdasarkan analisis persaingan, permintaan pelanggan, dan tren pasar untuk mencapai volume penjualan yang optimal dalam jangka panjang. Dalam semua strategi ini, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana volume penjualan dan harga saling mempengaruhi dapat membantu perusahaan membuat keputusan yang cerdas, mendukung pertumbuhan, dan mencapai tujuan bisnis mereka.

5.8 Analisis Break Even

Analisa break-even adalah teknik yang digunakan dalam keuangan dan manajemen bisnis untuk menentukan titik di mana pendapatan total sama dengan biaya total. Dengan kata lain, titik break-even adalah titik di mana perusahaan tidak mengalami keuntungan atau kerugian. Analisis ini sangat penting dalam

perencanaan bisnis, pengambilan keputusan, dan pengelolaan risiko.

Analisa break-even membantu perusahaan dalam berbagai cara:

Perencanaan Harga: Perusahaan dapat menggunakan analisis ini untuk menentukan harga yang harus dikenakan untuk mencapai tingkat penjualan yang diinginkan.

Evaluasi Risiko: Dengan mengetahui berapa banyak produk yang harus dijual untuk mencapai titik impas, perusahaan dapat menilai risiko terkait dengan memasuki pasar baru atau meluncurkan produk baru.

Pengambilan Keputusan Strategis: Analisis break-even dapat digunakan untuk menilai kelayakan proyek atau strategi pemasaran, dan membantu dalam pengambilan keputusan investasi.

Untuk melakukan analisa break-even, beberapa faktor harus dipertimbangkan yaitu :

Biaya Tetap adalah jenis biaya yang jumlahnya tidak berubah meskipun produksi atau aktivitas perusahaan berubah.

Contoh Biaya Tetap :

1. Biaya sewa, dapat dikategorikan tetap apabila apabila perusahaan membayar nilai yang sama setiap periode tanpa mempertimbangkan banyak produk yang diproduksi maupun dijual.
2. Biaya Karyawan Tetap, gaji yang dibayarkan kepada karyawan administrasi maupun manajemen
3. Asuransi, pembayaran premi untuk melindungi aset
4. Biaya Penyusutan

Biaya Variabel adalah jenis biaya yang berubah sejalan 2. dengan perubahan volume produksi atau aktivitas bisnis, naik jika aktivitas meningkat dan turun jika aktivitas menurun.

1. Biaya Bahan Bakar: Biaya bahan untuk menangkap atau menumbuhkan ikan merupakan biaya variabel karena akan bertambah seiring dengan peningkatan produksi.
2. Biaya Peralatan Penangkapan Ikan: Biaya peralatan yang digunakan untuk menangkap ikan, seperti umpan atau jaring, juga bisa dianggap sebagai biaya variabel.
3. Biaya Tenaga Kerja: Jika Anda membayar kru tambahan atau membayar kru berdasarkan jumlah tangkapan ikan, biaya tenaga kerja ini juga akan bervariasi sesuai dengan aktivitas penangkapan.
4. Biaya Pengangkutan: Biaya pengiriman atau transportasi ikan dari tempat penangkapan ke tempat pengolahan atau pemasaran juga bisa bervariasi tergantung pada jumlah ikan yang diangkut.

Biaya Bahan Bakar: Biaya bahan bakar untuk kapal penangkapan ikan atau alat transportasi lainnya dapat berubah seiring dengan perubahan jarak atau jumlah tangkapan.

Dengan menggabungkan elemen-elemen ini, rumus sederhana untuk menghitung titik break-even adalah:

$$\mathbf{BEP(kg)} = \frac{FC}{P - VC} = \frac{Rp. 20.000.000}{Rp. 50.000 - Rp. 30.000} = 1.000 \text{ kg}$$

72

$$\frac{Rp. 20.000.000}{1 - 0,6} = \frac{Rp. 20.000.000}{0,4}$$

$$= Rp. 50.000.000$$

Pembuktian :

$$BEP = \text{Unit BEP} \times \text{Harga Jual per unit}$$

$$= 1.000 \text{ kg} \times Rp. 50.000$$

$$= Rp. 50.000.000$$

$$\text{Laba} = TR - TC$$

$$= (1.000 \text{ kg} \times Rp. 50.000) - ((1.000 \text{ kg} \times 30.000) + Rp. 20.000.000)$$

$$= Rp. 50.000.000 - (30.000.000 + 20.000.000)$$

$$= Rp. 0 \text{ (BEP karena } TR = TC)$$

5.9 Analisis Margin Laba

Margin adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara berapa banyak keuntungan yang diperoleh dari bisnis dibandingkan dengan total pendapatannya. (Hakim, 2018) istilah margin tidak berbeda dengan profil. Margin atau profit dapat menentukan eksistensi sebuah usaha.

5.10 Margin Laba Kotor

Margin laba kotor merupakan perbandingan yang digunakan untuk mengukur persentase laba kotor dari penjualan bersih. Formula ini menghitung laba kotor dengan membagi laba kotor dengan penjualan bersih. Laba kotor sendiri dihitung sebagai selisih antara penjualan bersih dan harga pokok penjualan. Penjualan bersih dalam konteks ini merujuk pada penjualan total (baik tunai maupun kredit) setelah dikurangi retur, penyesuaian harga jual, dan potongan penjualan (Hery, 2015). Semakin besar margin laba kotor suatu perusahaan, semakin menguntungkan, karena hal tersebut menunjukkan bahwa biaya produksi yang ditanggung perusahaan relatif rendah (Sangeroki, 2013).

Margin Laba Kotor dihitung dengan rumus :

$$\text{Margin Laba Kotor} = \frac{\text{Pendapatan Bersih} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Pendapatan Bersih}} \times 100$$

Contoh : Perusahaan menghasilkan Rp. 500.000.000 yang berasal dari biaya produksi sebesar Rp. 400.000.000. Hitunglah Margin Laba Kotor.

$$\begin{aligned} \text{Margin Laba Kotor} &= \frac{\text{Rp. 500.00.000} - \text{Rp. 400.000.000}}{\text{Rp. 500.000.000}} \\ \text{Margin Laba Kotor} &= \frac{\text{Rp. 100.00.000}}{\text{Rp. 500.000.000}} = \frac{1}{5} \\ \text{Margin Laba Kotor} &= 20\% \end{aligned}$$

Berdasarkan contoh diatas, berarti 80% dari keuntungan perusahaan digunakan untuk memproduksi produk yang diproduksi perusahaan, dan 20% untuk biaya lain lain dan laba bersih perusahaan, atau margin laba kotor adalah 20% yang menunjukkan bahwa setiap Rp. 100 dari penjualan akan menghasilkan laba kotor sebesar Rp. 20 setelah mengurangi biaya langsung produksi.

5.11 Margin Laba Bersih

Margin laba bersih adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar keuntungan bersih yang diperoleh oleh perusahaan (Lukman, 2009).

Margin Laba Bersih dihitung dengan rumus :

$$\text{Margin Laba Bersih} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan Bersih}} \times 100$$

Contoh : Perusahaan menghasilkan Rp. 500.000.000 yang berasal dari penjualan produk. Setelah mengurangi biaya produksi, operasional, pajak elemen biaya lainnya, perusahaan mencatat laba bersih sebesar Rp. 80.000.000. Hitunglah Margin Laba Bersih.

$$\text{Margin Bersih} = \frac{\text{Rp. 80.000.000}}{\text{Rp. 500.000.000}} \times 100$$

$$\text{Margin Bersih} = 16\%$$

Berdasarkan contoh diatas berarti, margin laba bersih dari Perusahaan adalah 16%. Ini berarti bahwa 16% dari pendapatan bersih perusahaan berasal dari laba bersih setelah mengurangi semua biaya dan pengurangan lainnya.

5.12 Margin Laba Operasional

Margin laba operasional adalah cara untuk mengukur seberapa bagus perusahaan mengatur bisnisnya. Ini dihitung dengan membandingkan berapa banyak uang yang dihasilkan dari operasi perusahaan dengan total penjualan. Jika angka ini naik, itu artinya perusahaan semakin pintar dalam mengelola bisnisnya dan bisa berarti pendapatan perusahaan juga akan naik (Syamsuddin, 2010).

Margin Laba Operasional dihitung dengan rumus (Hery, 2015) :

$$\text{Margin Laba Operasional} = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Pendapatan Bersih}} \times 100$$

Contoh : Perusahaan memiliki pendapatan operasional sebesar Rp. 150.000.000 dan laba operasional sebesar Rp.45.000.000 Hitunglah Margin Laba Operasional dari perusahaan

$$\text{Margin Laba Operasional} = \frac{\text{Rp. 45.000.000}}{\text{Rp. 150.000.000}} \times 100$$

$$\text{Margin Laba Operasional} = \frac{\text{Rp. 45.000.000}}{\text{Rp. 150.000.000}} \times 100$$

$$\text{Margin Laba Operasional} = 30\%$$

Jadi, persentase Margin Laba Operasional dari perusahaan tersebut adalah 30%. Ini artinya dari seluruh pendapatan operasional perusahaan, 30% nya merupakan keuntungan yang berhasil diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Bustami, B. and Nurlela. 2009. *Akuntansi Biaya Teori dan Aplikasi, Akuntansi biaya teori dan aplikasi*.
- Dunia, F., Abdullah, W. and Sasongko, C. 2012. *Akuntansi biaya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hakim, L. 2018. *Strategi Keuangan Perusahaan*. Elex media komputindo.
- Hery, S.E. 2015. *Analisis laporan keuangan*. Media Pressindo.
- Krismiaji, Y. and Anny, A. 2011. *Akuntansi Manajemen*. 2nd edn. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Lukman, S. 2009. 'Manajemen Keuangan Perusahaan: Konsep Aplikasi Dalam Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan', *Edisi baru, Jakarta: garfindo persada* [Preprint].
- Mulyadi. 2009. *Akuntansi Biaya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi, A.B. et al. 2015. 'Universitas Gajah Mada', *Cetakan ketiga belas, Agustus* [Preprint].
- Nainggolan, H. and Patimah, S. 2020. 'Pengaruh Biaya Bahan Baku, Biaya Tenaga Kerja dan Biaya Overhead Pabrik Terhadap Omset Penjualan Pabrik Roti Gembung Kota Raja Km. 3 Balikpapan Kalimantan Timur', *Methosika: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist*, 4(1), pp. 19–33.
- Prima, S.D. and Kristanto, S.B. 2013. 'Akuntansi Biaya', *Tarumanegara. InMedia* [Preprint].
- Samuelson, P.A. 2004. *Makroeconomi, Media Global Edukasi*. Jakarta.
- Sangeroki, S. 2013. 'Ukuran Perusahaan Dan Margin Laba Kotor Terhadap Pemilihan Metode Penilaian Persediaan Di Perusahaan Manufaktur', *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Sochib. 2018. *Buku Ajar Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Deepublish.

- Sodikin, S.S. 2015. 'Akuntansi manajemen sebuah pengantar',
Yogyakarta: UPP STIM YKPN [Preprint].
- Soekartawi, S. 2002. *Analisis Usahatani*. Jakarta: UI Press), Jakarta.
- Sukirno, S. 2002. *Pengantar Teori Makroekonomi Pers. Ke-2*.
Jakarta.: Rajawali Pers.
- Syamsuddin. 2010. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada.
- Witjaksono, A. 2006. 'Akuntansi biaya'.

BAB 6

PEMASARAN PERIKANAN

Oleh Fajriah

6.1 Pendahuluan

Industri perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peran vital dalam menyediakan pangan bagi masyarakat global. Perikanan menyumbangkan sumber protein penting bagi lebih dari tiga miliar orang di seluruh dunia, sehingga menjadi sumber penghidupan bagi jutaan nelayan dan pekerja di sektor perikanan. Namun, keberlanjutan dan pertumbuhan industri perikanan tidak dapat tercapai secara otomatis. Pemasaran yang tepat dan efektif menjadi kunci untuk menjaga industri perikanan yang berkelanjutan dan berkembang. Keberhasilan pemasaran merupakan tolak ukur kesuksesan usaha perikanan, karena pola pemasaran yang baik akan berbanding lurus dengan pendapatan dan produktivitas usaha (Nuriati, 2019).

6.1.1 Peran Penting Pemasaran Dalam Industri Perikanan

1. Memberikan persaingan dalam sektor industri perikanan

Pemasaran memainkan peran krusial dalam membantu produk perikanan bersaing di pasar yang semakin ketat. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, para pelaku industri perikanan perlu mengidentifikasi keunggulan produk mereka dan menyampaikan nilai tambahnya kepada konsumen. Upaya pemasaran yang cerdas dapat membantu memperluas pangsa pasar dan meningkatkan daya saing produk perikanan di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

2. Memperoleh Promosi Produk Berkelanjutan

Pemasaran dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang praktik perikanan yang berkelanjutan. Mengedukasi konsumen

mengenai pentingnya memilih produk perikanan yang ditangkap atau dihasilkan secara ramah lingkungan dapat mendorong permintaan akan produk yang berkelanjutan. Hal ini mendorong pelaku industri untuk menerapkan praktik tangkap atau budidaya ikan yang ramah lingkungan agar produk mereka tetap diminati oleh konsumen yang peduli dengan lingkungan.

3. Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang Berkelanjutan

Pemasaran dapat menjadi alat untuk mempengaruhi kebijakan dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Melalui kampanye pemasaran yang bijaksana, masyarakat dapat disadarkan akan pentingnya menjaga kelimpahan ikan dan keanekaragaman hayati laut. Dukungan dari konsumen dan pelaku industri bagi kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan akan membantu mewujudkan eksploitasi sumber daya perikanan yang bertanggung jawab. Salah satu contoh pengaplikasian kegiatan pengelolaan sumber daya perikanan tangkap adalah penerapan penangkapan ikan terkontrol di pesisir Pacitan, yakni penangkapan ikan yang harus memperhatikan tanda kelestarian sumber daya untuk menghindari penangkapan ikan berlebih (*over fishing*) (Jefri *et al.*, 2021).

4. Diversifikasi Pasar dan Produk

Pemasaran yang efektif membantu membuka peluang untuk diversifikasi pasar dan produk perikanan. Dengan memasarkan produk secara kreatif dan berinovasi, industri perikanan dapat mengeksplorasi pasar baru dan mengembangkan produk bernilai tambah dari hasil tangkap atau budidaya perikanan menjadi produk olahan. Diversifikasi pasar membantu mengurangi ketergantungan pada pasar tunggal, yang dapat meningkatkan kestabilan ekonomi bagi pelaku industri perikanan. Optimalisasi pemasaran merupakan salah satu formulasi strategi yang dapat dilakukan untuk menjaga

keberlangsungan usaha (Setiyorini, Noorachmat and Syamsun, 2018).

5. Mendukung Komunitas Nelayan dan Pekerja Perikanan

Pemasaran yang efektif dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan, yang berdampak positif pada pendapatan dan kesejahteraan komunitas nelayan dan pekerja di sektor perikanan. Dengan membantu produk perikanan mencapai nilai jual yang lebih tinggi, pemasaran dapat memberikan dampak sosial yang positif pada komunitas pesisir dan pedesaan yang bergantung pada mata pencaharian ini.

6.1.2 Keberlanjutan Pemasaran Perikanan

Pemasaran yang tepat dan efektif menjadi suatu keharusan untuk mencapai keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang sistem pangan global dengan mengedukasi konsumen tentang pentingnya memilih produk perikanan yang berkelanjutan, mendukung kebijakan pengelolaan yang bijaksana, dan mendorong inovasi produk, pemasaran berperan sebagai motor penggerak keberlanjutan industri perikanan. Selain itu, pemasaran juga membantu meningkatkan keuntungan dan kesejahteraan bagi komunitas nelayan dan pekerja perikanan. Oleh karena itu, upaya kolektif dalam menerapkan pemasaran yang efektif akan memastikan industri perikanan yang berkelanjutan, sehat, dan berdaya saing di masa depan. Efisiensi saluran pemasaran merupakan salah satu hal penting dalam keberlanjutan pemasaran perikanan (Nurmalasari *et al.*, 2021).

6.2 Analisis Pasar Perikanan

Analisis pasar perikanan adalah proses penting yang membantu para pelaku industri memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti mengarungi lautan yang luas, analisis ini memungkinkan kita untuk mengenali arus dan karang di dunia bisnis perikanan.

6.2.1 Faktor-Faktor keberhasilan Pemasaran Produk Perikanan di Era Modern

1. Permintaan Konsumen

Permintaan konsumen adalah tonggak utama yang membentuk pasar perikanan. Melalui analisis mendalam tentang preferensi dan kebiasaan konsumen, para pelaku industri dapat memahami jenis ikan yang diminati, kemasan yang disukai, hingga metode distribusi yang paling efektif. Apakah konsumen mencari ikan segar untuk hidangan mewah atau produk olahan yang praktis dan siap saji? Permintaan konsumen yang jelas akan menjadi kunci untuk menyediakan produk yang sesuai dengan keinginan mereka.

2. Penawaran dan Produksi

Penawaran dan produksi ikan merupakan faktor penting yang mempengaruhi analisis pasar perikanan. Dari nelayan yang mencari hasil tangkapan hingga peternak yang membudidayakan ikan, tingkat produksi dan ketersediaan ikan akan mempengaruhi keseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar. Melalui analisis produksi, para pemangku kepentingan dalam industri perikanan dapat mengantisipasi fluktuasi harga dan kecenderungan pasar. Selain terjadi fluktuasi harga komoditi perikanan juga berfluktuasi dari jumlah produksi. Fluktuasi produksi utamanya disebabkan oleh hasil tangkapan yang sangat bergantung pada musim, sedangkan fluktuasi harga diakibatkan oleh perubahan permintaan dan penawaran hasil tangkapan (Teti, Sultan and H.Cotte, 2019).

3. Faktor Lingkungan dan Perubahan Iklim

Faktor lingkungan dan perubahan iklim berperan dalam menentukan kelimpahan ikan dan ketersediaan sumber daya laut. Variasi cuaca, peningkatan suhu laut, dan perubahan lingkungan maritim dapat berdampak pada pola migrasi ikan, ketersediaan pakan alami, dan habitat laut. Analisis yang

cermat tentang faktor-faktor ini memungkinkan para pelaku industri untuk menghadapi tantangan dan menyesuaikan strategi bisnis mereka dengan berkelanjutan.

4. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Regulasi dan kebijakan pemerintah memiliki dampak signifikan dalam industri perikanan. Peraturan tentang ukuran minimal ikan tangkapan, kuota penangkapan, dan pembatasan penangkapan di wilayah tertentu dapat mempengaruhi produksi dan distribusi ikan. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mendukung praktik perikanan berkelanjutan dan konservasi sumber daya laut akan menjadi pendorong bagi pertumbuhan industri perikanan yang berwawasan masa depan.

5. Perubahan Sosial dan Demografis

Perubahan sosial dan demografis, seperti pertumbuhan populasi, perubahan kebiasaan makan, dan tren kesehatan, berdampak pada permintaan dan preferensi konsumen terhadap produk perikanan. Melalui analisis pasar perikanan yang tepat, pelaku industri dapat mengidentifikasi peluang dalam pasar yang berkembang dan menyesuaikan produk mereka dengan kebutuhan yang berubah.

6. Persaingan di Pasar

Persaingan di pasar perikanan menjadi tantangan bagi para pemangku kepentingan. Dari nelayan lokal hingga perusahaan besar yang beroperasi di tingkat internasional, analisis pasar membantu para pelaku industri untuk memahami pesaing mereka, keunggulan kompetitif, dan tren strategi bisnis yang efektif. Dengan melalui analisis ini, pelaku industri dapat mengidentifikasi celah pasar dan menghadapi persaingan dengan bijaksana.

Melalui analisis pasar perikanan yang cermat, para pelaku industri dapat menavigasi perjalanan bisnis mereka dengan lebih baik. Dengan memahami permintaan dan penawaran,

faktor lingkungan dan perubahan iklim, regulasi pemerintah, serta persaingan di pasar, mereka dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan menghadapi tantangan yang muncul. Seperti menjelajahi lautan yang tak terbatas, analisis pasar perikanan memungkinkan mereka untuk melihat jauh ke depan, menangkap peluang, dan berlayar menuju keberhasilan yang gemilang.

6.2.2 Segmen Pasar Perikanan

Lingkup atau Segmen pasar dapat mencakup antara lain :

1. Restoran Mewah yang Mencari Ikan Spesialis
Restoran mewah biasanya mengutamakan kualitas dan keunikan ikan dalam hidangan mereka. Segmen ini cenderung mencari hasil tangkapan spesifik yang jarang ditemukan dan memiliki cita rasa istimewa.
2. Pasar Ritel dan Supermarket
Segmen ini termasuk konsumen umum yang mencari ikan segar atau olahan dalam jumlah besar dan dengan harga yang bersaing.
3. Konsumen yang Peduli Lingkungan
Segmen ini mencari produk perikanan yang ditangkap atau dibudidayakan dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
4. Konsumen yang Mementingkan Kesehatan
Segmen ini cenderung mencari ikan yang kaya akan nutrisi dan rendah lemak, karena mereka mementingkan kesehatan dan pola makan sehat.

6.2.3 Target Pasar Perikanan

Setelah mengidentifikasi segmen pasar, langkah selanjutnya adalah menentukan target pasar yang akan dikejar dengan fokus dan strategi khusus. Target pasar adalah kelompok konsumen spesifik yang menjadi prioritas Anda untuk memasarkan produk

perikanan Anda. Beberapa langkah untuk menysasar target pasar dalam industri perikanan adalah sebagai berikut:

1. **Penelitian Mendalam**
Lakukan penelitian mendalam tentang karakteristik, preferensi, dan kebutuhan target pasar yang telah Anda identifikasi. Pahami dengan baik apa yang menjadi fokus dan keinginan mereka terkait produk perikanan.
2. **Penyesuaian Produk**
Sesuaikan produk perikanan Anda dengan kebutuhan dan preferensi target pasar. Misalnya, jika target pasar Anda adalah restoran mewah, pastikan Anda menawarkan ikan spesial yang cocok dengan cita rasa dan keunikan hidangan mereka.
3. **Komunikasi yang Efektif**
Gunakan bahasa dan pesan yang tepat untuk berkomunikasi dengan target pasar Anda. Pastikan Anda menyampaikan nilai tambah dan keunggulan produk Anda secara jelas dan menarik.
4. **Distribusi yang Efisien**
Pastikan produk perikanan Anda dapat dijangkau dengan mudah oleh target pasar Anda melalui jalur distribusi yang tepat.
5. **Strategi Pemasaran**
Gunakan strategi pemasaran yang sesuai dengan karakteristik target pasar. Misalnya, jika target pasar Anda lebih aktif di media sosial, manfaatkan platform tersebut untuk mempromosikan produk perikanan.

6.3 Rantai Pasok Perikanan

Rantai pasokan perikanan merujuk pada proses kompleks dari hulu ke hilir yang dimulai dari penangkapan ikan atau hasil laut lainnya hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, dan setiap tahap memiliki peran penting dalam memastikan produk perikanan dapat dihasilkan,

didistribusikan, dan dikonsumsi dengan aman dan efisien. Berikut adalah penjelasan tentang rantai pasokan perikanan dari awal hingga akhir :

1. Penangkapan

Tahap pertama dalam rantai pasokan perikanan adalah penangkapan ikan atau hasil laut lainnya. Penangkapan ini bisa dilakukan oleh nelayan yang menggunakan berbagai alat tangkap, seperti jaring, pancing, atau perangkat lainnya, tergantung pada jenis ikan atau hasil laut yang diburu dan lokasi penangkapan. Pada sektor perikanan tangkap terdapat begitu banyak permasalahan pemasaran antara lain rantai distribusi yang begitu panjang, terdapat perbedaan harga yang masih tinggi dari produsen ke konsumen, kontinuitas produk yang kurang terjamin, kelangkaan produk di periode tertentu, serta keterbatasan infrastruktur pendukung pemasaran hasil tangkapan (Pramulya, 2022), (Taufiq and Sutopo, 2012).

2. Penanganan Awal

Setelah ditangkap, ikan atau hasil laut lainnya perlu segera ditangani untuk menjaga kesegarannya. Nelayan akan melakukan pemisahan dan sortir awal untuk memilah hasil tangkapan sesuai jenis, ukuran, dan kualitasnya.

3. Pengolahan

Tahap ini melibatkan pemrosesan lebih lanjut dari ikan atau hasil laut yang sudah ditangkap. Pengolahan dapat mencakup pembersihan, pemotongan, pengawetan (misalnya dengan mendinginkan atau membekukannya), pengeringan, atau pengawetan lainnya. Tujuannya adalah untuk menjaga kualitas produk dan memperpanjang umur simpannya.

4. Pengemasan dan Penyimpanan

Setelah diolah, produk perikanan akan dikemas dengan baik untuk melindungi kualitasnya selama proses distribusi. Pengemasan yang tepat dapat melibatkan penggunaan kantong plastik, kantong vakum, atau kemasan lainnya. Selain itu, produk

perikanan yang sudah dikemas perlu disimpan dalam kondisi yang tepat, seperti suhu yang sesuai, agar tetap segar.

5. Distribusi dan Transportasi

Dalam tahap ini, produk perikanan akan didistribusikan dari lokasi penangkapan atau pabrik pengolahan ke pasar atau tempat penjualan lainnya. Distribusi dapat melibatkan transportasi darat, laut, atau udara, tergantung pada jarak dan jenis produk. Proses transportasi harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan produk tetap segar dan sesuai dengan standar keselamatan pangan.

6. Penjualan dan Pemasaran

Di tahap ini, produk perikanan akan dijual kepada pedagang, distributor, pengecer, atau pasar grosir. Selain itu, upaya pemasaran juga dapat dilakukan untuk mempromosikan produk perikanan kepada konsumen akhir. Strategi pemasaran ini dapat mencakup penggunaan label yang jelas, informasi produk, dan sertifikasi keberlanjutan atau kualitas.

7. Konsumen Akhir

Tahap akhir dalam rantai pasokan perikanan adalah saat konsumen akhir membeli dan mengonsumsi produk perikanan. Penting bagi konsumen untuk memastikan bahwa produk yang dibeli segar, berkualitas baik, dan diproses sesuai dengan standar keamanan pangan.

Penting untuk diingat bahwa rantai pasokan perikanan harus memperhatikan aspek keberlanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut dan kelangsungan sumber daya perikanan. Ini termasuk menghindari penangkapan berlebihan, mencari alternatif ramah lingkungan dalam proses tangkapan dan pengolahan, serta memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan praktik-praktik perikanan berkelanjutan.

6.4 Strategi Pemasaran Perikanan

Strategi pemasaran dalam industri perikanan berperan penting dalam mempromosikan produk perikanan, meningkatkan penjualan, dan mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan (Taufiq and Sutopo, 2012). Berikut adalah beberapa strategi pemasaran yang dapat diterapkan dalam industri perikanan:

1. **Penentuan Target Pasar**
Identifikasi segmen pasar yang tepat untuk produk perikanan Anda. Misalnya, Anda dapat menasar pasar lokal, regional, atau internasional. Tentukan juga apakah Anda ingin menasar pasar konsumen atau bisnis, seperti restoran, hotel, atau pasar eceran.
2. **Branding dan Citra**
Buat merek yang kuat untuk bisnis perikanan Anda. Pastikan logo, slogan, dan citra merek Anda mencerminkan kualitas, kebersihan, dan keamanan produk perikanan Anda. Branding yang baik dapat membantu membedakan produk Anda dari pesaing dan membangun kepercayaan pelanggan.
3. **Kualitas dan Keamanan Produk**
Pastikan produk perikanan yang Anda tawarkan berkualitas tinggi dan aman dikonsumsi. Jaga kebersihan selama proses produksi, penanganan, dan distribusi. Sertifikasi keamanan dan kualitas, seperti ISO atau HACCP, dapat membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan.
4. **Penjualan dan Distribusi:** Tentukan saluran distribusi yang efektif untuk mencapai target pasar Anda. Anda bisa menjual langsung ke konsumen, bekerja sama dengan pasar swalayan, restoran, atau pengecer lokal. Selain itu, pertimbangkan pula penjualan online melalui platform e-commerce.
5. **Promosi dan Penjualan:** Lakukan strategi promosi yang tepat untuk menarik perhatian calon pelanggan. Gunakan media sosial, situs web, dan brosur untuk mempromosikan produk perikanan Anda. Jangan lupa untuk menawarkan penawaran

khusus atau diskon pada saat-saat tertentu guna mendorong pembelian.

6. Kemitraan dan Jaringan

Bangun kemitraan dengan pihak terkait dalam industri perikanan, seperti nelayan, petani ikan, atau perusahaan pengolahan ikan. Kerjasama ini dapat membantu memastikan pasokan yang stabil dan memperluas jangkauan pemasaran.

7. Inovasi Produk

Terus berinovasi dalam mengembangkan produk perikanan Anda. Pertimbangkan untuk menciptakan varian produk baru, mengolah produk yang sudah ada menjadi olahan bernilai tambah, atau mengeksplorasi jenis ikan yang kurang dikenal namun berpotensi.

8. Edukasi Pelanggan

Edukasi pelanggan mengenai manfaat produk perikanan dan cara memasaknya dapat meningkatkan minat dan kepercayaan konsumen terhadap produk Anda. Gunakan kampanye edukasi melalui media sosial, blog, atau workshop kuliner.

9. Peduli Lingkungan

Semakin banyak pelanggan yang peduli dengan isu lingkungan. Jadi, selalu perhatikan praktik perikanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Jika Anda menunjukkan komitmen terhadap konservasi sumber daya perikanan, hal ini dapat menjadi nilai tambah dalam pemasaran.

10. Analisis dan Evaluasi

Lakukan analisis rutin mengenai kinerja pemasaran Anda. Evaluasi strategi yang telah dilakukan dan lihat apa yang berhasil dan apa yang tidak. Dengan begitu, Anda dapat terus mengoptimalkan strategi pemasaran Anda untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Ingatlah bahwa pemasaran dalam industri perikanan juga perlu diimbangi dengan manajemen usaha dan kualitas produk yang baik. Jika dilakukan dengan tepat, strategi pemasaran yang efektif dapat membantu bisnis perikanan Anda berkembang dan bertahan di pasar yang kompetitif.

6.5 Tantangan Pemasaran dalam Industri Perikanan

Industri perikanan menghadapi berbagai tantangan dalam pemasaran, terutama karena sifatnya yang unik dan berhubungan dengan isu-isu lingkungan. Beberapa tantangan pemasaran dalam industri perikanan meliputi:

1. **Permintaan yang Bervariasi:** Permintaan untuk produk perikanan bisa bervariasi musiman, tergantung pada musim tangkap atau musim konsumsi tertentu. Hal ini dapat menyulitkan perencanaan produksi dan distribusi serta mengelola persediaan.
2. **Persaingan yang Ketat:** Industri perikanan sering kali memiliki pesaing yang kuat, baik dalam skala lokal maupun global. Meningkatnya jumlah produsen dan pengecer ikan yang berlomba-lomba menawarkan produk yang serupa dapat mengakibatkan penurunan harga dan margin keuntungan yang lebih kecil.
3. **Harga yang Volatil:** Harga ikan dapat sangat fluktuatif karena tergantung pada kondisi pasar, iklim, musim, dan faktor-faktor lainnya. Fluktuasi harga ini dapat mempengaruhi profitabilitas bisnis perikanan.
4. **Regulasi Ketat:** Industri perikanan tunduk pada berbagai regulasi dan aturan yang berkaitan dengan tangkapan ikan, praktik perikanan berkelanjutan, kualitas produk, dan keamanan pangan. Mematuhi peraturan ini bisa menambah biaya operasional dan waktu pemasaran.

5. Isu Lingkungan: Isu-isu lingkungan, seperti *overfishing*, penangkapan ikan ilegal, dan kerusakan ekosistem, telah menyebabkan kekhawatiran konsumen terhadap keberlanjutan produk perikanan. Bisnis perikanan harus membuktikan komitmen mereka terhadap praktik perikanan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nelayan tidak menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dapat merusak lingkungan (Pradana, 2019).
6. Jaminan Kualitas dan Keamanan Produk: Kualitas dan keamanan produk perikanan adalah hal yang sangat penting bagi konsumen. Bisnis perikanan harus menjaga kebersihan dan kualitas produk selama distribusi untuk memastikan produk tiba dalam kondisi baik dan aman dikonsumsi. Dari segi kualitas hasil perikanan, nelayan atau pembudidaya sangat sering dipermainkan oleh pengumpul yang nakal, sehingga hasil yang diperoleh nelayan tidak sesuai dengan kualitas yang dijual (Sari and Meliana, 2019).
7. Pandangan Negatif terhadap Industri Perikanan: Beberapa orang menganggap industri perikanan sebagai penyebab utama degradasi lingkungan dan kerusakan ekosistem. Membalik pandangan negatif ini dan membangun citra positif bisa menjadi tantangan tersendiri.
8. Akses ke Pasar Ekspor: Untuk bisnis perikanan yang ingin mengeksport produknya, masuknya produk ke pasar internasional dapat menghadapi hambatan seperti aturan impor dan ekspor, sertifikasi, dan persaingan harga global.
9. Peningkatan Biaya Pemasaran: Promosi dan pemasaran produk perikanan dapat memerlukan biaya yang signifikan, terutama ketika berusaha memasuki pasar yang lebih luas dan bersaing dengan merek-merek besar.
10. Kurangnya Informasi Pasar: Mendapatkan data dan informasi pasar yang akurat dan terbaru dalam industri perikanan bisa

menjadi sulit karena banyaknya aktor di sektor ini dan keterbatasan data yang tersedia.

Menghadapi tantangan-tantangan ini, bisnis perikanan perlu mengadopsi strategi pemasaran yang tepat, berkomitmen pada praktik perikanan berkelanjutan, dan membangun hubungan baik dengan konsumen dan mitra bisnis. Edukasi dan transparansi juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan konsumen terhadap produk perikanan yang ditawarkan.

6.6 Peluang Pemasaran dalam Industri Perikanan

Industri perikanan juga memiliki beragam peluang pemasaran yang menarik. Berikut adalah beberapa peluang pemasaran dalam industri perikanan:

1. **Peningkatan Permintaan Produk Laut**
Permintaan akan produk laut terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dunia dan kesadaran masyarakat akan manfaat nutrisi dari ikan dan produk laut lainnya. Ini menciptakan peluang untuk bisnis perikanan untuk memenuhi permintaan pasar yang berkembang.
2. **Peningkatan Minat pada Makanan Sehat dan Berkelanjutan**
Konsumen semakin peduli dengan makanan yang sehat dan berkelanjutan. Produk perikanan yang berasal dari praktik perikanan berkelanjutan dan memenuhi standar keamanan pangan akan menarik pelanggan yang peduli dengan kesehatan dan lingkungan.
3. **Inovasi Produk dan Olahan Bernilai Tambah**
Terdapat peluang untuk mengembangkan produk perikanan yang lebih beragam dan bernilai tambah, seperti makanan laut olahan, makanan ringan dari ikan, makanan laut siap saji, atau produk perikanan berbasis teknologi tinggi.
4. **Pemasaran Melalui Kanal Digital**

Internet dan media sosial membuka peluang baru untuk memasarkan produk perikanan secara lebih luas dan efektif. Bisnis perikanan dapat menggunakan platform e-commerce, aplikasi pemesanan makanan, atau pemasaran konten untuk menjangkau lebih banyak pelanggan.

5. Peningkatan Ekspor Produk Perikanan

Meningkatnya permintaan produk perikanan di pasar internasional membuka peluang bagi bisnis perikanan untuk memperluas pasar mereka dan meningkatkan ekspor produk.

6. Kemitraan dengan Restoran dan Industri Kuliner

Bisnis perikanan dapat menjalin kemitraan dengan restoran, hotel, atau industri kuliner lainnya untuk memasarkan produk perikanan mereka secara eksklusif atau menciptakan menu khusus dengan bahan baku ikan.

7. Program Sertifikasi dan Labelisasi

Sertifikasi kualitas dan keberlanjutan produk perikanan (seperti MSC - Marine Stewardship Council) dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi bisnis perikanan dan menarik perhatian konsumen yang peduli dengan isu lingkungan.

8. Ekowisata Perikanan

Ekowisata perikanan adalah bentuk pariwisata yang fokus pada edukasi dan pengalaman tentang kehidupan perikanan dan konservasi sumber daya laut. Hal ini dapat menciptakan sumber pendapatan tambahan bagi bisnis perikanan dan meningkatkan kesadaran tentang keberlanjutan sektor ini.

9. Produk Halal

Bagi bisnis perikanan di negara-negara mayoritas Muslim, kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi halal akan membuka akses ke pasar yang lebih luas dan memenuhi permintaan masyarakat Muslim yang semakin meningkat.

10. Pemanfaatan Limbah Perikanan: Pemanfaatan limbah perikanan menjadi produk bernilai tambah, seperti peptida

dari limbah ikan untuk industri makanan atau kosmetik, memberikan peluang pemasaran baru dan meminimalkan limbah industri perikanan.

Pemanfaatan peluang-peluang ini dapat membantu bisnis perikanan untuk berkembang dan beradaptasi dengan tren pasar serta kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Penting untuk tetap inovatif dan responsif terhadap perubahan dalam industri ini agar tetap kompetitif dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

6.6.1 Eksplorasi Pasar Ekspor

Eksplorasi pasar ekspor dan peluang di pasar internasional dapat menjadi langkah yang menarik dan potensial bagi bisnis perikanan. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan eksplorasi pasar ekspor dan melihat peluang di pasar internasional:

1. Riset Pasar

Lakukan riset menyeluruh tentang pasar internasional yang ingin Anda eksplorasi. Pelajari tren konsumen, preferensi, dan kebiasaan makan di negara-negara target. Tinjau juga regulasi dan persyaratan impor yang berlaku di negara-negara tersebut.

2. Identifikasi Peluang

Identifikasi peluang pasar untuk produk perikanan Anda. Cari tahu apakah ada permintaan yang tinggi untuk produk perikanan di negara-negara target, apakah ada pasar niche yang bisa Anda isi, atau apakah ada kekosongan pasokan di pasar tersebut.

3. Cari Mitra dan Distributor Lokal

Temukan mitra atau distributor lokal yang dapat membantu Anda memasuki pasar internasional dengan lebih mudah. Mitra lokal biasanya memahami kondisi pasar, memiliki jaringan distribusi yang luas, dan dapat membantu mengatasi hambatan bahasa dan budaya.

4. **Adaptasi Produk dan Kemasan**
Sesuaikan produk dan kemasan Anda dengan preferensi dan tuntutan pasar internasional. Pertimbangkan juga aspek legalitas, seperti label bahasa lokal dan persyaratan label makanan di negara target.
5. **Cek Potensi Hambatan**
Pertimbangkan hambatan yang mungkin dihadapi dalam berbisnis di pasar internasional, seperti regulasi, bea masuk, hambatan tarif, atau persaingan lokal. Tinjau juga aspek logistik dan pengiriman produk ke negara target.
6. **Perencanaan Pemasaran**
Buat rencana pemasaran yang sesuai dengan pasar internasional yang Anda tuju. Pertimbangkan strategi pemasaran online dan offline, serta budaya dan tradisi lokal dalam kampanye pemasaran Anda.
7. **Coba Pasar dengan Pendekatan Skala Kecil**
Sebelum meluncurkan produk secara besar-besaran, coba pasar dengan pendekatan skala kecil. Uji pasar dengan mengirimkan contoh produk atau melakukan kampanye pemasaran kecil untuk mengukur respons pasar.
8. **Kualitas dan Keandalan**
Pastikan kualitas produk Anda konsisten dan dapat diandalkan. Ini penting untuk memenangkan kepercayaan konsumen di pasar internasional.
9. **Perhatikan Pengaturan Waktu**
Perhatikan juga pengaturan waktu untuk memasuki pasar internasional. Pertimbangkan musim konsumsi dan permintaan khusus di negara-negara target.
10. **Evaluasi dan Perbaiki**
Setelah memasuki pasar internasional, lakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur kinerja dan kesuksesan Anda. Perbaiki strategi pemasaran dan operasional Anda berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

Eksplorasi pasar ekspor dan masuk ke pasar internasional memang memerlukan persiapan dan risiko. Namun, dengan riset dan persiapan yang matang, hal ini bisa menjadi kesempatan yang menguntungkan dan membantu bisnis perikanan Anda berkembang secara global.

6.6.2 Penerapan Teknologi Dalam Pemasaran Perikanan

Penerapan teknologi dalam pemasaran perikanan dapat membantu meningkatkan efisiensi, jangkauan pasar, dan memperkuat hubungan dengan konsumen. Berikut adalah beberapa cara penerapan teknologi dalam pemasaran perikanan:

1. Pemasaran Digital:
 - a. Situs Web dan E-commerce: Membangun situs web perusahaan perikanan yang informatif dan responsif dapat membantu konsumen mengakses informasi tentang produk dan proses pemesanan secara mudah. Integrasi dengan platform e-commerce juga memungkinkan penjualan langsung produk secara online. Platform e-commerce yang telah berkembang di Indonesia salah satunya Aruna Indonesia, yang mempertemukan antara komunitas nelayan dan koperasi dengan pembeli akhir melalui penggunaan teknologi IT (Febryanti *et al.*, 2022).
 - b. Media Sosial: Gunakan media sosial untuk mempromosikan produk perikanan, berinteraksi dengan pelanggan, dan membangun hubungan dengan audiens yang lebih luas. Kampanye iklan berbayar di platform media sosial juga dapat meningkatkan visibilitas merek Anda.
2. Aplikasi Mobile:
 - a. Aplikasi Pemesanan: Buat aplikasi pemesanan makanan laut yang mudah digunakan oleh pelanggan. Aplikasi semacam ini dapat memudahkan pelanggan untuk

memesan produk perikanan Anda secara online dengan beberapa ketukan saja.

- b. Aplikasi Edukasi: Kembangkan aplikasi yang memberikan informasi tentang spesies ikan, cara memilih ikan segar, atau resep masakan menggunakan produk perikanan Anda. Aplikasi semacam ini dapat meningkatkan pengetahuan pelanggan tentang produk Anda.
 - c. Aplikasi Analisis Pendapatan dan kelayakan Usaha : Aplikasi ini ditujukan untuk mengetahui besarnya pendapatan riil dan analisis kelayakan usaha secara langsung baik di atas kapal atau dimanapun berada, salah satu aplikasi yang telah ada dan dapat digunakan adalah aplikasi SIDIA atau Sistem Digital Agribisnis. SIDIA dapat memberikan hasil analisis yang akurat terkait besaran pendapatan, layak tidaknya suatu usaha dilanjutkan, pay back periode, IRR dan analisis ekonomi lainnya. Aplikasi ini dibuat dan dikembangkan oleh penulis.
3. Teknologi Pelacakan dan Pelaporan:
- a. Sistem Pencatatan Tangkapan: Penerapan teknologi pelacakan dapat membantu memantau dan mencatat tangkapan ikan secara akurat. Data ini berguna untuk menunjukkan praktik perikanan berkelanjutan dan memberikan informasi transparan tentang produk Anda kepada pelanggan.
 - b. Label Berbasis Teknologi: Gunakan label QR code atau teknologi lainnya pada kemasan produk perikanan. Pelanggan dapat memindai label ini untuk mengakses informasi lengkap tentang sumber daya ikan, lokasi tangkapan, dan proses produksi.
4. Iklan Digital yang Dikustomisasi:
- a. Retargeting: Gunakan teknik retargeting iklan untuk menjangkau pelanggan yang sebelumnya sudah mengunjungi situs web atau berinteraksi dengan produk

Anda. Iklan semacam ini dapat mengingatkan mereka tentang produk Anda dan mendorong mereka untuk melakukan pembelian.

- b. Personalisasi: Manfaatkan teknologi untuk menyampaikan iklan dan konten yang disesuaikan dengan preferensi dan perilaku konsumen. Personalisasi dapat meningkatkan keterlibatan konsumen dan menghasilkan respons yang lebih baik.
5. Pelacakan dan Analisis Kinerja:
- a. Gunakan alat analisis web untuk melacak kinerja kampanye pemasaran online Anda. Data ini membantu Anda memahami efektivitas strategi pemasaran dan melakukan perbaikan jika diperlukan.
6. Penggunaan Drone:
- a. Dalam konteks perikanan, drone dapat digunakan untuk pemantauan perairan dan penangkapan gambar atau video produk perikanan. Hal ini dapat digunakan sebagai konten pemasaran yang menarik dan edukatif.

Penerapan teknologi dalam pemasaran perikanan dapat membantu bisnis perikanan untuk tetap relevan dan kompetitif di era digital saat ini. Dengan menggunakan teknologi yang tepat, Anda dapat mengoptimalkan promosi produk, memperluas jangkauan pasar, dan memberikan pengalaman konsumen yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Febryanti, D. I. *et al.* 2022. 'Pemanfaatan Platform Digital dalam Pemasaran Produk Perikanan dan Kelautan (Studi Kasus Aruna Indonesia)', 12(1), pp. 66–83.
- Jefri, A. *et al.* 2021. 'Strategi Pengembangannya Di Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Di Tempat Pelelangan Ikan Teleng) Marketing Analysis of Capture Fishery Commodities and Its Development Strategies in Pacitan Regency , East Java Province (Case Study At Tel', V(2), pp. 84–105.
- L, I. A. and Pramulya, R. 2022. 'Analisis Saluran Pemasaran Perikanan Tangkap Di Kecamatan Samatiga', *Jambura Agribusiness Journal*, 3(2), pp. 69–75. doi: 10.37046/jaj.v3i2.13414.
- Nuriati, N. K. 2019. 'Analisis Efisiensi Saluran Pemasaran Ikan Tongkol Hasil Tangkapan Nelayan Di Desa Seraya Timur Kecamatan Karangasem', *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 10(2), p. 512. doi: 10.23887/jjpe.v10i2.20096.
- Nurmalasari, L. *et al.* 2021. 'Analisis Efisiensi Saluran Pemasaran Ikan Teri (*Stolephorus* sp.) di Desa Sanggalangit, Kabupaten Buleleng', *Current Trends in ...*, 4(1), pp. 26–32. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/CTAS/article/download/59754/40356>.
- Pradana, R. S. 2019. 'Peluang Dan Tantangan Subsektor Perikanan Dalam Menopang Perekonomian Provinsi Banten', *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 3(2), pp. 113–126. doi: 10.37950/jkpd.v3i2.70.
- Sari, A. D. and Meliana, D. 2019. 'Peluang Dan Tantangan Pemasaran Usaha Teripang Daerah Pesisir Kota Bontang Kalimantan Timur', 7(2), pp. 7–19.

- Setiyorini, E. S., Noorachmat, B. P. and Syamsun, M. 2018. 'Strategi Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan pada UMKM Cindy Group', *Manajemen IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*, 13(1), p. 19. doi: 10.29244/mikm.13.1.19-28.
- Taufiq, M. and Sutopo. 2012. 'Strategi Pemasaran Produk Perikanan', *Dharma Ekonomi*, 19(36), pp. 1–12.
- Teti, A., Sultan, D. and H.Cotte, I. 2019. 'Strategi Dan Sistem Pemasaran Ikan Di Pangkalan Pendaratan Ikan (Ppi) Beba Kabupaten Takalar', *Journal Of Indonesian Tropical Fisheries (JOINT-FISH) : Jurnal Akuakultur, Teknologi Dan Manajemen Perikanan Tangkap, Ilmu Kelautan*, 2(1), pp. 18–31. doi: 10.33096/joint-fish.v2i1.28.

BAB 7

KONTRIBUSI PERIKANAN TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

Oleh Muhammad Bibin

7.1 Pendahuluan

Indonesia merupakan pulau terbesar di dunia dan memiliki potensi bahari dan kelautan yang menakjubkan. Potensi ekonomi sumber daya ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Luas perairan Indonesia adalah 3,25 juta Km² dan panjang garis pantainya kurang lebih 95.181 Km. Indonesia memegang peranan penting dalam sektor ekonomi utama perikanan. Dengan sumber daya perairan yang melimpah, produksi makanan laut Indonesia saat ini tumbuh dengan laju 7% per tahun, menjadikannya produsen terbesar di Asia Tenggara (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2014). Total produksi pangan Indonesia pada tahun 2022 diprediksi mencapai 24,85 miliar ton, terdiri dari 7,99 miliar ton pangan yang sudah diolah dan 16,87 miliar ton hasil pertanian (KKP, 2022). Menurut Anugrah & Alfarizi (2021) potensi sumberdaya perikanan yang besar di Indonesia, tentunya membutuhkan perhatian khusus dalam proses pengelolaannya.

Produk Domestik Bruto (PDB) subsektor perikanan memberikan manfaat yang efektif tidak hanya bagi PDB sektor pertanian tetapi juga bagi PDB nasional. Capaian PDB perikanan dalam triwulan IV Tahun 2022 atas harga konstan (ADHB) adalah sebesar Rp. 72.9 triliun dan atas harga berlaku (ADHB) adalah sebesar Rp. 135.8 triliun (Gambar 1). Secara kumulatif (c-to-c)

hingga triwulan keempat ini, PDB perikanan atas dasar harga konstan telah mencapai nilai sebesar Rp. 275.5 triliun. Dengan demikian secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan satu hingga Triwulan IV Tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 2.79% dibandingkan dengan capaian Triwulan I hingga Triwulan IV Tahun 2021 (Rp. 267.9 triliun).

Kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan berpotensi meningkat jika diterapkan strategi-strategi kreatif yang memecahkan sejumlah hambatan pengembangan sektor tersebut. Industri akuakultur menghadapi kendala baik di hulu maupun di hilir. Di wilayah hulu, peningkatan bahan baku dan produksi ikan segar masih menjadi kendala penangkapan ikan. Sementara itu, sektor hilir perikanan menghadapi dua kendala signifikan: ketersediaan bahan baku yang tidak mencukupi dan tidak konsisten untuk meningkatkan produksi ikan olahan, dan ketidakmampuan untuk mendiversifikasi penawaran produk. Selain itu, perikanan dihadapkan pada masalah yang semakin rumit akibat persaingan pasar yang semakin ketat dan peningkatan tingkat kualitas kebutuhan pelanggan. Kondisi tersebut menghambat upaya nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil laut untuk mencari nafkah. Hal ini akan berdampak pada besarnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pembangunan ekonomi nasional.

7.2 Potensi Sumberdaya Perikanan

Perikanan adalah salah satu sektor ekonomi penting di dunia, terutama untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan finansial masyarakat pesisir (Hidayah *et al.*, 2020). Salah satu industri berbasis sumber daya alam yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi global dan nasional adalah industri perikanan. Ikan merupakan salah satu komoditas dunia yang paling banyak diperdagangkan (Wuryandani & Meilani, 2011). Total produksi perikanan dan akuakultur dunia menunjukkan

pertumbuhan sebesar 41% selama periode 2019-2020. Pada tahun 2020 produksi perikanan dunia mencapai 178 ton, sedikit mengalami penurunan pada tahun 2018 total produksi perikanan mencapai 179 ton. Pada tahun 2020 total produksi perikanan naik sebesar 0.2% dibandingkan tahun 2019. FAO (2000) telah diperkirakan bahwa negara-negara berkembang menyumbang 54% dari total nilai ekspor global. Namun, perikanan terus dianggap sebagai salah satu pemasok energi dan protein terbesar, terhitung hampir 17 persen dari protein hewani yang dikonsumsi manusia di dunia.

Sebagai negara berkembang dengan potensi perairan dan keanekaragaman spesies yang luas, sektor perikanan Indonesia dapat menyumbang devisa negara, meningkatkan prospek kerja bagi masyarakat pesisir, dan menjadi sumber utama daging bagi masyarakat secara keseluruhan. Sayangnya, produksi perikanan Indonesia belum mencapai potensi maksimalnya. Berbagai investigasi penelitian menunjukkan bahwa potensi tangkapan paling berkelanjutan dan hasil berkelanjutan (MSY) tertinggi dari sumber daya perikanan tangkap adalah sekitar 6.400.000 metrik ton per tahun. Sedangkan potensi pemanfaatan (allowable capture) sebesar 80% dari MSY atau 5,12 ton per tahun. Namun demikian, terdapat disparitas tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan antar wilayah dan kategori sumber daya. Di beberapa wilayah, seperti Laut Jawa dan Selat Malaka, terdapat indikasi overfishing, namun di sebagian besar Kawasan Timur Indonesia, tingkat pemanfaatannya masih di bawah potensi lestari.

Kinerja sektor perikanan Indonesia belum optimal, terbukti dengan rendahnya konsumsi ikan per kapita negara ini dibandingkan dengan negara lain. Pada tahun 2022, konsumsi ikan per kapita di Indonesia sekitar 56,48 Kg. Tetap saja, orang Indonesia mengonsumsi lebih sedikit ikan per kapita dibandingkan tetangga mereka di Malaysia, Singapura, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam.

Sumber daya ikan hanyalah salah satu sumber daya alam yang paling banyak dikonsumsi tetapi paling sedikit ditangani. Hal ini karena salah satu karakteristik sumber daya laut memiliki kemampuan untuk diabaikan. Ikan di perairan yang bersifat *ferae naturae*, seperti tidak ada yang berhak menuntut penguasaannya pada saat penangkapan, tidak dapat dinyatakan sebagai harta kekayaan. Doktrin penangkapan ikan adalah *res nullius*, atau suatu benda yang seharusnya dibawa tetapi tidak dapat dibawa karena merupakan sumber daya buruan. Kondisi ini mengubah ikan menjadi sumber daya yang diisi secara komunal (milik bersama). Hal ini menjelaskan mengapa perikanan tangkap termasuk komoditas ekonomi yang sering mengalami kegagalan. Industri penangkapan ikan dicirikan oleh adanya eksternalitas. Sebagai hasil dari orang-orang yang bersaing untuk mendapatkan ikan sebanyak mungkin, karakteristik kepemilikan bersama yang berhubungan dengan akses terbuka sering menyebabkan masalah seperti penipisan sumber daya ikan, penangkapan ikan yang berlebihan, dan kelebihan kapasitas. Namun, jika kita ingin memanfaatkan sumber daya ikan secara efektif dan mengoptimalkan dampak ekonominya, pengelolaan yang efisien, yang mencakup pola pemanfaatan dan pengelolaan yang berkelanjutan, harus dilakukan (Prasetyo, 2019).

7.3 Potensi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Yang Berkelanjutan

Tujuan pembangunan perikanan berkelanjutan tertuang dalam UU Perikanan Nomor 45 Tahun 2009. Keberlanjutan tidak hanya mencakup pemanfaatan perikanan, tetapi juga kelestarian stok laut dalam jangka panjang. Dalam hal ini, pengelolaan sumber daya ikan tidak hanya mencakup ikan untuk manusia, tetapi juga ikan untuk ikan, yang terkait dengan pelestarian dan konservasi ikan. Selain itu, UU Nomor 45 Tahun 2009 yang menggantikan UU Nomor 31 Tahun 2004 juga merupakan bentuk reformasi

kebijakan dengan pengaturan yang lebih luas mengenai teknologi dan hukum, yang tidak dibahas secara luas dalam undang-undang sebelumnya. Kebijakan terkini melalui UU Perikanan kemudian diimplementasikan dalam berbagai bentuk, antara lain kebijakan Minabahari, Minapolitan, industrialisasi perikanan, dan lainnya. Kebijakan ini mengutamakan pemanfaatan sumber daya perikanan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Pelaksanaan bentuk pembangunan perikanan ini dapat berhasil jika semua aspek pertumbuhan produksi perikanan dilengkapi dengan peningkatan pengelolaan sumber daya ikan. Hal ini penting karena sumber daya ikan yang sehat merupakan penopang bagi usaha serta kesejahteraan bagi mereka yang memanfaatkan sumber daya ikan.

Tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sumber daya laut untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Sistem Maximum Sustainable Yield (MSY) menjadi salah satu acuan kami di Indonesia. Oleh karena itu, prinsip-prinsip pengelolaan perikanan beradaptasi dengan persyaratan keberlanjutan yang sangat ketat. Selain itu dengan MSY sebagai titik indikator tidak memberikan gambaran yang lengkap tentang kondisi sumber daya ikan, karena perikanan dapat mengalami eksploitasi ekonomi (miskin atau kehilangan sumber pendapatan) pada MSY yang merupakan besaran aset. Selain itu, perikanan MSY dapat berkontribusi pada kerapuhan ekosistem dan interaksi spesies yang tidak dihargai (Zhou et al., 2019).

Sebagai sumber berbagai bahan dan energi, perekonomian sumber daya perikanan sangat bergantung pada sumber daya laut dan lingkungan di sekitarnya. Lingkungan berfungsi sebagai habitat fisik dan tempat pembuangan bagi masyarakat. Daya tampung lingkungan ini merupakan cerminan dari sumber daya ikan kita. Menerapkan instrumen akuntansi sumber daya yang menerapkan peran lingkungan dalam perekonomian lebih jauh ke dalam Sistem Akun Nasional (SNA) melalui Akun Satelit adalah salah satu cara

untuk membangun pembangunan berkelanjutan. Dalam pendekatan konvensional, kontribusi kekayaan alam tersebut ditentukan oleh kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian nasional yang diukur dengan Produk Nasional Bruto (PNB). Namun, GNP sendiri hanya menggambarkan nilai tambah dan tidak menangkap dinamika nyata yang terjadi pada stok perikanan, seperti penipisan, degradasi, dan perubahan pertumbuhan akibat ulah manusia. Dalam konteks perencanaan pengelolaan perikanan, pemerintah tidak memiliki indikator yang sistematis tentang ketersediaan, perubahan akses, dan variasi permintaan antar dan di dalam sumber daya ikan.

Banyak negara, termasuk Indonesia, telah memperkirakan nilai keseluruhan perikanannya dengan menggunakan perhitungan neraca sumber daya. Neraca sumber daya pada dasarnya memperoleh aliran stok dan nilai stok pada setiap periode waktu yang berbeda, dimulai dengan periode waktu benchmark (atau basis). Neraca sumber daya ikan akan membantu menetapkan nilai total aset perikanan yang tepat. Selain itu, keseimbangan sumber daya ikan akan membantu pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya dalam menentukan dampak intervensi kebijakan di masa lalu terhadap pengelolaan sumber daya ikan. Menerapkan keseimbangan sumber daya ikan sebagai instrumen pembangunan perikanan berkelanjutan merupakan langkah penting untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang kondisi perikanan hulu dan hilir kita. Informasi yang akurat tentang portofolio sumber daya kelautan akan mempengaruhi arah kebijakan yang lebih tepat sasaran.

7.4 Industrialisasi Perikanan

Produksi adalah teknik mengubah bahan mentah atau produk setengah jadi menjadi produk jadi dengan nilai tambah untuk tujuan keuntungan. Sebaliknya, sistem bisnis perikanan mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan

pemanfaatan sumber daya laut dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, 2004).

Pengolahan hasil perikanan perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan industri yang beragam. Sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004, pengolahan ikan dan hasil perikanan wajib memenuhi kriteria kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan persyaratan keamanan hasil perikanan.

1. Pengawasan dan kontrol kualitas;
2. Penetapan dan penerapan persyaratan atau standar untuk sumber daya dasar, untuk sanitasi dan teknik penanganan dan pemrosesan, untuk sarana dan prasarana, dan untuk metode pengujian;
3. Sertifikasi.

Tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk meningkatkan nilai hasil perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Upaya ini juga berupaya mendekatkan produk perikanan ke pasar dan meningkatkan popularitasnya di kalangan konsumen. Menurut temuan berbagai penelitian, ada kelompok konsumen yang membenci makanan hasil tangkapan atau budidaya tetapi mengenal roti, sosis, bakso, nugget, kerupuk, serpih, dll. Melalui pengolahan, produk perikanan dapat diubah menjadi komoditas yang menarik konsumen. Makanan dan bahan baku industri diproduksi oleh sektor pengolahan ikan. Pengolahan ikan untuk produksi makanan, termasuk dehidrasi, penggaraman, pengasapan, pengukusan, dan pengalengan, selain kegiatan pengolahan lainnya yang mempengaruhi struktur atau morfologi bahan baku secara keseluruhan, seperti sosis, bakso, burger, dan nugget ikan.

Industri tepung ikan merupakan salah satu contoh pengolahan hasil perikanan untuk keperluan produksi bahan baku industri. Prosesnya melibatkan pengeringan dan penggilingan ikan mentah untuk membuat tepung. tepung laut merupakan bahan penting dalam industri pakan ternak dan laut. Indonesia adalah importir tepung ikan terbesar di dunia. Produksi tepung ikan nasional dinilai masih belum memadai dari segi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pasokan. Banyak ikan yang dihasilkan oleh perikanan tangkap dijual sebagai ikan segar untuk konsumsi manusia; dengan demikian, pabrik tepung ikan selalu dihadapkan pada kelangkaan bahan baku, ketidakpastian, dan prosedur yang tidak aman.

7.4.1 Peran Industri Perikanan Dalam Pembangunan Ekonomi

Pada tahun 2022, total produksi perikanan sebesar 24.85 juta ton. Capaian volume produksi perikanan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 13.63 persen jika dibandingkan dengan volume produksi pada tahun 2021. Tingkat pemanfaatannya, terutama untuk spesies yang tidak ekonomis, dan belum optimal. Hal ini karena penggunaannya masih terbatas pada sediaan konvensional dan konsumsi awal. Akibatnya, ikan di atas kapal tidak ditangani dengan baik, dan ikan yang didaratkan berkualitas rendah. Sementara ekspor produk perikanan Indonesia terlihat didominasi oleh ikan dalam bentuk yang belum diolah. Akibatnya, perdagangan hasil perikanan olahan di Indonesia belum terlalu berhasil (Estradivari et al., 2017). Sebesar 57,05% dari total produksi tangkapan laut dimanfaatkan dalam bentuk basah, disusul pengolahan tradisional 30,19%, pengolahan modern 10,90%, dan pengolahan lainnya 1,86%. Pada 2005, ekspor mencapai 857.782 ton, dengan produk olahan modern mencapai 80 persen dan produk olahan tradisional hanya 6 persen (Statistika, 2007).

Selain mendekatkan produk perikanan dengan konsumen, pengolahan perikanan juga dapat berperan dalam menstabilkan

ketersediaan produk perikanan di pasar. Melalui pengolahan, permasalahan yang berkaitan dengan produk perikanan yang antara lain bersifat musiman (khususnya produk perikanan tangkap), tidak stabil, mudah rusak, berlimpah, dan memerlukan penyimpanan khusus dapat dikurangi sampai batas tertentu. Produk olahan perikanan dapat disimpan lebih lama pada suhu kamar untuk menjaga kualitas, dapat didistribusikan lebih luas melintasi batas negara dan benua dengan cara yang mudah dan layak, serta lebih murah daripada produk ikan segar atau hidup. Dengan adanya pengolahan ikan diharapkan dapat menstabilkan harga jual hasil tangkapan dan budidaya. Pada musim penangkapan, volume atau biomassa ikan yang dihasilkan oleh perikanan khususnya perikanan tangkap meningkat yang berarti penurunan nilai atau harga, begitu pula sebaliknya pada musim kemarau. Pengolahan perikanan juga dapat memberikan kepastian usaha untuk perikanan tangkap dan budidaya dengan mengambil surplus secara teratur untuk menjamin stabilitas harga.

Selain untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen dalam negeri, produk olahan perikanan juga disalurkan. Ekspor produk perikanan merupakan salah satu sumber utama keuntungan devisa nonmigas Indonesia. Namun, produk bernilai tambah yang dihasilkan di Indonesia tetap berupa ikan murah seperti tuna, tongkol, udang, cumi, sotong, rajungan, dll, yang memiliki nilai ekonomis meski tanpa pengolahan lebih lanjut. Pertumbuhan volume dan nilai ekspor hasil perikanan dapat dilihat pada (Tabel 7.1).

Tabel 7.1. Pertumbuhan Volume Ekspor

Komoditas Utama	Volume (Ton)		Nilai (000 USD)		Pertumbuhan (%)	
	2021	2022	2021	2022	Volume	Nilai
Udang	66.332	61.069	615.338	504.637	-7.93	-17.99
Tongkol- Tuna- Cakalang	49.902	63.542	215.072	280.730	27.33	30.53
Rumput Laut	65.355	73.030	108.969	144.569	11.74	32.67
Cumi- Sotong- Gurita	58.459	48.837	217.504	228.063	-16.46	4.85
Rajungan- Kepiting	7.987	5.892	165.973	96.936	-26.24	-41.60
Lainnya	96.848	97.137	343.665	375.061	0.30	9.14
Total	344.884	349.508	1.666.522	1.630.004	1.34	-2.19

Sumber: KKP Rilis Data Kelautan dan Perikanan Triwulan IV, 2022

Komoditas utama yang dominan menyumbang pertumbuhan nilai ekspor tertinggi selama periode tersebut ialah rumput laut tumbuh sebesar 32.57%, Tuna, Tongkol dan Cakalang tumbuh sebesar 30.53% dan Cumi, Sotong dan Gurita tumbuh sebesar 4.85%. Komoditas utama yang memiliki potensi tinggi untuk ekspor adalah rumput laut, Tuna, Tongkol, dan Cakalang karena memiliki pertumbuhan yang signifikan baik secara volume ekspor maupun nilai ekspor. Sebenarnya ikan kaleng jenis ini merupakan jenis produk pangan yang berpotensi untuk dikembangkan ekspor karena permintaan ikan tuna kaleng yang besar dengan pasar internasional (Maiti & Bidinger, 2010). Akan tetapi ekspor ikan segar yang belum melalui proses pengolahan paling dominan dilakukan saat ini. Negara tujuan utama ekspor adalah Malaysia, Jepang Singapura, Amerika Serikat, Tiongkok dan lainnya (Tabel 7.2).

Tabel 7.2. Negara Tujuan Utama Ekspor Ikan Segar

Negara Tujuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jepang	2,862.8	2,265.4	3,025.9	2,781.4	1,431.5
Malaysia	26,619.4	28,359.8	30,225.9	30,861.9	31,665.5
Singapura	17,528.1	15,452.2	15,591.1	15,235.2	14,597.7
Amerika Serikat	241.5	171.0	101.6	22.9	194.6
Taiwan	1,906.9	2,311.3	2,448.9	1,740.6	1,378.7
Arab Saudi	809.4	697.8	262.1	105.9	166.2
Hongkong	2,341.2	2,124.3	2,519.9	1,074.6	893.5
Tiongkok	1,725.7	1,874.1	2,617.4	3,151.5	1,207.7
Australia	367.4	320.8	271.7	197.0	220.1
Uni Emirat Arab	298.9	144.5	58.6	7.7	0.4
Lainnya	260.1	185.5	571.2	138.0	297.1
Jumlah	54,961.4	53,906.7	57,694.3	55,316.7	52,053.0

Sumber: KKP Statistik Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2017-2021, 2022

Dalam hal ingin meningkatkan nilai jual ikan yang tidak berguna dapat dilakukan dengan memodifikasi teknologi hasil perikanan (pengembangan produk perikanan) agar lebih dapat diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan selera pasar dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan di daerah tersebut, dianggap aman, dan berkontribusi pada ketersediaan makanan.

7.4.2 Prinsip-Prinsip Industri Perikanan

Industri perikanan dilandasi oleh prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Industri perikanan diprediksi akan meningkatkan nilai tambah berupa produk olahan yang dapat lebih beragam, berkualitas, dan dijual dengan harga yang lebih tinggi.

Peningkatan harga eceran produk berbasis perikanan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong peningkatan ekonomi berbasis perikanan.

2. Peningkatan daya saing: Industri perikanan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap daya saing harga produk perikanan melalui efisiensi sistem produksi, peningkatan produktivitas, hasil yang berkualitas tinggi, dan harga yang kompetitif, sehingga produknya berdaya saing tinggi di pasar domestik dan internasional.
3. Modernisasi sistem produksi hulu dan hilir: Kemajuan sektor perikanan dapat dipercepat dengan modernisasi sistem produksi yang dapat mendongkrak nilai tambah dan kualitas produk kelautan dan perikanan dengan tetap memperhatikan keseluruhan rantai nilai. Modernisasi berpotensi meningkatkan efisiensi, mempercepat dan meningkatkan produksi baik hilir maupun hulu, serta mendukung upaya pengembangan komoditas dan produk unggulan untuk bersaing di pasar global yang semakin kompetitif. Modernisasi juga akan mendorong perubahan sistem manufaktur hulu skala UMKM melalui penggunaan teknologi yang lebih efisien dan manajemen bisnis yang menguntungkan.
4. Usaha perikanan akan mendorong penguatan kerangka ekonomi dengan meningkatkan jumlah dan kualitas entitas industri perikanan dan membangun hubungan antara entitas industri, industri hilir dan hulu, industri besar, menengah, dan kecil, serta industri dan konsumen di semua tahapan nilai rantai. Untuk itu, keluasaan dan keterhubungan antar pelaku industri, khususnya hilir dan hulu, harus dikelola secara terpadu dan seimbang untuk menjamin rantai pasok, sekaligus memperkuat sistem produksi bahan baku nasional untuk memenuhi tuntutan pengolahan yang berkelanjutan industri. Selain itu,

kebijakan industri perikanan dan penanaman modal akan mendorong kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara usaha mikro, kecil, dan menengah dengan perusahaan besar melalui pengembangan komoditas nasional yang berdaya saing global dan produk-produk inovatif. Industri kecil dan besar berpotensi untuk bergabung dalam jaringan sistem manufaktur perikanan yang lebih besar guna memperkuat fondasi industri kelautan nasional.

5. Sistem pengelolaan berbasis komoditas, provinsi dan regional dengan fokus pada komoditas berkualitas tinggi: Kebijakan sektor perikanan didasarkan pada permintaan produk premium di pasar domestik dan internasional. Untuk mengintegrasikan pelaksanaannya, tergantung pada kawasan dan sistem pengelolaan kawasan, terutama distribusi sumber daya alam di kawasan potensial dan dengan sistem pengelolaan kawasan di sentra-sentra produksi potensial dan potensi pengembangan ke depan. Secara geografis, pendirian sentra industri pengolahan ditentukan oleh aksesibilitas terhadap sentra produksi bahan baku. Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi seperti jalan, irigasi, listrik, dan transportasi meningkatkan konektivitas antar pusat-pusat produksi yang merupakan komponen dari suatu jaringan ekonomi. Konektivitas antar simpul jaringan ekonomi akan membantu meningkatkan efektivitas sistem produksi dan tata niaga industri perikanan.
6. Industri perikanan akan dikelola sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menuntut keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan jangka panjang. Prinsip ini melindungi kelangsungan hidup industri perikanan dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan. Konsep ini juga

menguntungkan untuk mencapai standar internasional untuk manajemen kualitas konsumen. Perencanaan tata ruang akan memandu pengembangan sektor perikanan untuk memastikan bahwa peningkatan intensitas dan kuantitas produksi tidak berkontribusi terhadap degradasi lingkungan.

7. Industri perikanan berpotensi mendorong transformasi masyarakat agraris menjadi masyarakat industri modern dengan mempengaruhi cara berpikir dan perilaku masyarakat yang mencerminkan karakteristik industri.

7.5 Peluang Pasar Perikanan

7.5.1 Kebutuhan Sektor Perikanan Regional

Tingkat permintaan (demand) diartikan sebagai besaran permintaan sektor ekonomi daerah. Tingkat kebutuhan yang paling tinggi menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan daerah terhadap sektor ekonomi tersebut memerlukan pemasukan atau impor dari sektor lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masing-masing provinsi. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Pasal 27 UUD 1945 mengidentifikasi hak atas penghidupan sebagai salah satu hak asasi manusia. Selain itu pangan merupakan salah satu faktor penentu kualitas sumberdaya manusia (SDM). Letak geografis Indonesia, keberagaman suku, agama dan ras menyebabkan ada perbedaan dalam pemilihan komoditas pangan yang akan dikonsumsi. Beberapa daerah di Indonesia memiliki pola konsumsi dan pengeluaran yang unik terkait komoditas pilihan pangan tertentu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya ialah tingkat pendapatan penduduk dan harga komoditas di suatu wilayah. Selain itu adat budaya serta kebiasaan masyarakat juga berpengaruh terhadap pola konsumsi dan pengeluaran makanan di provinsi tersebut. Bagi penduduk Sunda dan Jawa, beras merupakan makanan pokok. Mayoritas penduduk

Papua menerima singkong atau jagung sebagai sumber makanan utama mereka. Perbedaan pilihan makanan menunjukkan adanya persepsi dan penilaian terhadap makanan sebagai komoditas penting dalam budaya tertentu (Nasution et al., 2014).

Pada kelompok ikan/udang/cumi/kerang data Susenas, Provinsi Maluku Utara memiliki konsumsi ikan dan udang segar per kapita per bulan tertinggi yaitu 3,75 Kg, sedangkan provinsi DI Yogyakarta memiliki konsumsi terendah yaitu 0,69 Kg. Dari sisi pengeluaran bulanan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertinggi yaitu Rp 123.880 per kapita, sedangkan Provinsi Jawa Tengah terendah yaitu Rp 20.747 per kapita.

Untuk mengoperasionalkan posisi ikan dalam masyarakat, kebijakan lintas sektor yang terintegrasi harus dikembangkan. Kebijakan ketahanan pangan tidak hanya terfokus pada kuantitas produksi dan konsumsi pangan, tetapi juga pada kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Dalam rangka ketahanan pangan, konsumsi makanan sehat tidak hanya memenuhi kebutuhan orang yang kelaparan, tetapi juga mempengaruhi kesehatan, kecerdasan, dan kualitas hidup masyarakat. Ikan sangat bisa dikonsumsi karena keseimbangan nutrisinya yang memadai (Damongilala, 2021). Hari Ikan Nasional (HIN) ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2014, yang menetapkan tanggal 21 November sebagai Hari Ikan Nasional (HIN). Penetapan tanggal mengacu pada Hari Perikanan Sedunia yang diperingati setiap tanggal 21 November, dan dikeluarkannya Keputusan Presiden sebagai pemacu energi bagi pemerintah Indonesia, pelaku usaha, dan semua pihak untuk melakukan reorientasi pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan manusia dengan stok ikan, gizi dan kesejahteraan sosial. Kondisi ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi masyarakat Indonesia untuk mengkonsumsi ikan sebagai bagian dari pola hidup sehat, sehingga kecerdasan dan kesehatan dapat terwujud di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dikeluarkannya

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dukungan pemerintah Indonesia terhadap pola konsumsi ikan semakin menguat. Inpres tersebut mengarahkan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk 1) meningkatkan dan juga memperluas pelaksanaan GEMARIKAN kepada masyarakat, dan 2) mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

7.5.2 Kebutuhan Komoditi Regional

Besarnya potensi sumber daya perikanan Indonesia ditunjukkan dengan peningkatan nilai ekspor perikanan sebesar 10,66% antara Januari hingga November 2022 dan periode yang sama tahun 2021. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar. Dari sisi valuasi ekspor hasil perikanan, Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,32 persen antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, ekspor hasil perikanan Jawa Timur ke mancanegara merupakan yang tertinggi di dalam negeri yaitu mencapai 381.477 ton dengan nilai ekspor sebesar 2.602.492,056 USD. Dengan total ekspor udang mencapai 84.582,49 ton dan ekspor tuna mencapai total 54.195,79 ton, negara ini menjadi pemimpin ekspor. Ekspor produk unggulan Indonesia masih didominasi oleh ikan segar, belum termasuk ikan olahan. Untuk memenuhi permintaan ikan olahan, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan nilai persentase impor produk perikanan harus 20 persen lebih rendah dari total nilai ekspor, dengan standar kualitas yang terkendali.

7.5.3 Strategi Ekspor Produk Perikanan

Untuk mengakses pasar ekspor, pengusaha harus mempertimbangkan langkah teknis dan strategis tambahan. Bergantung pada keputusan manajemen, pemasaran dapat

dilakukan di dalam negeri atau di luar negeri. Jika manajemen memutuskan untuk melakukan ekspor, langkah-langkah strategis harus diambil untuk memastikan keberhasilannya, seperti menentukan komoditas/produk apa yang dapat diekspor, apakah komoditas yang diekspor benar-benar dibutuhkan oleh pembeli dan memenuhi preferensi mereka, apakah komoditas perikanan dapat diproduksi atau dipasok oleh produsen lain, dan komoditas apa yang laris manis di pasar internasional. Produk yang laku di pasar internasional bersifat kompetitif, yang ditentukan oleh kualitasnya sesuai preferensi konsumen, penggunaan yang berpusat pada kebutuhan konsumen, harga yang berpusat pada daya beli konsumen, dan waktu pengiriman yang berpusat pada musim pemasaran, iklim setempat, negara dan konsumen. Kemudian, menjadi penting untuk menganalisis kondisi negara tujuan ekspor, termasuk populasi dalam menentukan prospek pasar, tradisi, agama, dan budaya penduduk, yang secara otomatis menentukan pilihan ekonomi, politik, dan sosial negara tersebut. Faktor-faktor tersebut meliputi potensi risiko bisnis, kondisi lingkungan negara tujuan ekspor untuk menentukan jenis produk yang diekspor dan waktu pengapalan, serta regulasi ekspor-impor.

Menentukan pasar potensial dan segmen pasar untuk memilih saluran pemasaran yang diinginkan, termasuk menunjuk importir tunggal di negara tujuan ekspor, menunjuk agen penjualan, mendirikan rumah konfirmasi atau kantor cabang, mengalihkan urusan impor ke importir umum di negara tujuan ekspor, atau mentransfer pembeli bebas. Selain itu, perlu dirancang strategi operasional yang akan dilaksanakan karena harus menganut pola bauran pemasaran 6-P, yaitu harga, promosi, tempat, kekuasaan pemerintah, dan kekuasaan parlementer. Salah satu aspek sistem promosi yang harus diperhatikan dengan seksama adalah media promosi yang akan digunakan. Media cetak dan elektronik dimanfaatkan untuk pemasaran, termasuk pameran perdagangan internasional, baik di dalam negeri maupun di luar

negeri. Selain itu, dimungkinkan melalui Atase Perdagangan Kamar Dagang Indonesia. Lembaga Penunjang Ekspor (LPE), Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (DJPEN), dan *Indonesia Trade Promotion Center* (ITPC).

Dengan mengumpulkan data impor selama kurang lebih dua sampai lima tahun di negara tujuan ekspor, maka dapat dilakukan identifikasi pasar potensial dan segmen pasar guna membuat peta pemasaran komoditas tertentu. Di negara tujuan ekspor, juga dimungkinkan untuk memeriksa alamat agen promosi secara komprehensif dan memilih yang terletak di wilayah negara tujuan ekspor pada khususnya. Siapkan brosur dan daftar harga untuk mengenalkan calon pembeli ekspor dengan barang ekspor. Ini dapat dilakukan dengan mengirimkan sampel produk, membuat brosur, dan menyusun daftar harga. Harga ini diproduksi sebagai indikator harga umum (price indicator) sehingga pembeli dapat membandingkannya dengan harga komoditas serupa di negara lain. Peningkatan kualitas ikan dan produk ikan ekspor merupakan langkah krusial lanjutan yang harus dilakukan. Dikarenakan ketatnya persaingan dalam hal kualitas dan kelangsungan hidup ikan yang dikirim. Kepatuhan terhadap standar kualitas ikan internasional dapat memfasilitasi ekspor ikan oleh nelayan komersial.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, A. N., & Alfarizi, A. 2021. Literature Review Potensi Dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut di Indonesia. *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, 3(2), 31–36.
- Damongilala, L. J. 2021. Kandungan Gizi Pangan Ikan. *Patma Media Grafindo Bandung*, 1–60.
- Estradivari, Christian, H., Fikri, F., Muhammad, Y., & Veda, S. 2017. Kawasan Konservasi Perairan. *WWF Jakarta Indonesia*. http://awsassets.worldwildlife.org/downloads/mpa_for_fisheries_wwf_indonesia_2017.pdf
- FAO. 2000. *The State of World Fisheries and Aquaculture*. FAO Fisheries Department.
- Hidayah, Z., Nuzula, N. I., & Wiyanto, D. B. 2020. Analisa Keberlanjutan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Perairan Selat Madura Jawa Timur. *Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada*, 22(2), 101. <https://doi.org/10.22146/jfs.53099>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2014. *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025*. https://www.kemendag.go.id/storage/article/content_upload/transparansi_kerja/master-plan-2011-2025-id0-1354731495.pdf
- KKP. 2022. Data Kelautan dan Perikanan Triwulan IV Tahun 2022. In *Kementrian Kelautan dan Perikanan* (Issue April).
- Maiti, & Bidinger. 2010. Buku Ajar Agribisnis Budidaya Ikan Air Tawar. *Book, Mei*, 233.
- Nasution, P. S. U., Sihombing, L., & Hasyim, H. 2014. Analisis Pendapatan Nelayan Tradisional Dibandingkan dengan Upah Minimum Regional di Kecamatan Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Agriculture and ...*, 3. <https://www.neliti.com/publications/15183/analisis-pendapatan-nelayan-tradisional-dibandingkan-dengan->

upah-minimum-regiona

- Prasetyo, K. C. 2019. Mencegah “Tragedy of The Commons” Di Teluk Sawai dengan Sasi pada Era Otonomi Daerah. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 13–29. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.294>
- Statistika, B. P. 2007. Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia. *BPS, September*, 1–15.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, 1 (2004).
- Wuryandani, D., & Meilani, H. 2011. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Untuk Menunjang Ketahanan Pangan di Indonesia. *Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 395–419.
- Zhou, S., Kolding, J., Garcia, S. M., Plank, M. J., Bundy, A., Charles, A., Hansen, C., Heino, M., Howell, D., Jacobsen, N. S., Reid, D. G., Rice, J. C., & van Zwieten, P. A. M. 2019. Balanced harvest: concept, policies, evidence, and management implications. *Reviews in Fish Biology and Fisheries*, 29(3), 711–733. <https://doi.org/10.1007/s11160-019-09568-w>

BAB 8

PAJAK DAN SUBSIDI SEKTOR PERIKANAN

Oleh Sahabuddin

8.1 Pendahuluan

Sektor perikanan menjadi salah satu sektor strategis yang dapat dikembangkan dan memiliki daya saing yang kuat di pasar internasional. Dengan luas perairan yang mendominasi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di dalamnya sangat melimpah sumber daya alam berupa keanekaragaman hasil perikanan. Mendukung Indonesia memproduksi banyak sekali hasil perikanan.

Tren konsumsi makanan khas laut terutama ikan telah menjamur di seluruh dunia. Beberapa negara seperti Jepang, Thailand, Malaysia, dan Indonesia dikenal sebagai surganya para pecinta kuliner laut (*seafood*). Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakatnya, pemerintah di masing-masing negara akan terus melakukan inovasi-inovasi baik secara kebijakan maupun teknologi agar industri perikanan terus hidup di negaranya.

Industri perikanan dianggap sebagai salah satu sektor yang memberikan sumbangsih besar dalam pendapatan negaranya disamping hasil bumi yang lain. Angka konsumsi ikan di berbagai negara dapat dikatakan cukup besar seperti Thailand memiliki angka konsumsi *seafood* per-kapita tahunan sekitar 29.17 Kg pada tahun 2017. Sedangkan Indonesia sekitar 44.67 kg, dan tertinggi dipegang oleh Malaysia sekitar 57.62 kg ditahun yang sama.1 Sedangkan negara yang tidak memiliki pantai (*landlock state*)

untuk memenuhi konsumsi seafood akan dilakukan dengan cara mengimpor dari negara lain, maka dari itu industri perikanan tidak hanya ditujukan untuk keperluan konsumsi dalam negeri saja namun juga untuk perdagangan.

Pajak dan subsidi adalah dua mekanisme kebijakan fiskal yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk mengatur industri dan mempengaruhi kegiatan ekonomi. Dalam sektor perikanan Pajak dan subsidi sering digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen ekonomi untuk mengatur sektor perikanan dan mempengaruhi kegiatan ekonomi di dalamnya.

Dalam konteks sektor perikanan, penerapan pajak dan subsidi memiliki dampak yang signifikan terhadap pengelolaan sumber daya alam, kesejahteraan nelayan, dan keberlanjutan industri perikanan (Sayre *et al*, 2001; Carraro *et al*, 1995; Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2021).

8.2 Pajak Sektor Perikanan

8.2.1 Definisi

Pajak dalam istilah bahasa Inggris “Taxes” adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah uang yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada pemerintah, biasanya berdasarkan pendapatan atau transaksi tertentu. Uang yang dikumpulkan melalui pembayaran pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan banyak lagi (Sayekti *et al*, 2020; Mardiasmo, 2017).

Menurut Soemitro (1979); Soekanto (2006) menjelaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (Peralihan Kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*publieke-uitgeven*) dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau

pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Di Negara hukum, kebijakan pemungutan pajak harus dibuatkan landasan hukum, apabila tidak dibuatkan landasan hukumnya maka pemungutan yang dilakukan oleh negara bukan masuk kategori dalam pemungutan pajak tetapi pungutan liar (Pungli).

Dalam perkembangan sektor perpajakan dewasa ini, pembayaran pajak tidak hanya terbatas beralihnya kekayaan sektor partikelir ke sektor pemerintah, karena dalam undang-undang pajak penghasilan di Indonesia yang menjadi subjek pajak bukan terbatas hanya pada sektor swasta tetapi ada juga subjek pajak yang berasal dari sektor non-swasta (Badan Usaha Milik Negara) dan (Badan Usaha Milik Daerah).

8.2.2 Fungsi Pajak

Keberadaan pajak disebabkan karena fungsi pajak yang dibutuhkan oleh setiap negara (fungsi kas negara dan fungsi mengatur), karena negara harus memberikan perlindungan dan pelayanan bagi rakyatnya. Sehingga negara menciptakan pajak untuk mengumpulkan dana, supaya dapat melindungi dan melayani rakyatnya. Bahwa posisi pajak merupakan pilar (*Penopang*) negara. Filosofi pajak klasik mengatakan bahwa "*Taxes are the sinews of the state*". Filosofi kontemporer "*Taxes are the blood of the state*", untuk membangun infrastruktur itu berasal dari pemerintah bukan dari rakyat (Mustaqiem, 2014).

Pajak dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk, termasuk pajak penghasilan (*income tax*), pajak penjualan (*sales tax*), pajak properti (*property tax*), pajak perusahaan (*corporate*

tax), dan lain-lain. Sistem perpajakan berbeda-beda di setiap negara dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti hukum perpajakan, kebijakan ekonomi, dan kondisi sosial. Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi negara dan menyediakan layanan publik bagi warganya. Setiap warga negara atau entitas bisnis yang memperoleh pendapatan atau melakukan transaksi tertentu diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan aturan dan tarif yang berlaku di negara mereka.

Pengumpulan dan pengelolaan pajak biasanya diatur oleh otoritas perpajakan yang ditunjuk oleh pemerintah, seperti badan pajak atau kementerian keuangan. Setiap warga negara atau entitas yang memiliki kewajiban pajak harus mengisi dan melaporkan informasi keuangan mereka kepada *otoritas* perpajakan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melanggar aturan perpajakan dapat berakibat pada sanksi atau denda yang berlaku.

Menurut Mustaqiem (2014) dan Mankiw (2018) menyatakan bahwa fungsi pajak dibagi dalam 4 bagian yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*) sebagai sumber pendapatan untuk negara: Fungsi paling dasar dari pajak adalah untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah. Pendapatan ini kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program dan kebijakan publik, seperti layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan keamanan nasional. Pajak merupakan sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat.
2. Fungsi Mengatur (*regulerend*) Regulasi Ekonomi: Melalui sistem perpajakan, pemerintah dapat menerapkan kebijakan ekonomi guna mengatur dan mengendalikan aktivitas ekonomi di negara tersebut. Misalnya, dengan menaikkan atau menurunkan tarif pajak atas barang-barang tertentu,

- pemerintah dapat mempengaruhi konsumsi, produksi, dan investasi dalam industri tertentu. Pajak juga dapat digunakan untuk mengontrol inflasi dan mengatasi ketimpangan ekonomi.
3. Fungsi redistribusi Pendapatan: Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih merata di masyarakat. Pajak progresif, yang mengenakan tarif yang lebih tinggi pada pendapatan yang lebih tinggi, dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan cara ini, pajak berperan dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.
 4. Fungsi stabilitas, pengendalian Eksternalitas: Eksternalitas adalah efek samping dari aktivitas ekonomi yang tidak diinternalisasi dalam harga pasar. Pajak dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengatasi eksternalitas negatif, seperti polusi lingkungan. Dengan mengenakan pajak atas polutan atau aktivitas yang menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan, pemerintah dapat memberikan insentif bagi perusahaan dan individu untuk mengurangi dampak negatifnya.

8.2.3 Tujuan dan Bentuk Pajak

Pajak dalam sektor perikanan merupakan suatu pungutan atau kontribusi finansial yang dikenakan oleh pemerintah terhadap individu atau badan usaha yang terlibat dalam kegiatan perikanan (Sayadi, 2016). Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan dari penerapan pajak dalam sektor perikanan bisa beragam, antara lain yaitu:

1. Menghasilkan pendapatan untuk pemerintah yang bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan program lainnya.
2. Mendorong keseimbangan pasar dengan mengatur harga dan distribusi produk perikanan.

3. Memberikan insentif untuk mengurangi eksploitasi berlebihan pada sumber daya perikanan dengan memberlakukan pajak pada aktivitas yang berlebihan.
4. Membiayai program-program konservasi dan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

Peraturan pajak dalam sektor perikanan dapat bervariasi dari negara ke negara, karena setiap negara memiliki sistem perpajakan yang berbeda. Menurut (Pomeroy, 1994) ada empat jenis pajak yang dapat dikenakan dalam konteks sektor perikanan yaitu:

1. Pajak penghasilan (PPh)
Dikenakan pada perusahaan atau individu yang menghasilkan keuntungan dari usaha perikanan.
2. Pajak pertambahan nilai (PPN)
Dikenakan pada produk-produk perikanan saat berpindah tangan dari produsen ke konsumen akhir.
3. Pajak ekspor dan impor
Dikenakan pada produk perikanan yang diekspor atau diimpor antara negara-negara.
4. Pajak bahan bakar
Dikenakan pada bahan bakar yang digunakan dalam proses penangkapan ikan atau pengoperasian kapal perikanan.

Secara umum beberapa aturan pajak yang dapat diterapkan dalam sektor perikanan yang meliputi pajak ekspor, pajak impor, pajak tangkapan ikan, dan pajak atas peralatan perikanan (Sayekti, 2019; Harahap, 2014; Per.men.Keu, 2015; Per.men.KKP, 2018). Penjelasan atas pajak yang dimaksud sebagai berikut:

1. Pajak Ekspor: Pajak ekspor adalah pajak yang dikenakan pada barang atau produk perikanan yang diekspor ke negara lain. Pajak ini bertujuan untuk mengontrol ekspor dan juga dapat berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah. Tarif

pajak ekspor perikanan biasanya ditetapkan sebagai persentase dari nilai produk perikanan yang diekspor.

2. Pajak Impor: Pajak impor adalah pajak yang dikenakan pada barang atau produk perikanan yang diimpor dari negara lain ke dalam wilayah suatu negara. Pajak ini bertujuan untuk melindungi industri perikanan lokal dengan membuat produk impor menjadi lebih mahal, sehingga mendorong konsumen untuk membeli produk lokal. Tarif pajak impor perikanan dapat bervariasi berdasarkan jenis produk, asal negara, atau perjanjian perdagangan internasional.
3. Pajak Tangkapan Ikan: Pajak tangkapan ikan adalah jenis pajak yang dikenakan pada jumlah ikan atau jenis ikan tertentu yang ditangkap oleh nelayan atau perusahaan perikanan. Pajak ini dapat diterapkan berdasarkan berat ikan yang ditangkap atau berdasarkan nilai ikan tersebut. Tujuan dari pajak tangkapan ikan adalah untuk mengatur eksploitasi sumber daya ikan dan mendorong praktik perikanan yang berkelanjutan.
4. Pajak atas Peralatan Perikanan: Pajak atas peralatan perikanan adalah pajak yang dikenakan pada alat dan peralatan yang digunakan dalam kegiatan perikanan, seperti kapal, jaring, pancing, dan peralatan lainnya. Pajak ini bertujuan untuk mengatur penggunaan peralatan perikanan dan juga dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi pemerintah.

8.2.4 Penerimaan Pajak Sektor Perikanan

Terdapat tiga bidang utama dalam penerimaan pajak sektor perikanan (UU Nomor 36 Tahun 2008; Peraturan direktur jenderal pajak nomor per-23/pj/2009; Direktur jenderal pajak nomor per-20/pj/2015; dan Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009) yaitu:

1. Pajak Penghasilan (PPh);
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penerimaan pajak pada sektor perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut,

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Badan usaha atau eksportir yang menjalankan usaha di sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan ditetapkan sebagai Pemungut pajak penghasilan yang ditetapkan dalam Pasal 22 Undang-Undang (UU) No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan mengenai pembelian material oleh pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul adalah badan hukum atau orang perorangan yang kegiatan usahanya adalah mengumpulkan hasil dari usaha perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, kemudian menjualnya ke badan usaha atau eksportir lain (UU Nomor 36 Tahun 2008, 2008).

Tarif dan prosedur pemungutan pajak penghasilan badan usaha atau eksportir yang melakukan usaha di bidang perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 523/2001, yang diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 23/2009. Berdasarkan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 23/2009, besaran pajak penghasilan terutang atas pembelian material oleh pemungut ditetapkan sebesar 0,25% dari harga beli sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai. Pemungut adalah badan usaha atau eksportir yang beroperasi di bidang perhutanan, perkebunan, pertanian, dan/atau perikanan (Direktur jenderal pajak nomor per-23/pj/2009, 2009).

2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pasal 4(1) Undang-Undang No. 12/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diubah oleh Undang-Undang No. 12/1994, menyatakan bahwa subjek pajak adalah orang atau badan yang memiliki hak atas tanah (secara harfiah disebut

sebagai “bumi”) dan/atau mendapat manfaat dari tanah, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau mendapat manfaat dari bangunan di atas tanah.

Pada tahun 2010, beberapa perusahaan penangkapan ikan berikut mengajukan peninjauan kembali terhadap ketentuan pasal ini ke Mahkamah Konstitusi (MK): PT West Irian Fishing Industries, PT Dwi Bina Utama, PT Irian Marine Product Development, dan PT Alfa Kurnia. Perusahaan-perusahaan penangkapan ikan tersebut berargumen bahwa PBB yang berlaku di sektor perikanan merupakan pengenaan pajak berganda, sebab sudah ada pungutan hasil perikanan (PHP) berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang No. 45/2009 yang mengubah Undang-Undang Perikanan tahun 2004. Perusahaan-perusahaan tersebut menganggap bahwa pengenaan PHP seharusnya meniadakan pengenaan PBB. Pada tahun 2012, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak permohonan dari perusahaan penangkapan ikan terkait. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menjelaskan perbedaan antara pajak dan pungutan di sektor perikanan. Menurut Mahkamah Konstitusi, PBB di sektor perikanan berkaitan dengan pemanfaatan tanah berupa wilayah laut atau wilayah perikanan sebagaimana dinyatakan dalam surat izin penangkapan (SIPI), sedangkan pungutan di sektor perikanan berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya ikan.

PBB untuk sektor perikanan dikategorikan sebagai “PBB Sektor Lainnya”. Peraturan Dirjen Pajak No. 20/2015 tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Lainnya menyatakan bahwa objek pajak PBB meliputi: Tanah (bumi) dalam bentuk perairan lepas pantai (mencakup laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, laut pedalaman, ZEE dan perairan dalam Landas Kontinen Indonesia) yang digunakan untuk Usaha perikanan tangkap, Usaha akuakultur, Jaringan

pipa, Jaringan kabel telekomunikasi, Jaringan kabel listrik, dan Jalan Tol. Bangunan dalam bentuk konstruksi teknis yang diletakan atau dibangun secara permanen di atas tanah (bumi) dalam bentuk perairan lepas pantai (mencakup laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, laut pedalaman, ZEE dan perairan dalam Landas Kontinen Indonesia) (Direktur jenderal pajak, 2015).

Tarif PBB diberlakukan terhadap Objek Pajak (tanah dan/atau bangunan) sebesar 0,5% dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Dasar penghitungan NJKP ditetapkan paling sedikit sebesar 20% dan paling tinggi sebesar 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Persentase NJKP ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Lihat Pasal 5, 6 (3), 6 (4), dan 7 Undang-Undang No. 12/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 12/1994.

3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Semua hasil produk perikanan selain ikan segar dapat dikenai PPN; menurut Undang-Undang No. 42/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, produk ikan segar tidak lagi dikenai PPN mulai tanggal 1 April 2010, hasil ikan segar tidak lagi menjadi subjek PPN (Undang-undang Nomor 42, 2009).

8.2.5 Perlakuan Pajak Sektor Perikanan di Indonesia

Kebijakan perpajakan yang berlaku saat ini menggolongkan perikanan kedalam kelompok BKP, namun tidak serta merta terhadap ikan dan komoditas perikanan lainnya dikenai PPN. Terdapat ketentuan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015, yang mengatur bahwa perikanan dikategorikan Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis yang mendapat fasilitas berupa dibebaskan dari pengenaan PPN.

Hasil perikanan memang termasuk ke dalam kelompok Barang Kena Pajak (BKP), tapi tidak serta merta dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Terdapat regulasi yang mengatur bahwa barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun budidaya adalah Barang Kena Pajak (BKP) yang bersifat strategis atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN.

Hal ini disebutkan pada pasal 1 angka 1 huruf c dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2021 yang menyatakan bahwa salah satu Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis adalah barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil pemrosesannya yang dilakukan dengan cara tertentu yang diserahkan oleh petani atau kelompok petani. Dimana hasil pertanian yang dimaksud termasuk hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perburuan atau penangkapan maupun penangkaran, dan perikanan baik dari penangkapan atau budidaya.

Diikuti juga dengan barang dan jasa tertentu lainnya yang dibebaskan dari pengenaan PPN, antara lain barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa keuangan, jasa angkutan umum, jasa kesehatan, jasa asuransi, jasa tenaga kerja, jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional, mesin, vaksin, buku pelajaran dan kitab suci, air bersih termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap, listrik, rusun sederhana, rusunami, RS, RSS, hasil kelautan perikanan, pakan ikan, ternak, bibit/benih, pakan ternak, bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak, emas batangan dan emas granula, minyak bumi, gas bumi, panas bumi, senjata/alutsista, dan alat foto udara. Hal ini merujuk pada pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang PPN.

Selain itu, terdapat pemrosesan yang diperbolehkan untuk dibebaskan dari PPN di bidang perikanan yakni dengan cara

didinginkan/dibekukan, digarami, dikeringkan/diasap, direbus, dan/atau dikemas dengan cara sangat sederhana untuk tujuan melindungi barang terkait.

Adapun, akibat dari pembebasan PPN tersebut Pajak Masukan atas perolehan hasil perikanan tidak dapat dikreditkan. Namun demikian, bagi orang atau badan yang melakukan penyerahan hasil laut tidak diwajibkan mempunyai Surat Keterangan Bebas PPN yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP).

Bagi pemerintah, tujuan dari dibebaskannya penyerahan barang hasil perikanan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang hasil perikanan adalah:

1. Mencapai keberhasilan sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha sektor perikanan
3. Memperlancar perkembangan ekonomi nasional; dan
4. Melindungi para nelayan.

8.3 Subsidi Sektor Perikanan

8.3.1 Definisi Subsidi

Subsidi merupakan bantuan atau dukungan finansial yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga lain kepada individu, perusahaan, atau sektor tertentu dengan tujuan untuk mengurangi biaya produksi, harga, atau dampak ekonomi lainnya agar dapat mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan penerima subsidi. Subsidi bisa diberikan untuk berbagai sektor, termasuk sektor perikanan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016).

Istilah "subsidi" merujuk pada dukungan atau bantuan finansial yang diberikan oleh pemerintah atau badan lain kepada suatu sektor, kelompok, atau individu guna mengurangi biaya produksi atau konsumsi barang atau jasa tertentu. Subsidi dapat berbentuk tunai, pembebasan pajak, keringanan harga, atau

berbagai bentuk lainnya, yang bertujuan untuk mendorong perkembangan atau menjaga keberlangsungan sektor atau kelompok yang menerima subsidi (Hogan *et al*, 2011; Sumaila *et al*, 2010; Sarker *et al*, 2013).

Implementasi subsidi pemerintah dapat sangat bervariasi tergantung pada negara, sektor, atau program yang dijalankan. Subsidi pemerintah dapat diberikan untuk berbagai bidang, termasuk Perikanan, energi, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya (Hogan *et al*, 2011; Sumaila *et al*, 2010; Sarker *et al*, 2013).

8.3.2 Tujuan Subsidi

Tujuan dari subsidi dalam sektor perikanan adalah untuk mendorong pertumbuhan industri perikanan, meningkatkan pendapatan nelayan, dan juga untuk memperkuat ketahanan pangan. Namun, subsidi yang tidak tepat sasaran atau berlebihan juga dapat menyebabkan masalah, seperti overkapasitas perikanan, penurunan stok ikan, dan kerusakan lingkungan akibat praktik perikanan yang tidak berkelanjutan. Menurut Sumaila *et al* (2010; 2011); Sheng *et al* (2014); World Bank (2017) subsidi dalam sektor perikanan dapat digunakan untuk berbagai tujuan diantaranya adalah:

1. Meningkatkan kapasitas produksi perikanan.
2. Mendorong investasi dalam infrastruktur dan teknologi perikanan.
3. Membantu nelayan kecil untuk meningkatkan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang diperlukan.
4. Meningkatkan keamanan pangan dan pendapatan petani ikan.

Sedangkan menurut Sayadi (2016) subsidi diberikan dalam sektor perikanan untuk tujuan seperti halnya:

1. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan industri perikanan lokal.

2. Meningkatkan daya saing perusahaan perikanan dalam negeri, terutama ketika bersaing dengan impor dari negara lain yang mungkin mendapat dukungan dari pemerintahnya.
3. Meningkatkan keberlanjutan sumber daya perikanan dengan memberikan insentif bagi praktik pengelolaan yang berkelanjutan.
4. Mengurangi tekanan ekonomi pada nelayan atau perusahaan perikanan yang mungkin mengalami kesulitan finansial.

8.3.3 Bentuk Subsidi

Menurut Pomeroy (1994) dan FAO (2021) subsidi pada sektor perikanan dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti:

1. Subsidi bahan bakar: Pemerintah memberikan bantuan finansial untuk mengurangi biaya bahan bakar yang digunakan oleh kapal perikanan.
2. Subsidi kapal: Dukungan finansial untuk pembangunan atau perawatan kapal perikanan.
3. Subsidi penelitian: Pemerintah mendukung penelitian dan inovasi di sektor perikanan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan.
4. Subsidi pemasaran: Bantuan untuk memfasilitasi pemasaran dan distribusi produk perikanan.

Sedangkan Dahuri et al (2007) mengemukakan bahwa Bentuk subsidi sektor perikanan dapat beragam dan dapat mencakup sebagai berikut:

1. Subsidi bahan bakar: Pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk harga subsidi untuk bahan bakar kapal perikanan. Ini bertujuan untuk mengurangi biaya operasional nelayan dan mendorong aktivitas perikanan.
2. Subsidi alat tangkap: Pemerintah memberikan dukungan finansial untuk pembelian, perbaikan, atau penggantian alat tangkap seperti jaring, pancing, dan alat lainnya.

3. Subsidi investasi: Pemerintah memberikan bantuan dana atau kredit dengan suku bunga rendah untuk mendukung investasi dalam infrastruktur perikanan, seperti pelabuhan, cold storage, atau fasilitas pengolahan ikan.
4. Subsidi pemantauan dan penegakan hukum: Pemerintah mendukung upaya pemantauan dan penegakan hukum untuk mencegah illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing melalui dana subsidi yang dialokasikan untuk operasi penegakan hukum dan sistem pemantauan.
5. Subsidi pengembangan teknologi: Pemerintah memberikan bantuan untuk riset dan pengembangan teknologi inovatif yang dapat meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan produktivitas sektor perikanan.

Penting untuk diingat bahwa subsidi perikanan harus dirancang dengan hati-hati untuk memastikan bahwa mereka memberikan manfaat yang diinginkan tanpa mengakibatkan dampak negatif pada lingkungan dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Kebijakan subsidi yang tepat harus didasarkan pada penelitian dan analisis yang komprehensif tentang kondisi sektor perikanan di wilayah tertentu.

8.3.4 Penerapan Kebijakan Subsidi Perikanan Indonesia

Strategi kebijakan subsidi mempunyai visi mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional yang didasarkan pada tiga pilar kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Mendorong agar pemanfaatan sumber daya laut dapat dijalankan maka Indonesia melalui tiga aturannya mencoba melegitimasi tindakan subsidi dan bantuan pemerintah dalam bidang perikanan.

Pertama, legitimasi tindakan subsidi didasarkan pada UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang mana tersebar dalam beberapa Pasal, salah satunya Pasal 17 menegaskan bahwa

pemerintah harus memfasilitasi para pelaku usaha untuk mewujudkan industri perikanan di Indonesia (Undang-Undang Nomor 32, 2014). **Kedua**, legitimasi tindakan subsidi didasarkan pada UU No. 45 Tahun 2009 perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 25 B kewajiban pemerintah terkait bantuan fasilitas untuk pemasaran (Undang-Undang Nomor 45, 2009). **Ketiga**, legitimasi tindakan subsidi didasarkan pada UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam salah satu tujuan dalam aturan ini yaitu terkait dengan menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha. Sarana dan prasarana yang dimaksud yaitu, adanya stasiun pengisian bahan bakar, kapal penangkap ikan, pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan Ikan, tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan, serta air bersih (Undang-Undang Nomor 7, 2016).

Kemudian dari tiga undang-undang tersebut dibuatlah peraturan pelaksanaannya melalui Permen KP No. 60 Tahun 2017 tentang Pedoman umum dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah di kementerian kelautan dan perikanan. Pada pasal 3 memberikan rincian jenis bantuan apa saja yang akan diberikan, ada tujuh jenis bantuan pemberian penghargaan dan beasiswa, bantuan operasional dan sarana-prasarana, rehabilitasi atau pembangunan gedung, asuransi, dan yang paling penting bantuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2017).

Sebagai bentuk kepatuhan Indonesia terhadap WTO Indonesia melakukan Notifikasi terhadap subsidi yang diterapkan seperti *National fish logistic system (slin)*; *the empowerment of community salt companies program (pugar)*; *the development of community salt cimpanies program (pugar)*; *the fishing ship vessel contruction program (inkamina)*; *the rural business development program (pump)*; *fisher insurance (asnel)* (WTO Document. 1994)

Semua program subsidi ini tidak membahayakan perdagangan internasional karena penerapan subsidi perikanan di Indonesia merupakan bentuk dari subsidi untuk menunjang produksi dalam negeri untuk mensejahterakan taraf hidup nelayan berskala kecil (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016).

Merujuk pada Dokumen Notifikasi Subsidi Indonesia ke WTO telah menjelaskan bahwa penerima manfaat dari subsidi perikanan tersebut hanya bersektor pada nelayan skala kecil dan entitas bisnis berskala kecil (UMKM).

Bentuk kepatuhan Indonesia terhadap pengaturan subsidi perikanan WTO juga ditunjukkan dengan adanya penyelarasan aturan-aturan hukum terkait subsidi dan bantuan di bidang perikanan seperti mengharuskan penggunaan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Biro Pusat Statistik. 2017. Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Trip Usaha Penangkapan Ikan di Laut Menggunakan Kapal Motor dan Perahu Motor Tempel, 2014. laman <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1852>
- Carraro, C., Sgobbi, A., & Siniscalco, D. 1995. Policy and technical aspects of the 1994 tax reform in Italy. *The World Economy*, 18(2), 243-267.
- Dahuri, R., Rais, J., & Ginting, S. P. 2007. Subsidi Perikanan. PT RajaGrafindo Persada.
- Direktur jenderal pajak nomor per - 20/pj/2015. 2015. Tata cara pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor lainnya
- Direktur jenderal pajak nomor per-23/pj/2009. 2009. Perubahan kedua atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-523/pj./2001 tentang tarif dan tata cara pemungutan, penyeteroran, serta pelaporan pajak penghasilan pasal 22 oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 2021. Fisheries Subsidies. laman <http://www.fao.org/fishery/topic/19158/en>
- Harahap, R. R. 2014. Hukum Perpajakan Indonesia. PT Raja Grafindo Persada.
- Herman, Donald H. J. 1974. "Review of Economic Analysis of Law," By Richard A. Posner, *Washington University Law Review*, Volume 1974 Issue 2, laman http://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2680&context=law_lawreview
- Hogan, R. J. (Ed.). 2011. "Subsidies: Benefits, Costs, and Disparities." Hauppauge, NY: Nova Science Publishers.

- <https://money.kompas.com/read/2014/10/21/111249326/Laut.Masa.Depan.Indonesia>, [diakses 9 Maret 2020].
- Irfansyah, D A S. 2017. *Mengamankan Laut dan Keamanan Maritim*, Pushankam UPN dan Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman R.I, Yogyakarta:2017, hlm. 53
- Ismaila, W S P Y. 2021. Penerapan Kebijakan Subsidi Perikanan Indonesia Berdasarkan Pengaturan Subsidi Perikanan WTO. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol 5, No.2
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2021). *Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2024*. Pusat Data dan Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan (PUSDIKP)
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2021. *Analisis Dampak Kebijakan Fiskal pada Sektor Perikanan Tangkap Indonesia*. laman <https://kkp.go.id/an-unit/3-berita/4859-analisis-dampak-kebijakan-fiskal-pada-sektor-perikanan-tangkap-indonesia>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2015. *Buku Kelautan dan Perikanan dalam Angka Tahun 2015*, Pusat Data Statistik dan Informasi.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2016. *Kebijakan Subsidi di Bidang Kelautan dan Perikanan*. (laman <https://kkp.go.id/djprl/article/view/1132>)
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2016. *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015*.
- Mankiw, N. G. 2018. *Principles of Economics* (8th ed.). Cengage Learning. (Chapter 9: Application: The Costs of Taxation)
- Mardiasmo. 2017. *Perpajakan*, Edisi Revisi 2017. Percetakan Andi.
- Mustaqiem. 2014. *Perpajakan dalam konteks "Teori dan hukum pajak di Indonesia"*. Mata Padi Pressindo. Yogyakarta.

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2017. 2017. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di KKP.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.09/MEN/2018. 2018. tentang Perikanan Tangkap.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.010/2017. 2017. tentang Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.011/2015. 2015. tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015. 2015. tentang Impor dan/atau Penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015. 2015. Tentang Impor Dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.
- Pomeroy, R. S., & Williams, M. J. 1994. Fisheries subsidies: Their main economic and social implications. FAO Fisheries Technical Paper, (338). laman <http://www.fao.org/3/u4220t/u4220t00.htm>
- Sarker, D., & Ross, H. (Eds.). 2013. "Handbook of Fisheries and Aquaculture." Cambridge University Press.

- Sayadi, M. H., Soltani, M., & Shabanpour, B. 2016. Economic analysis of subsidies and taxing in fishery industry: Case study of northern Iran. *Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation*, 9(5), 1013-1020. laman https://www.researchgate.net/publication/321437282_Economic_analysis_of_subsidies_and_taxing_in_fishery_industry_Case_study_of_northern_Iran
- Sayekti, N., Zain, I. H. M., & Budiyanoto, A. 2019. Analisis Dampak Kebijakan Pajak Ekspor terhadap Perikanan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kelautan dan Perikanan Unsyiah*, 4(4), 64-71.
- Sayekti, S., Wicaksono, T., & Zahroh, U. 2020. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak di Kota Surakarta. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 82(1), 47-53.
- Sayre, R., & Ribaud, M. 2001. Taxes, subsidies, and the environment. *Agricultural Outlook*, 27(1), 22-27.
- Sheng, J., & Smith, M. D. 2014. The impact of subsidies on the ecological sustainability and future profits from North Sea fisheries. *PloS one*, 9(3), e90350.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soemitro R. 1979. *Dasar dasar hukum pajak dan pajak pendapatan*. Eresco. Jakarta-Bandung
- Sumaila, U. R., Cheung, W. W. L., & Teh, L. 2011. *Economics of marine ecosystems*. Oxford University Press.
- Sumaila, U. R., Guénette, S., Alder, J., & Chuenpagdee, R. (Eds.). 2010. "Addressing the Ecological and Social Impacts of Fishing Subsidies." *Fish and Fisheries Series*, Vol. 33. Springer.
- Sumaila, U. R., Khan, A., Dyck, A., Watson, R., Munro, G., Tyedmers, P., & Pauly, D. (2010). A bottom-up re-estimation of global fisheries subsidies. *Journal of Bioeconomics*, 12(3), 201-225.

- Sumanto. 1990. Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Andi Offset.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-95/PJ/2010. 2010. Tentang penegasan perlakuan PPN atas BKP dan/atau JKP tertentu dan/atau BKP Tertentu yang bersifat strategis yang diekspor dan barang hasil pertanian yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN.
- Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008. 2008. tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. 2014. Tentang Kelautan.
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. 2009. tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. 2009. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. 2016. Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. 2016. Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Penambak Garam. Ps. 6 klasifikasi Nelayan kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, dan Nelayan Pemilik.
- World Bank. 2017. The Sunken Billions Revisited: Progress and Challenges in Global Marine Fisheries. World Bank, Washington, DC.
- WTO Document. 1994. New and full notification pursuant to article XVI. 1 of the gatt 1994 and article 25 of the agreement on subsidies and countervailing measures/G/SCM/N/315/IDN.

BAB 9

PERDAGANGAN INTERNASIONAL

HASIL PERIKANAN

Oleh Shara Jayanti

9.1 Pengertian dan Faktor Pendorong Perdagangan Internasional

Perdagangan adalah suatu kegiatan yang dapat diartikan sebagai transaksi atau pertukaran barang dan jasa. Perdagangan bisa dilakukan dalam lingkup lokal (antar daerah), nasional (dalam negeri) serta internasional (melibatkan lebih dari 1 negara). Perdagangan internasional merupakan transaksi atau pertukaran barang dan jasa antar negara yang menjalin kesepakatan bersama sebagai bentuk legalitas suatu kegiatan, kegiatan tersebut dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu ekspor dan impor, ekspor merupakan kegiatan mengirimkan barang atau menyediakan jasa untuk dijual ke negara lain sedangkan impor memiliki arti sebaliknya yaitu kegiatan suatu negara mendatangkan barang atau menggunakan jasa yang bersumber dari negara lain.

Dinamika perkembangan perdagangan internasional memang tergolong dinamis, adapun faktor-faktor yang mendorong tingkat ekspor dan impor suatu negara adalah faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi. Kedua faktor tersebut yang melatarbelakangi suatu negara untuk melaksanakan ekspor dan impor. Faktor ekonomi yang dimaksud adalah segala sesuatu yang menghasilkan materi meliputi sumber daya alam, teknologi yang sedang berkembang pesat serta *life style* masyarakat yang berhubungan dengan daya minat beli serta kebutuhan. Sumber daya alam merupakan salah satu faktor terpenting di segmen

ekonomi, hal ini dikarenakan setiap negara mampu menghasilkan sumber daya alam yang berbeda beda sehingga apabila suatu negara yang tidak mampu menghasilkan sumber daya alam tetapi kebutuhan akan bahan tersebut sangat diperlukan di negaranya, maka suatu negara akan melakukan impor dari negara lain dengan kesepakatan Bersama serta begitupula sebaliknya apabila suatu negara mampu menghasilkan sumber daya alam yang melimpah dan sudah mampu mencukupi kebutuhan di negaranya maka untuk meingkatkan nilai ekonomi dilakukan ekspor sumber daya alam tersebut ke negara lain yang membutuhkan dengan kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Teknologi juga merupakan faktor di segmen ekonomi, hal ini dikarenakan adanya teknologi konvensional serta teknologi *modern* dengan kata lain kedua teknologi ini memiliki nilai urgenitas yang berbeda beda di setiap negara, ada negara yang menginginkan pengolahan sesuatu secara konvensional ada pula yang mengharuskan melaksanakan kebutuhan hidup harus dengan teknologi *modern* untuk efisiensi dari segi ekonomi dan waktu. Sayangnya tidak semua negara memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup untuk menciptakan suatu teknologi *modern* sehingga hal ini menjadi peluang bagi suatu negara untuk menjual barang dan jasa dari kemajuan teknologi yang telah diciptakan di negaranya kepada negara lain untuk meraup keuntungan finansial, namun sebaliknya jika suatu negara belum mampu menciptakan teknologi *modern* terbaru yang canggih untuk memenuhi kebutuhan serta efisiensi ekonomis serta waktu biasanya melakukan pembelian produk teknologi maupun jasa dari negara lain (impor). Selain sumber daya alam dan teknologi ada juga *life style* yang bersumber dari penduduk atau masyarakat yang mendiami suatu negara tertentu. *Life style* ini sangat erat hubungannya dengan minat beli, dimana seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kebutuhan yang diimbangi dengan kemampuan finansial cukup maka akan menginginkan pemenuhan atas kebutuhannya meskipun barang

atau jasa tersebut belum dapat dia temukan di perdagangan lokal. Sehingga mendorong mereka untuk mengimpor suatu barang atau jasa dari negara lain, misalkan sekelompok orang yang bekerja di ladang dan ingin membuat suatu pupuk fermentasi dimana fermentatornya berasal dari bakteri yang hanya bisa dikultur di media tertentu dan media tersebut tidak diroduksi di negaranya maka hal ini mendorong untuk melaksanakan kegiatan impor sesuai kesepakatan bersama. Pada hakikatnya faktor ekonomi ini merujuk pada pelaksanaan perdagangan internasional untuk meningkatkan finansial dan memperoleh keuntungan secara materi yang dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang sedang melaksanakan kesepakatan bersama untuk ekspor dan impor.

Selain faktor ekonomi, perdagangan internasional yang meliputi ekspor dan impor juga dilatarbelakangi oleh faktor non ekonomi yang meliputi politik serta sosial budaya. Politik yang dimaksudkan disini adalah hubungan diplomatik antar negara untuk saling bekerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak atau bisa juga diartikan sebagai hubungan diplomatik suatu organisasi internasional yang menaungi beberapa negara sebagai anggota yang atas kesepakatan bersama, menjalin hubungan baik salah satunya di bidang perdagangan internasional untuk saling memajukan tingkat ekonomi suatu negara. Selain politik ada pula sosial budaya yang mempengaruhi perdagangan internasional, hal ini hanya sebagai latar belakang dari minat beli masyarakat internasional dikarenakan sosial serta budaya suatu negara pasti memiliki ciri khasmasing -masing sehingga menarik perhatian masyarakat internasional untuk lebih mengenali serta keinginan untuk membeli barang dan jasa yang bersumber dari budaya – budaya negara lain.

Perdagangan internasional memiliki banyak manfaat untuk kemajuan negarayang sudah saling sepakat untuk hal tersebut. Hal ini yang mendasari apabila suatu kegiatan perdagangan internasional tidak bertujuan untuk merugikan salah satu pihak

yang telah bersepakat, jika hal demikian terjadi maka suatu negara berhak membatalkan kegiatan perdagangan Internasional tersebut. Adapun manfaat yang harusnya didapatkan dari perdagangan Internasional adalah mampu menyuplai kebutuhan masyarakatnya, mensejahterakan masyarakat untuk meningkatkan tingkat kemakmuran negara, meningkatkan nilai devisa suatu negara yang sudah mengirimkan barang atau jasa untuk negara lain, meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta keuntungan lainnya.

9.2 Hasil Perikanan Indonesia

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang terletak diantara dua benua dan dua samudra. NKRI diapit oleh benua Asia dan benua Australia serta berada diantara jalur perdagangan laut teramai serta strategis yaitu samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu Indonesia yang beriklim tropis memiliki kekayaan aneka ragam hayati yang melimpah yang meliputi flora dan fauna yang hidup di dalamnya. Selain itu Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim terbesar di dunia. Hal ini bukan karena tanpa alasan, dimana Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki 70% wilayah lautan dan 30% wilayah daratan, selain itu memiliki lebih dari 17.500 pulau dengan garis pantai >99.000 km sehingga masyarakat di Indonesia memiliki potensi yang besar di bidang kelauran dan perikanan.

Jenis perikanan dan persebarannya yang ada di Indonesia sendiri menjadi 3 kategori yaitu, perikanan pantai (<60 mill dari bibir pantai), perikanan laut (penangkapan ikan di laut) serta perikanan darat (kegiatan budidaya perikanan yang dilakukan di daratan). Hasil dari perikanan laut meliputi ikan salmon, ikan tuna, ikan marlin, ikan tongkol, ikan sarden, ikan kakap merah, cumi-cumi, gurita, rajungan kepiting dan rumput laut serta beberapa ikan lainnya. Perikanan darat terdiri dari 2 kegiatan budidaya yaitu budidaya air tawar serta budidaya air payau. Hasil

dari budidaya air tawar yang masih menjadi keunggulan masyarakat adalah ikan lele, ikan nila, udang air tawar, ikan kakap putih, ikan gurami, ikan patin, dan lain sebagainya. Selain itu hasil dari budidaya air payau meliputi ikan kakap, ikan bandeng, ikan kerapu, udang vannamei, udang windu, dan lain sebagainya. Apabila menilik potensi perikanan Indonesia adalah yang terbesar di dunia baik untuk segmen perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

Dalam Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 tahun 2022 menyatakan bahwa potensi hasil perikanan di Indonesia terbagi menjadi 9 kelompok “Sumber Daya Ikan” (SDI) yaitu udang penaeid, ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar, ikan demersal, ikan karang, lobster, kepiting, rajungan, dan cumi-cumi. Komoditas ekspor merupakan suatu barang unggulan yang dijual ke luar negeri, barang tersebut memiliki nilai jual atau segi ekonomis yang menguntungkan. Potensi ekspor hasil perikanan Indonesia sangat diminati negara asing, hasil perikanan tersebut adalah udang, ikan tuna, ikan kakap, ikan tongkol dan ikan cakalang sedangkan untuk komoditas ekspor hasil perikanan Indonesia secara keseluruhan adalah udang, ikan tuna, ikan kakap, ikan kerapu, ikan tenggiri, ikan tongkol, tilapia, cephlopoda (octopus, squid dan cuttle fish), rajungan, kepiting, lobster, teripang dan rumput laut. Dari semua hasil perikanan di Indonesia, udang masih menjadi primadona ekspor yang bernilai jual tinggi.

Menurut Direktur Jendral Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Haeru Rahayu menyebutkan bahwa produksi udang akan terus ditingkatkan mencapai angka 1,829 juta ton pada 2023 dengan target mencapai angka 2 ton pada tahun 2024 mendatang. Budidaya udang yang akan menjadi fokus KKP supaya peningkatan setiap tahunnya mencapai 100% dan akan diusung menjadi komoditas ekspor yang pertama adalah udang vannamei (*Litopenaeus vannamei*) sebagai produk utama, udang jerbung (*Penaeus merguensis*) sebagai plasma nutfah khas dari Indonesia

serta udang windu (*Penaeus monodon*) sebagai produk ekspor premium. Saat ini Indonesia menempati peringkat ke-3 terbesar dalam ekspor udang skala Internasional, setelah Republik Ekuador dan Negara India.



Gambar 9.1. Udang *Litopenaeus vannamei* (Aruna Nakama, 2023)

Udang vanname memiliki nama latin *Litopenaeus vannamei* merupakan udang yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia sampai saat ini. Udang vanname merupakan udang yang memiliki nilai gizi hampir serupa dengan udang windu, namun secara teknis maupun nonteknis budidaya udang vannamei lebih mudah daripada budidaya udang windu sehingga udang vannamei ini menjadi salah satu produk unggulan udang untuk memenuhi kebutuhan udang di pasar lokal maupun internasional. Ketersediaan benur udang vanname sendiri juga lebih mudah untuk didapatkan daripada benur udang windu, selain itu udang

vannamei juga memiliki kelebihan yaitu lebih tahan terhadap pathogen, sudah banyak inovasi benur vanname ber-SPF (*Specific Pathogen Free*) sehingga tingkat survival rate (SR) tergolong tinggi, benur vannamei berasal dari indukan yang sudah terdomestikasi, konversi pakan yang relatif rendah serta mampu hidup pada kepadatan tinggi. Dengan keunggulan tersebut serta harga udang vannamei yang lebih ekonomis jika dibandingkan dengan udang windu maka minat masyarakat lokal dan internasional terhadap udang vannamei sangat tinggi.



Gambar 9.2. Udang Windu / *Penaeus monodon*
Sumber : (Ertman Arina dalam Pramujisunu Yoga, 2022)

Udang windu merupakan salah satu produk ekspor premium Indonesia. Udang windu memiliki nama latin *Penaeus monodon* dan merupakan udang endemik dari Indonesia. Udang windu masih menjadi produk premium dikarenakan ukuran udang windu lebih besar jika dibandingkan dengan udang vanname, udang windu juga memiliki rasa yang manis, gurih dengan kandungan gizi yang tinggi. Harga udang windu juga lebih

mahal dari udang vanname. Di pasar global udang windu dikenal dengan beberapa nama yaitu udang pancet, giant tiger prawn/ *jumbo tiger prawn* dan black tiger prawn/ *black tiger shrimp*.



Gambar 9.3. *Penaeus merguensis* (Ditjen Perikanan Budidaya KKP, 2021)

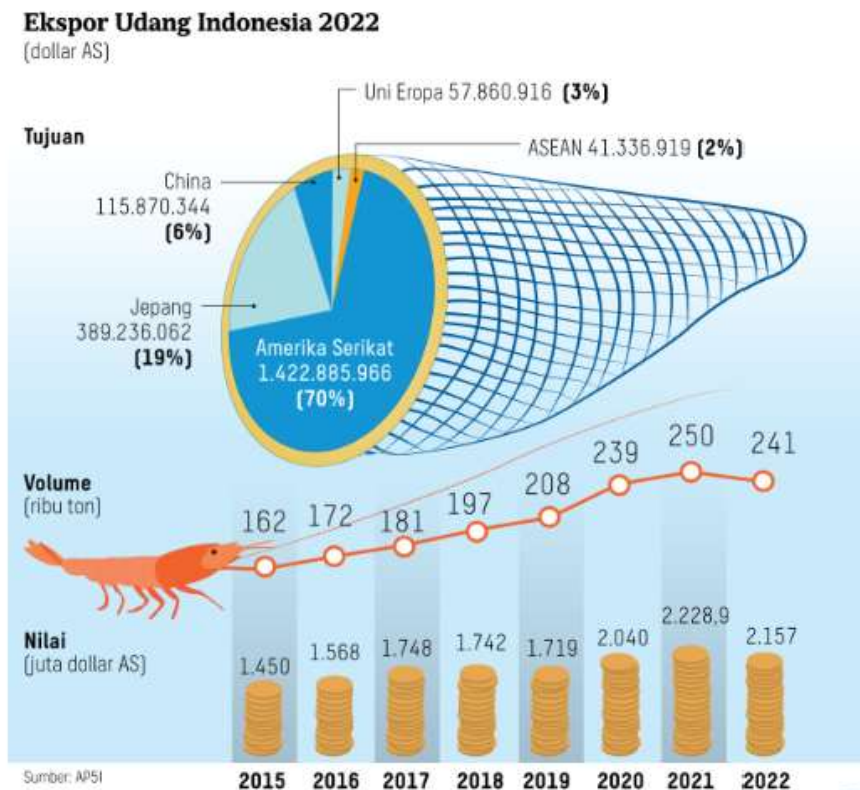
Udang jerbung atau yang biasa disebut sebagai *banana shrimp* oleh masyarakat Internasional, memiliki nama latin (*Penaeus merguensis*). Udang merguensis ini merupakan udang asli Indonesia yang merupakan hasil rekayasa genetic yang telah berhasil dilakukan oleh Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara, Jawa Tengah sejak tahun 2018. Saat ini pengembangan budidaya udang merguensis juga dilakukan multilocal di Gresik, Pemalang, Brebes dan Demak untuk meneliti habitat terbaik untuk peningkatan budidaya udang merguensis tersebut. Udang merguensis ini telah disiapkan menjadi komoditas andalan dari Indonesia dipasar ekspor yang memiliki keunggulan yaitu daya tahan tubuh udang merguensis lebih tahan terhadap penyakit serta lebih tahan terhadap iklim tropis, siklus reproduksi

yang lebih singkat jika dibandingkan dengan udang vannamee dan udang windu sehingga diharapkan produksi udang merguensis di Indonesia bisa meningkat dan mencukupi kebutuhan lokal, nasional serta target ekspor di Indonesia (Direktur Jendral Perikanan Budidaya KKP, 2022).

Menurut Direktur Jendral Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Budi Sulisttiyo menjelaskan bahwa pada Januari – April 2023, ekspor udang mencapai angka 567 juta USD atau 8,47 trilliun, nilai ini setara dengan 32,5% dari total ekspor produk perikanan di tanah air. Selain itu komoditas hasil perikanan selanjutnya adalah ekspor (ikan tuna – ikan cakalang – ikan tongkol) yang mencapai 282 juta USD, nilai ini setara dengan 16,2% dari total ekspor produk perikanan di tanah air kemudian disusul oleh komoditi ekspor cumi-cumi sotong-gurita yang mencapai angka 195 Juta USD auat setara dengan 11,2% dari total ekspor produk perikanan di tanah air . Untuk komoditi rumput laut mencapai 171 juta USD atau setara dengan angka 9,8% dari total ekspor produk perikanan di tanah air serta yang terakhir adalah komoditi rajungan dan kepiting yang mencapai 136 juta USD atau setara dengan angka 9,8% dari total ekspor produk perikanan di Indonesia. Sampai saat ini ekspor udang Indonesia dipasarkan 5 kawasan utama yaitu Amerika Serikat, Jepang, China, Uni Eropa dan negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.

Di Indonesia sendiri hasil perikanan tangkap yaitu hasil perikanan yang langsung didapatkan atau diambil dari laut yang paling tinggi pada tahun 2021 berasal dari provinsi Maluku yaitu sebesar 547. 463 ton, kemudian yang kedua berasal dari provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 534. 401 ton sedangkan tertinggi ketiga berasal dari provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 376. 127 ton (Badan Pusat Statistik, 2021). Untuk ekspor oalahan hasil perikanan

pada tahun 2019, nilai ekspor olahan rumput laut menempati peringkat ke-7 global untuk agar-agar dan peringkat ke-6 global untuk ekspor karaginan. Jumlah ekspor produk olahan ikan meningkat sebesar 10,6% dari tahun 2019 menuju tahun 2020, dengan rincian berupa komoditas ikan beku dan untuk komoditi olahan udang meningkat sebesar 7,24% dari tahun 2019 menuju tahun 2020 (Kementerian Perindustrian , 2020).



Gambar 9.4. Grafik Ekspor Udang Indonesia tahun 2022
(Indonesian Fishery Procedure's Processing and Marketing Association, 2022 dalam Grahadyarini, 2023)

Pada gambar 9.5 telah diperhitungkan bahwa jumlah ekspor udang terbesar saat ini adalah masih dengan tujuan ekspor ke negara Amerika Serikat yaitu sekitar 70% kemudian disusul oleh Jepang sebanyak 19%, China 6%, Uni Eropa 3% dan negara di kawasan ASEAN 2%, angka ini tergolong stabil untuk setiap tahunnya sehingga kualitas dari produk hasil perikanan diharapkan akan lebih meningkat dari tahun ke tahun sehingga kepercayaan pasar Internasional serta minat beli global juga diharapkan lebih meningkat juga. Jika melihat jumlah ekspor udang di negara tetangga seperti Jepang, China, dan negara di kawasan ASEAN sendiri yang juga masih menunjukkan angka yang baik maka diharapkan juga produksi udang dan kualitas udang yang dihasilkan dari budidaya di Indonesia harus meningkat setiap tahunnya supaya mampu memenuhi permintaan pasar global. Udang memang masih menjadi produk makanan yang sangat diminati oleh masyarakat global, karena selain rasa yang lezat ternyata nilai gizi yang ada di udang sangat baik bagi kesehatan karena mengandung kalium, fosfor dan kalsium serta protein yang tinggi sehingga sangat baik bagi tubuh sedangkan untuk kandungan lemak jenuh pada udang tergolong rendah yaitu hanya 0,446/100 gram.

9.3 Strategi Peningkatan Hasil Ekspor Produk Perikanan

Pemerintah Indonesia bersama para pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan beserta instansi terkait harus bekerjasama meningkatkan ekspor produk perikanan Indonesia di skala Internasional. Strategi yang diperlukan untuk meningkatkan ekspor hasil perikanan adalah sebagai berikut :

1. **Mempermudah perizinan dengan dan sosialisasi prosedur ekspor kepada masyarakat.** Upaya pemerintah melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan

Perikanan untuk mempermudah perizinan dengan dan sosialisasi prosedur ekspor kepada masyarakat. Optimalisasi dan pemutakhiran metode untuk perhitungan potensi sumber daya ikan dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan untuk dilakukan ekspor juga harus dilakukan khususnya untuk ekspor hasil perikanan tangkap.

2. **Pengembangan kerjasama sektor perikanan dengan negara lain**, seperti halnya pada tahun 2018 Indonesia melakukan sosialisasi perjanjian antara Indonesia dengan *The European Free Trade Associated (EFTA) Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA)*. Melalui implemantasi perjanjian IE-CEPA, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi ekspor produk ikan dan hasil laut di pasar Eropa dengan mengedepankan pengembangan akuakultur berkelanjutan serta bertanggung jawab. Beberapa keuntungan yang diperoleh adalah pertukaran pendapat, informasi teknologi terbaru serta pengalaman keahlian untuk memerangi *illegal fishing* hingga metode pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang berkelanjutan serta pengembangan strategi manajemen mutu dan keamanan pangan. Pada bulan Agustus tahun 2023 pemerintah Indonesia melalui Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) melaksanakan kunjungan ke Perusahaan Jepang Marusen Suisan untuk bertukar informasi dan keahlian peningkatan kualitas dan inovasi produk olahan seafood. Selain itu pada tahun 2023 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyepakati penguatan kerjasama perdagangan sector kelautan dan perikanan dengan Tiongkok. Dalam kerjasama tersebut disebutkan bahwa Unit Pengolah Ikan (UPI) akan memperoleh approval number *General Admonistration of Custom of the Republic of China (GACC)* melalui China

Import FOOD Enterprise Registration (CIFER). Produk perikanan saat ini yang banyak diekspor ke China adalah udang vanname, rumput laut, cumi-cumi, ikan tenggiri, layur, sotong, gulama, kurisi, ikan bawal dan kepiting.



Gambar 9.5. KKP sepakat penguatan Kerjasama perdagangan dengan China. (Sumber : AgroFarm, 2023)

- 3. Optimalisasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN).** SLIN merupakan suatu sistem untuk mengatur (manajemenisasi) rantai pasokan ikan dan produk perikanan, bahan dan alat produksi, informasi mulai dari pengadaan, penyimpanan sampai dengan distribusi sebagai satu kesatuan dari kebijakan untuk meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi perikanan hulu sampai hilir, pengendalian disparitas harga, serta untuk memenuhi kebutuhan konsumen (termasuk skala industri). Tujuan SLIN adalah untuk menjaga standard keamanan mutu hasil perikanan agar hasil perikanan tetap segar, tidak tercemar residu hasil cemaran, serta bebas Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), untuk menyimpan produk ikan serta

mendistribusikan ikan ke daerah konsumen dan industri. SLIN sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.5 Tahun 2014. Sistem Logistik bersifat perishable sehingga penanganan mahal dan kompleks, sehingga perlu dirumuskan strategi kelembagaan, infrastruktur distribusi dan transportasi untuk menjamin konektivitas peningkatan daya saing produk perikanan. Sistem SLIN juga dilakukan untuk mendukung kebijakan industrialisasi.

4. Mensosialisasikan Mutu Produk Perikanan Indonesia.

Sosialisasi dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan seperti lokakarya, pelatihan, seminar, penyuluhan dan pertemuan antar instansi. Ketentuan/ Standard mutu hasil perikanan yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor pasti berbeda beda, oleh karena itu juga pemerintah yang berwenang perlu memberikan edukasi melalui sosialisasi atau penyuluhan kepada pelaku usaha sector perikanan terutama pada penggunaan obat-obatan untuk mensukseskan budidaya ikan supaya tidak ada residu antibiotik yang masih terdapat pada produk perikanan sebab produk yang tidak sesuai syarat ekspor akan dikembalikan kepada produsen dan hal demikian dapat merugikan produsen serta tingkat kepercayaan konsumen global.

5. Mengembangkan Pengelolaan Perikanan Berbasis WPP

Pengembangan ekspor perikanan Indonesia seharusnya tidak didasarkan pada daerah administratif, mengingat komoditas ini sangat dinamis. Lebih baik pengembangannya berdasarkan WPP RI. Pengembangan yang didasarkan pada administratif hanya akan menimbulkan konflik dan tidak menggambarkan potensi sumber daya ikan sesungguhnya. Potensi sumber daya ikan memang lebih tepat untuk kegiatan yang mendorong pengembangan perikanan

tangkap, sedangkan perikanan budi daya lebih dinamis. Pengembangan ekspor perikanan merupakan kegiatan yang ada pada aspek pasca panen, sehingga pengembangannya bisa didasarkan pada wilayah administrasi dengan mengutamakan kegiatan perikanan tangkap sebagai fokus utama

6. Mengedepankan Prinsip Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan

Teknik Budidaya Perikanan wajib memperhatikan prinsip pengelolaan perikanan secara berkelanjutan, hal ini sejalan dengan kesadaran serta kepedulian masyarakat Internasional bahwa pemanfaatan Sumber Daya Ikan (SDI) harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Pemanfaatan sumber daya ikan dengan cara yang tidak benar seperti pukat harimau atau bahan peledak serta pakan-obat ikan yang berbahaya bagi kesehatan manusia sudah tidak dibenarkan lagi. Traceability telah menjadi pandangan negara tujuan ekspor sehingga pemanfaatan SDI harus benar benar dilakukan berdasarkan metode yang baik dan benar sesuai aturan KKP. Negara tujuan ekspor juga sangat memperhatikan pelacakan untuk mengetahui informasi terkait persyaratan keamanan pangan, penelusuran produk perikanan. Beberapa negara tujuan ekspor seperti Jepang dan negara Uni Eropa juga sudah membuat peraturan yang terdapat pada Peraturan Uni Eropa No. 1005 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa setiap perdagangan seafood di Uni Eropa harus dilakukan oleh kapal penangkapan ikan yang memiliki sertifikat penangkapan ikan yang dikeluarkan oleh instansi terkait yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan perikanan. Hal ini dilakukan untuk memrangi IUU fishing melalui larangan impor produk seafood yang ditangkap secara tidak sah atas dasar kaidah hukum Internasional yang sudah

banyak diadopsi dalam hukum nasional harus ditaati bersama. Selain itu pemanfaatan sumber daya ikan oleh pelaku usaha juga tidak boleh dengan cara mengeksploitasi pekerja di luar batas jam yang diperbolehkan serta tidak mempekerjakan anak sebagaimana yang diatur dalam hukum NKRI yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.35, Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan, sehingga terwujud kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Lukman. 2018. Hambatan dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Perikanan Indonesia. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Nusantara II. Jakarta.
- Arief M., Mahasri, G., & Taufiq Mukti, A. 2019. Peningkatan Hasil panen Udang Pada Budidaya Udang Tradisional di desa Permisian Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Untuk Mengurangi Waktu Panen Menggunakan Metode Best Management Practice (BMP). Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan, 7 (1), 17.
- Basri, Faisal dan Munandar, Haris. 2010. Dasar-dasar Ekonomi Internasional, Jakarta: Penerbit Prenada Media Group.
- FAO. 2016. The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Rome: Food and Agriculture Organization of The United Nations.
- Irwandaru Dananjaya dan Ajie Wahyujati, "Peningkatan Daya Saing Produk Lokal dalam Upaya Standardisasi Memasuki Pasar Global (Standardisasi Mutu dan Kualitas Produk Udang Windu)", UG Jurnal, Vol. 6 No. 02, 2012, hlm. 09 – 15.
- Supono. 2017. Teknologi Produksi Udang. Yogyakarta: Plantaxia
- Grahadyarini Lukita. 2023. Menakar Capaian Budidaya Udang. Kompas edisi 24 April 2023.
- Aruna Nakama. 2023. Budidaya Air Tawar Udang Vaname <https://aruna.id/id/2023/02/23/budidaya-air-tawar-udang-vaname/>
- Agrofarm. 2023. Indonesia dan China Perkuat Kerjasama Perdagangan Perikanan. <https://www.agrofarm.co.id/2023/07/indonesia-dan-china-perkuat-kerjasama-perdagangan-perikanan/>

Pramujisunu Yoga.2022. Udang Windu dan Udang Vannmei. Jala Tech https://app.jala.tech/kabar_udang/why-cant-tiger-shrimp-compete-with-vannamei-shrimp

BAB 10

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TENTANG PEMBANGUNAN PERIKANAN

Oleh Akmaluddin

10.1 Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara maritim terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, memiliki potensi besar dalam sektor perikanan. Selama beberapa dekade terakhir, Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan dan program untuk memaksimalkan potensi sektor perikanan dan menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan. Pada bab ini, kita akan membahas secara detail mengenai kebijakan-kebijakan tersebut.

Pertama, kita akan membahas sejarah kebijakan perikanan di Indonesia, mulai dari era Orde Lama hingga era modern saat ini. Ini akan memberikan konteks yang diperlukan untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut telah berkembang seiring waktu (1.2).

Selanjutnya, kita akan meneliti landasan hukum kebijakan perikanan, termasuk UUD, UU Perikanan, dan peraturan serta keputusan menteri yang relevan (1.3).

Kemudian, kita akan melihat struktur kebijakan Pemerintah dalam pembangunan perikanan, termasuk pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, konservasi sumber daya perikanan, dan penegakan hukum dan regulasi (1.4).

Kita juga akan membahas bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, termasuk melalui program dan proyek

spesifik, kemitraan dengan sektor swasta dan LSM, serta evaluasi dan pengawasan kinerja (1.5).

Bagian akhir dari bab ini akan berfokus pada kebijakan terkini Pemerintah Indonesia dalam pembangunan perikanan, termasuk strategi dan prioritas, respons terhadap isu global dan regional, serta tantangan dan peluang yang ada (1.6).

Akhirnya, saya akan menyimpulkan pembahasan dengan beberapa rekomendasi dan arah ke depan untuk kebijakan perikanan di Indonesia (1.7).

10.2 Sejarah Kebijakan Perikanan di Indonesia

Untuk memahami kebijakan perikanan Indonesia saat ini, penting untuk melihat bagaimana kebijakan ini berkembang seiring waktu. Seperti banyak negara berkembang lainnya, Indonesia telah melalui sejumlah fase dalam pengembangan kebijakan perikanan, mulai dari era Orde Lama hingga era modern saat ini.

10.2.1 Era Orde Lama

Era Orde Lama, yang dimulai setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 hingga digantikan oleh Orde Baru pada tahun 1966, ditandai oleh sejumlah tantangan yang dihadapi oleh industri perikanan. Meskipun Indonesia dianugerahi kekayaan perairan yang luas, perikanan pada masa itu tidak menjadi fokus utama dalam kebijakan pembangunan. Sektor ini sering kali ditinggalkan dan tidak mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Penangkapan ikan kebanyakan dilakukan oleh nelayan kecil dengan peralatan yang sederhana, dan belum ada investasi yang signifikan dalam teknologi atau infrastruktur perikanan. Meskipun demikian, selama periode ini terjadi peningkatan kecil dalam ekspor perikanan, meskipun masih sangat terbatas.

Sejak proklamasi kemerdekaan hingga tahun 1966, perikanan di Indonesia tidak mendapatkan perhatian yang cukup

dalam kebijakan pembangunan. Meski begitu, selama periode ini, para nelayan kecil dengan peralatan sederhana mereka berhasil memberikan kontribusi kecil pada ekonomi lokal dan ekspor perikanan. Era ini dianggap sebagai fase inisiasi kebijakan perikanan, di mana pemerintah mulai menyadari potensi sektor perikanan meski belum menempatkan fokus utama pada sektor tersebut.

10.2.2 Era Orde Baru

Era Orde Baru (1966-1998) menandai titik balik dalam sejarah kebijakan perikanan Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, pemerintah mulai mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk pengembangan sektor perikanan. Kebijakan pada masa ini mencakup pembangunan infrastruktur perikanan, seperti pelabuhan dan pasar ikan, dan peningkatan penelitian dan pengembangan. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat sektor perikanan dan meningkatkan produksi ikan. Sebagai hasilnya, produksi perikanan dan ekspor ikan meningkat secara signifikan selama periode ini. Selain itu, pemerintah juga berusaha mempromosikan penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dengan menerapkan berbagai regulasi dan standar.

Era ini merupakan periode transformasi kebijakan perikanan di Indonesia. Dengan pemerintahan yang baru di bawah Presiden Soeharto, prioritas pembangunan mulai dialihkan ke sektor-sektor yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian, termasuk perikanan. Infrastruktur perikanan mulai dibangun, termasuk pelabuhan dan pasar ikan, serta pusat-pusat penelitian perikanan. Semua ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat sektor perikanan dan meningkatkan produksi ikan. Selain itu, berbagai regulasi dan standar juga diterapkan untuk mempromosikan penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

10.2.3 Era Reformasi

Era Reformasi, yang dimulai pada tahun 1998, melihat perubahan signifikan dalam pendekatan terhadap kebijakan perikanan. Di era ini, keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat menjadi bagian integral dari kebijakan perikanan. Ada peningkatan fokus pada pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, perlindungan ekosistem, dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat pesisir. Kebijakan ini ditegaskan dalam berbagai peraturan dan undang-undang yang dikeluarkan selama periode ini. Selain itu, pemerintah juga berusaha memperkuat peran komunitas lokal dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan memberikan mereka akses yang lebih besar ke sumber daya ini.

Pada era ini kebijakan perikanan Indonesia memasuki fase baru, di mana fokusnya tidak hanya pada peningkatan produksi dan ekspor ikan, tetapi juga pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Peraturan dan undang-undang baru dikeluarkan untuk memastikan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan perlindungan ekosistem. Kebijakan ini juga menekankan pentingnya memperkuat peran komunitas lokal dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan memberikan mereka akses yang lebih besar ke sumber daya ini. Ini adalah langkah penting menuju kebijakan perikanan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

10.2.4 Era Pembangunan Modern

Dalam era modern ini, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah besar untuk mendorong pembangunan sektor perikanan yang berkelanjutan dan inklusif. Kebijakan ini mencakup peningkatan investasi dalam infrastruktur perikanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penegakan hukum yang kuat untuk melawan penangkapan ikan ilegal, dan konservasi sumber daya perikanan. Salah satu contoh

kebijakan penting adalah program "*Blue Economy*", yang bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dalam sektor perikanan.

Melalui sejarah ini, kita dapat melihat bahwa kebijakan perikanan di Indonesia telah berkembang sejalan dengan perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dari awal yang sederhana, perikanan telah menjadi sektor penting dalam ekonomi nasional dan menjadi fokus utama kebijakan pemerintah. Meskipun ada tantangan di depan, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat dan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan potensi sektor perikanan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Sejarah panjang kebijakan perikanan di Indonesia ini menunjukkan bagaimana pemerintah beradaptasi dan berevolusi untuk memenuhi tantangan dan peluang yang muncul seiring berubahnya waktu. Dengan memahami sejarah ini, kita dapat memperoleh wawasan berharga tentang bagaimana kebijakan perikanan saat ini dibentuk dan apa yang dapat kita harapkan di masa depan.

10.3 Landasan Hukum Kebijakan Perikanan

Berbagai peraturan dan hukum telah diberlakukan di Indonesia untuk membantu mengatur dan memandu pengembangan sektor perikanan. Ini mencakup Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Perikanan, dan berbagai Peraturan serta Keputusan Menteri.

10.3.1 Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjadi landasan fundamental dalam penyusunan segala jenis peraturan dan kebijakan di Indonesia, termasuk dalam sektor perikanan. Khususnya, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa, "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."1 Penegasan ini secara eksplisit menandakan bahwa sumber daya alam, termasuk sumber daya perikanan, merupakan milik bersama bangsa Indonesia yang pengelolaannya diatur oleh negara.

Peran negara dalam pengelolaan perikanan bukan hanya sebatas pengatur, tetapi juga sebagai pemegang kontrol dalam eksploitasi sumber daya alam ini. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan dan seimbang, guna memastikan manfaat yang sebesar-besar kemakmuran rakyat dapat tercapai.

Ketentuan ini juga memastikan bahwa pengelolaan dan eksploitasi sumber daya perikanan tidak dilakukan semena-mena oleh individu atau kelompok tertentu yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan keberlangsungan sumber daya perikanan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam konteks ini, negara berperan penting dalam menetapkan regulasi yang berkeadilan dan menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan.

Secara lebih spesifik, Pasal 33 UUD 1945 memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk menerbitkan berbagai regulasi dan kebijakan perikanan, seperti sistem perizinan penangkapan ikan, penetapan kuota penangkapan, hingga regulasi tentang pengelolaan dan perlindungan ekosistem perairan. Selain itu, pasal ini juga menjadi dasar konstitusional bagi pemerintah untuk melakukan berbagai upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam sektor perikanan.

Sebagai penutup, penting untuk dicatat bahwa meskipun Pasal 33 UUD 1945 memberikan wewenang kepada negara untuk mengendalikan sumber daya perikanan, namun semangat dari pasal ini adalah untuk memanfaatkannya demi kesejahteraan rakyat. Ini berarti bahwa pengelolaan perikanan harus diarahkan

pada peningkatan ekonomi rakyat, terutama komunitas pesisir dan nelayan kecil, serta peningkatan ketahanan pangan nasional.

10.3.2 Undang-Undang Perikanan

Undang-Undang Perikanan, yakni Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 dan perubahan signifikan dalam bentuk UU No. 45 Tahun 2009, adalah elemen integral dalam landasan hukum pengelolaan perikanan di Indonesia.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan merupakan tonggak penting dalam hukum perikanan Indonesia, mengatur pengelolaan sumber daya perikanan di seluruh nusantara. Tujuan utama undang-undang ini adalah memastikan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, dan berkeadilan.

Dalam hal ini, berkelanjutan merujuk pada pentingnya menjaga ketersediaan sumber daya ikan jangka panjang dengan melibatkan mekanisme kontrol seperti penetapan kuota dan musim penangkapan, serta perlindungan habitat penting seperti terumbu karang dan mangrove. Orientasi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir merujuk pada prioritas untuk memastikan bahwa masyarakat pesisir, yang sering kali sangat bergantung pada perikanan, mendapatkan manfaat yang merata dari pengelolaan perikanan.

UU No. 31 Tahun 2004 juga memberikan penekanan kuat pada pengembangan dan promosi perikanan berkelanjutan melalui pendidikan, penelitian dan pengembangan teknologi. Pasal ini mencerminkan pengakuan bahwa kemajuan dalam pengetahuan dan teknologi dapat berperan penting dalam mempromosikan pengelolaan perikanan yang efisien dan berkelanjutan.

Perubahan signifikan terjadi ketika UU ini diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009. Perubahan ini memperkenalkan ketentuan yang lebih ketat terhadap pelaku penangkapan ikan ilegal,

peningkatan hukuman bagi pelanggar, dan upaya lebih intensif dalam penegakan hukum. Ini mencerminkan peningkatan komitmen Indonesia untuk memerangi penangkapan ikan ilegal, yang telah merusak industri perikanan dan lingkungan.

Selain itu, UU No. 45 Tahun 2009 juga memperkuat peran serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Peraturan ini mendorong masyarakat lokal untuk berperan aktif dalam pengawasan dan penegakan hukum, serta pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah mereka.

Selanjutnya, UU ini menetapkan kerangka kerja untuk perizinan dan regulasi yang transparan dan bertanggung jawab untuk aktivitas perikanan. Ini mencakup semua aspek aktivitas perikanan, mulai dari penangkapan dan budidaya, hingga pengolahan dan pemasaran. Kerangka ini dirancang untuk memastikan bahwa semua aktivitas perikanan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

10.3.3 Peraturan dan Keputusan Menteri

Berbagai peraturan dan keputusan menteri telah dikeluarkan seiring berjalannya waktu untuk memandu dan memperjelas pembangunan sektor perikanan di Indonesia, dengan melibatkan aspek produksi, infrastruktur, dan perlindungan lingkungan maritim.

Salah satu peraturan penting adalah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 75 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019. Dokumen ini merinci strategi penting yang harus diadopsi untuk meningkatkan produksi ikan, mengembangkan infrastruktur perikanan, dan melindungi lingkungan maritim. Strategi ini mencakup peningkatan pengetahuan dan kemampuan nelayan, modernisasi kapal dan alat tangkap, peningkatan pengawasan penangkapan ikan, dan peningkatan sistem manajemen perikanan.

Rencana Strategis ini juga mengakui pentingnya pelestarian lingkungan maritim dan pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Ini melibatkan perlindungan dan pemulihan habitat penting, seperti terumbu karang dan hutan mangrove, serta peningkatan upaya penanggulangan perubahan iklim dan pencemaran laut.

Strategi ini mencakup pengembangan dan implementasi teknologi ramah lingkungan, promosi perikanan berkelanjutan, dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya perikanan dan lingkungan maritim. Ini mencerminkan pengakuan bahwa peningkatan produksi ikan dan pembangunan infrastruktur perikanan harus dilakukan dengan cara yang mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat lokal.

Sebagai contoh peraturan yang lebih baru, Keputusan Menteri No. 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menetapkan kerangka kerja untuk pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan inklusif². Dokumen ini memberikan pedoman tentang bagaimana perikanan harus dijalankan untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dan sosial sambil meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan komunitas lokal.

Peraturan ini menetapkan pedoman untuk pengelolaan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk penetapan zona untuk berbagai jenis aktivitas perikanan, perlindungan habitat penting, dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan perikanan. Ini mencakup pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan, yang mengakui pentingnya menjaga keseimbangan antara kegiatan manusia dan kesehatan ekosistem.

Selain itu, Peraturan ini juga mencakup pedoman untuk penyelesaian konflik dan promosi kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan dalam sektor perikanan. Ini mencerminkan pengakuan bahwa pengelolaan perikanan yang efektif dan

berkelanjutan membutuhkan partisipasi dan kerjasama dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri perikanan, nelayan, dan masyarakat lokal.

Melalui berbagai peraturan dan keputusan menteri ini, Pemerintah Indonesia terus berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor perikanan yang berkelanjutan dan inklusif, yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia.

10.4 Struktur Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Perikanan

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam pembangunan perikanan berfokus pada empat area utama: pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, konservasi sumber daya perikanan, dan penegakan hukum dan regulasi.

10.4.1 Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur perikanan mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan kapasitas dan kondisi pelabuhan perikanan, pengembangan pasar ikan modern, peningkatan kualitas transportasi perikanan, hingga pengembangan teknologi perikanan terkini. Pemerintah, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah berkomitmen untuk memperbaiki infrastruktur ini agar mampu mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor perikanan. Lebih lanjut, infrastruktur yang baik akan memfasilitasi akses nelayan dan pelaku industri perikanan ke pasar dan layanan penting lainnya.

Peningkatan infrastruktur perikanan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan sektor perikanan. Infrastruktur yang mendukung tidak hanya mempengaruhi produktivitas dan efisiensi, tetapi juga menjadi penunjang dalam pengembangan sektor perikanan yang berkelanjutan dan inklusif.

1. Pelabuhan Perikanan

Pembangunan dan peningkatan pelabuhan perikanan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam membangun infrastruktur perikanan. Pelabuhan perikanan yang memadai akan memfasilitasi akses nelayan ke pasar, memastikan efisiensi dalam pengelolaan hasil tangkapan, serta meminimalkan kerugian pasca-tangkap. Kapasitas pelabuhan perikanan juga ditingkatkan untuk menampung volume tangkapan yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan produktivitas nelayan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah merancang dan menerapkan berbagai program untuk meningkatkan fasilitas dan layanan di pelabuhan perikanan, termasuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, seperti dermaga, gudang penyimpanan, dan fasilitas penanganan hasil perikanan.

Pada level strategis, pemerintah juga telah berinvestasi dalam teknologi informasi dan komunikasi untuk memperbaiki manajemen dan operasional pelabuhan perikanan. Penggunaan teknologi seperti sistem pelacakan dan pelaporan hasil tangkapan secara real-time, serta sistem informasi pasar yang dapat memberikan informasi harga ikan terkini, telah memungkinkan nelayan dan pedagang untuk memaksimalkan nilai hasil tangkapan dan mengurangi kerugian pasca-tangkap.

Namun, pembangunan dan peningkatan pelabuhan perikanan bukanlah tantangan yang mudah. Beberapa hambatan yang dihadapi termasuk keterbatasan dana dan sumber daya, kurangnya koordinasi antara berbagai instansi pemerintah dan pemangku kepentingan, serta tantangan dalam menerapkan dan mengadaptasi teknologi baru. Untuk mengatasi hambatan ini, pemerintah perlu melakukan inovasi

dalam pendanaan dan manajemen proyek, serta membangun kemitraan dengan sektor swasta dan LSM.



Gambar 10.1. Kapal nelayan sandar di dermaga Pelabuhan Perikanan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur
(Sumber :

<https://www.antaranews.com/berita/2656021/kkp-afd-bangun-4-pelabuhan-perikanan-berwawasan-lingkungan>)

Di sisi lain, peningkatan infrastruktur pelabuhan perikanan juga harus didukung oleh peningkatan kapasitas SDM, terutama dalam hal keterampilan dan pengetahuan nelayan dan pekerja pelabuhan dalam manajemen dan operasional pelabuhan perikanan. Oleh karena itu, program pelatihan dan pendidikan menjadi sangat penting, baik untuk nelayan maupun pekerja pelabuhan.

Peningkatan pelabuhan perikanan juga perlu dikaitkan dengan upaya pelestarian lingkungan dan sumber daya perikanan. Pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan dan operasional pelabuhan perikanan

dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, misalnya melalui penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan limbah yang efektif.

Sementara itu, dalam menghadapi isu global dan regional, seperti perubahan iklim dan penangkapan ikan ilegal, pemerintah perlu mempersiapkan pelabuhan perikanan untuk beradaptasi dan merespons secara efektif. Misalnya, pembangunan dan peningkatan infrastruktur pelabuhan perikanan harus mempertimbangkan dampak dan risiko perubahan iklim, seperti naiknya permukaan laut dan perubahan pola cuaca⁴. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kerja sama regional dan internasional dalam pengelolaan pelabuhan perikanan, termasuk dalam hal penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal.

Pembangunan dan peningkatan pelabuhan perikanan merupakan tantangan yang kompleks, namun juga merupakan peluang besar untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor perikanan di Indonesia. Melalui strategi dan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat memanfaatkan peluang ini untuk mencapai tujuan pembangunan perikanan yang berkelanjutan dan inklusif.

2. Pasar Ikan Modern

Pasar ikan modern juga menjadi fokus dalam pembangunan infrastruktur perikanan. Pasar ikan modern memiliki standar sanitasi dan hygiene yang lebih baik, serta fasilitas penjualan dan pemasaran yang lebih baik. Dengan pasar ikan modern, diharapkan kualitas produk perikanan dapat terjaga, dan nilai jualnya dapat ditingkatkan.



Gambar 10.2. Suasana Pasar Ikan Modern Muara Baru ini mirip dengan Tsukiji Fish Market yang berada di negara Jepang. (Sumber :

<https://travel.kompas.com/read/2019/03/23/140000727/tips-belanja-sambil-wisata-nyaman-di-pasar-ikan-modern-muara-baru?page=all>)

Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah telah merancang berbagai program dan inisiatif, seperti pembangunan dan renovasi pasar ikan, peningkatan fasilitas penanganan dan penyimpanan ikan, serta pelatihan dan pendidikan bagi pedagang ikan untuk mematuhi standar sanitasi dan hygiene.

Membangun dan merenovasi pasar ikan modern bukanlah tugas yang mudah. Tantangan yang dihadapi termasuk pembiayaan, pengadaan lahan, dan koordinasi antar-

instansi. Namun, dengan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, dan komunitas lokal, berbagai tantangan tersebut dapat diatasi.

Pemerintah juga telah meluncurkan program untuk meningkatkan fasilitas penanganan dan penyimpanan ikan di pasar. Ini mencakup pembelian peralatan seperti freezer dan chiller, serta peningkatan sanitasi dan kebersihan pasar. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan kualitas produk perikanan, memperpanjang umur simpan, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan para pedagang.

Namun, fasilitas dan infrastruktur yang baik tidak akan berarti banyak tanpa peningkatan kapasitas SDM. Oleh karena itu, pemerintah juga telah menyelenggarakan berbagai pelatihan dan pendidikan bagi pedagang ikan. Topik pelatihan mencakup penanganan ikan yang benar, kebersihan pribadi dan tempat penjualan, serta pemasaran dan layanan pelanggan. Dengan pengetahuan dan keterampilan ini, pedagang ikan dapat memberikan produk berkualitas tinggi dan layanan yang baik kepada konsumen, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan mereka.

Selain itu, pemerintah juga telah berupaya untuk mempromosikan pasar ikan modern kepada masyarakat luas, baik melalui kampanye pemasaran maupun penyediaan informasi yang mudah diakses tentang lokasi dan layanan pasar. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menarik lebih banyak konsumen ke pasar ikan modern, dan dengan demikian meningkatkan permintaan dan harga produk perikanan.

Pasar ikan modern juga berperan penting dalam penegakan standar sanitasi dan kebersihan, yang merupakan bagian penting dari keamanan pangan. Dengan melakukan pengawasan dan penegakan standar secara rutin, pemerintah dapat memastikan bahwa produk perikanan yang dijual di

pasar aman untuk dikonsumsi, dan dengan demikian melindungi kesehatan konsumen.

Dengan demikian, pembangunan pasar ikan modern merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor perikanan. Meskipun tantangan yang dihadapi cukup berat, melalui strategi dan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat mencapai tujuan ini dan membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat luas.

3. Transportasi Perikanan

Dalam rangka mempercepat distribusi dan meminimalkan kerusakan dan kerugian pasca panen, pemerintah juga fokus pada peningkatan kualitas transportasi perikanan. Hal ini mencakup peningkatan jaringan transportasi dan logistik, pembangunan dan peningkatan jalan dan infrastruktur transportasi lainnya, serta peningkatan kapasitas dan efisiensi transportasi hasil perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan lembaga lainnya untuk merancang dan menerapkan berbagai kebijakan dan program, seperti pembangunan dan peningkatan jaringan transportasi, peningkatan kapasitas dan kualitas armada transportasi, dan peningkatan sistem dan teknologi manajemen logistik.

Pembangunan dan peningkatan jaringan transportasi perikanan berarti memperluas cakupan akses ke daerah-daerah perikanan, baik di perairan pedalaman maupun pesisir. Hal ini memungkinkan hasil tangkapan ikan yang segar untuk mencapai pasar dengan lebih cepat dan dalam kondisi yang baik, sehingga mengurangi kerugian pasca-tangkap. Pembangunan ini melibatkan perbaikan dan peningkatan jalan, jembatan, dan infrastruktur transportasi lainnya, serta peningkatan akses ke layanan transportasi seperti bus dan truk perikanan.



Gambar 10.3. Kapal Perikanan Bantuan Dirjen Perikanan Tangkap untuk Nelayan pada tahun 2022

(Sumber : <https://newsanalisa.com/terbitkan-juknis-bantuan-pemerintah-subsektor-perikanan-tangkap-ta-2022-kkp-mulai-siapkan-calon-penerima/>)

Selain infrastruktur, kualitas dan kapasitas armada transportasi juga menjadi fokus pemerintah. Dengan menambah dan meningkatkan armada transportasi, volume hasil tangkapan yang dapat diangkut dan didistribusikan menjadi lebih besar. Ini termasuk peningkatan kapasitas dan kondisi kapal ikan, truk perikanan, dan peralatan transportasi lainnya. Selain itu, pemerintah juga memberikan pelatihan kepada operator dan pekerja transportasi perikanan tentang penanganan dan transportasi hasil tangkapan yang tepat.

Manajemen logistik juga merupakan aspek penting dalam distribusi hasil perikanan. Peningkatan sistem dan teknologi manajemen logistik berarti membuat proses distribusi lebih efisien dan transparan, sehingga dapat mengurangi kerugian dan penundaan. Ini mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, seperti

sistem pelacakan dan pelaporan real-time, serta sistem informasi manajemen logistik terpadu.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan lembaga lainnya, telah merancang dan menerapkan berbagai kebijakan dan program untuk mencapai tujuan ini. Misalnya, mereka telah meluncurkan program untuk memperluas jaringan transportasi perikanan, meningkatkan kapasitas dan kualitas armada transportasi, dan memperbaiki sistem dan teknologi manajemen logistik.

Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam upaya ini, seperti pembiayaan, koordinasi antar-instansi, dan adaptasi teknologi baru. Oleh karena itu, pemerintah harus terus berupaya untuk mengatasi hambatan ini dan mencari solusi inovatif.



Gambar 10.4. Aplikasi Alat Transportasi Ikan Segar Roda Dua (ALTIS-2) oleh pedagang ikan keliling di Cirebon

(Sumber :

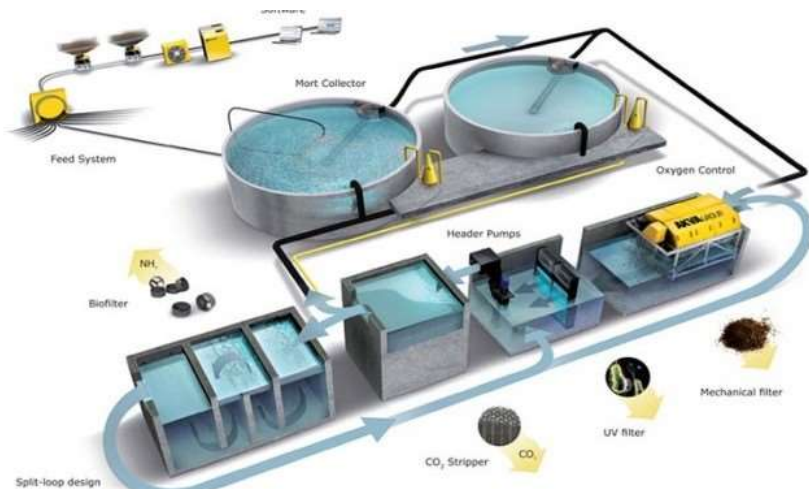
<http://www.mekanisasikp.web.id/2020/01/aplikasi-altis-2-oleh-pedagang-ikan.html>)

Dengan demikian, peningkatan kualitas transportasi perikanan merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk memajukan sektor perikanan. Dengan jaringan transportasi yang lebih baik dan manajemen logistik yang lebih efisien, hasil tangkapan ikan dapat didistribusikan dengan lebih cepat dan dalam kondisi yang lebih baik, sehingga mengurangi kerugian pasca-tangkap dan meningkatkan pendapatan nelayan.

4. Pengembangan Teknologi Perikanan

Adopsi dan penerapan teknologi perikanan terkini juga menjadi fokus dalam pembangunan infrastruktur perikanan. Teknologi perikanan yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor perikanan, serta dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah merancang dan menerapkan berbagai program penelitian dan pengembangan teknologi perikanan, termasuk teknologi penangkapan ikan yang berkelanjutan, teknologi pengolahan dan pengawetan ikan, teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen perikanan, serta teknologi lainnya yang mendukung operasional dan keberlanjutan sektor perikanan.



Gambar 10.5. Sistem teknologi Recirculating Aquaculture System (RAS) (Sumber : <https://www.agronet.co.id/detail/travela/teknologi/5263-Teknologi-RAS-untuk-Peningkatan-Budidaya-Perikanan>)

Pembangunan infrastruktur perikanan merupakan elemen penting dalam strategi pemerintah untuk memperkuat sektor perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan infrastruktur yang memadai, diharapkan sektor perikanan dapat beroperasi dengan efisien dan efektif, dan hasil perikanan dapat mencapai pasar dengan kondisi terbaik, sehingga meningkatkan nilai tambah dan pendapatan bagi nelayan dan pelaku industri perikanan lainnya.

10.4.2 Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia dalam sektor perikanan menjadi area yang tak kalah penting. Kebijakan pemerintah di bidang ini mencakup penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan bagi nelayan dan pekerja sektor perikanan, serta peningkatan penelitian dan pengembangan dalam bidang

perikanan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas nelayan dan pekerja perikanan. Di samping itu, pemerintah juga mendorong inovasi dan peningkatan teknologi perikanan melalui berbagai program penelitian dan pengembangan.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam sektor perikanan merupakan hal yang krusial dalam memastikan keberlanjutan dan produktivitas sektor ini. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah melakukan serangkaian inisiatif dalam hal ini. Berikut ini adalah beberapa elemen utama dalam pengembangan SDM sektor perikanan:

1. Pelatihan dan Pendidikan

Penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan bagi nelayan dan pekerja sektor perikanan menjadi agenda utama dalam pengembangan SDM. Pendidikan dan pelatihan ini meliputi berbagai aspek, mulai dari teknik penangkapan ikan yang berkelanjutan, pengolahan hasil tangkapan, hingga pemasaran hasil perikanan.

Selain itu, program pelatihan juga dirancang untuk meningkatkan pemahaman nelayan dan pekerja perikanan terhadap regulasi dan kebijakan yang ada, serta membantu mereka memahami pentingnya pelestarian lingkungan dan manajemen sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

Pendidikan dan pelatihan bagi nelayan dan pekerja perikanan merupakan bagian penting dari strategi pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor perikanan. Melalui pendidikan dan pelatihan, nelayan dan pekerja perikanan dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka secara efisien dan berkelanjutan.



Gambar 10.6. Pelatihan Peningkatan Keterampilan Nelayan dengan materi Teknik Perawatan Mesin Kapal dan Alat Tangkap Jaring di UPTD PAPLUWU DKP Jabar.

(Sumber : <https://dkp.jabarprov.go.id/pelatihan-peningkatan-kapasitas-keterampilan-nelayan/>)

Teknik penangkapan ikan yang berkelanjutan merupakan aspek penting yang diajarkan dalam program pelatihan. Teknik ini mencakup penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, penentuan waktu dan lokasi penangkapan yang tepat, dan penerapan praktek-praktek penangkapan yang berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penangkapan ikan dilakukan dengan cara yang minim mengganggu ekosistem perairan dan menjaga ketersediaan stok ikan untuk jangka panjang.

Pengolahan hasil tangkapan juga menjadi fokus dalam pelatihan. Hal ini mencakup pengetahuan dan keterampilan dalam pengolahan dan pengawetan hasil tangkapan, termasuk cara mengolah ikan menjadi berbagai produk, penggunaan teknologi pengawetan, dan penerapan standar sanitasi dan

hygiene. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai jual hasil tangkapan dan mengurangi kerugian pasca-tangkap.

Pemasaran hasil perikanan juga menjadi aspek penting dalam pelatihan. Hal ini meliputi pengetahuan dan keterampilan dalam pemasaran dan bisnis, termasuk cara memasarkan dan menjual produk perikanan, penggunaan teknologi digital dalam pemasaran, dan pengetahuan tentang pasar perikanan domestik dan internasional. Tujuannya adalah untuk membantu nelayan dan pekerja perikanan meningkatkan pendapatan mereka dan mencapai keberlanjutan ekonomi.

Selain itu, program pelatihan juga dirancang untuk meningkatkan pemahaman nelayan dan pekerja perikanan terhadap regulasi dan kebijakan perikanan. Hal ini meliputi pengetahuan tentang hukum dan regulasi perikanan, hak dan tanggung jawab mereka sebagai nelayan dan pekerja perikanan, dan cara berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan perikanan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa mereka mematuhi hukum dan regulasi dan berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

Pelestarian lingkungan dan manajemen sumber daya perikanan yang berkelanjutan juga menjadi fokus dalam pelatihan. Hal ini mencakup pengetahuan tentang ekosistem perairan, manajemen sumber daya perikanan, dan dampak aktivitas perikanan terhadap lingkungan. Tujuannya adalah untuk membantu mereka memahami pentingnya pelestarian lingkungan dan manajemen sumber daya perikanan yang berkelanjutan, dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam upaya ini.



Gambar 10.7. Nelayan dilatih latihan dasar keselamatan yang diselenggarakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kendal
(Sumber : <https://www.ayosemarang.com/semarang-raja/779058751/nelayan-kendal-dibekali-latihan-dasar-keselamatan-pelayaran>)

Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi nelayan dan pekerja perikanan merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk membangun sektor perikanan yang produktif, berkelanjutan, dan adil. Melalui pendidikan dan pelatihan, nelayan dan pekerja perikanan dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka secara efisien dan berkelanjutan, dan berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

2. Penelitian dan Pengembangan

Peningkatan penelitian dan pengembangan di bidang perikanan juga menjadi area penting dalam pengembangan SDM. Tujuannya adalah untuk menciptakan inovasi dan peningkatan teknologi perikanan yang dapat mendukung

peningkatan produktivitas dan keberlanjutan sektor perikanan.

Pemerintah mendorong kolaborasi antara lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan industri perikanan dalam penelitian dan pengembangan ini. Hal ini dilakukan agar hasil penelitian dan pengembangan dapat langsung dimanfaatkan oleh industri perikanan dan memberikan manfaat langsung bagi nelayan dan pekerja perikanan.

Peningkatan penelitian dan pengembangan (R&D) di bidang perikanan merupakan komponen penting dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan kemajuan sektor perikanan secara keseluruhan. Dengan menciptakan inovasi dan teknologi perikanan yang baru, R&D berpotensi mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan sektor perikanan di Indonesia.

Untuk mencapai ini, pemerintah telah memperkuat kerja sama dan kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam R&D perikanan, termasuk lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan industri perikanan. Melalui pendekatan kolaboratif ini, pemerintah berusaha memastikan bahwa hasil penelitian dan pengembangan dapat langsung dimanfaatkan oleh industri perikanan, memberikan manfaat langsung bagi nelayan dan pekerja perikanan, dan mendukung kebijakan dan strategi pembangunan perikanan yang berkelanjutan.



Gambar 10.8. Deklarasi Kerjasama Riset Rumput Laut dengan Negara ASEAN

Salah satu fokus utama dalam penelitian dan pengembangan ini adalah pengembangan teknologi perikanan yang baru dan inovatif. Ini mencakup pengembangan alat tangkap yang lebih efisien dan ramah lingkungan, teknologi pengolahan dan pengawetan hasil tangkapan yang lebih baik, teknologi pemantauan dan manajemen sumber daya perikanan, dan teknologi informasi dan komunikasi untuk pemasaran dan bisnis perikanan.

Selain itu, penelitian dan pengembangan juga difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang ekosistem perairan dan sumber daya perikanan. Hal ini mencakup penelitian tentang biologi dan ekologi ikan, dinamika populasi dan stok ikan, dampak aktivitas perikanan terhadap ekosistem perairan, dan dampak perubahan iklim dan perubahan sosial-ekonomi terhadap sektor perikanan.

Dalam mendukung penelitian dan pengembangan ini, pemerintah juga telah meningkatkan investasi dan dukungan terhadap infrastruktur dan fasilitas penelitian, pendidikan dan pelatihan bagi peneliti dan pekerja perikanan, serta

pengembangan dan penyebaran teknologi perikanan yang baru dan inovatif.

Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM di bidang perikanan, tetapi juga membantu menciptakan inovasi dan peningkatan teknologi perikanan yang dapat mendukung peningkatan produktivitas dan keberlanjutan sektor perikanan. Ini, pada gilirannya, dapat membantu Indonesia memanfaatkan potensi dan peluang sektor perikanan secara maksimal, serta menghadapi berbagai tantangan dan isu yang dihadapi oleh sektor perikanan.

Dengan demikian, peningkatan penelitian dan pengembangan di bidang perikanan merupakan area penting dalam pengembangan SDM dan pembangunan perikanan di Indonesia. Melalui peningkatan penelitian dan pengembangan, Indonesia dapat menciptakan inovasi dan teknologi perikanan yang baru, meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor perikanan, dan memberikan manfaat langsung bagi nelayan dan pekerja perikanan.



Gambar 10.9. Hasil Kerjasama Riset BRIN dan PT Evogaia

Karya Indonesia yaitu Biji Plastik dari Rumput Laut.

(Sumber : <https://www.brin.go.id/news/110393/hasilkan-biji-plastik-dari-rumput-laut-brin-dan-pt-evogaia-karya-indonesia-sepakat-lanjutkan-kerja-sama-riset>)

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan SDM di sektor perikanan juga mencakup pemberdayaan masyarakat pesisir dan komunitas nelayan. Program-program pemberdayaan ini meliputi peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat, pendampingan dalam pengelolaan sumber daya perikanan, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang perikanan.

Dengan pemberdayaan ini, diharapkan masyarakat pesisir dan komunitas nelayan dapat berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar dari aktivitas perikanan.

Melalui strategi-strategi ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa SDM di sektor perikanan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan sektor perikanan. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk terus mempromosikan inovasi dan peningkatan teknologi perikanan melalui penelitian dan pengembangan.

10.4.3 Konservasi Sumber Daya Perikanan

Konservasi sumber daya perikanan menjadi salah satu area fokus utama pemerintah. Kebijakan ini mencakup perlindungan dan pemulihan habitat penting, seperti terumbu karang dan hutan mangrove, dan pengelolaan berkelanjutan sumber daya perikanan. Pemerintah menerapkan berbagai strategi, termasuk pengendalian penangkapan ikan dan pengembangan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Selain itu, inisiatif konservasi ini juga melibatkan komunitas lokal, melalui pemberdayaan dan partisipasi aktif dalam kegiatan konservasi.

Konservasi sumber daya perikanan memegang peran penting dalam kebijakan pemerintah Indonesia untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan sektor perikanan dan

pelestarian lingkungan. Ada tiga elemen utama dalam upaya ini: perlindungan dan pemulihan habitat, pengelolaan berkelanjutan sumber daya perikanan, dan partisipasi komunitas lokal. Masing-masing elemen ini diterapkan melalui berbagai strategi dan inisiatif yang dirancang untuk memastikan keberlanjutan sektor perikanan.



Gambar 10.10. Nyimas Laula Pariama Hutasoit, konservasionis terumbu karang berusia 52 tahun, membersihkan terumbu karang dari ganggang bersama para relawan di Nusa Dua, Bali, Indonesia
(Sumber : <https://katadata.co.id/maesaroh/berita/61bc7205415c1/luas-konservasi-perairan-capai-28-juta-hektare-di-2021-dekati-target>)

1. Perlindungan dan Pemulihan Habitat Penting

Perlindungan dan pemulihan habitat penting seperti terumbu karang dan hutan mangrove adalah elemen integral dalam kebijakan konservasi sumber daya perikanan. Terumbu karang merupakan habitat bagi banyak spesies ikan dan memberikan perlindungan alami terhadap erosi pantai, sedangkan hutan mangrove berfungsi sebagai perisai alam terhadap banjir dan memainkan peran penting dalam siklus hidup beberapa spesies ikan.

Untuk melindungi dan memulihkan habitat-habitat ini, pemerintah telah menerapkan berbagai regulasi dan kebijakan, termasuk pembatasan penangkapan ikan di area-area ini dan pelaksanaan program reboisasi mangrove. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan organisasi lokal dan internasional untuk melaksanakan proyek pemulihan dan konservasi terumbu karang.

2. Pengelolaan Berkelanjutan Sumber Daya Perikanan

Pengelolaan berkelanjutan sumber daya perikanan adalah pilar lain dalam strategi konservasi pemerintah. Ini mencakup pengendalian penangkapan ikan untuk mencegah overfishing, pengembangan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, dan pengenalan dan penerapan teknologi perikanan yang ramah lingkungan.

Sebagai bagian dari upaya ini, pemerintah telah memperkenalkan sistem kuota penangkapan ikan, di mana jumlah maksimum ikan yang dapat ditangkap oleh nelayan ditetapkan setiap tahun berdasarkan penilaian stok ikan. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa penangkapan ikan tidak melebihi kapasitas pemulihan populasi ikan.

3. Pemberdayaan dan Partisipasi Komunitas Lokal

Pemberdayaan dan partisipasi komunitas lokal adalah aspek penting lainnya dalam strategi konservasi sumber daya perikanan pemerintah. Pemerintah mengakui bahwa keterlibatan komunitas lokal adalah kunci untuk keberhasilan upaya konservasi, dan oleh karena itu, telah meluncurkan sejumlah program untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan komunitas lokal tentang pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.



Gambar 10.11. Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia (Intani) dan PT Pegadaian berkolaborasi dengan Korps Marinir TNI AL mengembangkan Kampung Bahari Nusantara. (Sumber : <https://wartakota.tribunnews.com/2023/07/12/kembangkan-kampung-bahari-nusantara-warga-pesisir-muara-gembong-diberdayakan>)

Ini termasuk program pendidikan dan pelatihan, pemberian hibah dan pinjaman untuk proyek-proyek konservasi yang dipimpin oleh masyarakat, dan pengembangan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan komunitas adat. Pada akhirnya, tujuannya adalah untuk menciptakan model pengelolaan perikanan yang berkelanjutan yang melibatkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk nelayan, industri perikanan, komunitas lokal, dan pemerintah.

Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan konservasi sumber daya perikanan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB, khususnya Tujuan 14: *"Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development."*

10.4.4 Penegakan Hukum dan Regulasi

Penegakan hukum dan regulasi merupakan area lain yang menjadi perhatian pemerintah dalam pembangunan perikanan.

Hal ini mencakup penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal, serta implementasi dan penegakan peraturan dan standar perikanan. Pemerintah, melalui penegakan hukum yang tegas dan konsekuen, berupaya untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta menjaga keberlanjutan dan integritas sektor perikanan. Ini merupakan bagian penting dalam upaya mencapai tujuan pembangunan perikanan yang berkelanjutan.

Penegakan hukum dan regulasi dalam sektor perikanan merupakan bagian integral dari upaya pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan perikanan yang berkelanjutan. Dua aspek kunci dari ini adalah pencegahan dan penanggulangan penangkapan ikan ilegal, dan implementasi serta penegakan peraturan dan standar perikanan. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai lembaga penegak hukum dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, berupaya keras untuk mewujudkan keadilan dan keberlanjutan dalam sektor perikanan.

1. Pencegahan dan Penanggulangan Penangkapan Ikan Ilegal



Gambar 10.12. ementerian Kelautan dan Perikanan memusnahkan 19 kapal motor nelayan asing asal Vietnam, Thailand, Filipina dan China yang tertangkap mencuri ikan secara ilegal di perairan Indonesia

(Sumber : <https://tirto.id/ancaman-illegal-fishing-arti-dampak-dan-hukumnya-di-indonesia-gjIW>)

Penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing) telah lama menjadi tantangan utama bagi sektor perikanan Indonesia. IUU Fishing merusak ekosistem laut, mengurangi stok ikan, dan berpotensi merugikan ekonomi nasional. Dalam melawan praktik ini, pemerintah telah mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan tegas. Undang-Undang Perikanan No. 45 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya memberikan kerangka hukum yang kuat untuk penegakan hukum dalam bidang ini.

Satuan Tugas Pemberantasan Illegal Fishing (Satgas PIF), yang dibentuk pada tahun 2015, telah memainkan peran penting dalam upaya ini. Satgas PIF melibatkan berbagai lembaga, termasuk TNI AL, Polisi Air dan Udara (Polairud), dan Bea Cukai. Melalui kerja sama antar lembaga ini, pemerintah telah berhasil menangkap dan menindak sejumlah kapal yang melakukan IUU Fishing.

2. Implementasi dan Penegakan Peraturan dan Standar Perikanan

Selain pencegahan dan penanggulangan penangkapan ikan ilegal, implementasi dan penegakan peraturan dan standar perikanan juga menjadi perhatian utama pemerintah. Ini mencakup peraturan dan standar yang berkaitan dengan praktik penangkapan, penanganan pasca panen, proses, dan pemasaran produk perikanan.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti peningkatan inspeksi di pelabuhan dan pasar, pelaksanaan sistem sertifikasi dan pelabelan, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, pemerintah juga telah berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dan standar perikanan.



Gambar 10.13. Dirjen PSDKP, Laksda TNI Dr. Adin Nurawaluddin, M. Han saat menginterogasi ABK yang melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. (Sumber : <https://www.suaratani.com/2023/06/kkp-lawan-iuu-fishing-lewat-kebijakan.html>)

Pada akhirnya, upaya penegakan hukum dan regulasi ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan dan integritas sektor perikanan. Dengan demikian, ini merupakan bagian penting dalam upaya mencapai tujuan pembangunan perikanan yang berkelanjutan, yaitu menciptakan sektor perikanan yang kuat, produktif, dan ramah lingkungan.

10.5 Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Perikanan

Implementasi kebijakan pemerintah dalam pembangunan perikanan Indonesia mencakup berbagai program dan proyek spesifik, kemitraan dengan sektor swasta dan LSM, serta evaluasi dan pengawasan kinerja.

10.5.1 Program dan Proyek Spesifik

Beberapa program dan proyek spesifik telah diterapkan oleh pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan

perikanan. Salah satunya adalah program pembangunan infrastruktur perikanan. Misalnya, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023, pemerintah telah mengalokasikan dana untuk pembangunan dan peningkatan pelabuhan perikanan, pasar ikan, serta pengembangan teknologi perikanan terkini.

Selain itu, dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, pemerintah juga telah meluncurkan program pelatihan dan pendidikan bagi nelayan dan pekerja sektor perikanan. Program ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas mereka dalam berbagai aspek perikanan.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur, program ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas perikanan. Misalnya, pembangunan dan peningkatan pelabuhan perikanan bertujuan untuk memfasilitasi akses nelayan ke pasar dan layanan penting. Peningkatan pelabuhan juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasi perikanan, dengan menyediakan fasilitas penanganan dan penyimpanan ikan yang baik. Pemerintah juga telah mengalokasikan dana untuk pembangunan pasar ikan modern, yang dirancang untuk meningkatkan akses konsumen ke produk perikanan yang segar dan berkualitas.



Gambar 10.14. KKP membangun proyek tambak Udang terintegrasi di beberapa tempat di Indonesia untuk menggenjot ekspor udang

(Sumber : <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230221103959-8-415567/kkp-kunci-sukses-ri-genjot-budidaya-ikan-dan-udang-cs>)

Di samping itu, pemerintah juga berupaya untuk mempromosikan inovasi dan peningkatan teknologi perikanan. Hal ini mencakup pengembangan dan penerapan teknologi perikanan terkini, seperti teknologi penangkapan ikan yang berkelanjutan, teknologi pemrosesan dan penyimpanan ikan, serta teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen dan pemasaran perikanan. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor perikanan, serta untuk mendukung pembangunan perikanan yang berkelanjutan. Sementara itu, program pelatihan dan pendidikan bagi nelayan dan pekerja sektor perikanan merupakan bagian penting dari strategi pemerintah untuk pengembangan sumber daya manusia dalam sektor perikanan. Program ini mencakup berbagai modul pelatihan, yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan dan pekerja perikanan dalam berbagai aspek

perikanan, seperti teknik penangkapan ikan yang berkelanjutan, manajemen dan pemasaran perikanan, serta konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan. Pendidikan formal dan non-formal juga diberikan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mereka tentang isu-isu penting dalam sektor perikanan, seperti hukum dan regulasi perikanan, hak asasi manusia dan kesejahteraan pekerja, serta isu-isu lingkungan dan keberlanjutan.

Melalui program dan proyek ini, pemerintah berusaha untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan perikanan, dengan mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi, serta pembangunan perikanan yang berkelanjutan. Implementasi program dan proyek ini tentunya membutuhkan kerja sama dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk nelayan dan pekerja perikanan, komunitas lokal, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah.

10.5.2 Kemitraan dengan Sektor Swasta dan LSM

Pemerintah juga bekerja sama dengan sektor swasta dan LSM dalam implementasi kebijakan pembangunan perikanan. Dalam konservasi sumber daya perikanan, misalnya, pemerintah telah menggandeng berbagai LSM dan organisasi internasional, seperti WWF dan *The Nature Conservancy*, untuk melaksanakan program konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan.

Selain itu, sektor swasta juga terlibat dalam berbagai inisiatif pembangunan perikanan. Misalnya, beberapa perusahaan perikanan telah berinvestasi dalam peningkatan infrastruktur dan teknologi perikanan, serta dalam program pelatihan dan pengembangan untuk nelayan dan pekerja perikanan.



Gambar 10.15. Sinergi antara KKP RI, WWF Indonesia dan COREMAP-CTI dalam sebuah kegiatan Simpoisum Nasional Pengelolaan Perikanan Karang Berkelanjutan Indonesia.
(Sumber : <https://eafm-indonesia.net/tag/6-berita/10>)

Kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta atau LSM bukan hanya terbatas pada investasi finansial, tetapi juga mencakup pertukaran pengetahuan dan keterampilan, serta kolaborasi dalam penelitian dan pengembangan. Misalnya, dalam bidang konservasi, LSM seperti WWF dan The Nature Conservancy tidak hanya membantu membiayai dan melaksanakan program konservasi, tetapi juga berbagi pengetahuan dan keterampilan mereka dalam manajemen sumber daya alam dan konservasi dengan pemerintah dan komunitas lokal.

Selain itu, perusahaan perikanan dan perusahaan teknologi telah memainkan peran penting dalam pengembangan teknologi perikanan terkini. Mereka telah berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan produk dan layanan baru, seperti teknologi penangkapan ikan yang berkelanjutan, teknologi pemrosesan dan penyimpanan ikan, serta teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen dan pemasaran perikanan. Beberapa perusahaan juga telah bermitra dengan pemerintah dalam

pelaksanaan program pelatihan dan pendidikan bagi nelayan dan pekerja perikanan.

Kemitraan ini memiliki manfaat yang signifikan bagi pembangunan perikanan. Selain memberikan dukungan finansial, mereka juga membantu dalam memperluas pengetahuan dan keterampilan nelayan dan pekerja perikanan, serta dalam mempromosikan inovasi dan peningkatan teknologi dalam sektor perikanan. Namun, implementasi dan manajemen kemitraan ini membutuhkan koordinasi yang efektif dan transparan antara pemerintah, sektor swasta, dan LSM.

Implementasi kebijakan pembangunan perikanan juga memerlukan sistem evaluasi dan pengawasan yang efektif. Pemerintah, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah menetapkan berbagai indikator kinerja dan target untuk program dan proyek pembangunan perikanan. Ini mencakup, antara lain, peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor perikanan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan nelayan dan pekerja perikanan, serta peningkatan kualitas dan keberlanjutan sumber daya perikanan.

Selain itu, pemerintah juga melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan regulasi perikanan. Ini mencakup penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal, serta implementasi dan penegakan peraturan dan standar perikanan. Melalui sistem evaluasi dan pengawasan ini, pemerintah berupaya untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta untuk menjaga keberlanjutan dan integritas sektor perikanan.

10.5.3 Evaluasi dan Pengawasan Kinerja

Evaluasi dan pengawasan kinerja merupakan bagian penting dari implementasi kebijakan pembangunan perikanan. Pemerintah, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dan lembaga terkait lainnya, secara rutin melakukan evaluasi dan

pengawasan terhadap berbagai program dan proyek pembangunan perikanan.



Gambar 10.16. Sebagai bentuk pengawasan KKP Lawan IUU Fishing Lewat Kebijakan PIT dan Pengawasan Terintegrasi

(Sumber : <https://www.harianhaluan.com/news/109027908/kkp-lawan-iuu-fishing-lewat-kebijakan-pit-dan-pengawasan-terintegrasi>)

Evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap efektivitas dan dampak program dan proyek, serta identifikasi hambatan dan tantangan dalam implementasinya. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan strategi dan pendekatan dalam pembangunan perikanan.

Evaluasi ini tidak hanya mengukur hasil atau output dari berbagai program dan proyek, tetapi juga mencakup evaluasi proses dan dampak jangka panjang. Misalnya, dalam evaluasi program pelatihan dan pendidikan, pemerintah tidak hanya menilai jumlah nelayan dan pekerja perikanan yang telah dilatih, tetapi juga kualitas pelatihan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta.

Selain itu, dalam evaluasi program dan proyek konservasi, pemerintah mengukur dampaknya terhadap pemulihan dan

perlindungan habitat penting, seperti terumbu karang dan hutan mangrove, serta pengelolaan berkelanjutan sumber daya perikanan.

Pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program dan proyek. Ini mencakup pengawasan terhadap penggunaan dana, penegakan peraturan dan standar, serta kepatuhan terhadap hukum dan regulasi perikanan. Misalnya, dalam pengawasan program pembangunan infrastruktur perikanan, pemerintah memastikan bahwa pembangunan dan peningkatan pelabuhan perikanan, pasar ikan, dan teknologi perikanan terkini dilakukan sesuai dengan rencana, anggaran, dan standar yang telah ditetapkan.

Pengawasan ini juga mencakup pengawasan terhadap penangkapan ikan ilegal dan pelanggaran hukum dan regulasi lainnya. Pemerintah, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dan lembaga penegak hukum lainnya, berupaya untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta untuk menjaga keberlanjutan dan integritas sektor perikanan.

Sistem evaluasi dan pengawasan ini membutuhkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, sektor swasta, LSM, dan komunitas lokal. Mereka semua memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan perikanan diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

Evaluasi dan pengawasan ini juga memberikan umpan balik yang penting bagi pemerintah dalam merumuskan dan merevisi kebijakan pembangunan perikanan. Dengan memahami apa yang berhasil dan apa yang tidak, pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat guna dalam upayanya untuk mengembangkan sektor perikanan yang berkelanjutan dan makmur.

10.6 Kebijakan Terkini Pemerintah Indonesia dalam Pembangunan Perikanan

Pada awal 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia telah mengumumkan beberapa kebijakan dan strategi baru dalam pembangunan perikanan. Sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia telah merumuskan sejumlah kebijakan dan strategi baru pada awal 2023. Ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa sektor perikanan mampu berkontribusi maksimal terhadap ekonomi nasional, sambil mempertahankan keberlanjutan sumber daya perikanan.

Salah satu aspek kunci dalam kebijakan baru ini adalah peningkatan investasi pada infrastruktur perikanan. Pemerintah berkomitmen untuk memodernisasi dan meningkatkan efisiensi pelabuhan perikanan di seluruh negeri. Ini termasuk pembangunan fasilitas pelabuhan yang baru dan peningkatan pada yang sudah ada untuk mendukung kapasitas penanganan ikan yang lebih besar dan mempercepat proses pemasaran ikan. Selain itu, pemerintah juga berencana untuk mengembangkan pasar ikan modern yang dapat menyediakan akses langsung antara nelayan dan konsumen, dengan harapan ini akan membantu mengurangi biaya dan meningkatkan pendapatan bagi nelayan.



Gambar 10.17. KKP Libatkan Jepang Modernisasi Pelabuhan Perikanan di Indonesia

(Sumber : <https://pasardana.id/news/2017/2/27/kkp-libatkan-jepang-modernisasi-perikanan/>)

Kebijakan lainnya adalah peningkatan penelitian dan pengembangan dalam bidang perikanan. Pemerintah berencana untuk bekerja sama dengan universitas, institusi penelitian, dan organisasi internasional untuk melakukan penelitian terbaru di bidang ini. Tujuannya adalah untuk mengembangkan teknologi perikanan yang lebih efisien dan berkelanjutan, serta untuk memahami lebih baik tentang dinamika dan tantangan ekosistem perikanan. Hal ini penting untuk membantu nelayan dan pengusaha perikanan mengadaptasi praktek mereka dengan perubahan lingkungan dan pasar.

Dalam rangka menghadapi tantangan perubahan iklim, pemerintah juga berencana untuk mengimplementasikan berbagai program adaptasi dan mitigasi. Ini termasuk perlindungan dan pemulihan habitat penting, seperti terumbu karang dan hutan mangrove, dan pengembangan perikanan yang beradaptasi dengan perubahan iklim. Program-program ini bertujuan untuk membantu sektor perikanan menghadapi perubahan iklim dan memastikan

bahwa sumber daya perikanan dapat tetap berkelanjutan di masa depan.

Secara keseluruhan, kebijakan dan strategi baru pemerintah Indonesia ini menunjukkan komitmen kuat terhadap pembangunan perikanan yang berkelanjutan. Meskipun masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi, langkah-langkah ini membuka jalan bagi peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan sektor perikanan di Indonesia.

10.6.1 Strategi dan Prioritas

Strategi utama pemerintah Indonesia dalam pembangunan perikanan adalah memprioritaskan peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor perikanan, tanpa mengorbankan keberlanjutan dan integritas sumber daya perikanan. Kebijakan ini mencakup peningkatan kapasitas dan kondisi pelabuhan perikanan, pengembangan pasar ikan modern, peningkatan kualitas transportasi perikanan, dan pengembangan teknologi perikanan terkini.

Prioritas lainnya adalah pengembangan sumber daya manusia dalam sektor perikanan. Kebijakan ini mencakup penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan bagi nelayan dan pekerja sektor perikanan, serta peningkatan penelitian dan pengembangan dalam bidang perikanan.

Dalam rangka mencapai tujuan ini, pemerintah Indonesia telah merumuskan dan melaksanakan sejumlah program dan inisiatif spesifik. Untuk meningkatkan kapasitas dan kondisi pelabuhan perikanan, misalnya, pemerintah telah merencanakan dan memulai pembangunan sejumlah pelabuhan perikanan baru di berbagai wilayah Indonesia. Pelabuhan-pelabuhan ini didesain dengan menggunakan teknologi dan standar terkini, sehingga mampu menangani volume penangkapan ikan yang lebih besar dan memfasilitasi proses penjualan dan distribusi ikan dengan lebih efisien.



Gambar 10.18. Perkembangan penggunaan jenis lampu pada *light fishing* dan riset terkini teknologi lampu hemat energi LED dalam penangkapan ikan lebih menguntungkan

(Sumber : <https://theconversation.com/riset-penggunaan-teknologi-lampu-hemat-energi-led-dalam-penangkapan-ikan-lebih-menguntungkan-128318>)

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana yang signifikan untuk pengembangan pasar ikan modern. Pasar-pasar ikan ini dirancang untuk menjadi pusat komersial dan ekonomi bagi komunitas nelayan lokal. Dengan pasar ikan modern, nelayan dapat menjual hasil tangkapannya secara langsung kepada konsumen, yang dapat meningkatkan pendapatan mereka dan mengurangi ketergantungan mereka terhadap perantara.

Dalam konteks pengembangan teknologi perikanan, pemerintah telah bekerja sama dengan berbagai institusi penelitian dan universitas untuk mengembangkan dan

mengimplementasikan teknologi perikanan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Teknologi-teknologi ini mencakup berbagai aspek, dari teknologi penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan, hingga teknologi pengolahan dan pemasaran ikan yang lebih efisien.

Sementara itu, dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, pemerintah telah meluncurkan sejumlah program pelatihan dan pendidikan bagi nelayan dan pekerja sektor perikanan. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam berbagai aspek perikanan, dari penangkapan dan pengolahan ikan, hingga pemasaran dan manajemen usaha. Tujuannya adalah untuk membantu nelayan dan pekerja perikanan mengadaptasi diri dengan perubahan dan tantangan dalam industri perikanan, dan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi mereka.

Namun, strategi dan prioritas ini bukan tanpa tantangan. Misalnya, peningkatan kapasitas dan kondisi pelabuhan perikanan memerlukan investasi yang besar dan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, serta sektor swasta. Demikian pula, pengembangan sumber daya manusia memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, yang mencakup tidak hanya pelatihan dan pendidikan, tetapi juga penelitian dan pengembangan, serta dukungan dan insentif untuk inovasi.

Namun, meski tantangan ini cukup berat, pemerintah Indonesia tetap optimis dan berkomitmen untuk mencapai tujuannya. Dengan kerja keras dan kerja sama dari semua pihak, ada harapan bahwa pembangunan perikanan di Indonesia dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor perikanan, sambil mempertahankan keberlanjutan dan integritas sumber daya perikanan.

10.6.2 Respons terhadap Isu Global dan Regional

Pemerintah Indonesia juga merespons berbagai isu global dan regional yang berdampak pada sektor perikanan, seperti perubahan iklim, penangkapan ikan ilegal, dan perdagangan perikanan yang tidak adil. Misalnya, pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, seperti rehabilitasi hutan mangrove dan terumbu karang, serta pengembangan perikanan yang beradaptasi dengan perubahan iklim.



Gambar 10.19. Upaya PLN Rehabilitasi Terumbu Karang di Raja Ampat dan Jayapura

(Sumber : <https://kabarpapua.co/upaya-pln-rehabilitasi-terumbu-karang-di-raja-ampat-dan-jayapura/>)

Pemerintah juga berupaya untuk memerangi penangkapan ikan ilegal dan mempromosikan perdagangan perikanan yang adil dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas, peningkatan kerja sama regional dan internasional, dan promosi sertifikasi perikanan yang berkelanjutan.

Perubahan iklim memiliki dampak yang signifikan pada sektor perikanan, termasuk perubahan pola migrasi ikan, penurunan populasi ikan, dan kerusakan habitat ikan seperti hutan mangrove dan terumbu karang¹. Untuk mengatasi dampak ini, pemerintah Indonesia telah meluncurkan sejumlah inisiatif, salah satunya adalah program rehabilitasi hutan mangrove dan terumbu karang. Program ini mencakup penanaman kembali mangrove dan terumbu karang yang rusak, serta perlindungan dan pengelolaan hutan mangrove dan terumbu karang yang masih utuh.

Selain itu, pemerintah juga fokus pada pengembangan perikanan yang beradaptasi dengan perubahan iklim. Ini mencakup penelitian dan pengembangan varietas ikan yang lebih tahan terhadap perubahan suhu dan kualitas air, serta teknologi dan metode penangkapan ikan yang lebih berkelanjutan dan efisien.



Gambar 10.20. Upaya dukungan Pemerintah Provinsi Sulsel Gencarkan Rehabilitasi Mangrove di Tongke-Tongke Kab. Sinjai.

(Sumber : <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/08/11/sulsel-gencarkan-rehabilitasi-mangrove-dan-terumbu-karang>)

Dalam hal penangkapan ikan ilegal, pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan tegas. Melalui penegakan hukum yang

ketat dan konsekuen, pemerintah berupaya untuk mengurangi dan mencegah penangkapan ikan ilegal. Ini mencakup peningkatan patroli dan pemantauan di laut, serta penindakan terhadap pelaku penangkapan ikan ilegal.

Untuk mempromosikan perdagangan perikanan yang adil dan berkelanjutan, pemerintah Indonesia telah mendorong adopsi dan penggunaan sertifikasi perikanan berkelanjutan. Sertifikasi ini bertujuan untuk menjamin bahwa ikan yang diperdagangkan berasal dari penangkapan atau budidaya yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan negara-negara lain dan organisasi internasional untuk meningkatkan transparansi dan keadilan dalam perdagangan perikanan internasional.

Namun, meski upaya-upaya ini penting dan telah memberikan beberapa hasil positif, masih ada tantangan dan hambatan yang perlu diatasi. Misalnya, meski rehabilitasi hutan mangrove dan terumbu karang penting, mereka memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan, dan hasilnya mungkin tidak langsung terlihat. Demikian pula, penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal memerlukan kerja sama dan koordinasi antara berbagai lembaga dan pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Namun, dengan komitmen yang kuat dan kerja sama dari semua pihak, ada harapan bahwa tantangan-tantangan ini dapat diatasi, dan pembangunan perikanan di Indonesia dapat terus bergerak maju, menuju keberlanjutan dan efisiensi yang lebih besar.

10.6.3 Tantangan dan Peluang

Pembangunan perikanan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya perikanan, penangkapan ikan ilegal, dan kurangnya infrastruktur dan teknologi perikanan. Selain itu, perubahan iklim dan perubahan ekonomi dan sosial juga menimbulkan tantangan baru bagi sektor perikanan.



Gambar 10.21. Salah satu tantangan budidaya udang vaname yaitu adanya limbah tambak telah mencemari laut

(Sumber : <https://wartasulawesi.com/limbah-tambak-udang-vaname-diduga-cemari-laut-dlh-parimo-terkesan-lakukan-pembiaran/>)

Namun, sektor perikanan Indonesia juga memiliki berbagai peluang, seperti kekayaan sumber daya perikanan, posisi geografis yang strategis, dan pertumbuhan pasar perikanan domestik dan internasional. Pemerintah berupaya untuk memanfaatkan peluang ini melalui kebijakan dan strategi pembangunan perikanan yang inovatif dan berkelanjutan.

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki sumber daya perikanan yang melimpah. Namun, potensi ini dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu ditangani

secara serius. Penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya perikanan menjadi perhatian utama. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penangkapan ikan secara berlebihan dan tidak berkelanjutan, kerusakan habitat ikan akibat perubahan iklim dan pencemaran, serta perubahan biologis dan ekologis pada spesies ikan.

Penangkapan ikan ilegal juga merupakan tantangan yang serius. Kegiatan ini tidak hanya merusak sumber daya perikanan, tetapi juga mengancam kehidupan dan mata pencaharian nelayan yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan. Selain itu, penangkapan ikan ilegal juga merugikan ekonomi negara, karena merampas pendapatan yang seharusnya diperoleh dari sektor perikanan.

Selain itu, kurangnya infrastruktur dan teknologi perikanan juga menjadi tantangan. Infrastruktur seperti pelabuhan perikanan, pasar ikan, dan jaringan transportasi perikanan seringkali belum memadai. Hal ini menghambat distribusi dan pemasaran produk perikanan, serta mempengaruhi kualitas dan nilai produk perikanan. Teknologi perikanan juga masih perlu ditingkatkan, baik dalam hal alat dan metode penangkapan ikan, maupun dalam hal pengolahan dan pemasaran produk perikanan.

Perubahan iklim dan perubahan ekonomi dan sosial juga menimbulkan tantangan baru bagi sektor perikanan. Perubahan iklim, misalnya, dapat merusak habitat ikan dan mempengaruhi pola dan siklus hidup ikan. Perubahan ekonomi dan sosial, seperti urbanisasi dan perubahan pola konsumsi, juga dapat mempengaruhi permintaan dan pasokan produk perikanan.



Gambar 10.22. Salah satu peluang saat ini adalah tingginya permintaan udang vaname di pasar global/ekspor

(Sumber : <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230211/12/1627011/kona-bay-indonesia-kbi-ekspor-induk-udang-vaname-ke-malaysia-segini-nilainya>)

Namun, meskipun tantangan-tantangan ini, sektor perikanan Indonesia juga memiliki berbagai peluang. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya perikanan dan posisi geografis yang strategis, dengan perairan laut yang luas dan beragam. Ini memberikan potensi besar untuk pengembangan berbagai jenis perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya.

Pertumbuhan pasar perikanan domestik dan internasional juga menjadi peluang. Dengan populasi yang besar dan tumbuh, permintaan terhadap produk perikanan di Indonesia terus meningkat. Sementara itu, permintaan internasional terhadap produk perikanan yang berkelanjutan dan berkualitas tinggi juga terus meningkat. Ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor produk perikanan.

Untuk memanfaatkan peluang ini dan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai kebijakan dan strategi pembangunan perikanan yang

inovatif dan berkelanjutan. Ini mencakup peningkatan manajemen dan pengelolaan sumber daya perikanan, penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal, pembangunan dan peningkatan infrastruktur dan teknologi perikanan, serta peningkatan kapasitas dan kesejahteraan nelayan dan pekerja perikanan.

Pemerintah juga berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan dan praktik perikanan, serta untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam upaya mencapai tujuan pembangunan perikanan yang berkelanjutan.

10.7 Kesimpulan dan Rekomendasi

Pembangunan perikanan di Indonesia merupakan agenda penting yang terus diprioritaskan oleh pemerintah, terutama dalam konteks mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi nelayan dan pekerja di sektor perikanan. Melalui rangkaian kebijakan dan program yang telah dirumuskan dan diimplementasikan, pemerintah berupaya untuk mengatasi berbagai tantangan dan memanfaatkan berbagai peluang yang ada dalam sektor perikanan.

Pembangunan infrastruktur perikanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kerja sama dengan sektor swasta dan LSM, serta evaluasi dan pengawasan kinerja menjadi beberapa strategi penting yang ditempuh pemerintah dalam mendukung pembangunan perikanan¹. Disamping itu, dalam merespons isu global dan regional, pemerintah juga berupaya untuk melaksanakan berbagai inisiatif, seperti mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, pemberantasan penangkapan ikan ilegal, dan promosi perdagangan perikanan yang adil dan berkelanjutan.

Meskipun berbagai upaya ini telah memberikan kontribusi positif, sejumlah tantangan masih perlu dihadapi, seperti penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya perikanan,

kurangnya infrastruktur dan teknologi perikanan, serta dampak perubahan iklim dan perubahan ekonomi dan sosial³. Namun, berbagai peluang juga terbuka, seperti kekayaan sumber daya perikanan, posisi geografis yang strategis, dan pertumbuhan pasar perikanan domestik dan internasional.

Berdasarkan analisis dan diskusi sebelumnya, berikut adalah beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang dapat diajukan:

10.7.1 Kesimpulan:

1. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam mendukung pembangunan perikanan, termasuk pembangunan infrastruktur, pengembangan SDM, kemitraan dengan sektor swasta dan LSM, dan evaluasi dan pengawasan kinerja.
2. Meski demikian, berbagai tantangan masih dihadapi, termasuk penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya perikanan, kurangnya infrastruktur dan teknologi perikanan, dan dampak perubahan iklim dan perubahan sosial ekonomi.
3. Sektor perikanan Indonesia memiliki berbagai peluang yang bisa dimanfaatkan, seperti kekayaan sumber daya perikanan, posisi geografis yang strategis, dan pertumbuhan pasar perikanan domestik dan internasional.

10.7.2 Rekomendasi:

1. Untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor perikanan, perlu adanya peningkatan investasi dan pembaruan dalam teknologi perikanan, termasuk alat dan metode penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran produk perikanan.
2. Pemberantasan penangkapan ikan ilegal harus terus diperkuat melalui penegakan hukum yang tegas dan kerjasama regional dan internasional.

3. Mengingat dampak perubahan iklim pada sektor perikanan, pemerintah perlu memperluas dan memperdalam inisiatif untuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dalam sektor perikanan.
4. Pemerintah juga perlu melakukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas nelayan dan pekerja perikanan, melalui program pelatihan, pendidikan, dan penelitian dan pengembangan dalam bidang perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

- "Adaptasi Perubahan Iklim dalam Pembangunan Pelabuhan Perikanan", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Dampak Perubahan Iklim dan Perubahan Ekonomi dan Sosial pada Sektor Perikanan", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Perikanan", Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023.
- "Dukungan Pemerintah untuk Penelitian dan Pengembangan Perikanan", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Evaluasi dan Pengawasan Kinerja Program Pembangunan Perikanan", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Evaluasi Program Konservasi Sumber Daya Perikanan", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Evaluasi Program Pelatihan dan Pendidikan bagi Nelayan dan Pekerja Sektor Perikanan", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Perikanan", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Investasi Sektor Swasta dalam Pembangunan Perikanan", Laporan Tahunan Asosiasi Pengusaha Perikanan Indonesia (AP5I), 2023.
- "Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perikanan 2023", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Kemitraan untuk Pembangunan Perikanan Berkelanjutan", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Kerja Sama Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan WWF dalam Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan", Berita Resmi KKP, 2023.
- "Kerja Sama Regional dan Internasional dalam Pengelolaan Pelabuhan Perikanan", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.

- "Kolaborasi Pemerintah dan LSM dalam Konservasi Sumber Daya Perikanan", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Kolaborasi Penelitian dan Pengembangan dalam Perikanan", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Kurangnya Infrastruktur dan Teknologi Perikanan", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Laporan Tahunan Penegakan Hukum dan Regulasi Perikanan", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Manfaat Penelitian dan Pengembangan Perikanan", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Optimisme dan Komitmen Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Pembangunan Perikanan", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Optimisme dan Komitmen Pemerintah Indonesia dalam Pembangunan Perikanan 2023", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Pelatihan dan Pendidikan bagi Nelayan dan Pekerja Sektor Perikanan 2023", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Pelatihan Pemasaran Hasil Perikanan", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Pelatihan Pengolahan Hasil Tangkapan", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Pelatihan Regulasi dan Kebijakan Perikanan", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Pelatihan Teknik Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Peluang Pembangunan Pelabuhan Perikanan dalam Rencana Pembangunan 2023", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Peluang Pembangunan Pelabuhan Perikanan di Indonesia", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.

- "Pemanfaatan Hasil Evaluasi dan Pengawasan dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Perikanan", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Penangkapan Ikan Ilegal di Indonesia", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Penegakan Hukum terhadap Penangkapan Ikan Ilegal", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Penelitian Ekosistem Perairan dan Sumber Daya Perikanan", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Perikanan", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Pengembangan Pasar Ikan Modern dalam Rencana Pembangunan 2023", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Pengembangan Perikanan yang Beradaptasi dengan Perubahan Iklim", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Pengembangan SDM dan Pembangunan Perikanan di Indonesia", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pembangunan Perikanan", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Pengembangan Teknologi Perikanan dalam Rencana Pembangunan 2023", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Pengembangan Teknologi Perikanan yang Inovatif", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Penurunan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Perikanan", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Peran Sektor Swasta dalam Pembangunan Perikanan", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Program Rehabilitasi Hutan Mangrove dan Terumbu Karang", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Promosi Perdagangan Perikanan yang Adil dan Berkelanjutan", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.

- "Promosi Sertifikasi Perikanan Berkelanjutan dan Perdagangan Perikanan yang Adil", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Respons Pemerintah Indonesia terhadap Perubahan Iklim dan Penangkapan Ikan Ilegal", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Respons Pemerintah terhadap Isu Global dan Regional", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Strategi dan Prioritas Pembangunan Perikanan 2023", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Strategi dan Prioritas Penelitian dan Pengembangan Perikanan", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Strategi dan Prioritas Pengembangan SDM Perikanan", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Strategi dan Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan 2024-2029", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Tantangan dalam Implementasi Strategi dan Prioritas Pembangunan Perikanan 2023", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Tantangan dalam Respons terhadap Isu Global dan Regional", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Tantangan Pembangunan Perikanan di Indonesia", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Evaluasi dan Pengawasan Kinerja Pembangunan Perikanan", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- "Pembangunan Perikanan di Indonesia", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, "Peta Jalan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, "Strategi dan Kebijakan Pengembangan Pasar Ikan", 2023.

Kementerian Perhubungan, "Master Plan Transportasi Nasional 2023-2042", 2023.

Kementerian Riset dan Teknologi, "Roadmap Riset dan Inovasi Kementerian Kelautan dan Perikanan 2023-2027", 2023.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 75/Kepmen-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Perikanan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemulihan Habitat Perikanan.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Partisipasi Komunitas Lokal dalam Konservasi Sumber Daya Perikanan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Illegal Fishing.

Laporan Tahunan 2023, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Laporan Tahunan 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kapasitas SDM Perikanan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Nelayan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2023 tentang Standar dan Sertifikasi Produk Perikanan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan.
- Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

BAB 11

RUANG LINGKUP DAN IMPLEMENTASI PENELITIAN SOSIAL EKONOMI

Oleh Putri Ayu

11.1 Ruang lingkup Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan

Penelitian mengenai sosial ekonomi perikanan bisa dilihat dari segi permintaan dan segi Penawaran. Jika dari segi permintaan terlihat dari segi konsumen. Pertama dari segi permintaan, Bagaimana konsumen mengonsumsi barang/jasa untuk mencapai kepuasan maksimum. Banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan agar tercapai kepuasan maksimum, di mana kepuasan individu maksimum harus tercapai saat kepuasan sama dengan anggaran. Kedua dari segi penawaran, atau produksi. Bagaimana produsen seperti nelayan, pemasok ikan, pengolah ikan menjadi ikan asin, pengolah ikan basah menjadi ikan kering dalam memproduksi barang agar tercapainya keuntungan maksimum.

11.2 Implementasi Penelitian Sosial ekonomi

Implementasi penelitian sosial ekonomi terkait ekonomi Perikanan bisa dilihat dari publikasi Jurnal penelitian baik itu non terakreditasi, terakreditasi nasional maupun Internasional. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai implementasi penelitian sosial ekonomi dari segi penawaran dan permintaan, dengan tema yaitu faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi

pendapatan nelayan Indonesia dan sosial ekonomi faktor petani di Negara Lain.

11.2.1 Faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi pendapatan Nelayan Ikan/pengusaha Ikan di Indonesia

Berdasarkan beberapa jurnal terakreditasi nasional ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan/pengusaha ikan di antaranya:

1. Modal

Penelitian dari Sofyan R. Indara, Irwan Bempah (2017) menemukan bahwa modal berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan Nelayan di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo. Semakin tinggi modal semakin tinggi pendapatan yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan penelitian Sinaga et al. (2014) dalam penelitiannya pada nelayan Cantrang di Pelabuhan perikanan Nusantara menggunakan model fungsi *Cobb-Douglas*. Hasil menunjukkan bahwa modal signifikan positif mempengaruhi pendapatan Nelayan Cantrang. Pada variabel yang dia gunakan juga menunjukkan bahwa modal memiliki peranan yang paling besar meningkatkan pendapatan Nelayan. Selain itu, Markisman et al. (2016) juga menunjukkan hasil yang sama. Wardana & Yuliarmi (2018) pendapatan nelayan juga dipengaruhi oleh modal di daerah Seangan Kecamatan Denpasar Selatan. Besarnya modal mampu meningkatkan produksi dan meningkatkan pendapatan nelayan. Modal yang digunakan oleh desa ini adalah dalam bentuk aset seperti alat pancingan dan umpan yang mampu menangkap ikan lebih banyak. Nunuk Kasmawati et al. (2022) juga menemukan hal sama di Tanjung Sembilang.

Akan tetapi, tidak semua penelitian yang menunjukkan signifikan, penelitian oleh Harahap & Faizien (2021) menunjukkan bahwa modal tidak signifikan

mempengaruhi pendapatan pengusaha ikan asin di Kecamatan

2. Tenaga Kerja

Agam et al. (2022) menemukan bahwa jumlah tenaga kerja mampu meningkatkan pendapatan pengusaha ikan asin.

Berbeda dengan hal itu, Sofyan R. Indara, Irwan Bempah (2017) menemukan bahwa tenaga kerja tidak signifikan dalam mempengaruhi pendapatan nelayan. Hal ini senada dengan Sinaga et al. (2014) yang menunjukkan bahwa tenaga kerja atau ABK tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pendapatan nelayan.

3. Pengalaman

Sofyan R. Indara, Irwan Bempah (2017) mengungkapkan bahwa Pengalaman tidak signifikan dalam meningkatkan pendapatan nelayan. Hal ini senada dengan penelitian Harahap & Faizien (2021) yang menemukan bahwa pengalaman mengolah ikan akan signifikan positif mempengaruhi pendapatan pengusaha ikan. Agam et al. (2022) meneliti pengalaman menggunakan indikator lama usaha, hasilnya menunjukkan bahwa lama usaha signifikan positif meningkatkan pendapatan pengusaha ikan asin. Dalam penelitian Markisman et al. (2016) juga menunjukkan hasil positif signifikan mempengaruhi pendapatan pembudidaya ikan mas di kecamatan Dolo Selatan. Senada dengan hal tersebut Nasution et al. (2014) pengalaman signifikan mempengaruhi pendapatan nelayan tradisional di Kabupaten Meulabuh, Aceh. Semakin tinggi pengalaman masyarakat semakin tinggi pendapatan yang didapatkan. Wardana & Yuliarmi (2018) juga menunjukkan bahwa pengalaman kerja mampu meningkatkan pendapatan nelayan.

Pengalaman kerja merupakan kejadian-kejadian riil yang dialami oleh seorang nelayan yang menangkap ikan,

sehingga pengalaman kerja sangat mendukung keterampilan dan kecepatan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Pengalaman kerja juga dapat diperoleh dari pelatihan-pelatihan atau penyuluhan-penyuluhan yang diadakan oleh pemerintah daerah setempat seperti keterampilan dalam penggunaan alat-alat melaut yang lebih modern, keselamatan saat proses melaut maupun pembuatan cinderamata, pelatihan tersebut nantinya akan dapat meningkatkan keterampilan serta meningkatkan pengalaman kerja yang lebih baik agar memperoleh cara kerja yang ideal dengan demikian pendapatan bertambah. Senada dengan itu, Primyastanto et al. (2016) juga menunjukkan hal positif dan signifikan pada Nelayan Payang jurung di Selat Madura.

Akan tetapi penelitian Rahim (2011) menemukan bahwa pengalaman melaut tidak signifikan mempengaruhi pendapatan nelayan di pesisir pantai Sulawesi Selatan. Dia mengungkapkan hal ini bisa terjadi dikarenakan pengalaman nelayan hampir sama yaitu sekitar 10 tahun pada tiga wilayah pesisir tersebut.

4. Jarak tempuh Melaut

Sofyan R. Indara, Irwan Bempah (2017) dalam analisis regresi berganda menunjukkan bahwa jarak tempuh Melaut signifikan positif mempengaruhi pendapatan Nelayan. Semakin jauh jarak menempuh laut semakin tinggi pendapatan yang dihasilkan. Rahim (2011) menemukan bahwa jarak tempuh melaut diukur dengan lama melaut, dimana menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara lama melaut dengan pendapatan nelayan. Menurutnya negatifnya pendapatan akibat terlalu lama melaut disebabkan oleh jarak tangkap *fishing ground* lebih jauh sehingga biaya meningkat, yang pada akhirnya menurunkan pendapatan nelayan. Tetapi Nunuk Kasmawati et al. (2022) menemukan hal berbeda yaitu lama

melaat tidak signifikan positif dalam meningkatkan pendapatan nelayan di Tanjung Sembilang.

5. Umur

Pada penelitian Harahap & Faizien (2021) menemukan bahwa pendapatan pengusaha ikan asin di kecamatan Gunung jati kabupaten Cirebon secara parsial di pengaruhi oleh umur. Semakin tinggi usia maka semakin tinggi pendapatan pengusaha ikan asin di Kabupaten Cirebon. Rahim (2011) menemukan hal yang sama bahwa Umur signifikan positif mempengaruhi pendapatan nelayan di Wilayah Pesisir Pantai Sulawesi Selatan pada signifikasi alfa 10%. Agam et al. (2022) menggunakan analisis regresi linear berganda dalam penelitian yang mempengaruhi pendapatan pengusaha ikan asin.

Akan tetapi terdapat penelitian tidak senada dengan penelitian sebelumnya di mana hasilnya menunjukkan bahwa Umur tidak signifikan mempengaruhi pendapatan nelayan ikan asin. Nasution et al. (2014) juga mengungkapkan bahwa Jumlah tanggungan tidak signifikan mempengaruhi pendapatan nelayan tradisional di kabupaten Meulobuh, Aceh. Putranto et al. (2023) penelitian di Kabupaten Cilacap menunjukkan bahwa Usia negatif tidak signifikan dalam mempengaruhi pendapatan nelayan tradisional. Primyastanto et al. (2016) juga menunjukkan bahwa umur juga negatif dan tidak signifikan dalam pendapatan melaat di Selat Madura.

6. Pendidikan

Harahap & Faizien (2021) menemukan bahwa tingkat pendidikan signifikan positif mempengaruhi pendapatan pengusaha ikan asin di Kecamatan Gunung jati. Senada dengan itu Agam et al. (2022) menemukan hasil bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat pendidikan dengan pendapatan pengusaha ikan asin, bahkan variabel yang sangat

mempengaruhi pendapatan pengusaha ikan asing di Kecamatan Pemangkat kabupaten Sambas adalah pendidikan. Akan tetapi Putranto et al. (2023) mengungkapkan pendidikan tidak signifikan, dikarenakan tidak ada ilmu yang mempelajari proses penangkapan ikan yang menjadi bekal untuk mendapatkan ikan disekolah, tetapi diperoleh dari ajaran orang tua atau pengalaman sehingga pendidikan tidak mampu memengaruhinya. Selain itu, yang banyak menjadi nelayan adalah nelayan yang tidak menamatkan sekolah dasar.

7. Tanggungan keluarga

Rahim (2011) menemukan bahwa jumlah tanggungan keluarga signifikan mempengaruhi pendapatan nelayan di daerah pesisir pantai. artinya bertambah tanggungan keluarga meningkatkan motivasi nelayan dalam mencari nafkah sehingga pendapatan naik. hal ini senada dengan penelitian Agam et al. (2022) menemukan bahwa ketika jumlah tanggungan naik 1% maka pendapatan nelayan signifikan naik sebesar 0,629%. Akan tetapi penelitian lain menemukan bahwa banyaknya tanggungan keluarga tidak mempengaruhi naiknya pendapatan nelayan dan pengusaha ikan asing (Harahap & Faizien, 2021) . Nasution et al. (2014) juga menemukan hal sama di Aceh dan Putranto et al. (2023) di Kabupaten Cilacap.

8. Mesin/Teknologi

Teknologi dalam menunjang pendapatan nelayan diduga akan mempengaruhi pendapatan nelayan. Rahim (2011) menunjukkan bahwa alat tangkap mempengaruhi peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi mesin tidak signifikan mempengaruhi. Nunuk Kasmawati et al. (2022) juga menemukan hal sama di Tanjung Sembilang.

Tetapi hasil dari Sinaga et al. (2014) menunjukkan bahwa kapal dan mesin tidak terdapat pengaruh dalam meningkatkan

pendapatan nelayan. Wardana & Yuliarmi (2018) juga menemukan hal sama bahwa secara parsial teknologi modern lebih tinggi meningkatkan pendapatan nelayan di Desa Serangan Kecamatan Denpasar Selatan di banding teknologi tradisional. penggunaan teknologi modern berupa mesin perahu, joran, dan pukat yang membantu nelayan dengan cepat mendapatkan ikan mempunyai fungsi yang lebih baik dibandingkan teknologi tradisional seperti jukung, pancingan kayu, dan jaring.

Berdasarkan penelitian terdahulu atau penelitian yang membahas mengenai faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi pendapatan Nelayan atau Pengusaha ikan menunjukkan bahwa tidak semua indikator akan berpengaruh pada daerah penelitian. Sehingga ada gap literatur yang bisa disimpulkan dalam implementasi penelitian ini.

11.2.2 Faktor sosial ekonomi Nelayan di Negara lain

Pada pembahasan kali ini akan lebih memperhatikan beberapa kondisi sosial ekonomi nelayan di beberapa Negara yang dirangkum dari beberapa jurnal. Saudara diharapkan menambah wawasan pengetahuan mengenai Kondisi Nelayan ataupun pengusaha ikan di negara lain. Pembahasan ini lebih fokus kepada negara Bangladesh. Bangladesh memiliki total 260 spesies ikan air tawar dan 475 spesies laut. Perikanan, sektor dengan pertumbuhan tinggi, menyumbang sekitar 3,61% dari total pendapatan ekspor, 4,39% terhadap PDB dan 24,41% terhadap sektor pertanian. Perikanan laut menyumbangkan setidaknya 20-24% dari total produksi ikan di Bangladesh dan >90% tangkapan berasal dari penangkapan ikan artisanal, dengan sekitar 500.000 individu secara langsung bergantung pada segmen tersebut. Jurnal yang digunakan sebanyak 3 jurnal internasional yang membahas mengenai 3 wilayah penelitian di negara Bangladesh. Adapun hasil reviewnya adalah sebagai berikut:

1. ***Manajemen dan kondisi sosial ekonomi nelayan Baluhar Baor, Jhenaidah, Bangladesh*** (Abdullah-Bin-Farid et al., 2013)

Studi Abdullah-Bin-Farid et al. (2013) dilakukan di Baluhar Baor di Kotchandpur Upazilla (sub-distrik) di bawah distrik Jhenaidah, Bangladesh dari Februari 2011 hingga Juli 2011. Adapun hasil faktor sosial ekonominya adalah sebagai berikut;

a. Tipe keluarga

Keluarga berfungsi sebagai unit untuk menghasilkan pendapatan, konsumsi, reproduksi, dan interaksi sosial. Dalam penelitian ini ditemukan dua jenis pola keluarga yaitu keluarga inti dan keluarga gabungan. 58% keluarga nelayan adalah keluarga bersama.

b. Jumlah Tanggungan keluarga

Keluarga dikategorikan menjadi keluarga kecil (hingga 5 anggota), keluarga menengah (6 hingga 10 anggota) dan keluarga sangat besar (10+ anggota). Keluarga kecil ditemukan pada sebagian besar (48%) kasus .

c. Agama

Di suatu daerah agama memiliki dampak yang besar pada kegiatan sosial budaya tempat tinggal. Ditemukan bahwa semua nelayan beragama Hindu di wilayah studi.

d. Status Pendidikan

Status pendidikan nelayan mayoritas hanya bisa masuk (37%) diikuti oleh nelayan sampai tingkat SD (31%) dan seterusnya .

e. Kondisi rumah

Di wilayah studi rumah nelayan terdiri dari tiga tipe utama: (i) kancha (tanah), (ii) gudang timah dan (iii) setengah bangunan. Kondisi perumahan didominasi oleh kancha (74%) .f

- f. Sarana air minum
Studi tersebut menunjukkan bahwa 100% rumah tangga (KK) nelayan menggunakan air sumur tabung untuk minum dan diantaranya 96% KK menggunakan sumur milik sendiri, dan sisanya 4% menggunakan sumur milik orang lain.
- g. Fasilitas sanitasi
Kondisi sanitasi para nelayan teramat sangat buruk. Ditemukan tiga jenis toilet yang digunakan oleh nelayan: (i) kancha (terbuat dari bambu dengan daun dan pembuangan drainase yang tidak memadai), (ii) semipucca (terbuat dari bata dengan daun atau di tempat penampungan timah dan pembuangan drainase yang tidak memadai) dan (iii) pucca (terbuat dari bata dengan pembuangan drainase yang baik). Dalam studi maksimum, 78% toilet adalah kancha .
- h. Fasilitas kesehatan
Fasilitas kesehatan yang dinikmati oleh para nelayan sama sekali tidak memuaskan. Status pelayanan kesehatan dikategorikan menjadi tiga kelompok: dokter desa, kompleks kesehatan upazila dan dokter MBBS. Umumnya sebagian besar nelayan menerima saran kesehatan dari dokter desa, kebanyakan tidak terampil. Proporsi tertinggi (82%) nelayan yang bergantung pada dokter desa .
- i. Fasilitas listrik
Terdapat 92% nelayan yang terhubung dengan jaringan listrik dan hanya 8% nelayan yang tidak terhubung dengan jaringan listrik.
- j. Status penguasaan lahan
Mayoritas (58%) nelayan hanya memiliki lahan 0,001-0,041 ha, sedangkan 22% nelayan memiliki lahan 0,042-0,082 ha, 6% nelayan memiliki lahan 0,083-0,123 ha, 6%

nelayan memiliki lahan 0,124-0,164 ha dan 12% dari mereka memiliki lahan di atas 0,164 ha .

k. Pendapatan tahunan

Pendapatan tahunan para nelayan bervariasi dari BDT 15.000 hingga BDT 60.000+. Nelayan terpilih dikelompokkan menjadi empat kategori berdasarkan tingkat pendapatan tahunan dan mayoritas (40%) memiliki pendapatan tahunan BDT 46.000-60.000 . Rata-rata pendapatan tahunan ditemukan BDT 43.800±15.018.

2. ***Kajian status perikanan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan di pesisir Bhatiary, Chittagong, Bangladesh*** (Billah et al., 2018)

Penelitian Billah et al. (2018) dilakukan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi nelayan yang terlibat di wilayah pesisir Bhatiary Chittagong, Bangladesh. Adapun hasil faktor sosial ekonominya adalah sebagai berikut;

a. Usia

Usia responden berkisar antara 18 tahun hingga di atas 60 tahun. Mereka diklasifikasikan ke dalam lima kategori sebagai muda (18-30 tahun), paruh baya (31-40 tahun), hampir tua (41-50 tahun), tua (51-60 tahun) dan tua di atas 60 tahun. Proporsi tertinggi (36%) pembudidaya ikan berusia paruh baya dan di atas 60 tahun terendah (6%).

b. Agama

Ada sekitar 96% nelayan yang berstatus beragama Islam; nelayan lainnya beragama Hindu (6%) dan Budha (2%)

c. Pendidikan

Status pendidikan Sebagian besar nelayan berpendidikan hingga SD 78%, hanya 12% nelayan yang lulus SSC dan sisanya 10% lulus SSC

d. Jenis kelamin

Ada 74% nelayan laki-laki dan 26% perempuan

- e. Tipe Keluarga
Ada 82% keluarga yang termasuk dalam status tipe inti dan sisanya 18% memiliki keluarga bersama
- f. Keadaan Rumah
Studi tersebut menunjukkan bahwa 80% rumah dimiliki, sementara 8% digunakan secara bebas dan hanya 12% yang disewa. Di wilayah studi rumah nelayan terdiri dari dua tipe utama yaitu rumah gudang timah (68%) dan rumah beton (32%).
- g. Status air, sanitasi dan hygiene
Tidak ada sumur dalam yang terlihat di wilayah komunitas nelayan saat ini sedangkan 48 sumur dangkal ditemukan untuk memasok air minum bagi nelayan. Dalam penelitian ini, ditemukan 88% fasilitas toilet semi beton di antara responden dan sisanya 12% nelayan memiliki toilet beton untuk fasilitas kebersihan.
- h. Hiburan nelayan
Ditemukan bahwa, 54% responden memiliki televisi milik rumah mereka, 90% nelayan memiliki radio portabel, 48% nelayan memiliki ponsel dan sisanya menggunakan bersama dan terakhir, hanya 36% nelayan yang memiliki CD player.
- i. Pekerjaan sekunder
Ditemukan bahwa, kegiatan penangkapan ikan penuh waktu bukanlah pekerjaan utama bagi semua nelayan; sebaliknya, sebagian besar nelayan memiliki pekerjaan sampingan, seperti usaha kecil (40%), pertanian (36%) dan penarik becak (24%)
- j. Penghasilan
Pendapatan tahunan pembudidaya ikan bervariasi dari 30.000 hingga 70.000 dan BDT di atas. Nelayan terpilih dikelompokkan ke dalam lima kategori berdasarkan tingkat pendapatan tahunan mereka. Persentase tertinggi

(26%) pembudidaya ikan memperoleh BDT 30.000 hingga 40.000 per tahun dan persentase terendah adalah, (12%) memperoleh BDT 70.000 ke atas .

k. Pendidikan anak nelayan

Di wilayah studi, 41% anak nelayan mengenyam pendidikan dari lembaga pemerintah dan non pemerintah, 59% anak tidak mengenyam pendidikan dari lembaga apapun.

3. Kontribusi budidaya pada pengembangan mata pencaharian petani ikan di Noakhali, Bangladesh
(Adhikary et al., 2018)

Penelitian Adhikary et al. (2018) dilakukan di seluruh area budidaya ikan di Noakhali sadar upazila di bawah distrik Noakhali Bangladesh dari Februari 2013 hingga Juli 2013.

a. Struktur usia

Usia responden berkisar antara 20 hingga di atas 50 tahun. Mereka diklasifikasikan ke dalam empat kategori sebagai muda (20-30 tahun), paruh baya (31-40 tahun), tua (41-50 tahun) dan tua di atas 50 tahun. Proporsi tertinggi (36%) pembudidaya ikan berusia paruh baya dan di atas 50 tahun terendah (14%)

b. Status pendidikan

Sebagian besar pembudidaya ikan berpendidikan sampai SD 44%, 24% pembudidaya ikan berpendidikan SLTA, 18% lulus SSC, 14% tidak berpendidikan

c. Jenis dan Ukuran Keluarga

Tujuh puluh tujuh persen keluarga pembudidaya ikan tergabung dan keluarga inti dua puluh tiga persen. Keluarga dikategorikan sebagai keluarga kecil (anggota sampai dengan 5), keluarga menengah (anggota 6 sampai 10) dan keluarga besar (anggota di atas 10). Keluarga kecil 24%, keluarga sedang 54% dan keluarga besar 18%

d. Status perumahan

Studi tersebut menunjukkan bahwa 70% rumah adalah milik sendiri, sementara 8% bebas digunakan dan hanya 22% yang disewa. Di wilayah studi rumah nelayan terdiri dari tiga tipe utama yaitu I) Katcha ii) gudang timah dan iii) setengah bangunan. Kondisi perumahan didominasi oleh katcha (23%), diikuti oleh gudang timah (69%) dan setengah bangunan (8%)

e. Sarana air minum

Studi tersebut menunjukkan bahwa 100% rumah tangga pembudidaya ikan menggunakan air sumur tabung untuk keperluan minum dan diantaranya 64% rumah tangga pembudidaya menggunakan sumur sendiri, dan 36% menggunakan sumur tetangga.

f. Fasilitas sanitasi

Tiga jenis toilet ditemukan digunakan oleh pembudidaya ikan: i) Katcha – terbuat dari bambu dengan naungan daun dan pembuangan drainase yang tidak memadai ii) Semi-pucca, terbuat dari batu bata dengan daun atau di penampungan timah dan pembuangan drainase yang tidak memadai dan iii) Pucca terbuat dari batu bata dengan drainase pembuangan yang baik. Dalam studi tersebut, 20% toilet adalah katcha sedangkan 56% adalah semi-pucca dan hanya 24% adalah pucca .

g. Fasilitas kesehatan

Fasilitas kesehatan yang dinikmati oleh pembudidaya sama sekali tidak memuaskan. Umumnya pembudidaya ikan mengikuti anjuran kesehatan dari kabiraj/dokter desa yang tidak terampil dan tidak profesional. Status pelayanan kesehatan dikategorikan menjadi empat kelompok: kabiraj, dokter desa, kompleks kesehatan upazila dan dokter MBBS. Sebagian besar (28% dan 52%) pembudidaya ikan bergantung pada kabiraj desa dan

dokter desa yang sebenarnya tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu kedokteran dan 14% pembudidaya pergi ke kompleks kesehatan upazilla dan hanya 6% yang mendapat pelayanan dari dokter MBBS

h. Fasilitas listrik

Tidak ada listrik di wilayah studi. Jumlah maksimum (80%) pembudidaya ikan menggunakan panel surya. Lainnya digunakan lampu lilin, angin topan atau alat penerangan lainnya.

i. Status pekerjaan

Studi tersebut mengungkapkan bahwa 24% pembudidaya ikan terlibat dalam budidaya ikan sebagai pekerjaan utama mereka sementara 10% dalam bisnis, 50% pertanian dan 16% lainnya .

j. Pendapatan

Pendapatan tahunan petani ikan bervariasi dari 20.000 hingga 110.000 BDT. Pembudidaya ikan terpilih dikelompokkan ke dalam lima kategori berdasarkan tingkat pendapatan tahunan mereka. Persentase tertinggi (34%) pembudidaya ikan memperoleh BDT 75.000 hingga 100.000 per tahun

Berdasarkan tiga penelitian di Bangladesh, terlihat bahwa jika dilihat dari segi pendapatan , pendapatan nelayan sudah naik dari tahun ke tahun, status perumahan juga sudah lebih banyak milik pribadi dari pada sewa, agama didominasi oleh Islam, penggunaan listrik ada yang menggunakan panel surya, dan ada yang menggunakan jaringan listrik, pekerjaan didominasi oleh bertani dan nelayan, serta status pendidikan terlihat bahwa masih didominasi oleh tamatan SD atau tidak sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah-Bin-Farid, B. S., Mondal, S., Satu, K. A., Adhikary, R. K., & Saha, D. 2013. Management and socio-economic conditions of fishermen of the Baluhar Baor, Jhenaidah, Bangladesh. *Journal of Fisheries*, 1(1), 30. <https://doi.org/10.17017/jfish.v1i1.2013.7>
- Adhikary, R. K., Kar, S., Faruk, A., Hossain, A., Bhuiyan, M. N. M., & Abdulla-Al-Asif, -. 2018. Contribution of aquaculture on livelihood development of fish farmer at Noakhali, Bangladesh. *Asian-Australasian Journal of Bioscience and Biotechnology*, 3(2), 106–121. <https://doi.org/10.3329/aaajbb.v3i2.64789>
- Agam, B., Risa, N. E. W., & Wahyuni, A. P. 2022. Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Pendapatan Usaha Ikan Asin Di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. *PAPALELE (Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan Dan Kelautan)*, 6(1), 57–67. <https://doi.org/10.30598/papalele.2022.6.1.57>
- Billah, M. M., Kader, M. A., Siddiqui, A. A. M., & ... 2018. Studies on fisheries status and socio-economic condition of fishing community in Bhatiary coastal area Chittagong, Bangladesh. *Journal of Entomology and Zoology Studies*, 6(6), 673–679. https://www.researchgate.net/profile/Abdullah_Siddiqui10/publication/329221784_Studies_on_fisheries_status_and_socio-economic_condition_of_fishing_community_in_Bhatiary_coastal_area_Chittagong_Bangladesh/links/5c0fef09299bf139c7521503/Studies-on-fisheries
- Harahap, N., & Faizien, H. A. 2021. Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap Pendapatan Pengusaha Ikan Asin (Kasus di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon). *Jurnal Agrihati*, 34(1), 1–9.

- Markisman, Palampanga, A. M., & Lutfi, M. 2016. Pengaruh faktor sosial dan Ekonomi Terhadap Pendapatan Pembudidaya Ikan Mas Di Kecamatan Dolo Selatan. *Katalogis*, 4(3), 58–69.
- Nasution, P. S. U., Sihombing, L., & Hasyim, H. 2014. Analisis Pendapatan Nelayan Tradisional Dibandingkan dengan Upah Minimum Regional di Kecamatan Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Agriculture and Socioeconomics*, 3(1), 1–14.
<https://www.neliti.com/publications/15183/analisis-pendapatan-nelayan-tradisional-dibandingkan-dengan-upah-minimum-regional>
- Nunuk Kasmawati, Gusti Haqiqiansyah, & Said Abdusysyhid. 2022. Analisis Pengaruh Faktor Modal, Alat Tangkap, Lama Melaut Dan Cuaca Terhadap Pendapatan Nelayan Di Tanjung Sembilang Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Pembangunan Perikanan Dan Agribisnis*, 9(1), 134–146. <https://doi.org/10.30872/jppa.v9i1.52>
- Primyastanto, M., Efani, A., Soemarno, & Muhammad, S. 2016. Pengeluaran Nelayan Payang Jurung Di Selat Madura. *Journal Social Economic*, 16(1), 15–23.
- Putranto, Y., Sudarmo, A. P., & Patanda, M. 2023. Pengaruh Faktor Usia, Pendidikan, Jumlah Anggota Keluarga Terhadap Pendapatan Nelayan Tradisional Kabupaten Cilacap (Studi Kasus: TPI Lengkong dan TPI Menganti Kisik Cilacap). *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 7(1), 023–035.
<https://doi.org/10.29244/core.7.1.023-035>
- Rahim, A. 2011. Analisis Pendapatan Usaha Tangkap Nelayan Dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di wilayah Pesisir PAntai Sulawesi Selatan. *Jurnal Sosial Ekonomi KP*, 6(2), 236–247.

- Sinaga, R. N., Wijayanto, D., & Sardiyatmo. 2014. Analisis Pengaruh Faktor Produksi Terhadap Pendapatan dan Volume Produksi Nelayan Cantrang di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong Lamongan Jawa Timur. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 3(2), 85–93. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jfrumt/article/view/5038/4869>
- Sofyan R. Indara, Irwan Bempah, Y. B. 2017. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan tangkap di desa bongo kecamatan batudaa pantai kabupaten gorontalo 1). *Jurnal Agronesia*, 2(1), 91–97.
- Wardana, I., & Yuliarmi, N. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan Di Desa Serangan Kecamatan Denpasar Selatan. *E-Jurnal EP Unud*, 7(1), 2549–2579.

BAB 12

PERAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PERIKANAN DALAM PEREKONOMIAN

Oleh Roni Bawole

12.1 Pendahuluan

Dalam perekonomian nasional, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berperan penting dan strategis dalam menambah devisa negara. Eksistensi UMKM dominan terlihat dari berbagai data pendukung ekonomi Indonesia. Ada beberapa alasan yang dapat disampaikan mengapa UMKM menjadi strategis, yaitu Pertama, jumlah industrinya dapat mencapai 99,99 % dari keseluruhan unit usaha. Kedua, potensinya yang besar dalam menciptakan lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja. Artinya UMKM menciptakan lapangan kerja baru, menyerap tenaga kerja dan memberikan kesempatan kerja. Kontribusi UMKM tercatat sebesar 61 % terhadap Pendapatan Domestik Bruto Nasional dan menyerap 97 % dari total tenaga kerja. Bahkan, UMKM dapat menyumbang pula sekitar 35-69 % terhadap PDB bagi negara-negara ASEAN. Ketiga, laporan ASEAN Investment Report tahun 2022 menyebutkan bahwa pelaku UMKM tercatat sebanyak 65,46 juta dan berkontribusi sebesar 60,3 % terhadap PDB serta mampu menyerap 97 % tenaga kerja di Indonesia. Keempat, selama pandemi, sebanyak 84,8 % UMKM yang tadinya terpuruk sudah kembali beroperasi normal (Kemenko Bid Perekonomian, 2022). Keberadaan UMKM berdampak secara serius tidak saja pada aspek produksi dan nilai perdagangan, tetapi juga kehilangan pekerjaan dari tenaga kerja sebagai akibat situasi

pandemi Covid-19. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 64.194.057 UMKM yang ada di Indonesia (atau sekitar 99 persen dari total unit usaha) dan mempekerjakan 116.978.631 tenaga kerja (atau sekitar 97 persen dari total tenaga kerja di sektor ekonomi).

Sektor perikanan Indonesia, sebagai bidang penyumbang dalam jumlah UMKM, memiliki potensi ekonomi maritim yang besar, karena sektor ini dapat menghidupi banyak orang. Kegiatan ini meliputi penangkapan dan budidaya ikan, hingga industri, perdagangan, dan jasa kelautan. Usaha perikanan dapat meliputi bisnis budidaya ikan, rumput laut, mutiara, dan bisnis perikanan tangkap seperti ikan tuna, ikan cakalang, ikan teri, dan lain-lain.

Produksi perikanan Indonesia menunjukkan skala yang cukup besar dan memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat. Masyarakat cenderung lebih suka membeli bahan pangan dan produk perikanan yang sudah diolah dan dikemas. Oleh karena itu, ada peluang besar untuk mengembangkan industri pengolahan hasil perikanan dengan inovasi produk siap saji, produk beku, produk kaleng, produk kering, serta pengembangan nilai tambah pada produk *seafood*. Usaha ini dapat menjadi pusat produksi dan pengolahan hasil perikanan dalam skala UMKM yang berkembang pesat di masa depan. Meskipun sering juga UMKM perikanan dapat menjadi rentan dalam menghadapi gangguan pada periode ketidakpastian (Hikmah & Nasution, 2018; Nurhayati et al. 2020), terutama ketika pasokan bahan baku tidak kontinyu.

Uraian diatas menunjukkan pentingnya mengungkap faktor penentu ketahanan dan bisnis perikanan yang memiliki daya tahan tinggi terhadap ketidakpatian berusaha (Spivey, 2016). Faktor tersebut berkaitan dengan faktor kegagalan dan kesuksesan usaha mikro. Faktor pendukung keberlanjutan UMKM sangat berkaitan dengan jenis usaha atau lingkungan usaha. Audretsch dan Belitski

(2021) menunjukkan bahwa UMKM tetap bertahan hidup pada kondisi lingkungan yang bergejolak dengan kondisi kekurangan sumber daya, rendahnya keterampilan tenaga kerja, dan memiliki waktu yang terus berinovasi, menawarkan pengetahuan baru, dan menciptakan lapangan kerja baru. Kiat-kiat UMKM yang berhasil pada tingkat kabupaten di Indonesia sebagai negara berkembang (Mourougane, 2012) dan tahan terhadap berbagai tantangan (Saad et al. 2021) telah banyak dipublikasikan.

12.2 Potensi Perikanan

Pada tahun 2021, sektor perikanan memberikan kontribusi sebesar 2,83 % terhadap total keseluruhan pendapatan nasional. Kontribusinya dilihat dari jumlah produksi perikanan hasil tangkapan dan hasil budidaya perikanan. Manfaat ekonomi perikanan bagi masyarakat tujuannya agar dapat mencukupi kebutuhan gizi dan pangan masyarakat, menaikkan devisa, menumbuhkan ekonomi, dan menaikkan pendapatan penduduk (Tabel 12.1). Peningkatan ini meliputi indeks kesejahteraan masyarakat, nilai tukar nelayan dan pembudidaya, pertumbuhan produk domestik bruto, nilai ekspor, konsumsi ikan dan produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya.

Tabel 12.1. Kinerja Kelautan dan Perikanan Indonesia, 2016-2021 (KKP, 2022)

No	Rincian Indikator	Capaian Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Kesejahteraan Masyarakat	54	55,86	56,94	57,66	58,31	60,31 **
	Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya Ikan	102,82	104,04	105,98	106,94	100,35	103,97
	Nilai Tukar Nelayan ****	108,24	111,01	113,27	113,74	100,22	104,69
	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan ****	98,96	99,08	100,80	102,09	100,55	102,83
2	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)	5,19	5,70	5,19	5,81	0,73	5,45
3	Nilai Ekspor Komoditas Perikanan (USD miliar)	4,17	4,52	5,86	4,94	5,20	5,72
4	Konsumsi Ikan dalam Negeri (kg/ikan/thn)	43,94	47,34	0,69	54,50	56,39	belum tersedia **
5	Produksi Perikanan (juta ton)	22,58	23,19	23,05	22,76	21,81	24,47 ***
	•Perikanan	6,58	7,07	7,36	7,34	6,98	8,08
	•Perikanan	16	16,11	15,69	15,43	14,83	16,39

Sumber: KKP, 2022
 Keterangan: * Atas dasar harga konstan 2010; **. Angka sementara hingga Triwulan III-2021; ***. Angka estimasi; ****. Nilai Tukar 2014-2019 : Tahun Dasar 2012; Nilai Tukar 2020-2021: Tahun Dasar 2018.

12.2.1 Perikanan Tangkap

Potensi sumber daya ikan mencapai 12,01 juta ton per tahun yang berada di 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Potensi sektor perikanan Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, mencakup perikanan tangkap dan budidaya. Jumlah tangkapan ikan yang diizinkan setiap tahun sebesar 8,64 juta ton. Diperkirakan produksi lestari yang dapat dihasilkan mencapai sekitar 67 juta ton per tahun (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022).

Indonesia menjadi salah satu negara kepulauan dengan laut terluas di dunia. Sejalan dengan luasnya lautan tersebut, Indonesia memiliki potensi sumber daya ikan (SDI) yang sangat besar. Hal itu tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022. Potensi tersebut terdiri dari sembilan kelompok SDI, yaitu ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar, ikan demersal, ikan karang, udang penaeid, lobster, kepiting, rajungan, dan cumi-cumi. Estimasi potensi SDI mencapai 12,01 juta ton per tahun yang berada di 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Dari total potensi tersebut, jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan sebanyak 8,64 juta ton per tahun. Potensi ikan terbanyak berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718 dengan estimasi potensi sebesar 2,64 juta ton per tahun. Jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan di wilayah ini sebanyak 2,11 juta ton per tahun. Selanjutnya, potensi ikan di WPPNRI 573 mencapai 1,34 juta ton per tahun dengan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan sebanyak 985.645 ton per tahun. Potensi SDI sebanyak 1,31 juta ton per tahun berada di WPPNRI 711 dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 911.534 ton per tahun.

Kekayaan ikan laut Indonesia meliputi 37 % dari spesies ikan di dunia. Beberapa jenis, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan dan rumput laut, memiliki nilai ekonomis penting dan komersil (KKP, 2019).

Sayangnya, sektor perikanan dan kelautan belum berkembang dengan baik. Hal ini terlihat dari kontribusinya hanya berkisar 2,65 % dari PDB Indonesia, dengan produksi perikanan tangkap sebesar 6,7 juta ton pada tahun 2018 (BPS, 2020)

PDB Atas Dasar Harga Berlaku subsektor perikanan tahun 2016-2021 menunjukkan rata-rata mencapai Rp. 395.437,4 miliar dan tren pertumbuhan sebesar 8,20 persen, artinya rata-rata PDB Atas Dasar Harga Berlaku subsektor perikanan dari tahun 2016 hingga 2021 mengalami peningkatan yang konsisten. Tren PDB Atas Dasar Harga Berlaku subsektor perikanan dari tahun 2016 hingga 2021 lebih tinggi dibandingkan trend PDB Atas Dasar Berlaku nasional (6,58 persen) dan subsektor tanaman hortikultura (7,01 persen), namun lebih rendah dibandingkan trend PDB subsektor tanaman perkebunan (9,41 persen) (KKP, 2022)

12.2.2 Perikanan Budidaya

Perikanan budidaya Indonesia tercatat sebesar 15,89 juta ton, dan menyumbang 16 % dari 1,33 triliun dollar US nilai potensi keekonomian bidang kelautan Indonesia. Jadi, pengembangan perikanan budidaya sudah seharusnya menjadi prioritas utama selain kegiatan perikanan tangkap. Lahan perikanan budidaya Indonesia diperkirakan mencapai 17,92 juta hektar. Luas ini mencakup tiga jenis budidaya yaitu air tawar seluas 2,83 juta hektar, air payau seluas 2,96 juta hektar, dan budidaya laut seluas 12,12 juta hektar (Riana et al. 2014). Pemanfaatan lahan budidaya hingga saat ini baru mencapai 11,32 % untuk budidaya air tawar sebesar 22,74 % untuk budidaya air payau dan budidaya laut sebesar 2,28 % dengan nilai total produksi mencapai 15,77 juta ton pada tahun 2018.

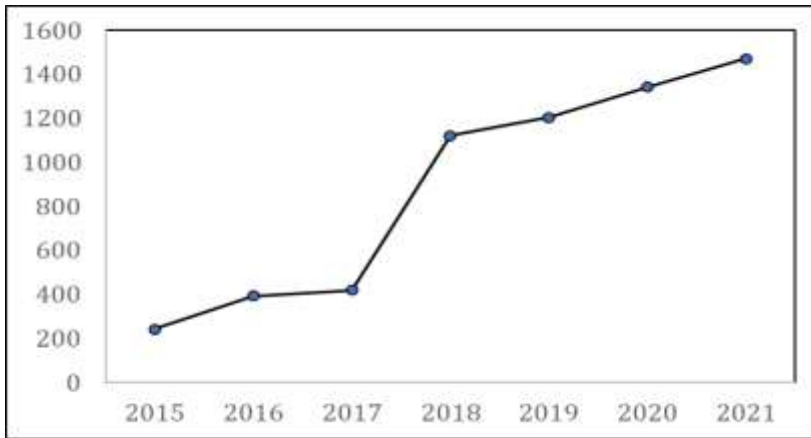
Nilai produksi perikanan sekitar 394 Triliun Rupiah, yang terdiri dari 198 triliun rupiah untuk perikanan tangkap dan 197 triliun rupiah untuk perikanan budidaya. Hal yang sama dapat pula

terlihat dari laju pertumbuhan sektor ini yang cenderung stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, pertumbuhan sektor perikanan sekitar 5,81% dan tahun sebelumnya 5,19%. Produksi perikanan budidaya tahun 2022 mencapai 16,87 juta ton, lebih besar dari produksi perikanan tangkap (7,9 juta ton). Produksi perikanan budidaya terdiri dari 7,5 juta ton dan rumput laut 9,2 juta ton. Proyeksi tahun 2023, produksi perikanan budidaya dapat mencapai 21,58 juta ton, total produksi perikanan 30,37 juta ton (perikanan tangkap 8,73 juta ton, perikanan budidaya 21,58 juta ton). Diperlukan peningkatan hilirisasi perikanan budidaya untuk menguatkan ekspor produk perikanan budidaya Indonesia ke pasar global (<https://www.rri.co.id/nasional/176651/kkp-potensi-perikanan-budidaya-indonesia> (diakses 22 juli 2023)).

12.2.3 Unit Pengolahan Ikan (UPI)

Unit Pengolahan Ikan, yang selanjutnya disingkat UPI, adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas Pengolahan Ikan. UPI ini dapat dikategorikan sebagai Usaha Kecil Menengah (UKM). Data KKP (2023) memperlihatkan jumlah UPI tahun 2018 sebanyak 60.429 unit dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 62.093 unit. Selanjutnya, UPI yang Bersertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) meningkat selama 7 tahun terakhir (Gambar 13.1). Sertifikat diberikan kepada UPI sebagai bukti bahwa UPI telah menerapkan metode pengolahan ikan yang baik dan memenuhi standar prosedur kebersihan dan sanitasi.

UPI merupakan usaha perikanan yang fokus pada pengolahan ikan. PermenKP 5 tahun 2021 telah memberikan dukungan untuk mempercepat kemudahan berusaha dan meningkatkan efektivitas kebijakan dalam usaha pengolahan ikan. Permen KP 5 tahun 2021 meliputi: penggaraman dan pengeringan ikan, pengasapan dan pemanggangan ikan, pembekuan Ikan, pemindangan ikan dan peragian atau fermentasi ikan.



Gambar 12.1. Perkembangan jumlah Unit Pengolahan Perikanan. Sumber: KKP (2023)

12.3 Peran dan Kontribusi UMKM Perikanan

12.3.1 Peran UMKM

Peranan UMKM saat ini menjadi penting dalam perekonomian di Indonesia, dengan 99,99 % atau sekitar 56,54 juta unit usaha dari total pelaku usaha yang ada. Artinya, eksistensi UMKM mampu memberikan sumbangan signifikan dalam perekonomian nasional. Pada tahun 1998 saat Indonesia dilanda krisis moneter, UMKM mampu bertahan karena kebanyakan usaha ini tidak bergantung pada pinjaman luar negeri. UMKM memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 60% dan menciptakan pekerjaan bagi masyarakat. Pada satu sisi, UMKM dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama masyarakat terkategori miskin. Pada sisi lain, UMKM dapat menjadi wahana dalam menghasilkan gagasan-gagasan baru guna meningkatkan pemanfaatan sumber daya secara efektif. Artinya UMKM diakui sumbangannya terhadap pembangunan ekonomi bangsa. Negara maju dan berkembang

seperti Indonesia benar-benar menyadari bagaimana peran UKMM dalam mendukung industri-industri besar, sehingga UMKM dapat menjadi pelopor berkembangnya ekonomi nasional (Rachmawati 2020).

Peran UMKM tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga sangat penting bagi kawasan Asia, baik sebagai penyedia utama kesempatan bekerja maupun dalam pertumbuhan ekonomi kawasan. Penciptaan kesempatan bekerja membuat kelompok usaha tersebut dianggap sangat strategis dalam pengurangan dan pengentasan kemiskinan. Peran UMKM berkaitan dengan karakteristik utama dari kelompok usahanya, yang meliputi: (1) banyak jumlahnya, begitu pula produk yang dihasilkannya; (2) dari sisi penyebarannya, usaha ini dapat ditemui pada berbagai pelosok, bahkan pada lokasi yang terisolasi; (3) usanya bersifat padat karya, terutama dari angkatan kerja yang berpendidikan rendah (Tambunan 2012).

UMKM tumbuh pesat dan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan di negara berkembang atau miskin karena adanya peluang untuk menjual produk mereka (pasar output) dan akses ke bahan baku atau input produksi (pasar input). Keduanya merupakan daya tarik utama yang mendorong munculnya perusahaan dan UMKM berperan penting dalam pertumbuhan di berbagai negara. (Tambunan 2012).

Di Indonesia jumlah UMKM mengalami peningkatan setiap tahun, dan di dalam kelompok usaha industri, jumlahnya paling banyak. Penyerapan tenaga kerja dan peluang kesempatan kerja merupakan ciri khas UMKM, selain bersifat sangat padat karya, juga sebagai kelompok usaha paling banyak jumlahnya dibandingkan kelompok usaha skala lain. Menggunakan anggota keluarga sebagai tenaga kerja yang membuat UMKM menjadi penting keberadaannya bagi perekonomian bangsa. Jumlah UMKM pada wilayah provinsi dapat diasumsikan bahwa UMKM semakin penting bagi perekonomian provinsi tersebut. Demikian

halnya dengan jumlah pekerja yang digaji, meskipun kondisinya sangat tergantung pada pendapatan atau produktivitas usaha.

Dalam bisnis perikanan Indonesia dengan mengandalkan produksi sumberdaya secara berkelanjutan, UMKM perikanan dapat sebagai salah satu komponen yang harus diperhitungkan. Sistem bisnis perikanan sendiri dapat meliputi berbagai aktivitas, mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan hasil perikanan (pasca panen) hingga pemasaran. Pada setiap aktivitas tersebut muncul UMKM yang sangat spesifik sesuai komoditas, jasa dan produk yang dihasilkan. Pada aspek produksi dihubungkan dengan penyediaan bahan baku perikanan (Prasetyati et al., 2019) dan mewujudkan perikanan berkelanjutan (Yonvitner, Boer, & Kurnia, 2020; Yonvitner, Boer, Taryono, et al., 2020). Pengolahan hasil perikanan ditujukan pula untuk menciptakan diversifikasi dan nilai tambah produk perikanan (Karim et al., 2021; Patra & Sabani, 2017; Sukolilo et al., 2022).

Secara khusus peran UMKM perikanan dapat dilakukan pada banyak aspek yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Hamdani et al., 2020; Hartati et al., 2020; Sunaris et al., 2022). Kegiatan UMUM perikanan dapat juga menyentuh banyak aspek aspek pemasaran dan promosi produk yang dihasilkan (Ainiyah, 2022; Heni Irawati et al., 2022; Ningsi et al., 2021; Riana, 2014)

12.3.2 Kontribusi UMKM

Kontribusi UMKM terhadap ekonomi wilayah adalah sumbangan dari sektor tersebut terhadap pembentukan atau pertumbuhan ekonomi dari wilayah tersebut. Kegiatan-kegiatan ekonomi informal yang umumnya tidak memiliki perijinan dan legalitas usaha. Dalam kasus UMKM, nilai *output* dilihat dari nilai produk domestik regional bruto (PDRB). Artinya, semakin besar PDRB dari UMKM semakin besar efek penggandaannya terhadap ekonomi provinsi (Tambunan 2009a).

Kontribusi UMKM perikanan secara ekonomi telah dipublikasikan oleh banyak peneliti. Kontribusi ekonomi perikanan sebagai upaya mewujudkan ekonomi biru (Adibrata et al., 2022; Bappenas RI, 2016; Murdani, Sus Widayani, 2019). Kontribusi UMKM perikanan tidak hanya menyumbangkan bagi ekonomi daerah (Muhtarom, 2017a; Yaskun & Sugiarto, 2016) , tetapi juga pada kesejahteraan nelayan (Murdani et al., 2019; Muhtarom, 2017b). Bahkan UKMKM perikanan dapat bangkit secara cepat pasca Pandemi Covid 19 (Bahtiar, 2021; Pakpahan, 2020; Thaha, 2020a, 2020b), dan secara nyata berkontribusi pada sektor layanan keuangan dari program-program pemerintah (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

12.4 Penutup

UMKM sebagai salah satu bisnis yang dapat berkembang pesat dan konsisten dalam menciptakan peluang ekonomi suatu wilayah dan perekonomian Indonesia. UMKM memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan ekonomi daerah dengan menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan masyarakat, membantu mengurangi tingkat pengangguran, dan menciptakan lapangan kerja. Dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan juga memperkuat posisi strategis UMKM dalam mengatasi masalah permodalan yang dihadapinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adibrata, S., Pratiwi, A. N., Jesiska, A., Aulia, A., Animah, A., Purnamasari, A., Angelia, F., Rani, I. S., & Anggraini, N. 2022. Implementasi blue economy dengan pendampingan pembuatan buku profil UMKM produk olahan perikanan Desa Batu Belubang, Bangka Belitung. *Indonesia Berdaya*, 3(4). <https://doi.org/10.47679/ib.2022349>
- Ainiyah, R. 2022. Startup Lawang Ekspor Sebagai Pintu Utama UMKM Perikanan Pasuruan Goes To Ekspor. *Journal of Agricultural Socio-Economics*, 3.
- Audretsch, D. B., & Belitski, M. 2021. Knowledge complexity and firm performance: Evidence from the European SMEs. *Journal of Knowledge Management*. Diakses dari <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JKM-03-2020-0178/full/html>.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Statistik Indonesia 2020. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Bahtiar, R. A. 2021. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Serta Solusinya. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, XIII(10).
- Bappenas RI. 2016. Kajian Strategi Industrialisasi Perikanan untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Wilayah. *Industri*, 1(Januari).
- Hamdani, H., Puspita, D., Farmiati, J., Murhadi, T., Arfan, R., & Heppy, H. 2020. Pemberdayaan Pelaku Usaha Pengolahan Perikanan Menuju Umkm Naik Kelas. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3). <https://doi.org/10.31004/cdj.v1i3.917>

- Hartati, S., Bayu, K., Mustari, E., Zulfan, I., Nurhayanti, Y., & Karim, E. 2020. Pemberdayaan Perempuan Nelayan Melalui Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Ikan Di Desa Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Dharmakarya*, 9(4). <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v9i4.31290>
- Heni Irawati, Luthfiyana, N., & Bija, S. 2022. Penerapan Strategi Pemasaran Produk Hasil Perikanan Umkm Desakitara Berbasis Online. *Dharma Bakti*. <https://doi.org/10.34151/dharma.v5i2.4063>
- Karim, M., Susilowati, A., Saokani, J., & Lawi, Y. S. A. 2021. Comparison of Nutritional Value of Milkfish Shredded with Milkfish Bone Shredded (Chanos Chanos). *International Journal of Scientific Research in Science and Technology*. <https://doi.org/10.32628/ijrst2183129>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2019. Laporan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2019.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2022. *Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah*.
- KKP. 2022. *Kelautan Dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2022*. Pusat Data, Statistik dan Informasi. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Jakarta.
- Mourougane A. 2012. Promoting SME development in Indonesia, OECD Economics Department Working Papers. No. 995, OECD Publishing
- Muhtarom, A. 2017a. Analisis Kontribusi Hasil Perikanan Laut Terhadap. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, II(1).
- Muhtarom, A. 2017b. Analisis Kontribusi Hasil Perikanan Laut Terhadap Kesejahteraan Para Nelayan Dan Masyarakat Di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Akuntansi*, 2(1). <https://doi.org/10.30736/jpensi.v2i1.91>

- Murdani, Sus Widayani, H. 2019. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang). *Jurnal Abdimas*, 23(2).
- Murdani, Widayani, S., & Hadromi. 2019. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi di. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah).
- Ningsi, N., Sunyanti, S., & Sarimuddin, S. 2021. Perancangan e-Marketplace Maswira (Masyarakat Pesisir berwirausaha) pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Bombana. *Jurnal Ilmiah Edutic: Pendidikan Dan Informatika*, 8(1). <https://doi.org/10.21107/edutic.v8i1.12064>
- Nurhayati, A., Pical, V., Erfani, A., Hilyaa, S., Saloko, S., Made, S., & Purnomo, A. H. 2020. Manajemen risiko perikanan tangkap (studi kasus di tengah pandemi Covid-19). *JFMR (Journal of Fisheries and Marine Research)*, 4(3), 417-427.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. Annual Report 2016-Increasing contribution of financial services sector in supporting the government priority programs. *Journal of Applied Business and Economics (JABE)*, 7(2).
- Pakpahan, A. K. 2020. Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*.
- Patra, I. ketut, & Sabani, N. 2017. Pola Pembinaan Umkm Usaha Pengolahan Ikan Kering Di Kelurahan Ponjalae Tapong Kecamatan Wara Kota Palopo. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 6(1). <https://doi.org/10.35906/je001.v6i1.165>

- Prasetyati, S. B., Alifiani, N. B., Syafei, L. S., & Sobariah, S. 2019. Potensi Usaha Perikanan di Desa Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Penyuluhan Perikanan Dan Kelautan*, 13(1). <https://doi.org/10.33378/jppik.v13i1.120>
- Rachmawati M. 2020. Kontribusi Sektor UMKM Pada Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*. E-ISSN 2686 5661 VOL.01 NO. 07. 28/02/2020.
- Riana, I.G., Wiagustini, N.L.P. and Meydianawathi, L.G. 2014. Master Plan UMKM berbasis perikanan untuk meningkatkan pengolahan produk ikan yang memiliki nilai tambah tinggi. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7(2), pp.102-119.
- Saad, M. H., Hagelaar, G., Van der Velde, G., & Omta, S. W. F. 2021. Conceptualization of SMEs' business resilience: A systematic literature review. *Cogent Business & Management*, 8(1), 1938347. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311975.2021.1938347>
- Secretariat, A.S.E.A.N. 2022. ASEAN Investment Report. *Jakarta: ASEAN Secretariat*.
- Sofyan, S. 2017. Peran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dalam Perekonomian Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 11(1), pp.33-64.
- Spivey, S. 2016. Micro-entrepreneurship: Exploring factors that influence failure, success, and sustainability of microenterprises in the United States (Ph.D. Dissertation). School of Business and Technology Management, Northcentral University, USA. 23.

- Sukolilo, M., Patmawati, S., Subekti, S., Tjahjaningsih, W., Agustina, M., Puspitasari, I. A., Nur, A., Akmal, M., Andini, R., & Rizky, A. 2022. Analysis of Nutritional Value and Consumer Behavior Diversification of Milkfish (*Chanos sp.*) Products From Aquaculture Products By Packaging Modification In MSME Sukolilo, Surabaya. *Journal of Aquaculture and Fish Health*, 11(3).
- Sunaris, S., Sukesu, S., & Sugiyanto, S. 2022. Pengembangan Model Kewirausahaan Dalam Peningkatan Kinerja Pemasaran Umkm Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2(2). <https://doi.org/10.38076/ideijeb.v2i2.97>
- Tambunan TTH. 2009. *Development of SMEs in ASEAN Countries*. New Delhi: Readworthy Publications, Ltd, New Delhi.
- Tambunan TTH. 2012. Peran Usaha Mikro dan Kecil Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Daerah. *Jurnal Bina Praja* | Volume 4 No. 2 Juni 2012: 73 – 92.
- Thaha, A. F. 2020. Dampak Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia. *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran*, 2(1).
- Yaskun, M., & Sugiarto, E. 2016. Analisis Potensi Hasil Perikanan Laut Terhadap di Kabupaten Lamongan. *Ekbis*, 1.
- Yonvitner, Boer, M., & Kurnia, R. 2020. Daya Dukung Bahan Baku Industri dan UMKM Berbasis Potensi Stok pada Wilayah Pengelolaan Perikanan. *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia*, 23(2). <https://doi.org/10.17844/jphpi.v23i2.31124>
- Yonvitner, Boer, M., Taryono, Riyanto, M., Kurnia, R., Setyobudiandi, I., Santoso, J., Sukri, N., & Abdul Aziz, K. 2020. Estimasi Stok Suplai Kebutuhan Bahan Baku untuk Industri Pengolahan Ikan. *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia*, 23(1). <https://doi.org/10.17844/jphpi.v23i1.31058>

BIODATA PENULIS



Dr. Muhammad Nur, S.Pi., M.Si.

Dosen Program Studi Akuakultur/ Budidaya Perairan
Universitas Sulawesi Barat

Penulis lahir di Palattae (Bone), Sulawesi Selatan pada tanggal 24 Desember 1990. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi Manajemen Sumber daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanudin pada tahun 2013. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan magister pada Program Studi Ilmu Perikanan, Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin dan selesai pada tahun 2015 melalui program Beasiswa Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) calon dosen. Pendidikan Program Doktor penulis tempuh pada tahun 2017 hingga tahun 2020 di Program Studi Pengelolaan Sumber daya Perairan, Institut Pertanian Bogor melalui program BPPDN. Penulis saat ini bekerja sebagai dosen di Program Studi Budidaya Perairan/Akuakultur, Fakultas Peternakan dan Perikanan, Universitas Sulawesi Barat sejak tahun 2015 sekarang. Terkait dengan organisasi keprofesian, penulis aktif di Masyarakat Iktiologi Indonesia dan menjabat Kordinator Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Bidang kajian yang digeluti yaitu ekobiologi ikan, iktiologi dan konservasi sumber daya ikan.

BIODATA PENULIS



Agus Kurniawan B, S.Pi., M.Si.

Dosen Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan
Fakultas Pertanian Universitas Puangrimaggalatung

Agus Kurniawan B dilahirkan di Ujung Pandang tanggal 16 Agustus 1987. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Manajemen Sumber Daya Fakultas Pertanian, Universitas Puangrimaggalatung. Menyelesaikan pendidikan (S1) pada Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan di Universitas Hasanuddin dan melanjutkan (S2) pada Jurusan Ilmu Ekonomi di Universitas Muslim Indonesia. Penulis menekuni bidang Menulis dalam bidang perikanan dan Artikel Ilmiah Internasional dan Nasional (2019 – sekarang). Penulis juga aktif sebagai anggota pada Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Pendidikan dan Pelatihan yang pernah diikuti adalah PEKERTI, Sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). Beberapa penulisan yang telah diterbitkan di jurnal Nasional dan Internasional. Berkontribusi dalam penulisan beberapa buku diantaranya Teknik Penangkapan Ikan, Metode Penelitian, Ekologi Perairan, Panduan Praktis Manajemen Mutu Produk Ikan Beku.

BIODATA PENULIS



Dr. E. Suharno, S.E., M.Si.

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Magister Ekonomi,
& Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Jenderal Soedirman

Penulis saat ini aktif sebagai konsultan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan kepakaran *Resources & Development Economics*. Saat ini penulis secara aktif berpengalaman melakukan *research* kompetitif nasional diberbagai level dasar, terapan, dan pengembangan pada lingkup akademik, perusahaan, dan pemerintahan. Penulis saat ini aktif sebagai pengelola Kaprodi Magister (S2) Ekonomi, dan pengelola Ketua Laboratorium Properti. Penulis juga aktif sebagai reviewer di jurnal nasional & internasional bereputasi, reviewer penelitian kompetitif nasional Kemdikbudristek, reviewer penelitian Universitas Terbuka dan Asesor BNSP. Kiprah penulis dapat ditelusur melalui akun ID Scopus = 57188925915, dan ID Orcid = [0000-0003-2515-2767](https://orcid.org/0000-0003-2515-2767). Buku ini semoga bermanfaat bagi akademisi, praktisi, dan mahasiswa. Penulis berbagi informasi melalui email: suharno@unsoed.ac.id.

BIODATA PENULIS



Yuyun Anggraini

Dosen tetap di Universitas Sembilanbelas November Kolaka pada Program Studi Ekonomi Pembangunan

Penulis lahir di Kendari pada tanggal 16 Juli 1992. Penulis merupakan dosen tetap di Universitas Sembilanbelas November Kolaka pada Program Studi Ekonomi Pembangunan. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S1 di Ekonomi Pembangunan Universitas Halu Oleo kemudian melanjutkan studi S2 di Magister Ekonomika Pembangunan Universitas Gadjah Mada.

BIODATA PENULIS



Hendra Poltak,M.S.A

Dosen Program Studi Teknik Budidaya Perikanan
Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong

Lahir di kota kecil di tepi danau Toba, Porsea, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dan besar di Kota Medan. Lulus S1 Program Studi Akuntansi di Universitas Negeri Medan Tahun 2005 selanjutnya menyelesaikan tugas belajar Kementerian Kelautan dan Perikanan Program Magister Sains Akuntansi Tahun 2018 di Universitas Brawijaya Malang.

Penulis mengabdikan di Papua Barat sejak Tahun 2008 sampai sekarang tepatnya di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Penulis juga pernah mengajar pada beberapa perguruan tinggi swasta di Kota Sorong diantaranya Universitas Kristen Papua dan Universitas Victory Sorong Tahun 2012-2015 mengampu mata kuliah Pengantar Akuntansi; Perpajakan; Riset Operasi; dan Penganggaran. Saat ini menjadi asisten Ir. Muhfizar,MM mengajar mata Kuliah Manajemen Usaha Perikanan; Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan; Studi Kelayakan Bisnis, dan Teknik Penulisan Ilmiah pada kampus tempat penulis mengabdikan. Kecintaan penulis kepada dunia pendidikan ditorehkan pada beberapa artikel

penelitian dan pengabdian masyarakat terkait dengan sosial ekonomi dan kewirausahaan. Beberapa tulisan yang sudah dirampungkan antara lain Teknik Penulisan Ilmiah, Manajemen Usaha Perikanan, Efektivitas Audit Internal, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Tinggi, Dasar-Dasar Pemasaran Digital, Usaha Penangkapan Ikan Laut Dalam, Kewirausahaan (E-Bisnis dan E-Commerce), dan Desa Inovasi Kelautan dan Perikanan. Penulis Juga melibatkan diri menjadi editor buku dan editor jurnal nasional.

BIODATA PENULIS



Dr. Fajriah, S.Pi, M.Si

Dosen Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan,
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas
Muhammadiyah Kendari

Penulis lahir di Kota Kendari tanggal 03 Februari 1983. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah kendari. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Universitas Hasanudin, dan melanjutkan S2 pada Program Magister Agribisnis Minat Perikanan Universitas Haluoleo serta menempuh pendidikan S3 pada Program Doktor Ilmu Pertanian Jurusan Agribisnis Universitas Haluoleo. Penulis aktif pada berbagai kegiatan penelitian bidang perikanan tangkap dan pengabdian kepada masyarakat, dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut peneliti telah menghasilkan paten granted, jurnal dan prosiding baik skala nasional maupun internasional terindeks scopus dan Sinta, beberapa buku panduan Teknis bidang perikanan serta beberapa buku referensi bersama penulis lain diantaranya Manajemen

Industri Perikanan, Tingkah Laku Ikan dan Pelabuhan Perikanan.
Email penulis : fajriah@umkendari.ac.id.

BIODATA PENULIS



Muhammad Bibin, S.Pi., M.Si.

Dosen Program Studi Ilmu Perikanan
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Muhammad Bibin, lahir di Ungaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah tanggal 17 Januari 1992. Gelar sarjana bidang sosial ekonomi perikanan pada Fakultas Kelautan dan Ilmu Perikanan Universitas Hasanuddin (UNHAS) diraihinya pada tahun 2013. Kemudian menyelesaikan pendidikan di Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) pada bidang Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan tahun 2018.

Penulis merupakan dosen tetap pada program studi Ilmu Perikanan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Pada tahun 2019 penulis dipercaya menjadi ketua program studi Ilmu Perikanan (periode 2019 – 2023). Berbagai penelitian tentang sosial ekonomi perikanan sudah banyak dilakukan oleh penulis dan beberapa karya ilmiah sudah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional terindeks Scopus.

BIODATA PENULIS



Dr. Sahabuddin, S.Kel., M.Si.,

Dosen di Universitas Muhammadiyah Parepare pada Fakultas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan

Dr. Sahabuddin, S.Kel., M.Si., lahir di (Pinrang) Sulawesi Selatan tanggal 6 Juni 1982, Pendidikan Dasar ditempuh di SDN 106 Pinrang, SLTP Neg 1 Suppa, dan SMU Neg 1 Parepare. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 Jurusan Ilmu Kelautan (Selesai 2007), S2 Ilmu Perikanan (Selesai 2014) dan S3 Ilmu Pertanian (Selesai 2020) dengan judul Disertasi “Studi Biometrik dan Variasi Genetik serta Pola Distribusi dan Konektivitas Genetik Ikan Baronang Lingkis *Siganus Canaliculatus* Park, 1797 Dalam Upaya Pelestarian Sumberdaya Genetik Di Perairan Sulawesi Selatan” di Universitas Hasanuddin.

Saat ini penulis merupakan Dosen di Universitas Muhammadiyah Parepare pada Fakultas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan. Selain mengajar penulis rutin mengikuti kegiatan seminar nasional maupun Internasional sebagai pemakalah dan juga aktif melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk workshop/pelatihan sebagai pembicara yang didanai baik dari LLDikti, Dinas maupun dari BUMN. Hasil penelitian dan pengabdian dituliskan kedalam berbagai buku,

jurnal maupun menuliskan issu di media massa yang telah diterbitkan baik cetak maupun online. Dapat diakses melalui link <https://scholar.google.ca/citations?user=kul2y8IAAAAJ&hl=en>,
e-mail : assahab06@gmail.com

BIODATA PENULIS

Shara Jayanti

Dosen Asisten Ahli di BRSDM-KP dan ditempatkan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo

Penulis lahir di Magetan, 5 Juli 1994. Menempuh sekolah dasar di Negeri Pelem 1 pada tahun 2000-2006 di Magetan. Melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karangrejo dan lulus di tahun 2009. Selanjutnya Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Maospati dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya Masuk Program Studi Dokter Hewan di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2012 dan Lulus S.KH pada tahun 2016 kemudian menempuh jenjang pendidikan profesi dokter hewan (PPDH) pada tahun 2016-2017. Di tahun yang sama yaitu tahun 2017, ketika menempuh PPDH, penulis juga mengambil program double degree dengan Program Pasca Sarjana (Magister Program Studi Vaksinologi dan Imunoterapi) dan berhasil lulus di tahun 2018 dengan predikat cumlaude.

Setelah Tamat Dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun 2018, penulis bekerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Dosen Asisten Ahli di BRSDM-KP dan ditempatkan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo sejak tahun 2019 khususnya di Program Studi Teknik Penanganan Patologi Perikanan Politeknik Sidoarjo Kementerian Kelautan dan

Perikanan Sidoarjo. Saat ini penulis juga menjadi mitra bestari pada tim reviewer di jurnal penelitian Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor dan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.

BIODATA PENULIS



Akmaluddin

Dosen pada prodi Budidaya Perairan Jurusan Perikanan
Universitas Muhammadiyah Makassar

Penulis lahir di Kota Sengkang, Kabupaten Wajo pada tahun 1987. Setelah lulus dari SMA pada 2006, melanjutkan pendidikan di Universitas Hasanuddin Makassar. Lulus strata satu (S1) sebagai sarjana perikanan pada 2011 pada prodi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, tahun yang sama melanjutkan strata dua (S2) pada program studi Ilmu Perikanan Universitas Hasanuddin, dan selesai tahun 2014.

Saat ini penulis merupakan staf pengajar pada prodi Budidaya Perairan Jurusan Perikanan Universitas Muhammadiyah Makassar sejak tahun 2014 hingga saat ini. Penulis juga merupakan Anggota Muda Persatuan Insinyur Indonesia (PII) sejak tahun 2021 Bidang Teknik Perikanan dan Kelautan yang masih dibawah Badan Kejuruan Teknik Kehutanan dengan posisi Insinyur Profesional Madya. Penulis juga tersertifikasi oleh BNSP dibidang PenanggungJawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) sejak tahun 2022. Penulis juga aktif mengikuti perkembangan teknologi digital dengan mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus pada

Bidang Kecerdasan Buatan (*Artificial Inteligent*) untuk dosen dan *Internet Of Things : Smart Aquaculture* oleh Program Digitalent Scholarship Kementerian Informasi dan Komunikasi RI. Penulis juga adalah Narasumber pada Tema Digital Marketing dan Mikro Mentor UMKM Maju Digital. Sejumlah publikasi ilmiah telah dihasilkan penulis dan diterbitkan pada jurnal dan prosiding baik level nasional maupun internasional. Saat ini penulis dilibatkan sebagai Sekretaris Tim Persiapan Pembukaan Prodi Profesi Insinyur bidang Teknik Kehuatan dan Rumpun ilmu Hayati Universitas Muhammadiyah Makassar setelah mendapat mandat dari Badan Kejuruan Teknik Kehutanan PII pusat, Dirjen Dikti Kemenristek dikti, dan Pimpinan Unismuh Makassar.

BIODATA PENULIS



Prof. Dr. Ir. Roni Bawole, M.Si.

Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Papua, Manokwari, Papua Barat

Prof. Dr. Ir. Roni Bawole, M.Si. sebagai guru besar dalam ilmu kelautan (bidang pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut). Menyelesaikan studi doktor pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor tahun 2012. Sebagai staf dosen pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Papua (UNIPA). Saat ini menjabat sebagai Ketua Program Doktor Ilmu Lingkungan. Sebagai pengajar pada FPIK dan Pascasarjana Program Magister Sumber Daya Akuatik, Magister dan Doktor Ilmu Lingkungan. Pernah menjadi Manajer Program Lapangan, *Coastal Resources Management Project* – USAID (2003-2004). Makalah telah dipresentasikan pada berbagai forum internasional (*International Coral Reef Symposium, New Guinea Biological Conference, Ecosystem Fishery Based Management*, dll) dan nasional (Konas pesisir, Munas terumbu karang, ISOI, dll). Penulis buku, diantaranya tata Kelola Kawasan Konservasi Laut, Sumberdaya Perikanan Laut Sorong Selatan, Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat, Orang Asli Papua dalam Pengelolaan

Pariwisata Berbasis Konservasi, Pengelolaan Perikanan Teluk Wondama, dll. Korespondensi: r.bawole@unipa.ac.id.***